

Dr. Indriawan Seto Wahyu Wibowo

TERORISME *dalam* PEMBERITAAN MEDIA

Analisis wacana Terorisme Indonesia



9 786026 863291

TERORISME *dalam* Pemberitaan Media

Dr Indiwana Seto Wahyu Wibowo

T

Tangerang 2015

TERORISME *dalam*

PEMBERITAAN MEDIA

Analisis Wacana Terorisme Indonesia

Penulis:

Dr Indiwana seto wahyu wibowo

Dosen Ilmu Komunikasi UMN

Gading Serpong Tangerang

e-mail: indiwana@gmail.com

HP 082112297660

Editor :

Dr Yoyoh Hereyah M.Si

Desain Cover dan Tata Letak :

Indiwana seto wahyu wibowo

Cetakan pertama, Januari 2015

"kupersembahkan karya sederhana ini, untuk ayahku Almarhum ***F.Toepan***, dan untuk wanita-wanita hebat dalam hidupku, My Mom ***Sri Soebekti***, My wife ***Dr Yoyoh Hereyah***, dan tiga bidadari cantikku ***Cyntia Ayu Hera Pratami, Claudia Shinta Okta Wibowo*** dan ***Cheryl Kanza Athalia Wibowo***,"

Rumah Pintar Komunikasi 12 Januari 2015

KATA PENGANTAR

Setelah tidak ada lagi peristiwa besar yang terkait dengan peledakan bom dan aksi terorisme, media massa termasuk di dalamnya *Koran Tempo* menyadari bahwa isu seputar terorisme merupakan isu dengan nilai berita yang tinggi dan itulah sebabnya dalam pemberitaan soal penangkapan Ba'asyir pada minggu pertama Agustus 2010, *Koran Tempo* membingkainya dengan berbagai berita terkait yang kebanyakan merupakan berita pengembangan.

Buku sederhana ini memang sebagian besar isinya diambil dari hasil penelitian disertasi penulis yang dipertahankan di depan Dewan Penguji disertasi Universitas Indonesia pada 12 Agustus 2014. Persoalan yang diangkat dalam buku ini soal representasi pemberitaan terorisme pada *Koran Tempo* sebuah analisis wacana. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada istri saya tercinta, **Dr. Yoyoh Hereyah** dan ketiga buah hati saya yang terus menyemangati hingga terbitnya buku ini.

Begitu juga ucapan terima kasih saya haturkan kepada senior yang rela menjadi promotor dan kopromotor disertasi saya, **Prof Dr Harsono Suwardi MA**, dan **Dr Ade Armando**. Tanpa bimbingan beliau berdua tidak mungkin saya bisa menyelesaikan disertasi yang menjadi cikal bakal buku saya ini.

Isi buku ini memang terkait dengan aspek pemberitaan terorisme. Keinginan penulis menerbitkan buku ini sedikit banyak terpengaruh saat melihat adanya pelanggaran prinsip dasar jurnalistik yakni keberimbangan berita. Khususnya soal bagaimana terorisme Indonesia direpresentasikan dalam pemberitaan *Koran Tempo*.

Dari temuan penulis, *Koran Tempo* melakukan representasi tentang aktivitas sekelompok orang Indonesia yang berideologi di luar Pancasila, yang diberi cap sebagai teroris dan terkait dengan sosok seorang 'amir' atau pemimpin yang bernama Abu Bakar Ba'asyir. Peranan Ba'asyir dalam sejumlah

teks yang dianalisis sangat penting, karena dipandang sebagai orang yang paling bertanggungjawab atau paling tidak mendukung sejumlah aksi terorisme di tanah air.

Koran Tempo dalam teks yang dianalisis merepresentasikan, Ba'asyir ditangkap karena diduga terlihat sejumlah aksi terorisme di beberapa daerah termasuk di Aceh. *Koran Tempo* juga merepresentasikan adanya ideologi Ba'asyir yang jelas-jelas menentang demokrasi yang disebutnya sebagai 'kurang ajar'. Dia juga digambarkan, menyebut pemerintah Indonesia sebagai pemerintah yang kafir dan tidak sesuai dengan ajaran Islam karena melakukan pembiaran terhadap aktivitas *Jaringan Islam Liberal* dan kelompok *Ahmadiyah*. Dari berita yang ditulis *Koran Tempo* setelah penangkapan Ba'asyir pada 9 Agustus 2010, media ini seakan memiliki banyak amunisi untuk menempatkan Abu Bakar Ba'asyir sebagai orang yang layak ditangkap dan diduga kuat terkait dengan jaringan terorisme internasional Al-Qaidah. *Koran Tempo* mengemas pemberitaan yang menonjolkan ketidaksukaan Ba'asyir dengan ideologi Pancasila khususnya demokrasi. Hal ini jelas sekali ditunjukkan lewat berita berjudul : **Ceramah Ba'asyir Sebelum Ditangkap : " Demokrasi itu kurang ajar"** Edisi Selasa, 10 Agustus 2010, sehari setelah Ba'asyir ditangkap polisi.

Pemberitaan gencar soal isu dibalik penangkapan Ba'asyir di *Koran Tempo* ini, sebenarnya sebagai tanggapan atas peristiwa Ba'asyir ditangkap. Jelas sekali berbeda dengan pemberitaan *Koran Republika* di hari yang sama yang hanya memberitakan berita kecil soal tertangkapnya Ba'asyir oleh kepolisian dengan dugaan terlibat kasus terorisme.

Koran Tempo lewat pemberitaannya hendak menegaskan bahwa ada keterkaitan antara peranan Ba'asyir sebagai perencana, Ba'asyir tidak hanya terlibat di Terorisme Aceh, tetapi di sejumlah gerakan terorisme lainnya di tanah air. Representasi ini untuk memberikan alasan pembenaran mengapa akhirnya Ba'asyir ditangkap, karena dia diduga terkait mendanai dan mengetahui rencana pelatihan militer di Aceh, meskipun polisi

belum memiliki bukti yang kuat mengenai kebenaran dugaan keterlibatan Ba'asyir dalam kasus-kasus tersebut.

Ada kegagalan bila dilihat dari sudut jurnalisme, meskipun *Koran Tempo* mengangkat persoalan Ba'asyir dan keterlibatannya dalam kasus-kasus terorisme tetapi koran ini tak secara serius menggarap keseimbangan berita. Katakanlah, dalam berita tersebut ada kaitan erat antara terorisme Aceh dengan Ba'asyir, seharusnya *Koran Tempo* mengimbangi pemberitaan dengan mewawancarai Ba'aasyir atau pihak-pihak yang pro Ba'asyir.

Sebenarnya agak aneh kalau media massa sebesar *Koran Tempo* dengan jaringan wartawannya dan relasi hubungannya dengan berbagai narasumber tidak bisa mengkonfirmasi situasi ini.

Representasi yang dilakukan *Koran Tempo* adalah representasi yang menyodorkan pemberitaan hasil konstruksi media tentang aksi terorisme. Konstruksi atas realitas peristiwa terorisme ini dipengaruhi ideologi media *Koran Tempo* yang memang membela mereka yang terzalimi dan tertindas oleh aksi terorisme atau paling tidak yang menjadi korban aksi terorisme.

Ada upaya *Koran Tempo* melakukan eksklusi dan inklusi dalam pemberitaan soal terorisme di Indonesia. Pihak yang digambarkan dan menjadi pokok pembicaraan justru tidak diberi tempat yang layak, atau bahkan 'dihilangkan' dalam wacana.

Bisa disimpulkan *Koran Tempo* melakukan eksklusi. Eksklusi terjadi apabila ada aktor (seseorang/kelompok) yang coba dihilangkan atau disembunyikan dalam pemberitaan. Proses eksklusi ini menggunakan strategi dengan membungkusnya dalam pernyataan pihak-pihak berwenang dan memiliki kekuasaan untuk mendominasi pembicaraan /wacana yakni pihak kepolisian dan Densus 88.

Inklusi dalam pemberitaan soal terorisme muncul juga dalam proses pemilihan narasumber dan fakta-fakta yang disodorkan media ini kepada masyarakat seputar penangkapan terorisme dan secara khusus pemberitaan soal penangkapan terhadap Ba'asyir. *Koran Tempo* tidak secara jelas

menggambarkan apa alasan dan sebab-sebab di balik penangkapan Ba'asyir. Sehingga *Koran Tempo* dianggap kurang memenuhi unsur keadilan dalam pemberitaan dengan melakukan pencarian fakta di lapangan, atau paling tidak tidak ditemukan upaya mewawancarai narasumber dari pihak minoritas yakni mereka-mereka yang dituduh atau sebagai tersangka terorisme.

Akhir kata, penulis berharap buku sederhana ini bisa menjadi acuan dan sarana merenung tentang bagaimana seharusnya jurnalis bersikap saat berhadapan dengan aksi terorisme. Dan terlepas dari berbagai kekurangan yang ada, penulis berharap buku ini bisa menambah referensi tentang bagaimana posisi dan peranan media dalam mengungkap aksi terorisme. Kritik serta saran sangat penulis harapkan demi sempurnanya buku ini.

Tangerang, 12 Januari 2015

Dr Indiwano Seto Wahyu Wibowo

Email: indiwano@umn.ac.id

indiwanox@gmail.com

Hp : 082112297660

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSEMBAHAN KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

BAB I

AKSI TERORISME DI MATA MEDIA

Aksi Terorisme di mata media.....	1
Aksi Terorisme di Indonesia 1962-2012.....	13

BAB II

TERORISME DALAM KAJIAN TEORI KOMUNIKASI

Studi dan Riset Awal mengenai isu terorisme.....	29
Penelitian Ekonomi Politik Terorisme.....	34
Penelitian terorisme di Indonesia.....	36
Media dan terorisme.....	48
Representasi.....	51
Ideologi dan nilai-nilai berita.....	57
Sembilan elemen jurnalisme.....	66
Konstruksi Realitas dalam media massa.....	70
Jurnalisme advokasi.....	71
Kerangka Kerja Teori.....	73

BAB III

ANALISIS WACANA DAN TERORISME

Tiga pendekatan melihat wacana terorisme.....	74
Analisis Wacana Theo Van Leeuwen.....	75
Pendekatan Kualitatif melihat terorisme.....	79
Paradigma Penelitian.....	82
Pemilihan Media	85
Teknik Pengumpulan Data	86
Unit Analisis dan Narasumber.....	87

BAB IV

MENGAPA KORAN TEMPO

Mengapa Koran Tempo ?.....	90
Isu Terorisme Bernafaskan Islam Garis Keras.....	99

BAB V

ANALISIS BERITA TERORISME DI KORAN TEMPO

Berita seputar terorisme.....	101
Hasil analisis teks	102
Analisis dan Pembahasan Teks Berita.....	140

BAB VI

KEBIJAKAN KORAN TEMPO TERKAIT TERORISME

Kebijakan Koran Tempo terkait pemberitaan Terorisme.....	166
Intertekstualitas.....	181

BAB VII

KORAN TEMPO BERAT SEBELAH

Susahkah Mencari narasumber.....	215
Kejanggalan Itu ada.....	220

DAFTAR PUSTAKA225

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Berita-berita yang dianalisis.....	233
LAMPIRAN 2 Analisis Mikro Relasi.....	239
LAMPIRAN 3 Analisis Mikro Representasi.....	247
LAMPIRAN 4 Analisis Unsur Identitas.....	260
LAMPIRAN 5 Transkrip Wawancara Narasumber.....	264
LAMPIRAN 6 Berita seputar Terorisme di Koran Tempo.....	286
Tentang Penulis.....	308
HALAMAN NARSIS.....	310

BAB I

AKSI TERORISME DI MATA MEDIA

Aksi terorisme di mata media

Aksi terorisme merupakan bahan yang menarik untuk diberitakan oleh media massa. Sejumlah media massa, baik di luar negeri maupun di Indonesia tak pernah melewatkan peristiwa aksi terorisme dalam pemberitaan mereka.

Aksi dan sepak terjang terorisme, baik yang dilakukan oleh kelompok besar seperti *Jamaah Islamiyah* maupun *Al-Qaeda*, dan belakangan dilakukan oleh kelompok kecil seperti kelompok CiBiru Bandung menarik perhatian media massa. Dan buku ini hendak menguak bagaimana persoalan terorisme di Indonesia direpresentasikan di Koran Tempo.

Mengapa isu terorisme ini menarik untuk dianalisis? Salah satunya karena kondisi pers Indonesia di era reformasi berada dalam era kebebasan, media tidak lagi dibebani dengan ketakutan akan pembreidelan dan pencabutan SIUPP sebagaimana era sebelumnya. Ada kecenderungan, pers tidak senada saat menyiarkan dan memberitakan *trend* kekerasan bernafaskan sentimen agama khususnya soal terorisme. Bagi pers memberitakan aksi terorisme tidak semudah memberitakan persoalan politik dan kegiatan sosial yang terjadi sehari-hari di tengah masyarakat.

Sebenarnya aksi terorisme menjadi pemberitaan di media massa sejak jaman dahulu di mana-mana termasuk juga di Indonesia. Salah satu isu yang diangkat oleh media di tanah air saat reformasi adalah terorisme yang diduga ada

keterkaitannya dengan gerakan Islam garis keras dan gerakan fundamentalis Islam yang terkait dengan jaringan global. Contoh yang paling terasa adalah saat terjadi ledakan bom di Bali.

Media menggambarkan kasus itu amat variatif dan menyebutnya sebagai kasus Bom Bali I dan Bali II. "Bali kembali diguncang beberapa ledakan bom, Sabtu (1/10/2005) malam. Hingga pukul 01.00 Wita. Dilaporkan saat itu sedikitnya 23 korban tewas dan 99 orang lainnya luka-luka".(Kompas, 8 Oktober 2005)

Demikian beragamnya *headline* berita-berita terkait ledakan bom yang disiarkan nyaris seluruh media massa cetak di Ibukota pada tanggal 2 Oktober 2005. Berita tersebut menggambarkan secara dramatis peristiwa teror yang kembali melanda pulau Dewata setelah pada tahun 2002 aksi serupa juga menewaskan puluhan wisatawan, mancanegara maupun domestik yang tengah berwisata di Bali.

Fig.1.1 Pelaku Bom Bali



Begitu juga stasiun-stasiun televisi gencar menayangkan peristiwa demi peristiwa seputar aksi teror tersebut. Pada keesokan harinya, 3 Oktober 2005, media-media massa cetak, baik nasional maupun lokal, masih menempatkan peristiwa bom

Bali itu sebagai *headline* pemberitaan mereka dan pada edisi saat itu, disampaikan pada publik sejumlah kemajuan penyelidikan yang dilakukan aparat kepolisian. Dalam pemberitaan itu disampaikan bahwa teror itu hasil bom bunuh diri yang dilakukan tiga orang tersangka dari kelompok Islam garis keras. (*Kompas*, edisi 8 Oktober 2005). Dan untuk melengkapi hasil penyelidikan polisi tersebut, media-media massa menayangkan tiga potongan kepala tersangka pelaku bom bunuh diri, yakni pelaku peledakan di dua titik ledakan di Jimbaran dan satu titik di Kuta. .(*Kompas*, edisi 8 Oktober 2005).

Sejak awal terjadinya peledakan bom Bali hingga hari-hari berikutnya, masyarakat terus disuguhkan informasi-informasi terkini tentang peristiwa bom. Dari pemberitaan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tengah dan terus dirongrong oleh gerakan teroris. Meski begitu, terkait dengan penggunaan media oleh pelaku teror, ada perbedaan pemanfaatan media oleh pelaku teror di Indonesia dan di luar negeri. Bila terorisme di luar negeri amat memanfaatkan media dan selalu menampilkan diri serta identitas mereka secara jelas lewat media, terorisme di Indonesia tidak banyak memanfaatkan media. walaupun ada pemberitaan soal terorisme, sumber yang dicari dan ditampilkan hanya satu sisi yaitu pihak berwenang seperti polisi atau Densus 88 Anti Teror.

Buku ini mengusung soal representasi terorisme dalam pemberitaan media massa. Sebelum jauh menelaah hal itu perlu dipahami apa makna terorisme itu terlebih dahulu. Terdapat berbagai interpretasi tentang pengertian teror, teroris dan terorisme. Menurut Golose (2010:1-2) kata teror sendiri berasal dari bahasa *latin terrorem* yang memiliki arti rasa takut yang luar biasa. Sedangkan terorisme berasal dari kata kerja *terrere* yang berarti membuat takut atau menakut-nakuti.

Jadi bisa disimpulkan bahwa terorisme adalah sistem kepercayaan berdasarkan politik, sosial, atau ekonomi dilakukan sewenang-wenang (kejam, bengis, dan sebagainya sebagai

usaha untuk menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seseorang atau golongan.

Menurut *Webster's New World College Dictionary* (dalam Golose 2010: 2), istilah terorisme berasal dari bahasa Perancis *terrorisme* dan istilah terorisme ini mulai digunakan usai terjadinya *Reign of Terror* Perancis antara tahun 1793 -1794 saat pemerintah yang berkuasa saat itu mempraktikkan cara-cara teror dalam menerapkan kebijakan-kebijakan mereka.

Sementara itu menurut B.J Habibie (2012) mantan Presiden Indonesia, terorisme adalah tindakan teror atau tindakan kekerasan yang dilaksanakan secara sistematis dan tidak dapat diprediksi yang dilakukan terhadap negara, terhadap penyelenggara pemerintahan-baik eksekutif maupun legislatif. Bahkan dilakukan terhadap warga elite sosial politik dan terhadap perseorangan dalam negara untuk memperjuangkan sasaran politik teroris.

Sedangkan Laqueur (1999) setelah mengkaji lebih dari seratus definisi Terorisme, menyimpulkan adanya unsur yang paling menonjol dari definisi-definisi tersebut yaitu bahwa ciri utama dari Terorisme adalah dipergunakannya kekerasan atau ancaman kekerasan. Sementara motivasi politis dalam Terorisme sangat bervariasi, karena selain bermotif politis, Terorisme seringkali dilakukan karena adanya dorongan fanatisme agama.

Ada juga versi resmi terorisme yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dijelaskan pada Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 Ayat 1: Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini (Golose, 2010: 6-8). Perbuatan apa saja yang dikategorikan ke dalam Tindak Pidana Terorisme, diatur oleh ketentuan pada Bab III (Tindak Pidana Terorisme), pasal 6 dan

7; bahwa setiap orang dipidana karena melakukan Tindak Pidana Terorisme, jika: (1) Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman menimbulkan teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional. (2) Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara menghancurkan objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional (Pasal 7).

Mulyana W Kusumah dalam bukunya *Terorisme dalam Perspektif Politik dan Hukum* (2002), menjelaskan terorisme kian jelas menjadi momok bagi peradaban modern. Sifat tindakan, pelaku, tujuan strategis, motivasi, hasil yang diharapkan serta dicapai, target-target serta metode terorisme kini semakin luas dan bervariasi. Dengan demikian, semakin jelas bahwa teror bukan merupakan bentuk kejahatan kekerasan destruktif biasa, melainkan sudah merupakan kejahatan terhadap perdamaian dan keamanan umat manusia (*crimes against .peace and security of mankind*).

Dalam buku ini, fokus persoalan adalah representasi terorisme di Indonesia yang diduga dilakukan oleh kelompok Islam garis keras, terkait dengan sejumlah aksi terorisme yang diduga melibatkan peranan Abu Bakar Ba'asyir.

Isu yang sengaja diambil dalam buku ini adalah pemberitaan aksi terorisme di era 2010-an ketika aksi terorisme di Indonesia diwarnai sejumlah aksi terorisme yang tidak besar dan memiliki efek luar biasa. Setelah sejumlah

gembong terorisme ditangkap pasca 2008-2010 dan tewas atau dijatuhi hukuman mati, serta dieksekusi di Nusakambangan peristiwa terorisme yang terjadi di tanah air tidak terlalu besar. Inilah salah satu alasan mengapa peneliti mengangkat soal pemberitaan Koran Tempo periode 2010, setelah sejumlah gembong terorisme di Indonesia tertangkap, terbunuh atau dieksekusi/hukum mati.

Tabel 1.1
Gembong Terorisme di Indonesia

Nama	Peran dan aktivitas	Keterangan
Dr Azhari	Azhari dianggap sebagai ahli perakit bom serangan teroris di Indonesia.	Gembong teroris berkewarganegaraan Malaysia ini digrebek Densus 88 di kawasan Batu, Malang, Jawa Timur pada Rabu 9 November 2005. Dalam aksi penggrebekan Dr Azhari terdengar bunyi rentetan tembakan dan ledakan bom
Dulmatin	Dulmatin diyakini membantu para otak pelaku Bom Bali 2002.	Dulmatin ditembak dalam penggerebekan di Warnet Multiplus di Ruko Pamulang, Tangerang, Selasa 9 Maret 2010. Dulmatin terpaksa ditembak karena melawan dengan senjata revolver
Noordin Mohammad Top	Noordin dianggap bertanggung jawab atas serentetan serangan teror di Indonesia.	Noordin meninggal dalam penyergapan di di Kampung Kepuhsari, Kelurahan Mojosongo, Jebres, Surakarta, Jawa

		Tengah, pada 17 September 2009. Dia tewas bersama tiga rekannya termasuk Bagus Budi Pranoto (perakit bom peledakan Kedubes Australia di Jakarta, 2004) dan Ario Sudarso.
Imam Samudera	Imam Samudera diyakini sebagai orang yang bertanggung jawab atas peledakan bom di Legian, Kuta, Bali pada 2002. Dia juga diyakini orang yang berperan dalam sejumlah peledakan di Tanah Air antara lain di Pekanbaru, Riau, dan bom malam Natal 2000.	Abdul Aziz alias Imam Samudra ditangkap Tim Penyidik Bom Bali di Pelabuhan Merak, Tangerang, Banten, pada Kamis 21 November 2002 Imam Samudera dieksekusi mati di Nusakambangan pada 9 November 2008
Umar Patek	Umar Patek dianggap salah satu gembong teroris serangan Bom Bali 2002. Umar Patek juga dianggap sebagai aktor peledakan enam gereja pada 24 Desember 2000 yaitu Gereja Katedral Jakarta, Gereja Kanisius, Gereja Oikumene, Gereja Santo Yosep, Gereja Koinonia, dan Gereja	Umar Patek ditangkap di Kota Abbottabad, Pakistan pada 25 Januari 2011. Beberapa bulan setelah ditangkap di Pakistan, lalu Umar Patek dipulangkan ke Indonesia untuk menjalani persidangan. Jaksa di Pengadilan Negeri Jakarta Barat menuntut Umar Patek dijatuhkan hukuman seumur hidup. Namun majelis hakim menjatuhkan hukuman

	Anglikan.	20 tahun penjara kepada Umar Patek
Ali Ghufron	Dia diyakini sebagai orang yang berperan besar dalam kasus Bom Bali 2002. Ali Ghufron diduga terlibat sejumlah peledakan bom di Malaysia, Singapura dan Indonesia.	Ali Gufron alias Mukhlas ditangkap di Dukuh Mlandangan, Desa Sudimoro, Kecamatan Tulung, Klaten, pada Selasa 3 Desember 2002. Ali Ghufron dieksekusi mati di Nusakambangan pada 9 November 2008
Amrozi	Dia diyakini terlibat sejumlah pengeboman di Indonesia	Amrozi ditangkap di rumahnya di Lamongan, Jawa Timur, pada 9 November 2002. Amrozi dieksekusi mati di Nusakambangan pada 9 November 2008
Ali Imron	Ali Imron diduga meracik bom serta mengantarkan bom ke Jalan Legian, 12 Oktober 2002 dengan mobil L-300	Ali Imron ditangkap di tempat persembunyiannya di Pulau Tanjung Bru kang, di lepas pantai Samarinda, Kalimantan Timur, pada 1 Januari 2003.. Ali Imron dijatuhkan hukuman selama seumur hidup
Saefudin Zuhri		Anggota Detasemen Khusus (Densus) 88 menangkap Saefudin Zuhri di Desa Danasri Lor, Kecamatan Nusawungu, Cilacap, Jawa Tengah, pada Minggu 21 Juni 2009.
Rois dan Sogir	Mereka adalah tersangka kasus peledakan bom di	Rois dan Sogir ditangkap Detasemen Khusus 88 di Bogor, Jawa Barat..

	depan Kedubes Australia, Kuningan, Jakarta pada 9 September 2004	Penyergapan Rois dan Sogir berhasil di peroleh berkat di tangkapnya Yasin, Buchari, dan Fatahullah oleh tim Densus 88 Polda Metro Jaya di Pekalongan, Jawa Tengah pada 17 November 2005
--	--	---

Sumber : <http://www.lazuardibirru.org/berita/infografis/para-gembong-teroris-di-indonesia>, (21 oktober 2012)

Setelah penangkapan atau terbunuhnya sejumlah gembong teoris di tanah air, relative peristiwa aksi terorisme yang besar jauh amat berkurang. Sejak era reformasi, memang aksi terorisme meningkat tajam khususnya di era 2003-an tetapi memasuki tahun 2010, secara kualitas menurun meskipun secara kuantitas meningkat.

Di Indonesia, kata Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigjen Pol Tito Karnavian dari 689 pelaku teroris yang tertangkap dan diajukan ke pengadilan, tidak satupun yang dilepaskan karena adanya bukti. Namun, kata dia, terjadinya penurunan kualitas aksi terorisme, sementara kuantitasnya meningkat. (<http://www.antarajatim.com>, 03 Agst 2011 12:35:10).

Hal ini dilihat dari jumlah tersangka pelaku teroris yang tertangkap, yakni pada tahun 2003 sebanyak 93 orang dan bertambah menjadi 103 tersangka pada tahun 2010. Menurut Tito, polisi dan pengamat awalnya mengira persoalan terorisme di Indonesia telah selesai pascapenangkapan ratusan tersangka teroris pada tahun 2005, namun kenyataannya pada tahun 2009 membuat penegak hukum dan warga Indonesia terkaget dengan ledakan bom di Hotel *Ritz Charlton*. kata Tito dalam seminar

Penanggulangan Terorisme Guna Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Rangka Ketahanan Nasional di gedung Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Jakarta.

"Permasalahan aksi teror di Indonesia belum selesai. Bahkan, terungkap pada 2010 ada pelatihan di Aceh dan 2011 ada serangan bom bunuh diri. Secara kualitas menurun tapi kuantitas meningkat," paparnya.

Dari pihak yang berwenang yakni kepolisian meyakini bahwa kelompok-kelompok terorisme itu tetap ada di tanah air dan sejumlah penangkapan dilakukan bukan karena rekayasa. Wakapolri, Komjen Pol Nanan Sukarna menegaskan, bahwa aksi kelompok terorisme yang selama ini diungkap Densus 88 bukan merupakan sebuah rekayasa. Nanan mengingatkan bahwa kegiatan terorisme tersebut masih ada. (Rakyat Merdeka, Senin, 13/5/2013)

Ditegaskannya, "Kita ingin menyampaikan ke media dan masyarakat bahwa teroris ini bukan rekayasa kepolisian. Kita ingin semua alert bahwa teroris masih dan ada" katanya di Graha CIMB Niaga, Jl Jenderal Sudirman, Rabu (15/5/2013). Dalam pertemuan antara kepolisian dan pimpinan media tersebut, Wakapolri berharap ada sinergitas pemberitaan terkait penanggulangan masalah terorisme di Indonesia, tidak justru membantu teroris untuk meneror.

Di lain kesempatan, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri, Brigjen Pol Boy Rafli Amar menyatakan dalam sebuah penjelasannya di media, bahwa "Terorisme berada dalam simpul besar." Diingatkannya bahwa agar jangan bicara pemberantasan teroris yang dilakukan Densus 88 dan BNPT tidak efektif. Karena pemberantasan terorisme tidak semudah seperti membalik telapak tangan. Ini soal pemahaman ideologi yang salah tentang jihad.

Menurut dia, Jaringan terorisme Indonesia masih saling berkaitan. Mereka ada dalam simpul besar, dan masih aktif. Awalnya berkembang ketika NII non teritorial menjelma dalam berbagai bentuk. Salah satunya, *Jamaah Islamiyah (JI)*, dimana jaringan JI terungkap tahun 2002 usai peledakan bom Bali-1. Setelah JI membubarkan diri, anggota-anggotanya membentuk kelompok-kelompok baru. Ada yang berkaitan langsung, ada yang tidak yang disebut sel.

Menurut Boy, Jaringan-jaringan teroris ini kebanyakan merupakan alumni dari pelatihan-pelatihan militer di Afghanistan dan Filipina Selatan pimpinan Abu Sayyaf. Teroris-teroris pun bermunculan, dari Dr. Azahari sampai Noordin M Top. Setelah kematian keduanya, kekuatan teroris relatif melemah. Tetapi aksi-aksi terus berlangsung. Teroris kini meniru apa yang mereka dapat di Filipina Selatan. Mereka melakukan pelatihan-pelatihan militer di daerah konflik, misalnya Aceh dan Poso Sulawesi Selatan.

Dari sisa-sisa jaringan teror yang ada, nama Abu Omar yang paling tersohor. Selain berperan sebagai pemasok senjata, Omar beberapa kali mengirim anak-anak muda ke Mindanao untuk latihan perang. Salah satunya anak tirinya, Farhan, teroris Solo yang ditembak mati Densus 88 Agustus 2012. Bagi kelompok teroris, anak muda adalah sasaran yang potensial, karena mereka paling mudah dipengaruhi dan dicuci otaknya. Masih mencari-cari jati diri. Ketika diiming-imingi janji, mereka terjebak dalam kelompok radikal itu. Kepolisian sudah berupaya melakukan pencegahan dengan pendidikan deradikalisasi bagi anak-anak muda dan teroris.

Jaringan yang digerebek di Bandung pada 2010 lalu diduga jaringan Abu Omar/Umar. Senjata yang disita adalah jenis Kruger dan pistol FN kaliber 30. Meskipun sudah tertangkap tahun 2010, tapi lapisan di bawah Abu Omar masih berjalan.

Masih terlibat dengan kelompok ini dalam memasok senjata. Sementara Abu Roban yang ditembak mati di Kendal Jateng, terkait dengan Santoso. Santoso alias Abu Umar adalah tokoh sentral teroris Poso. Santoso ini giat merekrut dan ahli dalam membentuk mental serta jiwa teroris. Dia juga lihai dalam mengembangkan praktik pelatihan dalam sejumlah aksi teror, termasuk dalam aksi penembakan tiga anggota polisi di BCA di Palu, 25 Mei 2011. Dia pemimpin 20 orang terduga teroris yang ditangkap di sejumlah tempat dan pimpinan *halaqoh* Cileduk.

Abu Roban sebelumnya terlibat dalam perampokan toko emas di Tubagus Angke, Tambora, Jakarta Barat, beberapa waktu yang lalu dan perampokan di Bank DKI. Hasil perampokan itu untuk mendanai aksi terorisme atau *fa'i*. Abu Roban juga terkait kelompok Abu Omar. Saat ini mereka belum merancang aksi teror besar. Kelompok ini tersebar di berbagai daerah, dari Jawa, NTB sampai Poso. Tetapi ada juga jaringan-jaringan baru yang sama sekali tidak terkait dengan kelompok lama. Kelompok Pepi Fernando misalnya, yang bersama 16 anggotanya merancang bom buku dan dikirimkan ke sejumlah tokoh pada 2011. Kepolisian tengah mencari kelompok-kelompok semacam ini. Ini merupakan kendala tersendiri karena kelompok seperti ini sulit cukup sulit dideteksi. (Rakyat Merdeka, Senin, 13/5/2013).

Banyak juga pengamat yang mengaitkan aksi terorisme yang terjadi di Indonesia dengan aksi terorisme global yang dilakukan oleh kelompok teroris *Al-Qaeda*. Menurut Muhammad Guntur Romli (Kompas, 26 juli 2005), pasca tragedi 11 September 2001 di New York, Amerika Serikat, aksi teror meledak dimana-mana. Bukan Cuma di Bali, bom meledak nyaris bersamaan di Cablanca Madrid, Riyadh Arab Saudi dan 7 juli 2005 di London. Titik serangnya pun nyaris sama, lokasi umum, transportasi dan wisata.

Sebenarnya, aksi teror yang dilakukan oleh terorisme di Indonesia sudah terjadi sejak lama, paling tidak dimulai pada era 1962an ketika terjadi aksi percobaan pembunuhan terhadap Presiden Ir Soekarno di Cikini. Untuk lebih lengkap bisa dilihat dalam tabel di bawah ini. Kebanyakan aksi terorisme di Indonesia tidak diikuti klaim atau pengakuan dari para pelaku aksi.

Tabel 1.2
**Aksi terorisme di Indonesia
(1962-2012)**

Tanggal kejadian	Aksi terorisme	Pelaku terorisme dan korban
1962	ledakan bom terjadi di kompleks Perguruan Cikini dalam upaya pembunuhan presiden pertama RI, Ir Soekarno, pada 1962.	Pelakunya adalah Tasrif, Saadun dan Yusuf Ismail. Ketiganya perantauan dari Bima, Nusa Tenggara yang dituding tergabung dalam gerakan DI/TII. (Majalah Tempo Thn II/10/1999)
11 Novem ber 1976	Aksi di Masjid Nurul Iman, Padang. Pelakunya adalah TimzarZubil, tokoh yang disebut pemerintah sebagai Komando Jihad. □	Timzar tidak pernah ditemukan sampai sekarang.
20 maret 1978	Sekelompok pemuda melakukan peledakan di beberapa tempat di Jakarta dengan bom molotov, dan membakar mobil presiden taksi untuk mengganggu jalannya Sidang Umum MPR□	Tak ada korban jiwa
14 April 1978	Ledakan bom di Masjid Istiqlal, Jakarta. Sampai sekarang,	Tak ada korban jiwa

	ledakan bom dengan bahan peledak TNT itu tetap jadi misterius.	
28 Maret 1981	Garuda Indonesia diserang oleh teroris. Dalam perjalanan menuju Medan setelah transit di Palembang dari penerbangan Jakarta, pesawat ini dibajak oleh 5 orang bersenjata yang mengaku sebagai anggota Komando Jihad. 3 Teroris tersebut mengaku sebagai bagian dari penumpang pesawat Garuda Indonesia	Tiga pelaku mengaku sebagai anggota Komando Jihad . Aksi ini mengakibatkan 1 orang kru pesawat tewas, 1 orang penumpang tewas, dan 3 orang teroris tewas
4 Oktober 1984	Terjadi serangkaian ledakan bom, yaitu di BCA, Jalan Pecenongan, Jakarta Barat. Lima orang ditangkap dan dipenjara. Yaitu Muhammad Jayadi, Chairul Yunus, Tasrif Tuasikal, Hasnul Arifin, dan Edi Ramli. Rentetan dari kasus peledakan beberapa kantor BCA ini menyeret nama tokoh Petisi 50 seperti HM Sanusi, AM Fatwa, dan HR Dharsono ke penjara.	Polisi menangkap pelakunya yaitu Muhammad Jayadi, anggotaGerakan Pemuda Ka'bah (anak organisasi Partai Persatuan Pembangunan) lantaran protes terhadap peristiwa Tanjungpriok 1983. Jayadi anggota Gerakan Pemuda Ka'bah kemudian dijatuhi hukuman penjara 15 tahun setelah mengaku menjadi pelaku peledakan.
21 Januari 1985	aksi terorisme dengan motif "jihad" kembali terjadi. Kali ini menimpa salah satu tempat keajaiban dunia yang ada di Yogyakarta, Candi Borobudur	Candi borobudur rusak Pelakunya adalah seorang mubalig, Husein Ali Alhabsy yang juga

		dilatarbelakangi motif protes terhadap Peristiwa Tanjungpriok 1983. Husein menolak tuduhan atas keterlibatannya dalam peledakan Borobudur dan menuding Mohammad Jawad, yang tidak tertangkap, sebagai dalangnya
16 Maret 1985	Terjadi ledakan bom yang dipasang di bus Pemudi Ekspres di Banyuwangi, Jawa Timur.	Tersangka pelaku Abdulkadir Alhasby, anggota majelis taklim. Kasus ini dikaitkan dengan peledakan Candi Borobudur
15 april 1999 19 april 1999	AMIN atau Angkatan Mujahidin Islam Nusantara pimpinan Edy Ranto menjadi tersangka pelaku peledakan bom di Plaza Hayam Wuruk pada 15 April 1999. Kelompok ini juga dituduh yang meledakkan Masjid Istiqlal 19 April 1999.	
1 Agustus 2000	Bom meledak dari sebuah mobil yang diparkir di depan rumah Duta Besar Filipina, Menteng, Jakarta Pusat	2 orang tewas dan 21 orang lainnya luka-luka, termasuk Duta Besar Filipina Leonides T Caday. Tidak ada klaim dari pelaku
27 Agustus 2000	Granat meledak di kompleks Kedutaan Besar Malaysia di Kuningan, Jakarta.	Tak ada korban jiwa Tidak ada klaim dari pelaku
13/9 2000	Ledakan mengguncang lantai parkir P2 Gedung Bursa Efek Jakarta.	10 orang tewas, 90 orang lainnya luka-luka. 104 mobil rusak berat, 57 rusak ringan

		Pelaku utama Tengku Ismuhadi ditangkap di sebuah bengkel di bilangan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Saat itu Tengku Ismuhadi ditangkap bersama 27 tersangka lainnya
24 Desember 2000	Serangkaian ledakan bom pada malam Natal di beberapa kota di Indonesia,	merenggut nyawa 16 jiwa dan melukai 96 lainnya serta mengakibatkan 37 mobil rusak
22 Juli 2001	Terjadi ledakan bom di gereja Anna dan HKBP di Kawasan Kalimalang, Jakarta Timur,	5 orang tewas
23 september 2001	Bom meledak di kawasan Plaza Atrium, Senen, Jakarta. 6 orang cedera	6 orang cedera
12 oktober 2001	Ledakan bom di restoran KFC Makassar mengakibatkan kaca, langit-langit, dan neon sign KFC pecah. Tidak ada korban jiwa. Sebuah bom lainnya yang dipasang di kantor MLC Life cabang Makassar tidak meledak.	Tak ada korban jiwa
6 November 2001	Bom rakitan meledak di halaman Australian International School (AIS), Pejaten, Jakarta	Tak ada korban jiwa, tak ada klaim pelaku
januari 2002	Granat manggis meledak di depan rumah makan ayam Bulungan, Jakarta.. Di Palu, Sulawesi Tengah, terjadi empat ledakan bom di berbagai gereja. Tidak ada korban jiwa.	Satu orang tewas dan seorang lainnya luka-luka
12 oktober 2002	Tiga ledakan mengguncang Bali. Saat bersamaan, di Manado	202 korban yang mayoritas warga

	Sulut bom rakitan juga meledak di kantor Konjen Filipina, tidak ada korban jiwa.	negara Australia tewas dan 300 orang lainnya luka-luka
5/12 2002	Bom rakitan yang dibungkus wadah pelat baja meledak di restoran McDonald's Makassar.	3 orang tewas dan 11 luka-luka.
3 Februari 2003	Bom rakitan meledak di lobi Wisma Bhayangkari, Mabes Polri Jakarta.	Tidak ada korban jiwa.
27 April 2003	Bom meledak di area publik di terminal 2F, bandar udara internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Jakarta	2 orang luka berat dan 8 lainnya luka sedang dan ringan.
5 Agustus 2003	Bom menghancurkan sebagian Hotel JW Marriott di Jakarta.	Sebanyak 11 orang meninggal, dan 152 orang lainnya mengalami luka-luka.
10 Januari 2004	Bom meledak di Palopo Sulawesi.	Empat orang tewas
1 april 2004	Tim penyelidikan dari Polda Metro Jaya menemukan 8 bom kapsul dari rumah tersangka bom Cimanggis, Syarif Hidayat, di Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Ke-8 bom kapsul itu merupakan hasil pelatihan perakitan bom yang dilakukan oleh kelompok Oman Rahman cs.	
9 september 2004	Ledakan bom terjadi di depan Kedutaan Besar Australia di Jakarta	5 orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka. Ledakan juga mengakibatkan kerusakan beberapa gedung di sekitarnya seperti Menara Plaza 89, Menara Grasia,

		dan Gedung BNI
21 Maret 2005	Dua Bom meledak di Ambon	
28 mei 2005	Bom meledak di Tentena	22 orang tewas
8 juni 2005	Bom meledak di halaman rumah Ahli Dewan Pemutus Kebijakan Majelis Mujahidin Indonesia Abu Jibril alias M Iqbal di Pamulang Barat..	Tak ada korban jiwa
1 oktober 2005	Bom kembali meledak di Bali. yang terjadi di RAJA's Bar dan Restaurant, Kuta Square, daerah Pantai Kuta dan di Nyoman Café Jimbaran.	Sekurang-kurangnya 22 orang tewas dan 102 lainnya luka-luka akibat ledakan
31 Desember 2005	Bom meledak di sebuah pasar di Palu, Sulawesi Tengah .	yang menewaskan 8 orang dan melukai sedikitnya 45 orang
17 Juli 2009	ledakan dahsyat terjadi di Hotel JW Marriott dan Ritz Carlton Jakarta. Ledakan terjadi hampir bersamaan, sekitar pukul 07.50 WIB	Peristiwa tersebut menewaskan 9 orang korban dan melukai lebih dari 50 orang lainnya, baik warga Indonesia maupun warga asing. Selain dua bom rakitan berdaya ledak rendah yang meledak tersebut, sebuah bom serupa yang tidak meledak ditemukan di kamar 1808 Hotel JW Marriott yang ditempati sejak dua hari sebelumnya oleh tamu hotel yang diduga sebagai pelaku

		<p>pengeboman, Dari peristiwa itu diketahui, ternyata bahan bakunya bukan hanya dari sisa bom tahun 2000, melainkan juga datang dari luar negeri (Filipina Selatan) yang masuk Indonesia secara ilegal. Menurut Kabareskrim Komjen Erwin Mappaseng, informasi itu diperoleh dari pemeriksaan terhadap Amran bin Masyur alias Andi Syahputra, salah satu tersangka bom Marriott yang ditangkap di Solo pada Kamis 26 Februari 2004.</p>
18 AGUSTUS 2010	Perampokan bank CIMB niaga	<p>Ridwan alias Ismail yang ditangkap Densus 88 di Kabupaten Siak, Riau, Kamis (22/8/2013), adalah otak aksi perampokan di Bank CIMB Niaga Medan, Sumatera Utara, pada 18 Agustus 2010.</p>
15 April 2011	Ledakan bom bunuh diri di Masjid Mapolresta Cirebon saat Shalat Jumat	<p>Pelaku bom bunuh diri tewas, 25 luka-luka Ahmad Yosefa Hayat adalah orang yang mengantarkan pelaku bom bunuh diri</p>

		Cirebon yaitu M.Syarif , ke Mesjid Adz Zikro di lingkungan Mapolresta Cirebon. Setelah peristiwa bom bunuh diri Cirebon tersebut, Ahmad masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polri
22 April 2011	Penemuan bom dan pengungkapan rencana bom yang menargetkan Gereja Christ Cathedral Serpong, Tangerang Selatan, Banten dan diletakkan di jalur pipa gas, namun berhasil digagalkan pihak Kepolisian RI	Berhasil digagalkan Polisi menangkap Pepi Fernando , dia akhirnya divonis di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Senin (5/3/2011). Majelis Hakim menjatuhkan vonis 18 tahun penjara kepada Pepi Fernando karena terbukti tindak pidana terorisme.(Antarafoto)
25 September 2011	Ledakan bom bunuh diri di GBIS Kepunton, Solo, Jawa Tengah usai kebaktian dan jemaat keluar dari gereja.	Peristiwa ini mengakibatkan 28 orang terluka dan seorang tewas yang diidentifikasi sebagai pelaku bom bunuh diri. Pelaku pemboman tersebut diidentifikasi sebagai Ahmad Yosefa Hayat alias <i>Ahmad Abu Daud</i>
19 Agustus 2012	Granat meledak di Pospam Gladak, Solo, Jawa Tengah. Ledakan ini mengakibatkan kerusakan kursi di Pospam Gladak.	Tak ada korban jiwa diduga dilakukan oleh Firman Firman ditangkap di Jalan Raya Kalimulya,

		Perumahan Anyelir 2 Blok F2, Depok
--	--	---------------------------------------

Sumber-sumber :

<http://www.tempo.co.id/hg/timeline/2004/04/17/tml,20040417-01.id.html>

Dari berbagai aksi terorisme, polisi menyimpulkan adanya keterlibatan kelompok Islam garis keras bermain di sana. Dugaan keterlibatan Jemaah Islamiyah (JI) dalam sejumlah aksi terorisme di Indonesia terbukti, paling tidak secara hukum dengan keluarnya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 21 April 2008, atas Zarkasih, Amir (pemimpin) JI. Putusan itu bukan hanya menyatakan bahwa Zarkasih melakukan tindak pidana terorisme, dengan hukuman 15 tahun penjara, melainkan juga menetapkan JI sebagai korporasi pelaku teror dan karenanya terlarang. Putusan itu telah berkekuatan hukum tetap karena terdakwa menerima (*Gatra*, 28 Agustus 2008).

Bisa dikatakan, di tengah suasana aksi terorisme sesungguhnya media berada di tengah realitas sosial yang sarat dengan kepentingan, konflik, dan fakta yang kompleks dan beragam. Realitas adalah hasil dari ciptaan manusia kreatif melalui kekuatan konstruksi sosial terhadap dunia sekelilingnya. Dunia sosial itu dimaksud sebagaimana yang disebut oleh George Simmel, bahwa realitas dunia sosial itu berdiri sendiri di luar individu, yang menurut kesannya bahwa realitas itu “ada” dalam diri sendiri dan hukum yang menguasainya. (Bungin, 2008:12).

Realitas atau kenyataan sosial (*social reality*) adalah realitas sosial suatu masyarakat yang sedang melaksanakan berbagai penyesuaian modernitas. Dalam penyiapan materi konstruksi, media massa kadang memposisikan diri pada tiga hal antara lain, keberpihakan media massa kepada kapitalisme. Media massa digunakan oleh kekuatan-kekuatan kapital untuk

menjadikan media massa sebagai mesin uang dan pelipatgandaan modal lewat penyajian-penyajian beritanya. Posisi kedua adalah adanya keberpihakan semu kepada masyarakat. Media massa seolah berpihak pada rakyat dalam bentuk simpati, empati dan berbagai partisipasi kepada masyarakat, tapi ujung-ujungnya “menjual berita” dan menaikkan rating untuk kepentingan kapitalis atau pihak pemilik modal.

Keberpihakan kepada kepentingan umum adalah posisi media yang terakhir . Bentuk keberpihakan ini merupakan arti sesungguhnya yaitu visi setiap media massa, meski akhir-akhir ini visi tersebut tidak pernah menunjukkan jati dirinya, namun slogan-slogan tentang visi ini tetap terdengar. (Bungin, 2008:196-197)

Aksi terorisme ini menjadi salah satu menu penting dari media massa dan dijadikan headline pemberitaan mereka. Persoalannya adalah bagaimana media menggambarkan hal tersebut? Apakah para wartawan menyampaikan beritanya secara objektif? Atau di lain pihak apakah teroris sungguh memanfaatkan media untuk menyampaikan ‘pesannya’? Hal ini menjadi menarik karena ada perbedaan gaya komunikasi yang dilakukan oleh teroris di Indonesia dan teroris di luar Indonesia. Persoalannya adalah bagaimana realitas itu dikonstruksikan oleh media massa.

Terkait dengan praktik konstruksi realitas, berita dipandang bukanlah sesuatu yang netral dan menjadi ruang publik dari berbagai pandangan yang berseberangan dalam masyarakat. Sebaliknya media adalah ruang di mana kelompok dominan menyebarkan pengaruhnya dengan meminggirkan kelompok lain yang tidak dominan berita adalah suatu konstruksi realitas.

Berita atau tulisan dalam pandangan konstruksi sosial bukan merupakan fakta yang riil. Berita termasuk berita seputar aksi Islam garis keras dan aksi terorisme adalah produk interaksi

wartawan dengan fakta. Realitas sosial tidak begitu saja menjadi berita tetapi melalui proses. Di antaranya proses internalisasi di kalangan internal dan proses menggambarkan aksi terorisme yang ia amati, dalam hal ini saat melihat fakta langsung diserap dalam kesadarannya. Kemudian proses selanjutnya adalah proses eksternalisasi. Dalam proses ini wartawan menceburkan diri dalam memaknai realitas. Wartawan saat membuat berita soal terorisme kemudian memaknainya sebagai sebuah berita. Hasil dari berita adalah produk dari proses interaksi dan dialektika ini. Paling tidak dalam konsep Berger (1996:33-50) konstruksi realitas terbentuk bukan hanya dari bagaimana cara wartawan memandang realitas tapi bagaimana juga kehidupan politik tempat media itu berada. Sistem politik yang diterapkan sebuah negara ikut menentukan mekanisme kerja media massa negara itu mempengaruhi cara media massa tersebut mengkonstruksi realitas.

Terkait soal itu, Ibnu Hamad (2008:10) mengatakan bahwa karena sifat dan faktanya tugas redaksional media massa adalah menceritakan peristiwa-peristiwa, maka tidak berlebihan bahwa seluruh isi media adalah realitas yang telah dikonstruksikan. Wajar saja kemudian pembangunan konstruksi realitas pada masing-masing media berbeda, walaupun realitas faktanya sama. Bagaimana cara mengonstruksikan realitas fakta ini tergantung pada kebijakan redaksional yang dilandasi pada politik media itu.

Di kesempatan lain, dalam sebuah artikel yang bertajuk ***Media, Terorisme, dan Islam*** Dr. Tjipta Lesmana mengatakan bahwa media mempunyai kepentingan bisnis, yaitu bagaimana mendapat keuntungan dari berita yang dilansir. Bagaimana caranya menyiasati agar kepentingan bisnis media tercapai, tapi tidak melupakan tanggung jawab media untuk memberikan informasi yang sebenar-benarnya kepada masyarakat serta membuat masyarakat dihantui ketakutan ketika memberitakan aksi-aksi terorisme?

"Para reporter dapat diberdayakan oleh aparat keamanan untuk menanggulangi masalah terorisme. Ketika seorang reporter mengetahui ada orang yang mencurigakan, jangan langsung diekspos, tapi dilaporkan kepada aparat keamanan. Ini adalah salah satu contoh tanggung jawab sosial pers. Memang sekarang ada kecenderungan media ingin cepat-cepat memberitakannya dan menjadikannya head line untuk meningkatkan jumlah oplah mereka. Akibatnya, orang yang dicurigai tahu bahwa keberadaannya sudah "diendus" oleh masyarakat. Orang tersebut tentulah akan kabur dan aparat keamanan tidak bisa menangkapnya. Jadi kepentingan bisnis hendaklah berada satu tingkat di bawah kepentingan dan keamanan nasional." (Lesmana dalam wawancara RRI (24/8/2005).

Menurut Tjipta Lesmana, media dituntut hati-hati dan tidak sembarangan ketika menyiarkan sebuah berita. "Mengekspos secara besar-besaran aksi-aksi terorisme tidak bagus, karena secara tidak langsung media mengiklankan para teroris. Dalam hal ini pers, menurut Lesmana, mutlak menjalin kerja sama dengan aparat keamanan atau kebalikannya, aparat keamanan harus merangkul media untuk bekerja sama dalam menanggulangi terorisme. Dalam ilmu komunikasi, terutama komunikasi propaganda dan perang urat saraf, diajarkan bahwa pers bisa menjadi teman yang sangat penting dalam hal ini. Pers mempunyai banyak reporter yang bisa dikatakan tersebar di seluruh daerah. Reporter ini secara tidak langsung memainkan peran intelijen." (Lesmana, wawancara RRI (24/8/2005).

Lalu apa ada kaitan antara media dan terorisme? Kelompok terorisme internasional, sebagaimana dikatakan Walter Enders dari University of Alabama dan Tod Sanddler dari *University of Southern California* dalam buku *The Political Economy of Terrorism* (2006:36-37) memanfaatkan media dengan segala teknologinya. Dia mengatakan:

"Periods of globalization have been associated with increased international terrorism. The first wave of globalization in the 1880s and beyond coincided with the emergence of the anarchists, who emigrated from Russia to Europe and then to North America . The anarchists assassinated political leaders, planted bombs, and engaged in sabotage in order to foment revolution. Their terrorist acts coincided with advances in global communications (for example, the telegraph and daily newspapers) and transportation (for example, faster and larger ocean liners). The second wave of globalization in the latter third of the twentieth century also coincided with an era of increased terrorism." (Enders,2006:36)

"Periode globalisasi telah dikaitkan dengan peningkatan terorisme internasional. Gelombang pertama globalisasi pada tahun 1880 dan seterusnya bertepatan dengan munculnya anarkis, yang beremigrasi dari Rusia ke Eropa dan Amerika Utara. Anarkis membunuh pemimpin politik, 'penanaman' bom dan terlibat dalam sabotase untuk menggerakkan revolusi. Aksi terorisme mereka bertepatan dengan kemajuan dalam komunikasi internasional (misalnya, koran, telegraf) dan transportasi (misalnya, munculnya kapal laut lebih cepat dan lebih besar). Gelombang kedua globalisasi dalam ketiga terakhir abad kedua puluh juga bertepatan dengan era meningkatnya aksi terorisme. "

Dia mengatakan, dengan adanya inovasi di berbagai bidang termasuk juga teknologi komunikasi dan inovasi dibidang transportasi seperti satelit komunikasi, internet, *'high speed'* periklanan dalam biro perjalanan udara diasosiasikan dengan era baru. Selama dua dekade, internet secara intensif digunakan oleh teroris untuk menyebarkan propaganda (Enders, 2006:36)

Walter mengatakan:

"Over the last two decades, the internet has been increasingly used by terrorists to disseminate propaganda, spread terror (for example, the beheading of Nicholas Berg was posted on the internet on 12 May 2004), coordinate activities, make demands, and send warnings," "Selama dua dekade terakhir,

Internet telah semakin digunakan oleh teroris untuk menyebarkan propaganda, teror (misalnya, pemenggalan Nicholas Berg dipublikasikan di internet pada tanggal 12 Mei 2004), koordinasi kegiatan, pembuatan tuntutan dan mengirim peringatan, " (2006:36).

Teroris juga memanfaatkan internet untuk meretas informasi intelijen- sebagai contoh sebuah computer milik Al-Qaida ditemukan di sebuah gua di Afghanistan berisi hasil download laporan data dari *US General Accounting Office* mengenai kelemahan infrastruktur di Amerika. Menurut Walter, antara kelompok teroris dan media menunjukkan suatu hubungan yang simbiotik. Untuk menciptakan satu atmosfer dari ketakutan, teroris-teroris memerlukan media untuk menyampai seruan dan tuntutan mereka agar pesan tersebut bisa menjangkau hampir setiap sudut dunia dengan segera. Sebagai contoh aksi teroris di Olimpiade Munich pada 5 September 1972 dan aksi perusakan simbol pusat Perdagangan dunia pada 9/11 merupakan sarana penting untuk menyampaikan tuntutan yang memancar di seluruh dunia.

Teroris-teroris memanfaatkan semua wujud dari media untuk mendapatkan dukungan anggota baru dan simpatisan secara lebih luas. Tetapi situasinya amat berbeda dengan di Indonesia. Nyaris tak pernah muncul tuntutan secara resmi dari para pelaku teror lewat media, seolah para pelaku teror tidak menginginkan aksinya disebarluaskan oleh media.

Lalu bagaimana di Indonesia? Apakah kondisi ini sama dengan di luar negeri? Itulah yang menjadi alasan utama penelitian ini yang mencoba mengaitkan antara media dengan aksi terorisme yang dilakukan oleh kelompok Islam garis keras. Pemanfaatan media untuk kepentingan propaganda dan penyampaian pesan oleh pelaku aksi teror biasanya terjadi di sejumlah belahan dunia. Tetapi, kondisi ini berbeda dengan di

Indonesia. Nyaris media memiliki garis yang tegas berada di luar wilayah konflik antara pelaku teroris dan pemerintah dalam hal ini pihak kepolisian dan Densus 88. Sejumlah media di Indonesia mengalami kebingungan saat merangkai dan melakukan framing pemberitaan seputar aksi terorisme. Dari sisi akademis, disinilah pentingnya penelitian ini, bisa diduga media massa akan mengalami pertarungan di ruang redaksi saat mengkonstruksi dan merepresentasikan realitas terorisme apalagi bila dikaitkan ideologi yang dimiliki oleh media dan pengaruh faktor-faktor lainnya.

Lalu Bagaimana media massa, khususnya Koran Tempo memberitakan isu Islam garis keras dan aksi terorisme yang berlandaskan sentimen agama khususnya gerakan terorisme?

Bagaimana proses media dapat digunakan merepresentasikan siapa saja yang terlibat, ideologi apa yang muncul dalam pengemasan berita seputar terorisme? Bagaimana representasi, mis representasi dalam teks pemberitaan soal terorisme di media Koran Tempo.

Bagaimana praktik media Koran Tempo dalam proses pemberitaan terorisme yang bernafaskan ideologi Islam garis keras. Di sisi yang lain bagaimana media Koran Tempo menggunakan sembilan elemen dasar jurnalisme dan *advocacy Journalism* untuk merepresentasikan aksi terorisme di Indonesia. Bagaimana konteks sosial politik dibalik pemberitaan terorisme di Indonesia? Khususnya di Koran Tempo edisi tahun 2010?

Buku ini berasal dari disertasi yang menggunakan metode analisis wacana yang menyoroti soal bagaimana media merepresentasikan ideologi media di balik aksi terorisme dan fenomena Islam garis keras di media. Penelitian ini bertujuan juga untuk mengkaji bagaimana media massa mengusung aksi terorisme yang berlandaskan sentimen agama khususnya

gerakan terorisme di tanah air dalam perspektif konstruktivisme. Studi ini akan mengkaji praktik sosial khususnya representasi peristiwa yang diyakini oleh awak media sebagai suatu kebenaran. Di sisi yang lain proses ekonomi sosial dan politik pemberitaan terorisme menjadi hal yang penting dalam studi ini. Proses pengemasan, pemolesan dan penafsiran kembali atas realitas yang disesuaikan dengan kebijakan redaksional menjadi hal signifikan dalam penelitian ini.

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan analisis wacana yang melihat bagaimana isu terorisme direpresentasikan lewat perspektif konstruktivisme. Penelitian ini diharapkan bisa menjelaskan soal isi media massa yang merupakan hasil pertarungan wacana dari wartawan/redaktur dengan pihak lain yang ada di media seperti para pemimpin dan pemilik media serta ekstra media yang terkait langsung dengan pemberitaan soal terorisme di media-media yang diteliti.

Secara teoritis dan akademis, penelitian ini akan menyumbang pemahaman dan penjelasan baru seputar representasi pemberitaan aksi terorisme oleh para pelaku jurnalisme dan bagaimana penggambaran ketimpangan informasi terkait dengan keterbatasan akses wartawan terhadap kelompok-kelompok teroris.

Dikarenakan isu yang diangkat soal terorisme dan gerakan Islam garis keras merupakan isu yang sangat sensitif maka ada kesulitan saat mencari data pendukung dari sisi pelaku terorisme dan kelompok Islam garis keras.

Penelitian ini adalah penelitian teks media sehingga lebih melihat pemberitaan yang muncul dalam teks sehingga tidak memerlukan wawancara dengan para pelaku teror, tetapi wawancara kepada Direktur Utama Tempo Group. Redaktur dan wartawan Koran Tempo dan editor dan wartawan lain di Indonesia.

BAB II

TERORISME DALAM KAJIAN TEORI KOMUNIKASI

Studi dan Riset Awal Mengenai Isu terorisme

Sebelum menjelaskan konsep atau teori dan kerangka berpikir dalam penelitian ini, perlu diuraikan dahulu secara komprehensif mengenai riset atau studi-studi terdahulu mengenai isu terorisme dan pemanfaatan media oleh kegiatan terorisme.

Menurut Andrew Silke dalam bukunya yang berjudul *Research on Terrorism* (2004) kebanyakan studi tentang terorisme dimulai dengan diskusi tentang apa itu definisi terorisme. Atau, tepatnya buku-buku tersebut membicarakan betapa sulit menyepakati definisi yang sama mengenai apa itu terorisme (Silke, 2004:2). Masalah utamanya sebenarnya sederhana yaitu ternyata tidak ada definisi yang disepakati bersama mengenai terorisme meski banyak usulan konsep diajukan untuk membedakan istilah ini dengan kejahatan lainnya. Schmid dan Jongman (dalam Silke, 2004:3) setidaknya menyebut ada 109 definisi berbeda dalam catatan mereka di pertengahan 1980-an, mengenai istilah terorisme dan kegiatan apa yang ada di baliknya.

Sementara James Poland mengamati bahwa perdebatan tentang definisi terorisme yang bisa diterima di mana-mana adalah "masalah yang paling membingungkan" dalam studi terorisme. Begitu juga argumen Shafritz, Gibbons dan Scott di awal 1990-an (dalam Silke, 2004:4) yang menyimpulkan bahwa tidak mungkin menyepakati satu definisi yang bisa diterima secara luas mengenai apa yang dimaksud dengan terorisme.

Sebagian besar peneliti senior dan komentator tampaknya sepakat dengan penilaian Shafritz.

Ditegaskan dalam buku tersebut, di negara-negara Barat ada persepsi umum dan diterima banyak orang untuk menyebut jenis kegiatan yang dianggap sebagai terorisme dan jenis kelompok macam apa yang digambarkan sebagai organisasi teroris. Sering kali, seperti juga pornografi, bahwa meskipun mungkin tidak mudah mendefinisikan terorisme kita akan tahu manakala kita melihatnya. Untuk beberapa peneliti, pembahasan dan perdebatan hebat mengenai definisi terorisme sangat melelahkan, bahkan menghabiskan energi mereka selama bertahun-tahun.

Lelah akibat perdebatan panas dan hanya sia-sia di tahun 1970-an dan 1980-an, para peneliti melihat perlunya ada sebuah definisi dan mempertimbangkan faedahnya saat menerapkan definisi itu pada penelitian-penelitian soal terorisme. Menurut Silke, adanya definisi yang disepakati mengenai terorisme memungkinkan penelitian untuk mengembangkan berbagai metode, pendekatan, *benchmark* dan mata pelajaran yang sesuai untuk studi soal terorisme (Silke, 2004:11).

Tanpa definisi, fokus dari bidang ini, maka maknanya akan sulit dicerna dan terfragmentasi. Artinya sulit membedakan apakah benar sesuatu kegiatan, peristiwa dan aktor sungguh terkait terorisme. Kebingungan di kalangan peneliti, ini juga mencerminkan beragamnya respon internasional pada terorisme. Dengan perbedaan interpretasi baik yang kuat maupun biasa saja, sejumlah pemerintah menanggapi terorisme dalam berbagai cara dan kadang-kadang terstruktur begitu rupa.

Sebagai contoh, sejak tahun 1997 Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyebutkan sejumlah nama organisasi asing di luar Amerika sebagai organisasi teroris. Dampaknya sangat serius, sekali sebuah kelompok dicap sebagai organisasi

teroris maka adalah ilegal bagi orang-orang atau lembaga yang ada di bawah yurisdiksi AS menyediakan dana atau dukungan lainnya kepada organisasi tersebut, karena bisa saja tindakan itu dianggap sebagai upaya mendukung organisasi teroris. Britania Raya (Inggris) telah mengikuti pendekatan ini dan meluncurkan sendiri daftar organisasi teroris terlarang di tahun 2001. Namun, meskipun ada kesamaan dalam cara kedua Negara yakni AS dan Inggris saat mendefinisikan terorisme dan siapa saja yang mereka anggap sebagai organisasi teroris, daftar yang dihasilkan mereka sangat berbeda. Bahkan, kebanyakan organisasi 'teroris' yang dilarang oleh AS justru tidak dilarang oleh Inggris.

Meski begitu tetap saja ada konsensus. Setidaknya ada tiga belas organisasi yang muncul di kedua daftar, termasuk kelompok-kelompok seperti ***al-Qa'eda, Hamas, Abu Nidal Organization, Partai Pekerja Kurdi (PKK), Basque Fatherland*** dan ***kelompok Liberty (ETA) dan Hizballah***. Namun, daftar Amerika Serikat menyebut 15 organisasi yang tidak muncul dalam daftar Inggris. (Silke, 2004:5). Beberapa negara (misalnya, Malaysia) pada awalnya mencoba untuk mendefinisikan terorisme untuk memasukkan semua serangan yang ditujukan terhadap warga sipil - termasuk serangan oleh pembom bunuh diri Palestina. Pendekatan seperti ini akhirnya diperdebatkan ketika menyangkut masalah perjuangan sejumlah kelompok untuk lepas dari kekejaman asing. Pendapat itu sangat bermasalah pada konferensi di Amerika Utara atau negara-negara Eropa Barat.

Lalu bagaimana bentuk riset penelitian di bidang terorisme? Sejumlah riset dan penelitian dilakukan untuk mengupas tuntas persoalan terorisme dari berbagai aspek.

"...A large research literature has built up on terrorism over the past three decades. Despite its quantity, several reviews have found that the quality of this literature is generally very poor. The review described in this chapter explores and assesses the impact 9/11 has had on research on terrorism.

This current survey follows in the footsteps of a review carried out by this author prior to 9/11. That previous review examined the published output of the primary journals in the area for the years 1990–1999... (literatur hasil riset tentang terorisme amat banyak selama lebih dari tiga dekade, meski disayangkan dari sisi kualitas literatur-literatur itu sangat lemah) (Silke,2004: 122)

Sumber-sumber data penelitian seputar terorisme juga beragam mulai dari buku-buku, interview dan layanan informasi dari pemerintah terkait dengan aksi terorisme. Namun, dari hasilnya terbukti bahwa hampir sebagai besar peneliti memanfaatkan data-data dari buku teks (*Scholarly books*) dan artikel dan sayangnya hanya sedikit yang benar-benar terjun ke lapangan mewawancari para teroris (24 %).

Dari sejumlah riset yang telah dilakukan, ada kesulitan dari studi di area yang memiliki kekurangan data dan pengalaman. Survey di masa-masa lalu menunjukkan bahwa ternyata pengalaman para *researcher* sangat sedikit di bidang yang mereka teliti yaitu soal terorisme. Bahkan, dari hasil temuan kebanyakan apa-apa yang ditulis mengenai terorisme justru ditulis oleh orang-orang yang tidak pernah bertemu dengan seorang teroris dan ditulis oleh orang-orang yang memang tidak menghabiskan waktunya untuk bergelut dengan persoalan terkait dengan konflik-konflik seputar dunia terorisme.

...."Terrorism research is very top-heavy with desk accounts of the phenomenon, where second-hand conclusions are reached based on media reports, magazine articles and other published accounts. Even then, the authors are often unfamiliar with the existing literature and lack the experience needed to tell the good studies apart from the bad."...(Riset terorisme biasanya hanya menyangkut hal-hal yang ada di permukaan, dimana kesimpulan dari tangan kedua berasal dari laporan-laporan media, artikel majalah dan penerbitan-penerbitan lain. Bahkan seringkali para pengarang tersebut tidak mengerti atau mengetahui literatur-literatur yang sudah ada sebelumnya dan

kurang pengalaman yang sebenarnya diperlukan untuk sebuah penelitian yang baik terpisah dari penelitian yang buruk...)

Dari pengamatan Andrew Silke (2004:62) dari sejumlah metode riset mengenai terorisme, paling tidak pada tahun 1995-1999 lebih banyak menggunakan studi atau analisis dokumen yakni sebesar 62 %, disusul dengan studi analisis dokumen yang ditambah dengan wawancara sebesar 11 %, dan 1 % menggunakan *'unstructured non systematic interviews'*, 7 % meneliti *database* soal terorisme, dan masing-masing 3 % menggunakan metode survey/penyebaran angket dan sumber lain.

... "There are a number of advantages to secondary data analysis and it is worth outlining these briefly. The first and foremost benefit is that the method involves considerably less effort and expense to obtain than if the researcher sets out to collect primary data. As a result, it is often used for research on topics for which it is particularly difficult to gather raw data. Its popularity among researchers of terrorism is therefore not completely surprising. Such research is also useful in establishing the wider context in which a phenomenon is occurring and in illustrating the potential complexity of the various factors which may be involved. There are disadvantages, however. As an illustration of some of these, let us consider the case of information gathered through media sources (an especially common source in terrorism research)... "
(silke, 2004:62)

Menurut Andrew meski di satu sisi ada keuntungan hanya mengandalkan data-data sekunder saat melakukan riset sekunder, dan tidak dapat melakukan pencarian data primer secara langsung lewat interview mendalam baik dari sisi kemudahan dan kecilnya biaya yang dikeluarkan , tetapi hasilnya akan berbeda bila melakukan penelitian langsung pada tangan pertama.

Penelitian Ekonomi Politik Terorisme

Persoalan ekonomi politik juga menjadi bahan yang menarik untuk sebuah penelitian sebagaimana dilakukan oleh Walter Enders dan Todd Sandler (2006) meski ini bisa dikategorikan sebagai perspektif ekonomi politik yang liberal. Sejak 1983 Professor Sandler meneliti persoalan terorisme, kemudian pada tahun 2003 dia bersama-sama dengan Walter Ender melakukan penelitian untuk *National Academy of Sciences' Estes Award* untuk riset perilaku yang relevan untuk menghindari perang nuklir. Hasil risetnya kemudian dijadikan buku dengan judul **"The Political Economy of Terrorism"** yang diterbitkan oleh Cambridge University Press , New York pada tahun 2006,

Persoalan ekonomi politik yang diangkat oleh Walter dan Todd Sander dianalisis menggunakan penelitian kuantitatif dari perspektif ekonomi dan analisis politik yang melihat bagaimana aksi terorisme domestik dan transnasional memberi kerugian ekonomi yang luar biasa besar bagi sejumlah negara. Penelitian ini dilakukan lewat survey yang mengkombinasikan metodologi ekonomi dengan metode penelitian politik.

Tabel. 2.1
The Political Economy of Terrorism

Judul	Topik Penelitian	Metodologi	Ringkasan Penelitian
<i>The Political Economy of Terrorism</i> Oleh Walter Enders and Todd Sandler the Robert R. and Katheryn A. Dockson (2006)	Investigatif terorisme domestik dan transnasional Dimana ada perbedaan kebijakan saat mengatasi terorisme domestik dan terorisme transnasional	Kombinasi dari metode ekonomi dengan analisis politik dan realitas (perspektif ekonomi politik liberal)	-Akibat aksi terorisme transnasional khususnya kerugian diperkirakan \$907 juta pada 24 April 1993 saat pengeboman menara NatWest di London; - kerugian sekitar \$725 juta pada 26 February 1993 ketika pengeboman World Trade Center Kemudian kerugian sekitar \$671 million pada 10 April 1992 saat pengeboman terjadi di distrik keuangan di London -Kerugian \$398 juta pada 24 July 2001 saat aksi bom di

			<p>Columbo International Airport di Sri Lanka; dan kerugian sekitar \$259 juta pada 9 February 1996 saat pengeboman yang dilakukan kelompok IRA South Key Docklands di London -secara umum Serangan bom 9/11 menimbulkan kerugian secara ekonomi dan properti sebesar \$80 billion, dimana \$40 billion di antaranya di asuransikan</p>
--	--	--	---

Penelitian soal terorisme di Indonesia

Di Indonesia, penelitian dan disertasi mengenai representasi terorisme dalam pemberitaan media masih jarang, dan bisa dikatakan sangat minim. Meski begitu ada juga sejumlah disertasi yang mengangkat soal terorisme tetapi dilihat dari berbagai sudut pandang dan bidang kajian.

Di bidang Komunikasi terkait dengan topik terorisme, ada hasil penelitian tesis yang perlu disimak. Topik yang

diangkat adalah ***Pemaknaan Khalayak Muslim dari enam organisasi Islam terhadap Berita Terorisme. Analisis resepsi Berita Prosesi Pemakaman Amrozi Cs tahun 2008 dan Berita Pengepungan rumah Teroris di Temanggung tahun 2009 di TVOne*** oleh Laode Aulia Rahman Hakim. Rahman melakukan studi ini di tahun 2010, melihat bagaimana pemaknaan khalayak terhadap pemberitaan media soal terorisme. Kesimpulannya, pemberitaan aksi terorisme mendapat perhatian khusus bagi khalayak luas di lokasi manapun yang terkena serangan teroris. Peneliti menggunakan studi resepsi khalayak untuk menganalisis pemaknaan khalayak muslim terhadap tiga berita terorisme di *TvOne*. Pemaknaan yang terjadi, pemberitaan terorisme di media di satu sisi dapat mengurangi dampak terorisme, sedangkan di sisi lain justru bisa membantu misi terorisme untuk menebarkan rasa takut.

Di bidang Filsafat Hendropriyono berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul ***'Terorisme dalam Filsafat Analitika; Relevansinya dengan Ketahanan Nasional'*** di Sekolah Pascasarjana UGM. Hendro lebih berfokus tentang terorisme yang dikaji dari filsafat analitika bahasa, yakni bahasa terorisme memiliki kemiripan keluarga (*family resemblance*), sebagai analogi di dalam satu bentuk tata permainan bahasa yang sama. Bahasa yang digunakan dalam terorisme ternyata terbelah atas dua tata permainan bahasa, yaitu mengancam dan berdoa yang dipergunakan dengan sekaligus.

Menurut Hendro, tata permainan bahasa yang terbelah dalam terorisme menunjukkan bahwa teroris mempunyai kepribadian yang terbelah (*split personality*). Para pelaku terorisme juga mengalami kegalatan kategori, yakni ketidakmampuan untuk membedakan pengetahuan sehingga mengakibatkan subjek dan objek terorisme menjadi tak terbatas. Aktif atau pasifnya kegiatan terorisme yang timbul tenggelam, tergantung kepada kondusif atau tidaknya lingkungan

masyarakat yang menjadi habitat hidupnya. Hendro juga menyebut fundamentalis atau aliran keras *'wahabisme'* merupakan lingkungan yang paling kondusif bagi terorisme. Aliran tersebut sudah mulai menginfiltrasi sebagian pikiran umat Islam Indonesia. (*Republika*, 26 Juli 2009)

Selain Hendro, ada disertasi lain terkait dengan terorisme tetapi dikaitkan dengan bidang hukum. Judul disertasi ***itu "Perkembangan Konstelasi Politik Internasional dan Implikasinya terhadap Politik Hukum Nasional Indonesia dalam Pemberantasan Terorisme"*** oleh Mardenis yang dipertahankan di depan sidang Universitas Padjajajaran 22 Juni 2009. Terbitnya UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme cenderung sangat diskriminatif dan tendensius terhadap umat Islam. (*Unpad.ac.id*, 22/06). Tidak heran bila muncul kesan bahwa perkembangan konstelasi politik internasional, terutama serangan atas sejumlah gedung di Amerika Serikat pada 9 September 2001, berimplikasi signifikan terhadap politik hukum nasional Indonesia dalam pemberantasan terrorism. Implikasi dari peristiwa 9/11 tersebut AS memandang kabur terhadap terorisme itu sendiri. "Seakan-akan, terorisme diidentikkan dengan dunia Islam. Padahal hal tersebut tidaklah benar," sanggahnya.

Dari perspektif yang kurang jernih tersebut, langsung maupun tidak langsung berdampak buruk pada citra Islam di mata dunia. Selain itu, hal tersebut juga langsung maupun tidak, mempengaruhi konstelasi politik hukum di Indonesia. Ia menambahkan, pengaruh tersebut tidaklah berlebihan, karena AS dipandang sebagai Negara adi kuasa.

Persoalan terorisme di Indonesia bisa dikaji dari sudut atau perspektif berbeda-beda. Hal ini tampak saat Benny Jozua Mamoto mengupas soal terorisme dari kajian Ilmu Kepolisian. Disertasi yang dipertahankannya berjudul ***"Penanganan Polri***

Terhadap Organ Teror Dalam Al- Jamaah Al-Islamiyah".

Inti dari disertasi ini adalah Penanganan kasus-kasus teror di Indonesia selama ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan hukum. Sebaliknya, anggota Al-Jamaah Al-Islamiyah yang terlibat tindak pidana terorisme mendasari tindakannya dengan keyakinan agama. "Kelompok tersebut juga mempersepsikan tindakannya sebagai sebuah perjuangan suci dan bukan tindakan kriminal atau terorisme. Bahkan tindakan keras aparat keamanan, sanksi hukum yang berat sampai risiko kematian tidak menyurutkan niat para teroris. Dia mengungkapkan, tindakan keras aparat dan sanksi hukuman yang berat justru dapat dipersepsikan sebagai tindakan represif pemerintah, sehingga hal itu dapat dijadikan alasan pembenar untuk melakukan pembalasan yang pada gilirannya akan menimbulkan lingkaran terorisme. Untuk mengurangi berkembangnya lingkaran terorisme, Satgas Bom Polri menggunakan pendekatan yang bersifat khusus, yaitu pendekatan budaya. Karena ternyata motivasi tindakan para pelaku banyak berlatar belakang budaya, dalam hal ini keyakinan keagamaan.

Kemampuan pengendalian budaya Satgas Bom Polri, yang sudah dapat dipastikan menimbulkan resistensi sangat tinggi. Resistensi akan semakin tinggi apabila pihak yang kuat, dalam hal ini Satgas Bom Polri, memaksakan kehendaknya dengan menggunakan berbagai cara kekerasan. (<http://www.pps.ui.ac.id/new>, Sabtu, 23 Agustus 2008)

Lain halnya dengan Mirra Noor Milla, persoalan terorisme dipandang dari sudut psikologi dengan judul ***disertasi "Dinamika Psikologis Perilaku Terorisme: Identitas dan Pengambilan Keputusan Jihad di Luar Wilayah Konflik pada Terpidana Kasus Bom Bali di Indonesia"***. Disertasi yang dipertahankan di UGM tahun 2009 ini mengungkap bahwa aksi-aksi bom bunuh diri menyadarkan kita, negeri ini telah menjadi ladang subur bagi kelompok radikal untuk menerapkan

strategi terorisme. Terorisme yang mengatasnamakan agama tertentu, para pelakunya bukanlah individu-individu dengan predisposisi psikologis tertentu yang menjadikan mereka sebagai teroris,” Menurutnya keputusan melakukan jihad di luar wilayah konflik oleh pelaku terorisme di Indonesia mengandung sejumlah bias yang lebih bersifat motivasional daripada rasional. Keyakinan kuat menyebabkan mereka memiliki kepercayaan diri berlebih dalam pengambilan keputusan. Identitas pelaku teror di Indonesia, jelasnya, melebur dalam identitas kelompok berdasarkan kelompok keagamaan. Demikian juga dengan identitas suku dan kebangsaan. Penguatan identitas terjadi ketika muncul persepsi adanya ancaman yang ditujukan pada kelompok mereka. Penganiayaan, pelecehan dan penyerangan terhadap umat Islam di berbagai penjuru dunia menyebabkan ancaman tersebut terasa nyata.

“Pembenaran dari ayat-ayat Al-Quran juga semakin menguatkan keyakinan mereka. Kristalisasi keyakinan yang terbentuk membimbing mereka pada penguatan identitas muslim *kaffah* dengan jalan perjuangan atau *jihad*. Gugur sebagai syuhada adalah manifestasi dari kesejahteraan subjektif dari hidup mulia dalam naungan Islam,” katanya. (Suara Merdeka, (29/5/2008).

Untuk lebih lengkap, mengenai sejumlah penelitian dan riset soal terorisme dengan berbagai bidang kajian , baik dalam bentuk skripsi, tesis atau disertasi bisa dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Penelitian Terorisme di Indonesia

Tahun	Judul skripsi/ Tesis/ Disertasi/penelitian	Kesimpulan/temuan
2005	<i>Penyebaran sel-sel aktif Terorisme internasional di</i>	Penelitian ini berusaha menguraikan apa yang menjadi penyebab atau

	<i>Indonesia pasca Bom Bali 2002 Oleh Vidia Adisti Fisip UI</i>	<p>faktor-faktor apa yang menjadikan sel-sel aktif terorisme internasional dapat tumbuh dan berkembang di Indonesia. Aksi-aksi teror kian hari kian marak, dan dilakukan dengan motif yang berbeda-beda pula.</p> <p>Berdasarkan perbedaan motif itulah dapat dikelompokkan hal-hal apa yang menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan sel-sel terorisme: di Indonesia dikaitkan dengan metode perekrutan serta sasaran perekrutan yang berpotensi. Yang dimaksud dengan sel-sel terorisme disini adalah para pendukung aksi teror, Sel-sel terorisme lebih dilihat sebagai pribadi perorangan bukan sebagai kelompok aksi teror, walaupun kelak akan mengacu pada terbentuknya kelompok dalam melakukan aksinya dikatakan aktif, karena layaknya sel dalam tubuh, sel-sel terorisme tersebut juga mempunyai kemampuan berkembang dengan cepat dalam menyebarkan ideologi kekerasan dalam mencapai tujuannya</p>
2008	<i>"Penanganan Polri Terhadap Organ Teror Dalam Al-Jamaah Al-Islamiyah" oleh</i>	<p>Penanganan kasus-kasus teror di Indonesia selama ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan hukum. Sebaliknya, anggota Al-</p>

	<i>Benny Jozua Mamoto mengupas soal terorisme dari kajian Ilmu Kepolisian.</i>	<i>Jamaah Al-Islamiyah</i> yang terlibat tindak pidana terorisme mendasari tindakannya dengan keyakinan agama. "Kelompok tersebut juga mempersepsikan tindakannya sebagai sebuah perjuangan suci dan bukan tindakan kriminal atau terorisme. Bahkan tindakan keras aparat keamanan, sanksi hukum yang berat sampai risiko kematian tidak menyurutkan niat para teroris. Dia mengungkapkan, tindakan keras aparat dan sanksi hukuman yang berat justru dapat dipersepsikan sebagai tindakan represif pemerintah, sehingga hal itu dapat dijadikan alasan pembenar untuk melakukan pembalasan yang pada gilirannya akan menimbulkan lingkaran terorisme.
2009	<i>'Terorisme dalam Filsafat Analitika; Relevansinya dengan Ketahanan Nasional' oleh Hendropriyono (disertasi di UGM)</i>	tata permainan bahasa yang terbelah dalam terorisme menunjukkan bahwa teroris mempunyai kepribadian yang terbelah (<i>split personality</i>). Para pelaku terorisme juga mengalami kegalatan kategori, yakni ketidakmampuan untuk membedakan pengetahuan sehingga mengakibatkan subjek dan objek terorisme menjadi tak terbatas
2009	<i>Dinamika Psikologis Perilaku Terorisme: Identitas dan Pengambilan</i>	keputusan melakukan jihad di luar wilayah konflik oleh pelaku terorisme di Indonesia mengandung sejumlah bias

	<i>Keputusan Jihad di Luar Wilayah Konflik pada Terpidana Kasus Bom Bali di Indonesia (disertasi bidang psikologi UGM oleh Mirra Noor Milla</i>	yang lebih bersifat motivasional daripada rasional. Keyakinan kuat menyebabkan mereka memiliki kepercayaan diri berlebih dalam pengambilan keputusan. Identitas pelaku teror di Indonesia, jelasnya, melebur dalam identitas kelompok berdasarkan kelompok keagamaan. Demikian juga dengan identitas suku dan kebangsaan. Penguatan identitas terjadi ketika muncul persepsi adanya ancaman yang ditujukan pada kelompok mereka. Penganiayaan, pelecehan dan penyerangan terhadap umat Islam di berbagai penjuru dunia menyebabkan ancaman tersebut terasa nyata
2009	<i>Perkembangan Konstelasi Politik Internasional dan Implikasinya terhadap Politik Hukum Nasional Indonesia dalam Pemberantasan Terorisme” oleh Mardenis Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung (2009)</i>	Terbitnya UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme cenderung sangat diskriminatif dan tendensius terhadap umat Islam. Tidak heran bila muncul kesan bahwa perkembangan konstelasi politik internasional, terutama serangan atas sejumlah gedung di Amerika Serikat pada 9 September 2001, berimplikasi signifikan terhadap politik hukum nasional Indonesia dalam pemberantasan terorisme. Implikasi dari peristiwa 9/11 tersebut AS memandang kabur terhadap terorisme itu sendiri. “
2010	<i>Pemaknaan Khalayak</i>	Pemberitaan aksi terorisme

	<i>Muslim dari enam organisasi Islam terhadap Berita Terorisme. Analisis resepsi Berita Prosesi Pemakaman Amrozi Cs tahun 2008 dan Berita Pengepungan rumah Teroris di Temanggung tahun 2009 di Tvone</i> <i>Tesis S2 Komunikasi</i> <i>Oleh Laode Aulia Rahman Hakim</i>	mendapat perhatian khusus bagi khalayak luas di lokasi manapun yang terkena serangan teroris. Peneliti menggunakan studi resepsi khalayak untuk menganalisis pemaknaan khalayak muslim terhadap tiga berita terorisme di <i>TV One</i> . Pemaknaan yang terjadi, pemberitaan terorisme di media di satu sisi dapat mengurangi dampak terorisme, sedangkan di sisi lain justru bisa membantu misi terorisme untuk menebarkan rasa takut
2011	<i>Jama'ah Anshorut Tauhid Sebagai Organisasi Hub Terorisme Berlatar Belakang Keagamaan di Indonesia</i> <i>Tesis Bidang Kajian Ketahanan Nasional UI</i> <i>oleh Rakhmat Damdami</i>	<i>Jama'ah Anshorut Tauhid</i> dapat dikatakan sebagai organisasi hub terorisme berlatar belakang keagamaan adalah menghubungkan / menyatukan beberapa kelompok/organisasi dalam satu jaringan; sebagai repeater, untuk memperkuat jangkauan antar kelompok/organisasi; fleksibel mendukung beberapa kelompok /organisasi yang berbeda tetapi masih dalam domain / tujuan yang sama; mengisolasi kesalahan yang dilakukan oleh anggota kelompok/organisasi; memberikan manajemen informasi yang terpusat.
2011	<i>Potensi Ideologisasi Jihad yang mengarah pada aksi terorisme oleh kelompok-kelompok Islam radikal di Indonesia</i>	<i>Jihad fie sabilillah</i> untuk menegakkan amar makruf nahi munkar, sendiri bukanlah monopoli kelompok teroris saja. Sejak era reformasi, beberapa kelompok menyatakan

	<i>Tesis Bidang Sosiologi oleh Rocky Sistarwanto</i>	menolak azas tunggal tersebut sebagai landasan perjuangannya, telah memunculkan berbagai kelompok Islam dengan mengusung landasan perjuangan <i>jihad fie sabilillah</i> tersebut. Tidak hanya bermunculan kelompok baru, beberapa kelompok Islam yang dulu “tertidur” karena penerapan asas tunggal ini seolah terbangun kembali dan menemukan lingkungan yang sempurna untuk kehidupan kelompoknya. Namun demikian tidak semua kelompok gerakan Islam dengan serta merta muncul menjadi kelompok-kelompok teroris.
2012	<i>Strategi far enemy Al Qaeda dan jaringan melawan Amerika Serikat, NATO dan Sekutu dalam perang asimetrik di Afghanistan dan Irak, 2001-2011 oleh Tagor Siagian Tesis Kajian Terorisme dalam Keamanan Internasional, Program Pasca Sarjana Fisip UI</i>	Meneliti seberapa efektif strategi far enemy yang dilakukan oleh <i>Al Qaida</i> dan jaringan melawan Amerika Serikat, Nato dan sekutu dalam perang asimetrik di Afganistan dan Irak.
2013	<i>Pencitraan Abu Bakar Ba’asyir di Harian Republika (Studi</i>	<i>Harian Republika</i> sebagai media yang bernafaskan Islam mempunyai cara pandang

	<p><i>Analisis Framing Pencitraan Abu Bakar Ba'asyir Terkait Keterlibatannya dengan Kegiatan Terorisme pada Pemberitaan Harian Republika Periode Agustus 2010 – Juni 2011)</i> oleh <i>Luriltasari, Ahta Prayinda S1 thesis, UAJY.</i></p>	<p>tersendiri dalam memberitakan kasus tersebut juga mencitrakan sosok Abu Bakar Ba'asyir. Dalam pemberitaan Abu Bakar Ba'asyir terkait keterlibatannya dengan jaringan teroris, <i>Republika</i> menggunakan <i>frame</i> anti-barat serta memahami penangkapan dan pengadilan terhadap Ba'asyir merupakan cara untuk mendeskreditkan Islam. Peristiwa tersebut merupakan rekayasa polisi dan kejaksaan yang didomplengi oleh Amerika. Sementara itu sosok Abu Bakar Ba'asyir dicitrakan sebagai seorang ulama lanjut usia yang menjadi korban atas permainan politik asing yang mengatasnamakan pemberantasan terorisme global</p>
--	--	--

Persoalan terorisme dan media massa, merupakan hal yang masih langka diteliti dalam sebuah disertasi di Indonesia apalagi dikaitkan dengan representasi. Ini yang membedakan buku ini dengan sejumlah penelitian sebelumnya, baik di bidang metodologi, paradigma dan teori-teori yang digunakan.

Dalam buku ini, persoalan terorisme di Indonesia ditinjau lewat analisis wacana yang melihat teks berita sebagai alat media massa untuk merepresentasikan sikap, kebijakan dan ideologi mereka, lewat model analisis wacana *Theo Van*

Leeuwen. Model analisis wacana ini untuk mendeteksi dan meneliti bagaimana suatu kelompok atau seseorang dimarginalkan posisinya dalam suatu wacana.

Dalam karyanya yang berjudul "***The representation of social actors***" dalam Carmen RosaCaldas-Coulthard dan Malcom, ***Text and Practice: Readings in critical discourse Analysis*** (1996:32-69) Theo melihat bagaimana suatu kelompok dominan lebih memegang kendali dalam menafsirkan suatu peristiwa dan pemaknaannya, sementara kelompok lain yang posisinya rendah cenderung untuk terus menerus sebagai objek pemaknaan, dan digambarkan secara buruk.

Analisis Van Leeuwen secara umum menampilkan bagaimana pihak-pihak dan aktor (bisa seseorang atau kelompok) ditampilkan dalam pemberitaan. Ada dua pusat perhatian yaitu: (1) Proses pengeluaran (*exclusion*). Apakah dalam suatu teks berita ada kelompok atau aktor yang dikeluarkan dalam pemberitaan, dan strategi wacana apa yang dipakai untuk itu. Proses pengeluaran ini secara tidak langsung bisa mengubah pemahaman khalayak akan suatu isu dan melitimasi posisi pemahaman tertentu. (2) Proses pemasukan (*inclusion*). *Inclusion* berhubungan dengan pertanyaan bagaimana masing-masing pihak atau kelompok itu ditampilkan dalam pemberitaan. Proses *inclusion* ini juga menggunakan strategi wacana dengan memakai kata, kalimat, informasi atau susunan bentuk kalimat tertentu, cara bercerita tertentu, masing-masing kelompok direpresentasikan dalam teks.

Yang menjadi objek penelitian adalah sejumlah pemberitaan seputar terorisme sejak Agustus 2010 di *Harian Koran Tempo* yang diawali dengan ditangkapnya Abu Bakar Ba'asyir. Koran Tempo edisi 10 Agustus 2010 mengangkat topik seputar penangkapan *Amir Jamaah Anshorut Tauhid (JAT)* Abu Bakar Ba'asyir dengan judul "***Ceramah Ba'asyir Sebelum***

Ditangkap : "Demokrasi Itu Kurang Ajar". Koran Tempo juga menulis cerita Ustadz Abu Bakar yang ***"Diburu Sepanjang Waktu"*** cerita tentang perjalanan lelaki kelahiran Jombang 17 Agustus 1938 yang diburu sejak 1983. Koran Tempo juga memuat berita lain di edisi yang sama : ***"Ba'asyir Dituding Terlibat Terorisme di Aceh"*** (di halaman A2) yang isinya mencoba mengkaitkan antara Ba'asyir dengan Abdullah Sunata. Dan dalam berita yang sama mencoba mengkaitkan Ba'asyir dengan Sunata –pemimpin gerakan pelatihan teroris di Aceh Besar-. Berita lain di edisi itu juga mengangkat berita berjudul ***"Ba'Asyir Diincar Sejak Di Bulukumba"*** ,serta sejumlah berita terkait dengan aksi Ba'asyir yang diduga terkait aksi terorisme di Indonesia. Analisis wacana ini hendak menelaah bagaimana representasi terorisme yang dilakukan kelompok Islam Garis Keras di *Koran Tempo* di tahun 2010.

Mengapa memilih *Koran Tempo* sebagai media yang dijadikan objek penelitian dan bukan media lainnya? Pertimbangan utama dari pilihan ini mengingat *Koran Tempo* adalah bagian dari group *Tempo Media* yang selalu menegaskan posisi diri mereka sebagai penegak jurnalisme profesional, yang menjunjung tinggi etika jurnalistik, menjaga keseimbangan narasumber dan berupaya menjunjung cover both sides dalam pemberitaannya, tetapi dalam pemberitaan aksi terorisme pertimbangan itu tidak dilakukan. Pertimbangan yang lain, *Koran Tempo* adalah bagian dari *Tempo Group media* yang sudah berpengalaman di bidang jurnalistik, namun dari berbagai kritik yang ada, *Tempo* –begitu juga *Koran Tempo*-, sering dianggap sebagai media yang sinis dan apriori terhadap Islam dan aksi kelompok Islam garis keras dalam kaitan dengan aksi terorisme di Indonesia.

Media Dan Terorisme

Ada anggapan bahwa media massa dan terorisme memiliki kepentingan yang sama. Menurut Behm (dalam Prajarto, 2004:38) pada tingkat ini, teroris menyusun dan memanfaatkan strategi media mereka dan di pihak lain, media

menempatkan kepentingannya pada aktivitas kelompok teroris. Dalam relasi yang sedemikian itu, terorisme tidak boleh dipandang hanya sekedar sebagai bentuk kekerasan belaka, namun terorisme adalah wujud dari kombinasi antara propaganda dan kekerasan. Behm melihat bahwa pada satu sisi, nilai manfaat media massa dalam melakukan peliputan diakui dan diterima. Peliputan media terhadap akibat kekerasan terorisme, sebagai contoh, dipandang mampu memicu ketidaksukaan publik terhadap kelompok teroris. Selain itu, terbuka pula peluang bagi pemerintah dan media massa untuk bekerjasama menyusun strategi memerangi terorisme (Behm dalam Prajarto, 2004:38).

Sebagai contoh, Prajarto (2004:38) mengungkapkan ada sejumlah reaksi berbeda terhadap aksi peliputan terorisme. Reaksi terhadap peliputan media untuk aktivasi terorisme 9 september di Amerika Serikat, bom Bali, bom bunuh diri Intifada, kekerasan di Chechnya, dan beberapa peledakan bom lainnya di Indonesia pada dasarnya melengkapi kontroversi tentang siapa atau pihak mana yang lebih layak disebut sebagai teroris. Klaim dari sekutu Amerika Serikat cenderung menyebut terorisme dilakukan oleh pihak-pihak yang mengganggu kepentingan Amerika Serikat. Di sisi lain kelompok yang dituduh melakukan pembelaan diri dan balik menuduh Amerika Serikat beserta sekutunyalah yang lebih banyak menjalankan "aksi terorisme". Dan kontroversi terhadap peliputan media soal terorisme pun salah satunya berakar dari pertanyaan tentang media massa sebagai bagian atau malah salah satu kelompok itu.

Senada dengan Behm, sebenarnya ada dua kutub debat tentang peliputan media soal terorisme sebagaimana disampaikan oleh Norris, Kern dan Just (dalam Prajarto, 2004: 39). Mereka melihat bahwa pertama, media massa berada satu posisi dengan kelompok teroris dan peliputan media justru memicu munculnya aksi-kasi kekerasan yang lain, atau bisa juga yang kedua, media massa berada di samping pemerintah dalam

upaya memerangi terorisme. Norris dkk melakukan kajian lebih dalam dengan melakukan *analisis framing* yang melihat pilihan topik, sumber berita, bahasa dan gambar yang ditampilkan media. Kesimpulan mereka mengantar pada tiga hal pokok, pertama frame berita lebih banyak menyangkut soal keamanan nasional, bahaya dalam negeri dan ancaman luar, persepsi tentang '*world terrorism*' yang berlebihan dan kekuatan pengaruhnya terhadap opini publik.

Lantas bagaimana peran media? Media massa karena fungsi atau memang bidang aktivitasnya, pada gilirannya tampil dan turut berperan. Artinya, aktivitas terorisme bisa lebih dikenal, dipahami dan disikapi karena sebaran liputan media. Dengan kata lain, kecepatan, percepatan dan cakupan luas tebar informasi tentang terorisme bergantung pada kerja institusi media. Pada tingkat yang sama, masyarakat mengikuti perkembangan peristiwa terorisme bergantung pada media juga, sehingga media massa menciptakan dua ketergantungan : publisitas bagi teroris dan peliputan untuk masyarakat (Prajarto, 2004:47).

Bila aktivitas terorisme dipandang sebagai konflik yang terjadi antara kelompok teroris dan pihak yang ditarget, maka posisi media berita dalam konflik itu bisa digambarkan seperti berikut ini. Secara umum, media berita idealnya hanya bertindak sebagai '*story teller*' (pencerita) dengan menjawab formula 5 W + H (mencari *Who* (*siapa*), *What* (apa), *Where* (dimana), *When* (kapan), *Why* (kenapa) dan *How* (mengapa); menggunakan pertimbangan piramida terbalik, nilai berita dan lead yang memenuhi standar profesional jurnalistik (Prajarto, 1993:10). Dari konsep peran media menurut Prajarto ini, setidaknya kehadiran media massa dalam liputan terorisme tetap dipandang sebagai pihak ketiga.

Tapi itu peran yang ideal, dalam praktiknya media bisa saja melakukan pemihakan. Saat terjadi konflik antara kelompok

teroris dan sasaran yang ditarget, persoalan muncul ketika media massa mengambil peran memihak salah satu pihak. Dengan keberpihakan tertentu, sebagaimana diungkap Behm (1991) dalam karyanya *'Terrorism: Violence Againsts the public and the Media: The Australian Approach. Political Communication and Persuasion'* media massa cukup layak menuai hujatan. Tetapi sepanjang pekerja media tidak mampu menjaga prinsip kejujuran, verifikasi dan independensi serta tidak sekedar menjaga netralitas (Kovach dan Rosentiel, (2001:121-123) maka sifat partisan media sulit untuk dibantah dan di sisi lain layanan media untuk kepentingan publik semakin jauh dari kenyataan.

Representasi

Penelitian ini juga membahas konsep representasi dalam kaitannya dengan ideologi dan kebijakan media dalam pemberitaan terorisme. Stuart Hall menyebut representasi sebagai gambaran sesuatu yang akurat atau realita yang terdistorsi. Representasi tidak hanya berarti *"to present"*, *"to image"*, atau *"to depict"*. Menurut dia, "representasi" adalah sebuah cara dimana kita memaknai apa yang diberikan pada benda yang digambarkan.

Stuart Hall, dalam bukunya *'Representation : Cultural Representations and Signifying Practices'* (1997:28) menegaskan bahwa representasi adalah sebuah proses produksi dan pertukaran makna antara manusia atau antar budaya yang menggunakan gambar, simbol dan bahasa.

"Representation is the production of meaning through language", (Hall, 1997:28), artinya produksi makna justru melalui bahasa. Bahasa adalah media yang paling sering digunakan dalam produksi dan pertukaran makna melalui pengalaman-pengalaman yang ada dalam masyarakat.

Stuart Hall menggambarkan bahwa bahasa melukiskan relasi *encoding* dan *decoding* melalui metafora produksi dan konsumsi. Proses produksi meliputi proses gagasan, makna, ideologi dan kode social, ilmu pengetahuan, ketrampilan teknis, ideology professional, pengetahuan institusional, defenisi dan

berbagai asumsi lainnya seperti moral, kultural, ekonomis, politis dan spiritual.

Menurut Stuart Hall, ada tiga pendekatan representasi, (Hall, 1997:24-26) pertama pendekatan reflektif, yang menyebutkan bahwa makna diproduksi oleh manusia melalui ide, media objek dan pengalaman-pengalaman di dalam masyarakat secara nyata. Kedua, pendekatan Intensional, bahwa penutur bahasa baik lisan maupun tulisan yang memberikan makna unik pada setiap hasil karyanya. Bahasa adalah media yang digunakan oleh penutur dalam mengkomunikasikan makna dalam setiap hal-hal yang berlaku khusus yang disebut unik. Sedangkan ketiga, Pendekatan Konstruksionis, yang melihat bahwa pembicara dan penulis, memilih dan menetapkan makna dalam pesan atau karya (benda-benda) yang dibuatnya. Tetapi, bukan dunia material (benda-benda) hasil karya seni dan sebagainya yang meninggalkan makna tetapi manusialah yang meletakkan makna.

Sementara itu dalam buku "*Critical and Cultural Theory*" (2004 :83) karya Dani Cavallaro, disebutkan bahwa asal kata 'representasi' itu sendiri mendua. Bahasa latin *repraesentatio*-dimana kata representasi diturunkan,terkait dengan *praesens* berasal dari kata *praesense* yang berarti 'mendahului'. Kata kerja ini memiliki pengertian ganda yaitu secara spasial dan secara hierarkhis.Kata tersebut dapat merujuk pada orang atau objek yang 'mendahului' atau di muka seseorang atau sesuatu yang lain dalam ruang. Atau bisa berarti merujuk pada orang atau objek yang menjadi *superior* atas seseorang atau sesuatu yang lain dalam sebuah kekuasaan.

Dalam bidang retorika, menurut Dani Cavallaro (2004: 83) representasi mengacu pada kemampuan untuk membangkitkan sebuah impresi yang kuat terhadap kehadiran melalui kata-kata dan '*figure of speech*'. Sebagaimana Roman Quintilian (dalam Cavallaro, 2004:83) katakan, 'representasi' menunjukkan kepandaian memilih dan menentukan bahkan membuat benda-benda yang bersifat cemerlang dan menyolok sehingga merangsang imajinasi audiens. Menurut Dani,

kemampuan individual kita dan sekeliling kita berpengaruh pada apa dan bagaimana kita memahami dan pada bagaimana kita merepresentasikan apa yang kita alami terhadap pikiran kita dan mungkin terhadap orang lain. Mengapa ini penting? Ini karena kemampuan kita dan lingkungan kita memahami sesuatu bergantung pada variasi-variasi yang terkait seperti cahaya, cuaca, *mood* dan kecenderungan. Maka dari itu adalah tidak masuk akal menganggap bahwa kita dapat merepresentasikan dunia secara objektif.

Objektivitas adalah sebuah mitos yang dirancang untuk membuat kita percaya bahwa ada suatu cara yang tepat dalam melihat dan merepresentasikan realitas—dan karenanya bisa meminggirkan segala yang berbeda, yang lain dan yang jadi alternatif.

Sejak awal, tepatnya pada 1953, M.H Abrams (dalam Cavallaro, 2004:71) menyimpulkan perkembangan sikap dunia barat terhadap representasi dengan menggunakan metafor cermin dan lampu. Cermin meliputi gagasan bahwa pikiran bisa merefleksikan dunia luar, sedangkan 'lampu' mencakup ide bahwa pikiran memancarkan cahayanya sendiri pada objek yang dilihatnya.

Menurut Abrams, model cermin pernah berjaya hingga abad ke-18, sedangkan model 'lampu' mulai meraih momentum dengan datangnya romantisme. Lebih jauh lagi Cavallaro menegaskan bahwa citra pikiran yang semula dianggap sebagai alat yang bersifat pasif dan reproduktif itu lama-lama secara gradual digeser oleh anggapan bahwa citra pikiran sebagai kekuatan kreatif dan aktif. Saat ini, kata, kalimat, pemikiran dan gambaran adalah segenap representasi yang mengesankan sebuah hubungan antara dua hal. Tapi adanya hubungan tersebut tidak secara otomatis memerlukan adanya sesuatu hal yang direpresentasikan.

Menurut Dani Cavallaro, dunia tidak dapat direpresentasikan secara akurat dan objektif karena alasan bahwa dunia bukan sesuatu yang apa adanya melainkan efek dari bagaimana ia dipahami dari berbagai sudut pandang.

Bahkan, sesuatu yang seringkali dianggap 'nyata' tidaklah benar-benar nyata dan tidak dapat diraih. Kita hanya mengalaminya melalui perantaraan teks, citra dan cerita. Ketiganya tidak pernah mencerminkan realitas secara jelas dan netral melainkan merepresentasikannya dengan sungguh-sungguh sesuai dengan kode-kode dan konvensi-konvensi masyarakat tertentu. Dan kerap kali kita terpaksa menggunakan dengan setengah sadar atau bahkan tidak sadar. Artinya, kita kadang mengambil alih kode-kode dan konvensi-konvensi seolah kode dan konvensi itu merupakan perangkat yang natural dan bukan merupakan produk dari keputusan-keputusan yang sifatnya natural (Cavallaro, 2004:72).

Sementara itu Graeme dalam buku "*Yang Tersembunyi Di Balik Media*" (2008: 120) menilai representasi jelas merujuk pada deskripsi terhadap orang-orang yang membantu mendefinisikan kekhasan kelompok-kelompok tertentu.

Sependapat dengan Graeme, saat kita melihat sebuah kelompok yang khas misalnya 'teroris', kita juga merujuk pada penggambaran (yaitu representasi) pelbagai institusi misalnya 'ekstrimis, Pesantren, Islam garis keras'. Kata tersebut tidak hanya tentang penampilan di permukaan. Kata tersebut juga menyangkut makna-makna yang dikaitkan dengan penampilan yang dikonstruksi misalnya makna tentang pesantren dengan ajaran-ajaran yang keras dan juga seputar aksi terorisme.

Terkait dengan ideologi, Althusser menyatakan bahwa ideologi adalah sistem-sistem representasi. Ideologi mendefinisikan sistem representasi. Demikian juga terdapat pelbagai pandangan yang mengistimewakan wacana sebagai ungkapan ideologi dan yang melihat representasi sebagai wacana dalam praktik. Tindakan representasi menjadi perwujudan hubungan-hubungan kekuasaan dalam masyarakat, karena itu representasi menjadi ungkapan ideologi dan ungkapan wacana dan hal tersebut terutama menyangkut kekuasaan. Bahkan Adam Briggs dan Paul Cobley (1998) mendeskripsikan representasi sebagai 'kendaraan' untuk

menstransmisikan ideologi dalam melayani pemeliharaan dan perluasan hubungan kekuasaan.

Dari kacamata Graeme, representasi itu sangat ideologis artinya semua pihak dapat mengajukan argumen bahwa makna tentang subjek-subjek representasi adalah makna yang menyangkut siapa yang memiliki kekuasaan dan siapa yang tidak, juga persoalan bagaimana kekuasaan itu diterapkan dan nilai-nilai yang mendominasi cara berpikir tentang masyarakat dan hubungan-hubungan sosial.

Dalam buku ini istilah representasi mengacu pada konsep yang disampaikan oleh Theo Van Leeuwen lewat karyanya "*The Representation of Social Actors*" (dalam Caldas & Malcolm, 1996:32-69). Menurut Theo, bila kita ingin mencari makna tersirat dari sebuah berita maka mau tidak mau kita harus melihat bagaimana sebuah teks hadir atau dihadirkan menjadi sebuah kalimat. Artinya, dalam proses pemberitaan, suatu peristiwa kemudian direpresentasikan ke dalam teks berita. Dalam proses representasi mengubah kejadian tertentu menjadi susunan teks, bisa dilihat bagaimana cara wartawan menyampaikan sebuah kenyataan. Juga bisa dilihat bagaimana suatu kelompok mendominasi wacana dalam berita tersebut dan ada kelompok atau individu yang 'dikeluarkan' dalam pembicaraan. Menurut Theo, kelompok yang dianggap mendominasi wacana adalah, adanya kekuatan yang dimiliki oleh sebuah kelompok untuk memegang kendali penafsiran pembaca dari sebuah berita. Dalam teks berita, dominasi ini bisa berbentuk sebuah pencitraan media terhadap pelaku dan korban dalam sebuah berita. Misalnya, representasi, pencitraan para teroris atau orang-orang yang dianggap sebagai teroris, anak adalah golongan yang meresahkan masyarakat. Segala bentuk pencitraan seperti itu dilakukan hanya dengan merepresentasikan suatu kejadian yang benar terjadi menjadi susunan teks dengan pilihan kata dan bentuk kalimat. Salah satu agen terpenting dalam mendefinisikan kelompok adalah media. Dengan begitu media secara tidak langsung membentuk pemahaman dan kesadaran di kepala khalayak mengenai

sesuatu lewat pemberitaan yang terus menerus disebarkan. Ini berarti bahwa wacana yang dibuat oleh media itu punya peran dalam melegitimasi suatu hal atau kelompok dan mendelegitimasi atau memarginalkan kelompok lain.

Terkait dengan representasi, Theo van Leeuwen memperkenalkan sebuah model dalam analisis wacana, model analisis tersebut untuk mendeteksi atau mengetahui bagaimana sebuah kelompok hadir sebagai kelompok yang dimarginalkan.

Dalam model analisisnya, Theo Van Leeuwen menampilkan bagaimana pihak-pihak dan aktor (perorangan atau kelompok) ditampilkan dalam pemberitaan. Ada dua titik focus perhatian dalam melihat teks media. Pertama, Theo menyebut proses pengeluaran (*exclusion*) yaitu apakah dalam suatu teks berita ada kelompok atau aktor yang dikeluarkan dalam pemberitaan. Ini bisa dicontohkan misalnya dalam pemberitaan terorisme apakah kelompok yang 'dianggap' teroris diberi kesempatan yang sama atau tidak dalam pemberitaan, atau justru 'dikeluarkan' dalam pembicaraan. Makna dari pengeluaran seseorang atau aktor dalam pemberitaan adalah, media seakan-akan menghilangkan atau menyamarkan pelaku/aktor dalam berita, tidak dijelaskan siapa pelaku sebenarnya, apakah sungguh dia atau kelompok tersebut yang melakukan aksi terorisme. Bila itu terjadi maka media sudah melakukan eksklusi, dan hanya merepresentasikan pihak korban atau narasumber resmi dan mengabaikan informasi dari sisi yang lain.

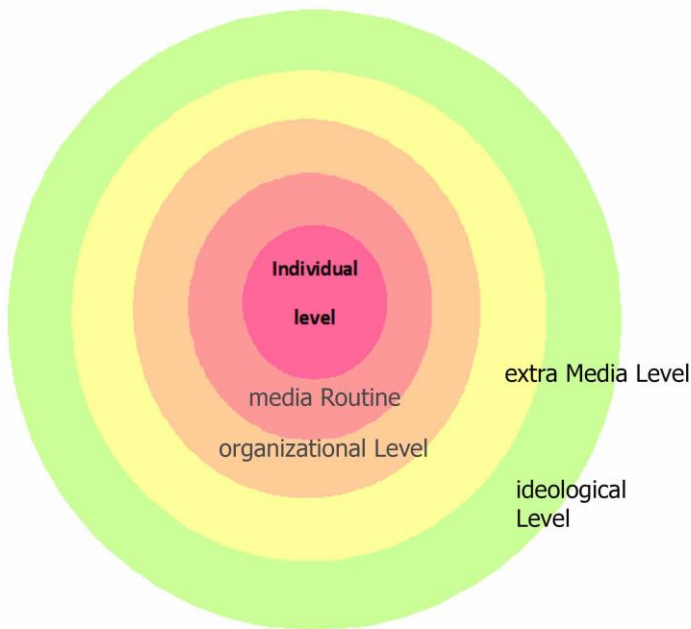
Secara tidak langsung proses Eksklusi (pengeluaran) ini bisa mengubah pemahaman pembaca tentang isu yang dibicarakan dan melegitimasi posisi pemahaman tertentu. Katakanlah dalam berita mengenai sebuah aksi pemberantasan terorisme yang melibatkan dua pihak yang berhadapan, apakah pemberitaan media kemudian mengeluarkan 'peran Densus 88', atau pelaku terorisme dari pemberitaan? Kalau ini yang terjadi maka hanya korban aksi terorisme yang ditonjolkan dalam suatu berita, sehingga kesan yang hadir kemudian bahwa teroris yang melakukan aksi kekerasan pantas mendapatkan tembakan hingga mati.

Proses yang kedua , menurut Theo Van Leeuwen adalah proses pemasukan (*inclusion*). Proses ini berhubungan dengan pertanyaan bagaimana seseorang atau kelompok aktor dalam suatu kejadian dimasukkan atau direpresentasikan dalam sebuah berita. Menurut dia, baik proses *eksklusi* maupun *inklusi* terdapat sebuah strategi wacana. Strategi wacana yang ditampilkan media dengan cara pemilihan kata, kalimat, informasi atau susunan bentuk kalimat tertentu, cara bercerita tertentu. Lewat strategi itu masing-masing kelompok direpresentasikan ke dalam sebuah teks.

Ideologi dan Nilai-nilai Berita

Istilah Ideologi diperkenalkan oleh filsuf Perancis Destutt de Tracy untuk menjelaskan ilmu tentang ide: yaitu sebuah disiplin ilmu yang memungkinkan orang untuk mengenali prasangka-prasangka dan bias-bias mereka. (Cavallaro, 2004:135). Konsep ideologi dapat digunakan sebagaimana Karl Marx (1818-1883) dan Friederich Engels (1820-1895) gunakan dalam *The German Ideology*, untuk menentang gagasan bahwa ide-ide sesungguhnya secara mandiri dapat mengembangkan konteks politik dan ekonomi tempat ide-ide itu diformulasikan.

Ideologi bisa juga dilihat sebagai nilai-nilai palsu yang digunakan untuk mengendalikan seseorang, atau sebagai ide-ide yang diunggulkan oleh kelas sosial, gender atau kelompok ras tertentu. Bisa juga ideologi dilihat sebagai nilai-nilai yang melanggengkan struktur kekuasaan yang dominan. Dengan begitu, ideologi dapat didefinisikan baik secara netral sebagai seperangkat ide tanpa konotasi-konotasi politis yang jelas, tetapi ideologi bisa juga dilihat secara kritis, sebagai seperangkat ide melalui mana orang membiasakan dirinya sendiri dan orang lain dalam konteks sosiohistoris yang spesifik, dan melalui mana kemakmuran kelompok-kelompok tertentu dikedepankan. (Cavallaro, 2004:137).



Sumber : Pamela J. Shoemaker dan Stephen D. Reese (1996),
dalam *Mediating The Message: Theories of Influences on Mass Media Content*

Bahkan Pamela J. Shoemaker dan Stephen D. Reese (1996), dalam ***Mediating The Message: Theories of Influences on Mass Media Content***, menyusun berbagai factor yang mempengaruhi konten media.

Menurut Pamela dan Reese, media, pada dasarnya menyajikan isi yang merupakan akumulasi dari pengaruh yang beragam. Kedua ahli ini mengungkapkan bahwa ada berbagai faktor yang diduga bisa mempengaruhi pengambilan keputusan dalam ruang pemberitaan soal isi media. Keduanya paling tidak mengidentifikasikan ada lima faktor. Kelima faktor itu mempengaruhi kebijakan redaksi dalam menentukan isi media.

Pertama, adalah Faktor individual. Faktor ini mempengaruhi isi terkait dengan latar belakang profesional dari pengelola media, khususnya para wartawan dan editor. Di Level individual, Pamela melihat bagaimana pengaruh aspek-aspek personal dari pengelola media, aspek-aspek pribadi dari wartawan ikut mempengaruhi pemberitaan yang akan ditampilkan kepada khalayak. Faktor ini berupa Latar belakang individu wartawan seperti umur, agama, jenis kelamin, dan perbedaan individual ini sedikit banyak mempengaruhi apa yang ditampilkan media. Begitu juga Latar belakang pendidikan, atau kecenderungan keberpihakan seseorang wartawan dalam politik, atau orientasi pada partai politik sedikit banyak bisa mempengaruhi apa yang ditulis sang wartawan tersebut,

Faktor kedua adalah **Rutinitas media**, berhubungan dengan mekanisme dan proses penentuan berita. Setiap media umumnya mempunyai ukuran sendiri tentang apa yang disebut berita, apa ciri-ciri berita yang baik, atau apa kriteria kelayakan berita. Ukuran tersebut adalah rutinitas yang berlangsung tiap hari dan menjadi prosedur standar bagi pengelola media yang berada di dalamnya. Rutinitas media ini juga berhubungan dengan mekanisme bagaimana berita dibentuk. Ketika ada sebuah peristiwa penting yang harus diliput, bagaimana bentuk pendelegasian tugasnya, melalui proses dan tangan siapa saja tulisan sebelum sampai ke proses cetak, siapa penulisnya, siapa editornya, dan seterusnya.

Faktor ketiga adalah faktor **Organisasi media**. Level organisasi berhubungan dengan struktur organisasi yang bisa mempengaruhi pemberitaan. Pengelola media dan wartawan bukan orang tunggal yang ada dalam organisasi berita, ia sebaliknya hanya bagian kecil dari organisasi media itu. Masing-masing komponen dalam organisasi media bisa jadi mempunyai kepentingan sendiri-sendiri. Di dalam organisasi media, misalnya, selain bagian redaksi ada juga bagian pemasaran, bagian iklan, dan bagian lain yang saling melengkapi. Masing-

masing bagian tersebut tidak selalu sejalan. Mereka mempunyai tujuan dan target masing-masing, sekaligus strategi yang berbeda untuk mewujudkan target tersebut. Bagian redaksi misalnya menginginkan agar berita tertentu yang disajikan, tetapi bagian sirkulasi menginginkan agar berita lain yang ditonjolkan karena terbukti dapat menaikkan penjualan. Pada tingkat individu dari pekerja media seperti wartawan, redaktur secara personal, karakteristik individu (seperti jenis kelamin, etnis, dan orientasi seksual) dan latar belakang dan pengalaman pribadinya (seperti pendidikan, agama dan status sosial ekonomi orang tua) tidak hanya membentuk sikap, nilai dan kepercayaan pribadi individu, namun mengarahkan latar belakang dan pengalaman profesionalnya. Pengalaman profesional ini akan membentuk peranan dan etika profesionalnya. Peran etika profesional ini memiliki efek langsung terhadap isi media juga mempunyai tujuan dan filosofi organisasi sendiri

Faktor lainnya adalah pengaruh *extra media*. Pada tingkat ini faktor-faktor yang mempengaruhi content media antara lain sumber-sumber informasi yang dijadikan isi media (seperti kelompok kepentingan dalam masyarakat), sumber-sumber pendapatan media (seperti pengiklan dan khalayak) serta institusi sosial lainnya (seperti pemerintah).

Kemudian pengaruh lain yang juga penting adalah di *level ideologi*. Pada tingkat ideologi, yang ingin diamati adalah bagaimana media berfungsi sebagai kepanjangan kepentingan kekuatan dominan dalam masyarakat, bagaimana rutinitas media, nilai-nilai dan struktur organisasi bisa berjalan di dalamnya.

Media meliputi semua alat dan saluran-saluran informasi dan seni pertunjukan (Wilkinson, 1997). Dengan demikian, media termasuk televisi, layar bioskop, atau dalam bentuk dokumen, teater, musik, surat kabar, majalah, buku, fotografi, dan seni-seni visual lain. Dapat diargumentasikan bahwa jika

media sebagai institusi mengomunikasikan ideologi kepada para audiensnya, maka berita sebagai operasi khusus dalam media adalah pembawa ampuh ideologi, termasuk di dalamnya ideologi terorisme atau ideologi anti terorisme.

Graeme melihat mengapa ideologi merupakan sesuatu yang dibawa oleh media dikarenakan bahwa berita diduga termasuk ke dalam sesuatu yang disebut sebagai fakta, sebagai lawan dari fiksi. Hal ini juga disebabkan karena pokok persoalan berita adalah aktivitas politik, peristiwa-peristiwa ekonomi dan perilaku sosial. Berita tidak dapat membantu melaporkan penerapan kekuasaan dan hampir tidak mengejutkan bahwa berita memiliki pelbagai pandangan (meskipun bisa saja tersembunyi) terhadap kekuasaan. Secara umum, berita menyokong ide-ide seperti aturan hukum melalui lembaga peradilan, keutamaan alami keluarga sebagai suatu unit sosial dan pelbagai definisi tentang teroris seperti yang diungkapkan oleh pemerintah.

Sedangkan berita adalah sesuatu yang diproduksi seperti halnya banyak media yang lain. Gagasan bahwa berita itu digali dari 'tambang kebenaran' seringkali harus dipertanyakan kembali, meskipun sering dianggap sebuah metafora yang menarik bagi para wartawan yang memberi tekanan untuk mendapatkan cerita yang nyata dan upaya mendapatkan fakta apa adanya.

Produksi berita adalah proses kolaboratif dimana tim dipersatukan oleh otoritas editor, oleh pemahaman yang sama terhadap nilai-nilai dan oleh suatu pemahaman terhadap peran-peran dalam tim. Dalam argumen Graeme, para editor pers sensitif terhadap sikap-sikap pemilik mereka, terhadap kompetisi untuk menyajikan berita lebih dulu dibanding surat kabar atau media lain dan terhadap pandangan para pembaca mereka. Para editor media khususnya media penyiaran saat ini memiliki sensitivitas serupa meskipun mereka bertanggungjawab kepada

Pemrednya bukan kepada pemilik usaha penerbitan mereka. Dan berita diproduksi dalam kerangka pandangan dalam hal praktik-praktik kerja dari sekelompok orang.

Michael Schudson (1996) ketika merujuk kepada pelbagai keberatan para pembuat berita terhadap frase seperti konstruksi sosial terhadap realitas membela pandangan sosiologis tersebut dengan mengatakan : "kita tidak mengatakan bahwa para wartawan memalsukan berita, kita mengatakan bahwa para wartawan tersebut 'membuat' berita. (Dalam Graeme, 2008:107).

Gaye Tuchman (1978) seperti yang dirujuk oleh Schudson mendeskripsikan berita sebagai informasi yang relevan yang dikumpulkan oleh pelbagai metode yang divalidasi secara profesional. Dan proses pembuatan berita adalah proses yang mengalir dari kontak pertama dengan sumber berita menuju waktu ketika berita muncul di halaman atau layar. Dan ada konsep penting yang mesti dipahami mereka yang bergerak di media yakni kepekaan melihat adanya nilai-nilai berita.

Proses selektif pengumpulan dan penyuntingan berita—termasuk juga berita-berita seputar aksi terorisme—secara fundamental ditentukan oleh asumsi-asumsi para pembuat berita tentang pokok pikiran yang dianggap bernilai atau tidak untuk dijadikan berita, yang sering disebut sebagai nilai-nilai berita (*news values*). Nilai ini dapat diungkapkan menurut kepentingannya bagi masyarakat. Tetapi di sisi yang lain nilai berita tersebut dapat dilihat sebagai tolak ukur kepentingan ideologis. Kondisi ini secara kritis bisa menimbulkan pertanyaan, hal ini penting bagi siapa? Berharga bagi siapa dan mengapa berita itu dianggap berharga?

Terkait dengan nilai-nilai berita, ada banyak definisi dari berbagai ahli, tetapi yang penting disimak adalah pendapat John Galtung dan Mari Ruge (1970) sebagaimana diungkap oleh

Briggs,A dan P Cobley (dalam Graeme,2008:111). Untuk lebih jelasnya bisa lihat Tabel berikut ini :

Tabel 2.3
Nilai-nilai berita

NILAI-NILAI BERITA/ KELAYAKAN BERITA	
<i>Frekuensi</i>	Peristiwa tersebut harus dimulai dan diakhiri dengan siklus publikasi dari organisasi yang melaporkannya. Sebagai contoh peristiwa terorisme akan diulang-ulang dan diperbanyak frekuensinya oleh media karena dianggap amat bernilai bagi audiens
<i>Ambang Batas</i>	Peristiwa tersebut harus melewati ambang batas ukuran soal kualitas agar kepentingan yang memadai layak jadi berita. Ada ambang batas, apakah sebuah peristiwa atau aksi terorisme itu layak jadi pemberitaan dari sisi kualitasnya
<i>Kedekatan Budaya</i>	Peristiwa tersebut harus bermakna bagi audiens organisasi berita yang dimaksudkan. Artinya semakin dekat audiens dengan peristiwa yang terjadi misalnya kasus peledakan bom di Bali bagi warga atau audiens di Indonesia amatlah bernilai dan memiliki kedekatan baik sosial, politik dan budaya
<i>Kejelasan</i>	Peristiwa tersebut harus secara relatif menjelaskan apa yang sebenarnya tengah terjadi. Artinya, pemberitaan soal terorisme akan memberi kejelasan bagi masyarakat yang tidak mengalami hal tersebut secara langsung. Media menjadi mata dan kaki tangan audiens untuk mendapatkan kejelasan mengenai apa yang sesungguhnya terjadi

<i>Kesesuaian</i>	Peristiwa tersebut harus sesuai dengan kerangka pemahaman yang melambangkan budaya audiens yang sesuai. Dalam pemberitaan kasus terorisme yang terjadi di Indonesia media menggunakan kata-kata, kalimat serta istilah-istilah yang mempunyai kesesuaian dengan budaya dan pemahaman audiens
<i>Ketidakterdugaan</i>	Peristiwa itu bernilai karena ada unsur ketidakterdugaan atau jarang terjadi
<i>Kontinuitas</i>	Jika suatu berita telah diberitakan, terdapat kemungkinan yang cukup besar bahwa peristiwa tersebut akan terus diberitakan. Artinya media massa akan memenuhi kebutuhan audiens untuk mencari 'kelanjutan' atau followup' dari berita-berita sebelumnya yang sudah membetot perhatian mereka
<i>Komposisi</i>	Liputan pelbagai peristiwa untuk sebagian ditentukan oleh struktur internal dari organisasi pengumpul berita. Para wartawan dan editor di media mempunyai pengaruh yang besar dalam memutuskan mana berita-berita yang layak mana yang tidak lewat sebuah proses kerja redaksional termasuk juga saat menentukan apakah kasus terorisme dan kekerasan bernafaskan sentimen agama itu layak atau tidak untuk disiarkan
<i>Tindakan-tindakan kelas elit</i>	Peristiwa yang melibatkan orang atau organisasi elit lebih mungkin untuk diliput daripada yang melibatkan orang atau organisasi yang tidak penting. Ini berarti media akan mementingkan atau memprioritaskan mengalirnya pendapat atau peristiwa yang melibatkan kehadiran atau keterlibatan elit-elit masyarakat yang berpengaruh pada terciptanya opini publik
<i>Personifikasi</i>	Peristiwa yang dapat dilihat berkaitan dengan orang-orang secara individual lebih mungkin untuk diliput daripada abstraksi-abstraksi yang

	tidak jelas. Artinya media akan menyentuh unsur-unsur manusiawi yang akan 'menguras' air mata audiens atau khalayak lewat upaya personifikasi misalnya dengan menggambarkan lebih detil dan personal soal keluarga korban atau bahkan korban luka berat yang menjadi korban kebiadaban aksi terorisme di Indonesia
<i>Negativitas</i>	Peristiwa-peristiwa lebih buruk lebih layak berita ketimbang peristiwa-peristiwa yang baik. Ini berarti media massa akan mengelaborasi dan mengeksploitasi pemberitaan-pemberitaan yang sifatnya sensasional dan punya dampak-dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat

Dalam penelitian yang menyangkut pemberitaan soal terorisme ini, persoalan nilai berita apakah itu frekuensi (mengingat seringkali media mengulang-ngulang berita yang sama) atau nilai yang lain menjadi salah satu bahan analisis yang komprehensif menggunakan analisis wacana.

Selain nilai-nilai berita sebagaimana disebut Galtung di atas, yang tak kalah penting adalah agenda berita dari media yang bersangkutan. Ide tentang berita yang menetapkan agenda cerita untuk konsumsi publik berkaitan dengan nilai-nilai. Item-item akan muncul dalam agenda sebuah media justru karena mereka begitu bernilai. Agenda tersebut dapat diidentifikasi melalui pelbagai pendekatan penelitian baik seperti analisis Isi dan analisis wacana sebagaimana dipilih dalam penelitian ini. Argumen penting dalam konsep agenda media adalah bahwa apa saja yang dianggap sebagai hal yang penting –termasuk juga soal terorisme—akan berbanding lurus di tengah masyarakat yang akan melihatnya sebagai suatu yang penting. Atau paling tidak apa yang dilontarkan oleh media

merupakan bahan yang memadai untuk menjadi alat pertarungan wacana di tengah masyarakat.

Sembilan Elemen Jurnalisme

Sebuah media massa yang baik tentunya menerapkan proses dan etika kerja yang baik juga. Ada sembilan elemen penting dalam dunia jurnalisme yang ditawarkan oleh Bill Kovach. Wartawan ujarnya merupakan sebuah profesi, dan ketika seorang ingin menjadi wartawan yang profesional, tentulah dia harus mematuhi kode etik jurnalistik. Menurut Bill Kovach dan Tom Rosentiels (2001) ada sembilan elemen jurnalistik yang menjadi standar perilaku wartawan dan menjadi basic sebuah jurnalisme.

Keseluruhan elemen ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain karena semuanya mempunyai kedudukan yang sama, tidak bisa hanya salah satu elemen saja yang dipatuhi oleh wartawan.

Elemen penting yang pertama adalah ***kewajiban utama jurnalisme adalah pencarian kebenaran***. Artinya sebagai seorang wartawan dia harus selalu menjunjung kebenaran. Dalam hal ini kebenaran yang dijunjung, adalah kebenaran secara fungsional yang sesuai dengan tugasnya seorang wartawan.

Kebalikannya, bila wartawan tidak menjunjung faktor kebenaran dalam liputannya, tentu saja dia akan merugikan banyak pihak, terutama publik yang menjadi korban dari pemberitaan itu. Bila elemen pertama ini dianggar maka akan berdampak pada perusahaan yang bisa kehilangan harga diri sebagai media yang seharusnya menyampaikan kebenaran.

Menurut Kovach, kebenaran dalam jurnalisme sangat sakral maknanya. Sehingga Wartawan wajib bertanggung jawab pada publik atas kebenaran yang disampaikannya. Jadi apapun yang terjadi di lapangan kebenaran adalah hal yang utama yang harus disampaikan oleh wartawan. Untuk mendapat sebuah kebenaran merupakan sebuah resiko yang dilakukan oleh seorang wartawan, mengingat proses untuk mendapatkan

kebenaran itu memerlukan waktu yang panjang. Dia benar – benar dituntut untuk bekerja keras. Medan yang terjal tak jarang ditemui oleh wartawan dalam proses peliputan. Perlu keterampilan – keterampilan khusus wartawan dalam melakukan peliputan dengan narasumber yang berbeda-beda, dari mulai wartawan pemula sampai yang profesional. Namun, bagaimanapun wartawan harus bertanggung jawab atas berita yang disampaikannya yang tentunya harus mutlak benar.

Elemen kedua, adalah ***loyalitas utama jurnalisme adalah pada warga negara***. Menurut Kovach, loyalitas wartawan seharusnya berujung pada publik, sebagai pembaca dari apa yang kita beritakan. Yang harus selalu diingat oleh wartawan adalah bagaimana membuat suatu berita yang menarik bagi pembaca yang menjunjung kebenaran, dan bagaimana bertanggung jawab pada publik jika berita yang dibuat hanya fiktif padahal sudah jelas yang akan membaca suatu media bukan hanya sekelompok orang, tapi semua orang di bangsa ini bahkan di seluruh dunia.

Begitu juga, media yang jujur, yang lebih mementingkan kepentingan publik justru lebih menguntungkan perusahaan tersebut, tak hanya soal prestisius, tapi soal financial juga menjadi lebih baik. Kepercayaan yang diberikan publik pada media bisa saja hilang akibat satu berita bohong dari oknum wartawan.

Elemen ketiga berbunyi : ***Esensi jurnalisme adalah disiplin verifikasi***. Artinya dengan adanya disiplin verifikasi yang dilakukan wartawan upaya menyampaikan berita yang fiktif tidak akan terjadi. Jurnalis harus bisa menentukan batas antara fiksi dan jurnalisme yang jelas, artinya jurnalisme tidak bisa digabungkan dengan fiksi. Semua yang disampaikan wartawan dalam pemberitaannya harus fakta dan nyata. Menurut Kovach verifikasi itu bersifat personal, oleh karenanya masalah yang hadir adalah standar verifikasi sendiri. Dan ini soal objektivitas sebuah berita biasanya sering dikaitkan dengan didiplin verifikasi itu sendiri.

Kovach dan Rosenstiel menawarkan lima konsep dalam mencari verifikasi: pertama, wartawan jangan menambah atau mengarang apa pun; jangan menipu atau menyesatkan pembaca, pemirsa, maupun pendengar; bersikaplah setransparan dan sejujur mungkin tentang metode dan motivasi anda dalam melakukan reportase; bersandarlah terutama pada reportase Anda sendiri; Bersikaplah rendah hati.

Sementara soal bagaimana metode efektif dalam melakukan verifikasi itu. Pertama, wartawan atau editor melakukan penyuntingan secara skeptis. Kedua, semua pihak memeriksa akurasi. Ketiga, wartawan jangan percaya pada sumber-sumber resmi begitu saja. Keempat, wartawan selalu melakukan pengecekan fakta.

Elemen keempat, ***Jurnalists harus menjaga independensi dari objek liputannya.*** Artinya saat melakukan suatu peliputan, wartawan harus benar-benar independen, melakukan peliputan secara objektif. Tidak terpengaruh pada apapun, kepentingan siapapun, kecuali kepentingan bahwa sebagai wartawan harus menyampaikan berita yang benar – benar terjadi untuk disampaikan pada masyarakat. Tidak peduli siapapun, apapun. Bahkan jika itu menyangkut keluarga sendiri, dan wartawan harus memberitakannya jangan anggap itu keluarga. Wartawan harus bertanggung jawab pada publik itu penting dan harus selalu di ingat. Lebih jauh lagi semangat independensi harus dijunjung tinggi oleh setiap wartawan. Dengan menjunjung kebenaran seperti inilah yang membedakan wartawan dengan profesi lainnya.

Elemen kelima ***Jurnalists harus membuat dirinya sebagai pemantau independen dari kekuasaan.*** Dalam tugasnya memantau kekuasaan, bukan berarti wartawan harus menghancurkan kekuasaan. Namun wartawan bertugas sebagai pemantau kekuasaan yaitu ikut menegakkan demokrasi. Salah satu cara wartawan memantau ini dengan melakukan investigatif reporting. Inilah yang sering menjadi masalah antar wartawan dengan penguasa. Ini yang sering memperbesar konflik antara

wartawan dan penguasa, karena biasanya banyak penguasa yang enggan privasi tentang dirinya dipublikasikan sedangkan itu harus diketahui oleh rakyat. Dalam melakukan investigasi terhadap sebuah kasus, seharusnya media melakukan dengan hati – hati. Artinya, wartawan harus super teliti melakukan penelusuran narasumber dan fakta-fakta yang hendak ditulisnya.

Elemen keenam, ***Jurnalis harus memberi forum bagi publik untuk saling kritik dan menemukan kompromi.*** Ini berarti bahwa saat melakukan tugasnya, seorang wartawan yang bertanggung jawab pada publik harus mendengarkan apa keinginan publik itu sendiri. Di sisi ini, Wartawan harus terbuka pada publik untuk mendengarkan segala sesuatunya. Jadi jika ada anggota publik yang ingin lebih mengetahui dalam sebuah kasus bisa menanyakannya langsung ke media. Via komunikasi media dengan publik seperti surat pembaca. Atau di media elektronik, terdapat alamat fax atau nomor telepon yang disediakan untuk menanggapi atau memberikan komentar.

Elemen ketujuh, ***Jurnalis harus berusaha membuat hal yang penting menjadi menarik dan relevan.*** Menurut Kovach, wartawan harus tahu tentang komposisi, tentang etika, tentang naik turunnya emosi pembaca dan sebagainya. Ini berarti berita yang dibuat jangan sampai membosankan bagi pembaca. Jangan sampai berita yang penting jadi tidak penting karena pembaca bosan. Berita itu dibuat tidak membosankan dan harus memikat tetapi tetap relevan. Ironisnya, dua faktor ini justru sering dianggap dua hal yang bertolak belakang. Terkadang, laporan yang memikat dianggap laporan yang lucu, sensasional, menghibur, dan penuh tokoh selebritas Tapi laporan yang relevan dianggap kering, angka-angka, dan membosankan.

Elemen ke delapan, ***Jurnalis harus membuat berita yang komprehensif dan proporsional.*** Artinya jurnalis perlu membuat berita secara profesional dan proposional dan untuk itu perlu banyak hal yang dilakukan untuk mendapatkan dan membuat berita semacam itu. Di lapangan, jurnalis tidak hanya menerima fakta yang mudah diraih. Harus ada sesuatu yang menantang dari pekerjaan wartawan pelaporan ivestigasi

mewakili berita yang komprehensif dan proposional ini. Wartawan harus tahu bagaimana caranya melaporkan suatu hal yang bermutu. Berita yang komprehensif bukan berita yang hanya punya judul sensasional karena berita macam itu hanya akan memalukan wartawan dan media yang menerbitkannya.

Elemen ke sembilan ***Jurnalis harus diperbolehkan untuk mendengarkan hati nurani pribadinya.*** Jangan hanya sebuah berita, hati nurani diabaikan karena segala sesuatu yang berasal dari hati nurani akan lebih baik dari apapun. Dari persoalan yang terjadi didalam kehidupan wartawan jawabannya adalah bersumber pada hati nurani. Di sisi lain, jurnalis yang berbohong, melakukan fiktifikasi narasumber pasti tidak bersumber pada hati nurani. Setiap jurnalis harus menetapkan kode etiknya sendiri, punya standarnya sendiri dan berdasarkan model itulah si wartawan membangun karakter dan melakukan pekerjaannya. Menjalankan prinsip semacam ini memang tidak mudah karena membutuhkan suasana kerja yang aman dan nyaman, yang bebas dimana setiap orang bisa berpendapat.

Konstruksi realitas dalam media Massa

Berita terorisme adalah realitas yang disampaikan wartawan ke publik lewat serangkaian proses produksi dan penerimaan makna. Penerimaan makna dari pesan yang disampaikan wartawan –sebagai komunikator–melalui media massa oleh individu pembaca ditentukan oleh produksi dan penerimaan makna serta negosiasi makna diantara para praktisi media, dan pembaca pesan dalam proses dialektis pembentukan makna. Para pelaku sosial itu, saat menyampaikan pesan sesuai dengan sistem kode dan perspektif yang seringkali dipengaruhi oleh ideologi dan bahasa masing-masing saat berinteraksi satu sama lain. Dalam proses dialektis pembentukan makna, banyak faktor yang bisa mempengaruhi pembentukan makna. Bahkan bisa disimpulkan ada banyak faktor selain teks itu sendiri, pribadi individu wartawan atau editor pembuat berita, *media routine* dan

ekstra media serta ideologi yang melingkupi proses produksi dan penyampaian pesan. Pada tahap internalisasi realitas sosial, realitas yang diterima oleh kesadaran pembaca berupa realitas objektif yang sebenarnya juga merupakan realitas subjektif. Di sini ideologi dan sistem tanda yang digunakan penguasa –dalam pemberitaan terorisme diwakili Kepolisian- ketika menyampaikan pikiran dan gagasan-gagasannya kepada pembaca tertanam dalam kesadaran individu pembaca. Sedangkan isi media dipengaruhi nilai-nilai budaya penguasa sebagai komunikator atau sumber berita dan dipengaruhi juga pola hubungan institusi media dengan kekuasaan.

Perspektif konstruksi sosial dikembangkan oleh Peter L. Berger, dan Thomas Luckmann dalam buku klasik berjudul *'The Social Construction Of Reality. A treatise in the sociology of Knowledge (1990: 304)*. Menurut mereka, berita surat kabar bisa dipandang sebagai tahap kedua dalam proses sosial konstruksi realitas yakni objektivasi. Isi berita pada dasarnya menunjukkan bagaimana realitas subjektif yang dikonstruksi oleh komunikator atau sumber berita yang dinilai oleh praktisi media. Atau dengan kata lain, bagaimana praktisi media melakukan objektivikasi, signifikasi atau penilaian terhadap suatu realitas, dalam hal ini tentang aksi terorisme. Penilaian awak media itu dilakukan melalui bahasa atau tanda-tanda sebagai isyarat atau indeks bagi makna-makna subjektif yang sebelumnya sudah dikonstruksi oleh komunikator. Berger juga mengungkapkan bahwa dalam proses sosial mengkonstruksi suatu realitas, surat kabar berperan sebagai perantara bagi pertemuan sistem kode dan perspektif bagi para pelaku sosial.

Jurnalisme Advokasi

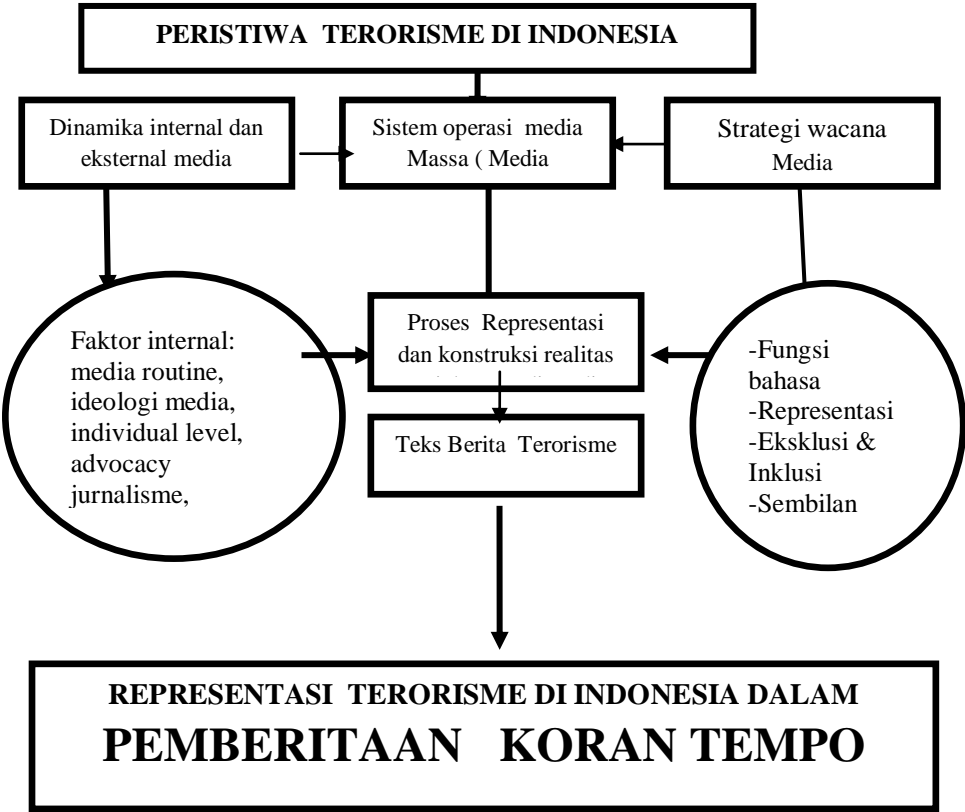
Terkait dengan pemberitaan Koran Tempo, perspektif jurnalisme baru yang memadukan segala unsur untuk 'advokasi' perlu dikemukakan. Jurnalisme Advokasi adalah *genre jurnalisme* baru yang secara sengaja dan transparan mengadopsi sudut pandang yang non objektif, biasanya dilakukan untuk kepentingan sosial dan politik yang khusus sebagaimana

pemberitaan soal terorisme yang dianggap sebuah aksi yang perlu dilawan oleh berbagai pihak termasuk oleh media massa. Secara tradisional, *advocacy journalism* ini ditempatkan dalam tajuk rencana atau opini resmi dari koran yang bersangkutan, tetapi ada kalanya berbentuk pemberitaan soal isu-isu khas yang menyangkut persoalan penting di tengah masyarakat. (Berman, 2004).

Meski begitu, Sue Careless dalam artikel berjudul "*advocacy journalism*" dalam Interim, (2000) menjelaskan rambu-rambu penerapan *advocacy journalism* ini di antaranya harus mengungkapkan sikap atau perspektif ini sejak awal, jujur berdasarkan kenyataan, akurat dan bisa dipercaya.

"Don't spread propaganda, don't take quotes or facts that out of context, don't fabricate or falsify and don't judge or suppress vital facts or present half truths" ujar Sue saat berpidato di depan Asosiasi jurnalis Kanada pada tahun 2000. Artinya meskipun tujuannya untuk melakukan advocacy, tetapi tetap saja jurnalis memperhatikan kebenaran, tidak hanya menyebarkan propaganda tak berdasar dan jauh dari kenyataan

Kerangka Kerja Teori (*Theoretical Framework*) studi liputan Terorisme di Media



BAB III

ANALISIS WACANA DAN TERORISME

Tiga pendekatan melihat wacana terorisme

Dalam Mengkaji tentang kecenderungan media dalam memberitakan satu isu, ada tiga pendekatan yang relevan untuk itu. Metode Analisis Isi (*Content Analysis*), Analisis Wacana (*Discourse Analysis*), dan Analisis Bingkai (*Framing Analysis*). Dalam buku ini peneliti menggunakan metode analisis wacana Theo Van Leeuwen. Theo van Leeuwen memperkenalkan sebuah model dalam analisis wacana, model analisis tersebut untuk mendeteksi atau mengetahui bagaimana sebuah kelompok hadir sebagai kelompok yang dimarginalkan.

Analisis van Leeuwen menampilkan bagaimana aktor dan pihak-pihak (perorangan atau kelompok) ditampilkan atau tidak ditampilkan dalam pemberitaan. Ada dua titik focus perhatian dalam analisis wacana ini. Pertama, Theo menyebutnya sebagai proses pengeluaran (*exclusion*) yaitu apakah ada kelompok atau aktor yang dikeluarkan dalam pemberitaan. Yang dimaksudkan dengan pengeluaran seseorang atau aktor dalam pemberitaan adalah, ketika media mencoba menghilangkan atau menyamarkan pelaku/aktor dalam berita, sehingga dalam berita korbanlah yang menjadi perhatian berita.

Secara tidak langsung proses eksklusi itu bisa mengubah pemahaman khalayak akan suatu isu dan

melegitimasi posisi pemahaman tertentu. Sebagai contoh dalam proses pemberitaan aksi terorisme yang menimbulkan korban nyawa warga yang terkena ledakan bom, seringkali media tidak menggambarkan siapa pelaku secara detil, tetapi hanya mementingkan posisi korban. Bahkan di sisi yang lain, kalau ada aksi penindakan tegas oleh kepolisian (Densus 88 Anti Teror) siapa yang menindak sengaja dikaburkan, seakan para teroris yang tertembak itu memang layak ditembak karena mereka melakukan aksi kekerasan yang menimbulkan korban nyawa warga yang tak bersalah.

Proses yang kedua menurut Theo adalah proses pemasukan (*inclusion*). Proses ini sebenarnya adalah berlawanan dengan proses eksklusi. Proses Inklusi ini berhubungan dengan pertanyaan bagaimana seseorang atau kelompok aktor dimasukan atau ditampilkan atau direpresentasikan ke dalam sebuah berita. Menurut Theo baik *exclusion* maupun *inclusion*, terdapat sebuah strategi wacana. Dengan menggunakan kata, kalimat, informasi atau susunan bentuk kalimat tertentu, cara bercerita tertentu, masing-masing kelompok direpresentasikan ke dalam sebuah teks.

Analisis Wacana Theo Van Leeuwen

Model penelitian untuk level teks adalah analisis wacana Theo Van Leeuwen yang mendasarkan analisis pada dua proses penting yakni Eksklusi dan Inklusi.

Tabel 3.1
Skema penelitian metode Analisis Wacana Theo Van Leeuwen

Focus kajian	strategi	Penjelasan	Unit analisis	Yang ingin dilihat
eksklusi	pasivasi	Proses bagaimana satu kelompok atau aktor tertentu tidak dilibatkan dalam wacana	Teks berita	<i>a.apakah ada aktor (seseorang /kelompok) yang coba dihilangkan atau disembunyikan dalam pemberitaan?</i>
	nominalisasi	Strategi yang berhubungan dengan mengubah verba dan dengan demikian menghilangkan aktor atau subjek dalam wacana	Struktur kalimat	<i>b.bagaimana strategi yang diajukan untuk menyembunyikan atau menghilangkan aktor tersebut dalam wacana</i>
	Penggantian anak kalimat	Penggantian subjek juga bisa dilakukan dengan penggantian anak kalimat	Anak kalimat	
Inklusi	Diferensiasi-indiferensiasi	Suatu representasi kehadiran aktor secara	Teks berita	Dari aktor sosial yang disebut dalam

		unik atau khas, atau bisa ditampilkan secara kontras dengan menampilkan aktor lain		wacana, bagaimana mereka ditampilkan ? dan dengan strategi apa pemarjinalan atau pengucilan itu dilakukan
	Objektiva si-abstraksi	Apakah informasi mengenai suatu peristiwa atau aktor sosial ditampilkan dengan memberi petunjuk yang konkret ataukah yang ditampilkan adalah abstraksi	Teks berita, kalimat	Misalnya dalam berita terorisme, kalau pelaku terorisme disebut, bagaimana caranya? Apakah penggambaran tersebut berkaitan dengan proses marginalisasi atau pengucilan atas aktor tersebut
	Nominasi katagorisasi	Apakah aktor ditampilkan apa adanya ataukah dibuat sesuai dengan katagorisasinya seperti agama, ciri fisik dan	Teks berita, kalimat	

	sebagainya	
Nominasi-indentifikasi	Hampir sama bagaimana suatu kelompok, peristiwa atau tindakan tertentu didefinisikan, namun dalam indentifikasi dilakukan dengan memberi anak kalimat	Teks berita, kalimat
Determinasi-interdenominasi	Apakah aktor digambarkan secara jelas atau anonim. Biasanya anonimitas ini terjadi karena wartawan belum mendapatkan bukti yang kuat untuk menulis, sehingga lebih aman ditulis anonim	Teks berita, kalimat
Asimilasi individualisasi	Apakah aktor ditampilkan dengan jelas katagorinya	Teks berita, kalimat

		atau tidak.	
	Asosiasi-disosiasi	Strategi yang berhubungan dengan pertanyaan apakah aktor ditampilkan 'sendiri' atau justru terkait dengan kelompok yang lebih besar	Teks berita, kalimat

Diadaptasi dari karya Theo Van Leeuwen " *The Representation of Social Actors*" (dalam Caldas & Malcolm, 1996:32-69)

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara mendalam dengan pihak media untuk bisa mendapatkan bagaimana praktik wacana di dalam media, Dan melakukan proses Intertekstualitas dengan mengaitkan konteks makro yakni konteks sosial budaya yang terkait dengan proses pemberitaan media soal aksi terorisme di *Koran Tempo*.

Pendekatan Kualitatif melihat terorisme

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sedangkan jenisnya adalah penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan salah satu bentuk dalam menemukan kebenaran atau untuk lebih membenarkan kebenaran. Bogdan dan Biklen mengajukan lima buah ciri sedangkan Lincoln dan Guba mengulas sepuluh buah ciri penelitian kualitatif, yakni:

- Latar ilmiah. Lincoln dan Guba menghendaki adanya kenyataan-kenyataan sebagai keutuhan yang tidak dapat dipahami jika dipisahkan dari konteksnya.
- Manusia sebagai alat (instrumen). Peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul

data utama. Hanya manusia sebagai alat sajalah yang dapat berhubungan dengan responden atau objek lainnya, dan hanya manusialah yang mampu memahami kaitan kenyataan-kenyataan di lapangan.

- c. Metode kualitatif. Penelitian kualitatif menggunakan metode pengamatan dengan wawancara, atau pengolahan dokumen. Dengan menyesuakannya dengan kenyataan jamak, menyajikan secara langsung antara peneliti dan responden serta lebih peka dalam menyesuaikan diri dengan penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.
- d. Analisis data secara induktif. Digunakan karena proses induktif sebagai yang terdapat dalam data, analisis induktif lebih dapat membuat hubungan peneliti – responden menjadi eksplisit, dapat dikenal dan akuntabel, analisis demikian lebih dapat menguraikan latar secara penuh dan dapat membuat keputusan-keputusan tentang dapat – tidaknya pengalihan pada suatu latar lainnya.
- e. Teori dari dasar (grounded theory). Analisis ini lebih merupakan pembentukan abstraksi berdasarkan bagian-bagian yang telah dikumpulkan, kemudian dikelompok-kelompokkan. Jadi penyusunan teori disini berasal dari bawah ke atas (grounded theory) yaitu dari sejumlah data yang banyak dikumpulkan dan yang saling berhubungan.
- f. Deskriptif. Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar dan bukan angka. Laporan penelitian berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya.

- g. Lebih mementingkan proses daripada hasil. Hal ini disebabkan oleh hubungan bagian-bagian yang sedang diteliti akan jauh lebih jelas apabila diamati dalam proses.
- h. Adanya batas yang ditentukan oleh fokus. Disebabkan oleh batas menentukan kenyataan jamak yang kemudian mempertajam fokus dan penetapan fokus lebih dekat dihubungkan oleh interaksi antara peneliti dan fokus. Bagaimana pun, penetapan fokus sebagai pokok masalah penelitian penting artinya dalam usaha menemukan batas penelitian.
- i. Adanya kriteria khusus untuk keabsahan data. Menurut Lincoln dan Guba hal itu disebabkan beberapa hal yakni validitas internal cara lama telah gagal karena hal itu menggunakan isomorfisme antara hasil penelitian dan kenyataan tunggal dimana penelitian dapat dikonvergensi, validitas eksternal gagal karena tidak taat asas dengan aksioma dasar dari generalisasinya dan kriteria reliabilitas gagal karena mempersyaratkan stabilitas dan keterlaksanaan secara mutlak dan keduanya tidak mungkin digunakan dalam paradigma yang didasarkan atas desain yang dapat berubah-ubah.
- j. Desain yang bersifat sementara. Penelitian kualitatif menyusun desain yang secara terus menerus disesuaikan dengan kenyataan di lapangan. Jadi tidak menggunakan desain telah disusun secara ketat dan kaku sehingga tidak dapat diubah lagi.
- k. Hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama. Disebabkan karena susunan kenyataan dari merekalah yang diangkat oleh peneliti, hasil penelitian bergantung pada hakikat dan kualitas hubungan antara pencari dengan yang dicari dan konfirmasi

hipotesis kerja akan menjadi lebih baik verifikasinya apabila diketahui dan dikonfirmasi oleh orang-orang yang ada kaitannya dengan yang diteliti. (Denzin, 1994)

Dalam melihat konstruksi media mengenai Islam garis keras dan aksi terorisme peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memahami realitas yang diteliti dengan pendekatan menyeluruh, tidak melakukan pengukuran pada realitas. Secara umum, makna pendekatan penelitian adalah cara pandang peneliti dalam melihat permasalahan penelitian. Menurut Denzin dan Lincoln (1994:4), istilah kualitatif menunjuk pada suatu penekanan pada proses-proses dan makna-makna yang tidak diuji atau diukur secara ketat dari segi kuantitas, jumlah, intensitas ataupun frekuensi.

Penelitian kualitatif memberi penekanan pada sifat bentukan sosial realitas, hubungan akrab antara peneliti dan objek yang diteliti, dan kendala-kendala situasional yang menyertai penelitian. Penelitian kualitatif mencari jawaban atas pertanyaan yang menekankan pada bagaimana pengalaman sosial dibentuk. Suatu penelitian kualitatif dilandasi oleh beberapa asumsi dasar tentang realitas sosial, hubungan peneliti dengan realitas sosial dan cara peneliti mengungkap realitas sosial tersebut.

Paradigma Penelitian

Persoalan pemberitaan terorisme bernaifaskan Islam garis keras di media Koran Tempo dilihat dari *Discourse Analysis* Theo Van Leewen. Paradigma yang dipakai dalam buku ini menggunakan paradigma konstruktivisme. Paradigma ini jelas memiliki implikasi penting terutama dari aspek *ontologi*, aspek *epistemologi*, *metodologi* dan *axiology* yang berbeda bila melihat kasus terorisme. Guba (1994) menjelaskan sejumlah dimensi yang harus dijelaskan dalam sebuah paradigma penelitian.

Pada dimensi ontologis, pertanyaan yang harus dijawab adalah apa sebenarnya hakikat dari sesuatu yang dapat diketahui, atau apa sebenarnya hakekat dari suatu realitas. Sedangkan dalam dimensi epistemologis, pertanyaan yang harus dijawab oleh peneliti adalah apa sebenarnya hakekat hubungan antara pencari ilmu (*inquirer*) dan objek yang ditemukan.

Dalam dimensi *axiologis* yang dipermasalahkan adalah peran nilai-nilai dalam suatu kegiatan penelitian. Sedangkan dalam dimensi metodologis, seorang ilmuwan harus bisa menjawab pertanyaan bagaimana cara atau metodologi yang dipakai seseorang dalam menemukan kebenaran suatu ilmu pengetahuan. Dalam paradigma kritis, secara ontologis realitas sosial dipandang sebagai sesuatu yang semu karena merupakan hasil dari proses sejarah, sosial maupun politik. Dari sisi hubungan antara peneliti dengan yang diteliti selalu dijumpai oleh nilai-nilai tertentu. Nilai itu sendiri ditemukan oleh si peneliti itu sendiri.

Dalam konsepsi positivisme, pembuktian ilmiah menuntut konfirmasi empirik, melalui proses observasi dan eksperimen. Caranya peneliti menerapkan seperangkat metode-metode tertentu mulai dari metode pengumpulan data, hingga metode analisis; kebanyakan disertai pengukuran atau melakukan proses kuantifikasi dari realitas sosial yang diteliti. Itu semua terkait dengan kriteria *testability* dan *falsifiability*, yakni apakah suatu teori bisa diturunkan menjadi konsep-konsep atau variabel-variabel yang memungkinkan untuk diuji secara empirik (Wallace, 1979; hal. 98). Oleh karenanya, dalam sistematika penelitian positivistik, khususnya yang menerapkan *hypothetico-deductive method*, suatu kerangka teori sebenarnya merupakan *theoretic hypothesis* (jawaban teoretis sementara terhadap masalah penelitian). Hipotesis teoretik itulah yang kemudian harus diturunkan menjadi *research hypothesis* (dan *statistical hypothesis*, dalam kasus penelitian kuantitatif). Tujuannya agar

memungkinkan teori tersebut diuji dengan data empiris yang ada. Ini amat berbeda dengan paradigma konstruktivisme.

Dalam paradigma konstruktivisme, yang digunakan dalam buku ini, dari sisi ontologisnya, realitas bisa dipahami dalam bentuk konstruksi mental yang bermacam-macam dan tidak dapat dindra, yang didasarkan secara sosial dan pengalaman, berciri lokal dan spesifik, dan bentuk serta isinya tergantung manusia atau kelompok individual yang memiliki konstruksi tersebut. (Denzin & Lincoln, 2009:137).

Konstruktivisme, mengadopsi ontologi kaum relativis, epistemologi transaksional dan metodologi hermeneutis atau dialektis. Tujuan-tujuan penelitian dari paradigma ini diarahkan untuk menghasilkan berbagai pemahaman yang bersifat rekonstruksi (Denzin & Lincoln, 2009:124).

Menurut paradigma ini, pengetahuan terdiri atas berbagai konstruksi yang memiliki konsensus relatif diantara pihak-pihak yang berkompeten. Sedangkan peran nilai-nilai dalam paradigma konstruktivis menempati posisi penting, sebab nilai dipandang sebagai sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam menciptakan hasil-hasil penelitian (Denzin & Lincoln, 2009:141). Karena itu tindakan mengesampingkan nilai tentulah tidak akan didukung sebab tindakan itu bertentangan dengan kepentingan audiens. Dalam konstruktivisme, peneliti juga bertindak sebagai pelaksana dan fasilitator penelitian.

Di sisi yang lain, suara peneliti dalam paradigma Konstruktivisme adalah suara 'partisan yang penuh dengan empati atau semangat' yang secara aktif terlibat dalam upaya mempermudah rekonstruksi multi pesan konstruksinya sendiri, demikian pula dengan rekonstruksi multipesan dari partisipan yang lain.

Pemilihan Media

Media yang dipilih dalam penelitian ini adalah surat kabar **Koran Tempo**. **Koran Tempo** dipilih karena Koran ini adalah anak perusahaan dari grup *Tempo* yang sudah berpengalaman di dunia jurnalistik di Indonesia. Pemiliknya adalah *PT Tempo Inti Media* yang sebelumnya dikenal dengan Majalah *Tempo*nya. **Koran Tempo** dipilih karena media ini dianggap kredibel dan bisa bertindak netral dalam menyuarakan jurnalisme yang berimbang. Kendati begitu, dari hasil penelitian justru koran ini seringkali mengabaikan hal yang penting dalam jurnalisme yaitu mekanisme verifikasi.

Alasan lainnya adalah, **Koran Tempo** mengklaim diri sebagai media yang mengedepankan jurnalisme profesional sebagaimana diakui oleh Direktur Utama *Tempo Group*, Bambang Harymurti namun dalam pemberitaan soal aksi terorisme di Indonesia kenetralan media ini perlu dipertanyakan. Sebagaimana diakui sendiri oleh Bambang Harymurti, **Koran Tempo** memang tidak netral karena sebagai media, koran ini harus lebih mengutamakan keberpihakannya kepada kepentingan rakyat banyak, bukan hanya kepentingan kelompok tertentu saja.

Koran Tempo pertama kali diterbitkan pada 2 April 2001 dengan sirkulasi sebesar 100.000 setiap hari. **Koran Tempo** adalah anak perusahaan dari *Tempo Group*. *Tempo* sendiri adalah media yang sudah sangat teruji di Indonesia, pada tahun 1982, untuk pertama kalinya *Tempo* dibredel. *Tempo* dianggap terlalu tajam mengkritik rezim Orde Baru dan kendaraan politiknya, Golkar. Saat itu tengah dilangsungkan kampanye dan prosesi Pemilihan Umum. Tapi akhirnya *Tempo* diperbolehkan terbit kembali setelah menandatangani semacam "janji" di atas kertas segel dengan Ali Moertopo, Menteri Penerangan saat itu (zaman Soeharto ada Departemen Penerangan yang fungsinya, antara lain mengontrol pers.) Pada Juni 1994 untuk kedua kalinya *Tempo* dibredel oleh pemerintah, melalui Menteri Penerangan Harmoko. *Tempo* dinilai terlalu keras mengkritik

Habibie dan Soeharto ihwal pembelian kapal kapal bekas dari Jerman Timur.

Selepas Soeharto lengser pada Mei 1998, mereka yang pernah bekerja di *Tempo* -dan bercerai berai akibat bredel-berembuk ulang. Mereka bicara ihwal perlu-tidaknya majalah *Tempo* terbit kembali. Hasilnya, *Tempo* harus terbit kembali. Maka, sejak 12 Oktober 1998, majalah *Tempo* hadir kembali.

Menurut Direktur Utama *Tempo* Group, Bambang Harymurti, *Koran Tempo* adalah koran yang selalu menjunjung profesionalisme jurnalistik. Menurut dia, Koran Tempo sudah melakukan kegiatan jurnalisme yang mengedepankan keberimbangan sesuai kaidah jurnalistik. Pertimbangan lainnya, *Koran Tempo* adalah bagian dari Group media besar di Indonesia yang seringkali dianggap 'sinis' terhadap Islam. Sedangkan isu yang diangkat dalam buku ini adalah bagaimana *Koran Tempo* merepresentasikan terorisme yang terkait dengan gerakan Islam garis keras, jadi wajar saja kalau peneliti tertarik untuk menganalisisnya.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Pengumpulan sejumlah berita terkait dengan aksi terorisme bernaftaskan gerakan Islam garis keras di *Koran Tempo* edisi Januari 2010- Desember 2010
2. Melakukan wawancara mendalam untuk bisa menguak dan mengetahui lebih dalam konteks di balik representasi pemberitaan terorisme di *Koran Tempo* terkait dengan pemberitaan terorisme. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan ***Direktur Utama Tempo, Bambang Harymurti*** dan ***kepada editor desk nasional*** yang bertanggungjawab terhadap pemberitaan soal terorisme

di *Koran Tempo*. Begitu juga wawancara mendalam dilakukan peneliti kepada pihak-pihak terkait dengan pemberitaan *Koran Tempo*, khususnya dengan sejumlah wartawan, redaktur, dan pengamat media massa untuk melihat praktik diskursif dan melihat aspek konsumsi terhadap teks berita terorisme.

3. Peneliti juga melakukan Wawancara mendalam untuk menguak intertekstual lewat mewawancarai sejumlah wartawan, pengamat media yang bisa menggambarkan aspek-aspek makro di balik produksi teks terorisme.
4. Melakukan studi kepustakaan, dengan menelusuri data-data sekunder seperti data seputar kebijakan pemberitaan terorisme, data seputar kejadian terorisme dan bagaimana penanganan terorisme di Indonesia serta data lain yang terkait dengan topik penelitian.

Unit Analisis dan narasumber

Unit analisis

Unit analisis adalah setiap unit yang akan dianalisa, digambarkan atau dijelaskan dengan pernyataan-pernyataan deskriptif. Yang menjadi unit analisis di tingkat Mikro (teks) adalah kalimat dalam paragraf pada pemberitaan *Koran Tempo* terkait aksi terorisme yang bernafaskan Islam pada edisi Agustus 2010-Desember 2010. Analisis teks ini kemudian diperkuat dengan wawancara dengan wartawan dan editor *Koran Tempo* terkait proses produksi teks, dan untuk analisis intertekstualnya dikaitkan dengan data-data lain yang ada dan wawancara dengan sejumlah narasumber.

Setiap berita yang dianalisis memiliki *Head lines/kepala* berita dan isi berita yang terdiri dari paragraf-paragraf. paragraf-paragraf tersebut terdiri dari kalimat-kalimat. Penelitian ini difokuskan pada isi masing-masing kalimat, termasuk juga dalam judul beritanya dan keseluruhan pemberitaan terkait dengan aksi terorisme bernafaskan Islam garis keras.

Narasumber

Untuk melihat strategi wacana dan intertekstualitas maka peneliti melakukan wawancara mendalam kepada sejumlah narasumber baik dari kalangan media yang diteliti yakni Direktur Utama *Tempo*, Bambang Harymurti, dan redaktur Desk Nasional *Koran Tempo* juga narasumber yang memberi komentar, menyampaikan kebiasaan wartawan saat melakukan peliputan atau melakukan pengeditan berita-berita seputar terorisme di Indonesia. Begitu juga, peneliti melakukan wawancara kepada pengamat media yang bisa menjelaskan praktik sosial budaya atau dimensi makro dalam penelitian ini. Untuk lebih lengkapnya, sejumlah pihak yang dijadikan narasumber bisa dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.2
Narasumber penelitian

No	Dimensi	Nama narasumber	Jabatan
1	Praktik wacana (intertekstualitas)	Bambang Harymurti	Direktur Utama <i>Tempo</i> Group
2	Praktik wacana (intertekstualitas)	Yudhono Akhmadi	(Redaktur Utama Internasional-Nusa untuk majalah-koran dan Online <i>Tempo</i>)
3	Praktik wacana Intertekstualitas	Efri NP Ritonga.	Redaktur Desk Nasional <i>Koran Tempo</i>
4	Intertekstualitas	I B Alit wiratmaja	anggota Dewas LPP <i>Radio Republik Indonesia</i>
5	Intertekstualitas	Noeh Hatumena	Pengurus pusat <i>Persatuan Wartawan Indonesia</i> (PWI)

6	intertekstualitas	Pepih Nugraha	Wartawan senior <i>Kompas</i>
7	Interterkstualitas	Benny Siga Butarbutar	Redaktur senior <i>LKBN ANTARA</i>
8	intertekstualitas	Marula Sardi	Wartawan <i>Rakyat Merdeka</i> Jakarta
9	intertekstualitas	Taufiq Rahman	Editor senior di harian <i>Republika</i>
10	intertekstualitas	Farid Gaban	Mantan Wartawan/editor <i>Tempo</i>

BAB IV

MENGAPA KORAN TEMPO

Mengapa Koran Tempo ?

Analisis tekstual berita seputar aksi terorisme ini dilakukan pada Harian Koran Tempo sebagai Koran umum yang menempatkan persoalan terorisme sebagai persoalan menarik yang dijadikan kekuatan pemberitaan mereka. Pemiliknya adalah PT Tempo Inti Media Harian. Tempo sebelumnya dikenal dengan Majalah Temponya.

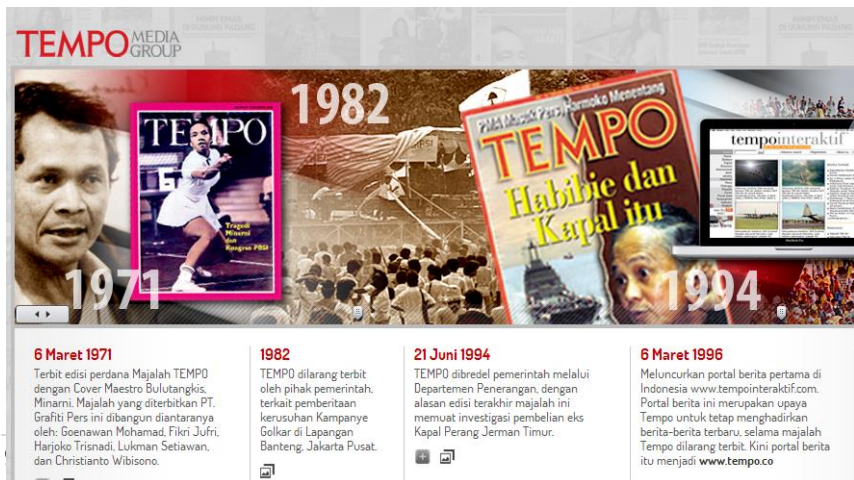
Koran ini pertama kali diterbitkan pada 2 April 2001 dengan sirkulasi sebesar 100.000 setiap hari. Koran Tempo adalah anak perusahaan dari Group Majalah Tempo sehingga kebijakannya khususnya di bidang pemberitaan sama dengan kebijakan induknya.

Mengapa peneliti memilih Koran Tempo? Memang disadari oleh peneliti bahwa media nasional di Indonesia cukup banyak dan beragam, mereka memiliki nama besar dan disiplin dalam pengemasan berita sesuai dengan etika jurnalistiknya. Koran Tempo adalah koran yang diterbitkan oleh Group Majalah Tempo yang sudah lama eksis di dunia penerbitan dan menjadi pelopor dalam jurnalistik yang tegas terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap melanggar kepentingan rakyat banyak.

Alasan utama mengapa peneliti memilih Koran Tempo adalah karena Koran Tempo –begitu juga Tempo—dianggap sering bertindak ‘sinis’ terhadap Islam dan aksi kelompok-

kelompok Garis Keras Islam. Kritik utama dari kelompok Islam tertentu adalah Tempo seringkali melakukan reportase dan investigasi yang menyudutkan Islam di tanah air. Buku ini mengangkat topik terorisme yang dikaitkan dengan aksi kelompok militan Islam seperti kelompok JAT yang dipimpin oleh Abu Bakar Ba'asyir, sehingga tepatlah alasan memilih Koran Tempo sebagai media yang diteliti. Apakah Koran Tempo juga melakukan kebijakan yang sama dengan induk perusahaannya yang seringkali dituding anti Islam dalam pemberitaannya. Tudingan yang perlu dicermati adalah tudingan dari Farid Gaban yang sering melihat Tempo tidak cermat secara jurnalistik dalam mengangkat persoalan teroris. Gaban yang mantan wartawan Tempo mengkritik ulasan majalah Tempo, No. 07/VI, Oct 18-24, 2005 soal pengakuan salah satu gembong teroris. Gaban menilai pemberitaan Tempo jauh di bawah standar jurnalistik yang lazim dan tidak ketat dalam menerapkan standar peliputan. Berita itu juga cenderung menyesatkan pembaca, sebab seolah-olah Tempo menerima pengakuan secara langsung dari "sang teroris" dan bahwa rencana membunuh Ulil memang benar adanya. Lebih fatal, berita itu bersifat menghakimi secara sepihak orang yang tak berdaya (dalam penjara).

Tudingan miring terhadap sikap Tempo yang sinis dan apriori terhadap Islam ketika Tempo menyoroti isu Label Halal MUI, yang menimbulkan reaksi keras dari kelompok Islam



karena dalam covernya majalah ini dianggap melecehkan Majelis Ulama Indonesia.

Dan *Koran Tempo* adalah bagian dari Majalah *Tempo*, majalah berita mingguan Indonesia yang umumnya meliput berita dan politik. *Tempo*, majalah mingguan ini terbit perdana pada April 1971 dengan berita utama mengenai cedera parah yang dialami Minarni, pemain badminton andalan Indonesia di Asean Games Bangkok, Thailand. Dimodali Rp 20 juta oleh Yayasan Jaya Raya milik pengusaha Ciputra; digawangi oleh mereka para seniman yang mencintai pekerjaannya dan para wartawan berpengalaman yang dipecat atau keluar dari tempat kerja sebelumnya: *Ekspress*, *Kompas*, dan lainnya.

Sejarah Tempo ini muncul dalam artikel dalam majalah Pantau Tahun II/No.16/2001 yang berjudul *Konflik Nan 'Tak Kunjung Padam: Bagaimana Tempo Mengatasi Masalah dan Meletakkan Budaya Perusahaannya?*, yang ditulis oleh Coen Husain Pontoh. Seniman dan wartawan di awal penerbitanya adalah Goenawan Mohamad (Ketua Dewan Redaksi), Bur Rasuanto (Wakil Ketua), Usamah, Fikri Jufri, Cristianito Wibisono, Toeti Kakiailat, Harjoko Trisnadi, Lukman Setiawan, Syu'bah Asa, Zen Umar Purba, Putu Wijaya, Isma Sawitri, Salim Said, dan lainnya. Satu orang kepercayaan dari Yayasan Jaya Raya juga turut serta mengelola *Tempo*, yaitu Eric Samola.

Mengapa Bernama Tempo ? Alasannya pertama, singkat dan bersahaja, enak diucapkan oleh lidah orang Indonesia dari segala jurusan; *kedua*, terdengar netral, tidak mengejutkan dan tidak merangsang; *ketiga*, bukan simbol sebuah golongan, dan *keempat*, *Tempo* adalah waktu.

"Tempo meniru Time? Benar Tempo meniru waktu, selalu tepat, selalu baru".

Kalimat ini diiklankan *Tempo* pada terbitan 26 Juni 1971 guna menjawab surat seorang pembaca yang berkesimpulan bahwa *Tempo* telah meniru *Time*. Kesimpulan yang wajar melihat sepiantas *cover Tempo* memang mirip *Time*: segi empat dengan pinggiran merah. Bahkan, pada 1973, *Time* menggugat *Tempo* melalui pengacara Widjojo, namun

akhirnya dapat diselesaikan dengan damai. Edisi pertama *Tempo* laku sekira 10.000 eksemplar. Disusul edisi kedua yang laku sekira 15.000 eksemplar. *Progress* penjualan oplah ini menepis keraguan Zainal Abidin, bagian sirkulasi *Tempo*, yang menganggap majalah ini tidak akan laku. Selanjutnya, oplah *Tempo* terus meningkat pesat hingga pada tahun ke-10, penjualan *Tempo* mencapai sekira 100.000 eksemplar (Pontoh, 2001).



Dalam perjalanannya, terjadi dualisme kepemimpinan di tubuh *Tempo* antara Goenawan dengan Bur. Keduanya memiliki perbedaan ide dasar. Goenawan ingin *Tempo* bergaya tulis *feature* (bercerita), sedangkan Bur cenderung ke *news*. Keduanya pun sering berbeda paham dan saling bertolak pendapat. Puncaknya pada saat Bur melemparkan air kopi ke arah Goenawan. Tindakan yang dianggap kelewatan oleh Goenawan hingga dia meminta kepada Eric Samola untuk memutuskan, apakah dia yang keluar atau Bur. Akhirnya Bur yang mengundurkan diri dari *Tempo*.

Pada 12 April 1982, di usia yang ke-12 tahun, *Tempo* dibredel oleh Departemen Penerangan melalui surat yang dikeluarkan oleh penguasa Ali Moertopo (Menteri Penerangan).

Tempo dianggap telah melanggar kode etik pers. Ide pembredelan itu sendiri datang dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang saat itu dipimpin oleh Harmoko, wartawan harian *Pos Kota* (Pontoh, 2001).

Diduga, adanya aksi pembredelan tersebut terjadi karena *Tempo* meliput kampanye partai Golkar di Lapangan Banteng, Jakarta, yang berakhir rusuh. Presiden Soeharto, yang disebut sebagai motor partai Golkar, tidak suka dengan berita tersebut. Pada 7 Juni 1982, pembredelan *Tempo* *dicabut* setelah Goenawan membubuhkan tanda tangan pada secarik kertas. Secarik kertas itu berisi permintaan maaf *Tempo* dan kesediaan untuk dibina oleh pemerintah. Waktu itu, Goenawan tidak punya pilihan lain memang.

Prahara kembali berguncang di tubuh *Tempo* pada 13 Juli 1987. Sebanyak 31 wartawan ramai-ramai keluar (eksodus). Alasannya: kesejahteraan dan pola manajemen yang tidak transparan. Mereka yang keluar di antaranya Syu'bah Asa, Edy Herwanto, Saur Hutabarat, Marah Sakti Siregar, dan Achmad Luqman. Mereka kemudian mendirikan majalah *Editor*, saingan *Tempo*.

Goenawan sangat sedih dengan kejadian itu. Selanjutnya, pembenahan manajemen pun dilakukan dan kesejahteraan karyawan juga diperhatikan. Konflik dianggap sebagai momentum untuk membenahi kekurangan. "Yang bagus bukanlah organisasi yang sempurna, tapi organisasi yang selalu dengan teratur dan dengan 'tak terlalu sulit disempurnakan, diperbaiki,'" kata Goenawan saat itu.

Pada 1990, eksodus kembali terjadi. Sebanyak 20 wartawan spontan keluar. Ada yang mendirikan majalah baru, *Prospek*, yang dimodali pengusaha Sutrisno Bachir; ada yang bergabung ke harian *Berita Buana*. Alasan utama eksodus kali ini ada dua: *pertama*, tawaran kesejahteraan dan jenjang karir yang menggiurkan di tempat lain; *kedua*, beredarnya isu kristenisasi di tubuh *Tempo*. Khusus kristenisasi, isu agama ini membuat tubuh *Tempo* menjadi tidak sehat.

Pada 21 Juni 1994, *Tempo* kembali dibredel bersama saudara tirinya: *Editor* dan majalah yang sedang berkembang: *Detik*. Kali ini penyebabnya adalah berita *Tempo* terkait pembelian pesawat tempur eks Jerman Timur oleh BJ Habibie. Berita tersebut tidak menyenangkan para pejabat militer karena merasa otoritasnya dilangkahi. Namun, diduga, penyebab dasarnya adalah karena Presiden Soeharto tidak suka *Tempo* dari dulu; berita BJ Habibie hanyalah alasan pembenaran.

Kalau dulu syarat terbit kembali sangat mudah, hanya bertanda tangan di secarik kertas, kali ini sangat sulit. Keluarga Presiden Soeharto yang diwakili Hasyim Djojohadikusumo, adik Prabowo Subianto, dalam penjelasannya kepada Erick Samola di sebuah pertemuan di hotel memberikan syarat: berita *Tempo* harus diketahui oleh mereka (Keluarga Presiden Soeharto), pemimpin redaksi harus ditentukan oleh mereka, dan mereka bisa membeli saham *Tempo*. (Pontoh, 2001)

Jajaran pemimpin *Tempo* mendiskusikan syarat tersebut. Semuanya kemudian bersepakat untuk menolaknya. Mereka rela *Tempo* tidak pernah terbit lagi. Ini adalah persoalan integritas diri, alasannya.

Pembredelan tiga media tersebut di atas menyulut pelbagai demonstrasi massa. Salah satunya, demonstrasi berdarah pada 27 Juni 1994 oleh para aktifis, mahasiswa, dan buruh. Di tubuh PWI juga terjadi demonstrasi. Sebagian



wartawan seperti Ahmad Taufik, Dita Indah Sari, dan lainnya sepakat untuk mendirikan Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Mereka menuduh PWI berdiri di bawah ketiak pemerintah.

Walau pun dibredel, *Tempo* punya cara sendiri untuk tetap eksis dan menyapa pembacanya. Pada 1996, *Tempo* meluncurkan majalah digital pertama di Indonesia: *Tempo Interaktif*, melalui situs www.tempo.co.id. Karena beredar di dunia maya, majalah ini lolos dari jangkauan pembredelan.

Meskipun *Tempo* tetap eksis, sebagian wartawannya tidak tahan hidup tanpa penghasilan yang jelas. Mereka pun keluar: Lukman Setiawan, Mahtoem Mastoem, Harjoko Trisnadi, Herry Komar, Amran Nasution, dan Agus Basri. Mereka kemudian mendirikan majalah *Gatra* yang dimodali Bob Hasan, pengusaha dan orang kepercayaan Presiden Soeharto. Sebagian yang lain bergabung di majalah *Forum* dan tabloid *Kontan*.

Jatuhnya Presiden Soeharto pada reformasi 21 Mei 1998 dan naiknya BJ Habibie sebagai Presiden memberi angin segar bagi masa depan *Tempo*. BJ Habibie mencabut pembredelan *Tempo* dan mengizinkannya untuk terbit kembali.

Sekitar 40 orang berkumpul di Teater Utan Kayu untuk memikirkan *Tempo* baru. Hasilnya, melalui PT Arsa Raya Perdana dan dengan investasi baru sekira Rp 5 miliar, *Tempo* edisi perdana pascabredel terbit pada Selasa, 6 Oktober 1998.

"Kami makin sadar: ada sesuatu yang lebih berharga ketimbang nafkah dan kepuasan profesional, yakni kemerdekaan dan harga diri," tulis editorial perdana *Tempo* pascabredel.

Perkembangan *Tempo* pascabredel sangat *progress*. Oplah mencapai sekira 60 ribu eksemplar tiap kali terbit, mengalahkan majalah pesaing: *Gatra*, *Forum*, *Panji Masyarakat*, dan *Gamma*. Begitu pula dari sisi iklan, *Tempo* meraih 41% porsi iklan dibandingkan para pesaingnya tersebut. Persentase tersebut meningkat pada tahun 2000 menjadi 50% dan pada tahun 2005 menjadi 70%.

Perkembangan yang luar biasa tersebut membuat manajemen menerbitkan *Tempo* dalam edisi Inggris bernama *Tempo Magazine* pada 12 September 2000. Edisi Inggris ini terbit tiap minggu, dua hari setelah edisi Indonesia terbit. Oplahnya lumayan, laku sekira 7 ribu eksemplar di edisi perdananya. Intinya,

Pada 6 Nopember 2000, *Tempo* menjadi media pertama yang masuk bursa saham (*go public*). Nama PT Arsa Raya Perdana diganti menjadi PT Tempo Media Inti supaya mudah dikenali. Pada penawaran perdananya, *Tempo* menawarkan 200 juta saham dan 100 juta *warran* guna meraup dana segar Rp 75 miliar.



Dana segar tersebut 60% digunakan untuk mendirikan *Koran Tempo*, 25% untuk pelunasan utang anak perusahaan, dan 15% untuk penambahan modal kerja. Kalau semuanya berjalan lancar, *Tempo* juga berambisi untuk mendirikan radio, televisi, dan kantor berita. Setelah *go public*, komposisi kepemilikan saham di *Tempo* berubah: PT Grafiti Pers: 16,6%, Yayasan Jaya Raya: 24,8%, Yayasan 21 Juni

1994: 24,8%, Yayasan Karyawan Tempo: 16,6%, dan publik: 17,2%.

Pada 2 April 2001, ketika umur *Tempo* menginjak 30 tahun, diterbitkanlah *Koran Tempo*. Kehadiran *Koran Tempo* bertujuan untuk mengembalikan prinsip-prinsip jurnalistik harian yang terabaikan: cepat, lugas, tajam, dan ringkas. Nama *Tempo* sengaja digunakan pada *Koran Tempo* untuk meraih pangsa pasar. (Pontoh, 2001).

Tokoh penting di balik *Tempo* group adalah Gunawan Mohamad dan Bambang Harymurti. Di era Orde Baru, *Tempo* dipimpin oleh Gunawan Mohamad yang kemudian digantikan oleh Bambang Harymurti. Setelah didirikan kembali pasca pembredelan Oktober 1998, Goenawan Mohamad memilih terjun mengembangkan Komunitas Utan Kayu. *Tempo* saat ini dipimpin oleh Bambang Harymurti yang sebelumnya menjabat Kepala Biro Majalah *Tempo* Bandung



Goenawan Mohamad

Komisaris Utama

Goenawan Mohamad dan kawan-kawan mendirikan Majalah *Tempo* pada 1971 dan menjadi Pemimpin Redaksi (Pimred) - nya. Wartawan dan budayawan kelahiran Batang, Jawa Tengah, tahun 1941, ini menjabat Pimred hingga dua tahun sebelum *Tempo* dibredel pada 1994. Ketika *Tempo* terbit kembali pada 1998, Goenawan hanya bersedia 'mengawal' *Tempo* - sebagai orang pertama di majalah berita tersebut, selama setahun saja. Selanjutnya, tampuk kepemimpinan diserahkan ke Bambang Harymurti.

Sejak 1989, wartawan dan budayawan ini -- ia menerima Hamengku Buwono IX Award dari Universitas Gajah Mada tahun 2011 -- menjadi Komisaris Utama PT *Tempo* Inti Media Tbk sampai sekarang. Ia mewakili PT. Grafiti Pers.

Kini jabatannya di Majalah *Tempo* adalah redaktur senior dan setiap pekan meraih hadiah sastra Profesor Teeuw Award (1992), itu rutin menulis Catatan Pinggir. Goenawan sekarang merawat Komunitas Salihara, sebuah wadah berkesenian yang ada di kawasan Salihara, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Sejumlah buku bertema sosial budaya serta puisi sudah lahir dari tangan Goenawan Mohamad.

Isu Terorisme Bernafaskan Islam Garis Keras

Isu yang sengaja diambil dalam buku ini adalah pemberitaan aksi terorisme di era 2010-an ketika aksi terorisme di Indonesia diwarnai sejumlah aksi terorisme yang tidak besar dan memiliki efek luar biasa. Setelah sejumlah gembong terorisme ditangkap pasca 2008-2010 dan tewas atau dijatuhi hukuman mati, serta dieksekusi di Nusakambangan peristiwa terorisme yang terjadi di tanah air tidak terlalu besar. Inilah salah satu alasan mengapa peneliti mengangkat soal pemberitaan Koran Tempo periode 2010, setelah sejumlah gembong terorisme di Indonesia tertangkap, terbunuh atau dieksekusi/hukum mati. Setelah penangkapan atau terbunuhnya sejumlah gembong teoris di tanah air, relative peristiwa aksi terorisme yang besar jauh amat berkurang. Sejak era

Home ► Tentang Kami ► Dewan Direksi



Bambang Harymurti

Direktur Utama

Bambang Harymurti, Direktur Utama PT Tempo Inti Media Tbk atau BHM, begitu pimpinan tertinggi *Tempo* ini biasa disapa, sudah duduk di posisi itu sejak 2007. Dialah Direktur Utama pertama Kelompok Tempo yang mengawali karirnya dari jenjang reporter.

Pria kelahiran Jakarta 1956, ini mulanya magang di Majalah *Tempo*, tepatnya di Biro Bandung. Setelah menyelesaikan kuliah di Institut Teknologi Bandung pada 1984, Bambang sepenuhnya menekuni profesi sebagai jurnalis *Tempo* di Jakarta. Ketika mendapat peluang mengikuti program magang di Majalah *Time*, dalam program *Friendly Free Press Fellows*, ia tak menyia-nyiakannya kesempatan itu. Kembali dari Washington pada 1987, Bambang mendapat tugas memimpin Biro Majalah *Tempo* di Bandung.

Selanjutnya, dia menduduki jabatan Kepala Biro Jakarta (1987-1989), kemudian Kepala Biro Amerika Serikat di Washington hingga *Tempo* dibredel pada 21 Juni 1994. Selama di Amerika, Bambang sempat melanjutkan pendidikan di J.F. Kennedy School of Government, Harvard University, Amerika Serikat, dan meraih gelar master pada 1991. Ketika *Tempo* terbit kembali pada 1998, Bambang mengisi jabatan Wakil Pemimpin Redaksi. Ia memang disiapkan menggantikan Pemimpin Redaksi yang dijabat Goenawan Mohamad. Penggantian itu terjadi setahun kemudian. Pada tahun 2001, ketika *Koran Tempo* lahir, Bambang juga merangkap jabatan sebagai Pemimpin Redaksi *Koran Tempo*.

Selain sibuk memimpin PT. TIM Tbk, BHM juga mengabdikan dirinya di Dewan Pers selama dua priode yang berakhir di tahun 2013.

reformasi, memang aksi terorisme meningkat tajam khususnya di era 2003-an tetapi memasuki tahun 2010, secara kualitas menurun meskipun secara kuantitas meningkat. Dalam buku ini memang membatasi analisis tekstual pemberitaan terorisme di harian Koran Tempo di era 2010, ketika aksi terorisme di tanah air amat jauh berkurang. Koran Tempo banyak mewarnai pemberitaan soal terorisme pada tahun 2010. Dari begitu banyak berita mengenai aksi terorisme di Koran Tempo, peneliti sengaja mengambil sampel berita yang sangat tepat untuk menggambarkan bagaimana media ini menempatkan persoalan terorisme di Indonesia. Sejumlah berita sengaja dipilih oleh peneliti untuk menggambarkan betapa Koran Tempo berupaya melakukan pengemasan terhadap pemberitaan terkait aksi terorisme, di tahun 2010, khususnya setelah sejumlah gembong terorisme di tanah air ditangkap, tewas atau dihukum mati oleh aparat penegak hukum. Analisis Data menggunakan teknik analisis wacana Theo Van Leeuwen.

BAB V

ANALISIS BERITA TERORISME DI KORAN TEMPO

Berita seputar terorisme

Untuk analisis teks, peneliti menggunakan sejumlah berita *Koran Tempo* terpilih terkait dengan pemberitaan terorisme khususnya yang berhubungan dengan aksi kelompok Islam garis keras. Dalam penelitian ini teks berita sebagai unit analisis yang digunakan adalah sebagai berikut.

Tabel 5.1
Berita-berita yang Dianalisis

No	JUDUL BERITA	Edisi/Halaman
1	Ceramah Ba'asyir Sebelum Ditangkap: " Demokrasi itu kurang ajar"	<i>Koran Tempo</i> Selasa, 10 Agustus 2010 Cover story
2	Sebelum Ditangkap Ba'asyir Kecam Demokrasi	<i>Koran Tempo</i> , Selasa 10 Agustus 2010 Halaman A3
3	Ba'asyir Dituding Terlibat Terorisme di Aceh	<i>Koran Tempo</i> /Edisi no.3267/tahun X/ Selasa 10 Agustus 2010/Halaman A2
4	Kesaksian dari Tanah Rencong Jerat Ba'asyir	(<i>Koran Tempo</i> /Edisi no.3267/tahun X/ Selasa 10 Agustus 2010/ Halaman A4)

5	Lima Serangkai Penebar Teror	(<i>Koran Tempo</i> , edisi Selasa, 10/8/2010 halaman A4)
6	Sang Amir yang Sudah Lama Diincar	(<i>Koran Tempo</i> /Edisi no.3267/tahun X/ Selasa 10 Agustus 2010/ Halaman A3)
7	FPI Menilai Ba'asyir Korban Rekayasa	<i>Koran Tempo</i> /Edisi no.3267/tahun X/ Selasa 10 Agustus 2010/ Halaman A4)
8	Polisi Yakini Mustawan Anggota JAT	(<i>Koran Tempo</i> , Sabtu 14/8/2010)
9	Ba'asyir Dulmatin Dituduh Rancang Pelatihan Militer	(<i>Koran Tempo</i> /Edisi no.3267/tahun X/ 16 Agustus 2010/ Halaman A 2)
10	Ba'asyir Dituding Terkait jaringan Medan	(<i>Koran Tempo</i> , 21/9/2010, Halaman A 2)
11	Kelompok Medan Dipimpin Abu Tholut	(<i>Koran Tempo</i> , 21/9/2010)
12	Teroris Di Balik Perampokan Medan	(<i>Koran Tempo</i> , 21/9/2010),
13	Aksi Perampokan Dianggap Halal	(<i>Koran Tempo</i> , 21/9/2010)

Hasil Analisis Teks

Analisis Berita 1

Tabel 5.2
Analisis Teks 1

JUDUL	<i>Ceramah Ba'asyir Sebelum Ditangkap : "Demokrasi itu kurang ajar"</i>
Narasumber	Kepala Bareskrim Mabes Polri Komisaris Jenderal Ito

	Sumardi dan hasil reportase wartawan <i>Koran Tempo</i> sendiri
Frame/pokok berita	<i>Koran Tempo</i> juga merepresentasikan adanya ideologi Ba'asyir yang jelas-jelas menentang demokrasi.
Representasi/misrepresentasi aktor	Pihak <i>Tempo</i> tidak memberikan tempat yang seimbang bagi kelompok/individu yang ditampilkan. Terjadi proses marginalisasi dan delegitimasi dari pihak yang dijadikan subjek pemberitaan. Ba'asyir yang dijadikan subjek pembicaraan justru ditempatkan pada posisi tidak penting bahkan 'dihilangkan' oleh media dalam pembicaraan.
Kelemahan/kekurangan	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Koran Tempo</i> melakukan delegitimasi terhadap Ba'asyir - Representasi yang dilakukan <i>Koran Tempo</i> hanya satu pihak yaitu kelompok yang berkuasa dan berwenang sedangkan pihak yang dibicarakan justru sengaja tidak ditonjolkan - <i>Koran Tempo</i> tidak melakukan verifikasi kebenaran berita, dan langsung percaya saja dengan pernyataan kepolisian - <i>Koran Tempo</i> tidak melakukan investigasi sendiri untuk memastikan kebenaran fakta yang disodorkan oleh

	aparatus kepolisian
Nilai-nilai Berita	<p>-prominence (keterkenalan)</p> <p>-Important</p> <p>-Proximity (dekat dengan kepentingan masyarakat)</p>



Untuk unsur representasi, dalam teks pertama yang berjudul **Ceramah Ba’asyir Sebelum Ditangkap :” Demokrasi itu kurang ajar”** (Edisi Selasa, 10/8/2010, Cover Story) *Koran Tempo* merepresentasikan bahwa Ba’asyir ditangkap karena diduga terlihat sejumlah aksi terorisme di beberapa daerah termasuk di Aceh. *Koran Tempo* juga merepresentasikan adanya ideologi Ba’asyir yang jelas-jelas menentang demokrasi.

Koran Tempo merepresentasikan sosok Ba’asyir menilai demokrasi sebagai sesuatu yang ‘kurang ajar’. Menurut Ba’asyir selama ini umat Islam salah, pengamalan Islam yang membutuhkan pemahaman yang benar, sebab hidup harus berasas tunggal yakni bersendikan pada hukum agama (Islam).*Koran Tempo* menempatkan Ba’asyir yang medeskreditkan demokrasi yang bertentangan dengan hukum Allah dalam teksnya. Dalam teks, Ba’asyir mengomentari soal penangkapan dirinya sebagai pertama penangkapan dirinya ini adalah Rakhmat Allah, kedua untuk mengurangi dosanya dan upaya penangkapan dirinya adalah rekayasa Amerika walau dalam teks tidak dijelaskan apa bentuk rekayasa Amerika

menurut Ba'asyir. Tetapi meski Ba'asyir ditempatkan seolah sebagai subjek utama, Ba'asyir tidak ditempatkan sebagai pihak yang bebas berpendapat untuk menolak atau paling tidak mengkonfirmasi apakah tudingan-tudingan yang dilancarkan pihak kepolisian itu benar atau tidak. Dari teks di atas, jelas sekali Ba'asyir dijadikan pihak yang tertindas dan termarginalisasi dan tidak dimunculkan 'suaranya'.

Pada teks berita pertama meski Media merepresentasikan, Ba'asyir ditangkap karena diduga terlihat sejumlah aksi terorisme di beberapa daerah termasuk di Aceh tapi sosok Ba'asyir yang ditampilkan tidak diberi ruang bicara. Yang dimunculkan adalah anggapan dan keyakinan polisi bahwa Ba'asyir memang menginginkan adanya ideologi lain di luar Pancasila. Ba'asyir hanya sempat mengomentari soal penangkapan dirinya sebagai (1) ini rahmat Allah, (2) untuk mengurangi dosa dan (3) rekayasa Amerika walau dalam teks tidak dijelaskan apa bentuk rekayasa Amerika. Narasumber yang dikutip pun lebih banyak atau condong yang pro polisi dan tidak memberi kesempatan pihak Ba'asyir untuk melakukan konfirmasi. Wartawan *Koran Tempo* cenderung percaya saja klaim Kepala Bareskrim Mabes Polri Komisaris Jenderal Ito Sumardi dan ditambah hasil reportase wartawan *Koran Tempo* sendiri.

Pada teks pertama, *Koran Tempo* tidak melakukan konfirmasi seputar tuduhan atas Ba'asyir yang diduga terlibat sejumlah aksi terorisme di tanah air. *Koran Tempo* lebih banyak mengedepankan sumber resmi seperti Kepala Bareskrim Mabes Polri, Ito Sumardi. Upaya konfirmasi dan investigasi mengenai kebenaran dari klaim atau tuduhan polisi terhadap Ba'asyir dan kelompok Islam garis keras tidak dilakukan. Wartawan/editor *Koran Tempo*, Ahmad Fikri dan kawan-kawan, tidak memberi tempat yang seimbang untuk narasumber yang mendukung Ba'asyir. Kalaupun ada narasumber lain, hanya satu paragraf di paragraf dua, dan hanya terdiri dari tiga kalimat pendek terpisah.

Dalam teks ini ada upaya melakukan ekskomunikasi, artinya *Koran Tempo* tidak melakukan upaya menyeimbangkan informasi dengan melakukan wawancara yang seimbang, padahal kewajiban melakukan hal itu merupakan kewajiban hakiki pers. Artinya, dari sembilan elemen jurnalisme, *Koran Tempo* sudah melanggar elemen dasar bahwa perlu adanya verifikasi data dan narasumber agar berita yang disampaikan mengandung kebenaran

Analisis Berita 2

Tabel.5.3
Analisis Teks 2

JUDUL	SEBELUM DITANGKAP, BA'ASYIR KECAM DEMOKRASI
Narasumber	-Ba'asyir -Tokoh JIL, Ulil Abshar Abdalla -Anggota Komnas Ham, Yoseph Adhi Prasetyo
Frame/pokok berita	<i>Koran tempo</i> merepresentasikan alasan penangkapan itu karena pernyataan pernyataan Ba'asyir yang anti demokrasi dan anti pemerintah

Representasi/misrepresentasi	<p>-Kendati dijadikan Headline pemberitaan, tapi terjadi misrepresentasi artinya kendati Ba'asyir seolah menjadi pokok pembicaraan tetapi suaranya dihambat</p> <p>- Ba'asyir tidak diberi ruang bicara yang sama untuk menanggapi tuduhan polisi</p> <p>-<i>Koran Tempo</i> melakukan delegitimasi dan ekskomunikasi terhadap Ba'asyir karena pendapatnya diabaikan, seolah suaranya tidak penting untuk didengarkan</p> <p>-<i>Koran Tempo</i> tidak melakukan verifikasi terhadap narasumber, dan percaya begitu saja pernyataan polisi, bahkan mencoba mengaitkan dengan isu atau ide lain yang dianggap bisa menjawab adanya informasi yang coba ditutupi kepolisian soal alasan penangkapan Ba'asyir</p>
Nilai-nilai Berita	<p>-prominence (keterkenalan)</p> <p>-Important (karena menyangkut kepentingan banyak orang)</p> <p>-Proximity (dekat dengan publik)</p>

Sebelum Ditangkap, Ba'asyir Kecam Demokrasi

Jumat malam, 6 Agustus 2010, Jalan sempit menuju Masjid Bihwasul Qorh, Babakan Priangan, Bandung, lebih sibuk dari biasanya. Dua mobil patroli polisi terparkir di Jalan Sriwijaya, dekat mulut jalan menuju masjid. Belasan petugas bersenjata terlihat hiris-miris, dari pintu masuk jalan hingga masjid di permukiman padat itu.

Di depan masjid, balho bergambar wajah Ba'asyir terpampang. Sebuah tenda menyangi halaman masjid, sekaligus melindungi layar yang menampilkan gambar hidup Ba'asyir yang tengah berceramah.

Dari lantai dua masjid itu, Ba'asyir memali ceramah sekitar pukul 20.00 WIB. Terlihat tabir membahana saat Ba'asyir berdiri di minbar.

Dalam ceramah itu, Ba'asyir antan lain menyontok, umat Islam yang menjalankan Islam dengan benar akan bertumbuh sama dengannya, dihidup sebagai Islam garis keras atau fundamentalis. Padahal, kata Ba'asyir, Islam adalah Islam, tidak ada embel-embel di belakarnya.

Ba'asyir juga menyinggung soal keterlibatan dia terhadap demokrasi "Paham itu kurang ajar". Dalam demokrasi yang berlandaskan suara terbanyak, kata Ba'asyir, untuk menjalankan hukum Allah, umat Islam harus meminta izin kepada manusia. Mengutip pandangan seorang imam, Ba'asyir mengatakan, jika demokrasi dan Islam dicampur, "Itulah ke-bekasan".

(ini) hanya pendapat Ba'asyir dan para pengikutnya. Banyak pemikir Islam



Abu Bakar Ba'asyir dengan pengawal ketat tiba di Markas Besar Kepolisian RI, Jakarta, kemarin.

tersebut mengatakan bahwa ajaran Islam tidak bertentangan dengan demokrasi modern. Konsep "gynas" atau "masyaorah" dalam Islam, misalnya, sejalan dengan konsep "konsensus" dalam demokrasi.

Tidak Jaring Islam Liberal, Uli Abah Abdell, mengatakan jatra pemikiran Ba'asyir adalah yang ke-empat dari Ba'asyir juga tidak pernah mempermediasi demokrasi "tapi Uli kepada Tempo tadi malam".

Selama ceramah, Ba'asyir langsung diawal pans anggota jemaah memukul ru-

mah di samping masjid. Di sana ia mengeluarkan waktu untuk diwawancarai. Berikut ini petikan wawancara Ba'asyir dengan sejumlah wartawan, termasuk dari Tempo.

Apa garis besar ceramah malam ini?

Pertama, dalam mengemukakan Islam, kita perlu pemahaman yang benar. Islam itu ideologi paling benar, paling cocok untuk mengatur kehidupan manusia dan dunia. Kedua, kita harus memahami pokoknya Islam, yaitu tauhid. Tauhid harus berdiri. Tauhid tidak cukup diyakini dalam hati dan diucapkan le-

wat lisan, tapi harus dibuktikan dalam perbuatan. Hidup hanya untuk mengabdikan kepada Allah, untuk taat kepada Allah. Makanya, hidup diatur dengan hukum Allah. Hidup harus tunduk dengan hukum Allah, dari mulai urusan pribadi sampai urusan negara. Itu saja kesimpulan saya.

Pendapat Anda tentang penyerangan terhadap Ahmadiyah baru-baru ini?

Ahmadiah dan golongan lain, seperti JIL (Jaringan Islam Liberal), itu golongan murtad. Mereka dibentok orang kafir untuk merosok dan menggok-obok Islam dari dalam. Sehingga ini na-

manya ghaibul fihri (perang pemikiran). Itu lebih berat daripada dipergang dengan senjata. Ahmadiah dan JIL itu harus dinasir dan dipangsi. Tapi pemerintahan ini kan bukan pemerintah Islam. Negara ini bukan negara Islam, tapi negara kafir. Semua itu, meskipun masuk Islam, dianggap sebagai hak asasi.

Ditanggapi hal ini, Uli Abah mengatakan, yang menghancurkan Islam dari dalam itu jatra orang-orang seperti Ba'asyir. Jika menganggap murtadnya kelompok JIL sebagai perang pemikiran, menurut Uli, Ba'asyir meetings melasun balik de-

ngan pemikiran. "Perang pemikiran itu dilasan dengan pemikiran, jangan dilasan dengan kekerasan," kata Uli. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik mengatakan bahwa hak beragama merupakan hak dasar manusia. Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Joseph Adji Prasetyo, dalam sebuah wawancara dengan Tempo mengatakan bahwa hak beragama seseorang hanya bisa dicurangi jika melanggar dan membahayakan moral bangsa, seperti mempromosikan tindakan anasir. Sedangkan golongan seperti Ahmadiyah, menurut Joseph, tidak mempromosikan umatnya untuk melakukan tindakan seperti itu.

Sebelum lagi Ramadan, ada organisasi yang berencana melakukan **meorcing**.

Kalau melihat kemungkaran, kita harus segera menolaknya. Kalau kamu melihat kemungkaran, beradillah kamu selalu menolak dengan tangan, kalau enggak bisa, dengan lisan, terisbit dengan hati.

Kemungkaran itu tidak terdapat pada bulan Ramadan. Kalau pun kemungkaran itu tidak boleh tampak. Kalau kemungkaran dilakukan sembarangan, itu urusan mereka. Tapi, kalau tampak, harus dicegah, meskipun bukan di bulan Ramadan.

Polisi melarang **meorcing** untuk mencegah kebocoran itu ada benarnya. Tapi, ke-sekulerannya, polisi sendiri harus **meo-meorcing**. Jangan melarang **meorcing**, lalu kemungkaran dibicarakan. ■

Pada berita kedua yang berjudul **Sebelum Ditangkap Ba'asyir kecam Demokrasi** (Koran Tempo edisi Selasa 10 Agustus 2010 Halaman A3) media mengangkat sejumlah 'alasan penting' mengapa tokoh semacam Ba'asyir itu layak ditangkap dan ditahan. Koran tempo merepresentasikan alasan penangkapan itu karena pernyataan pernyataan Ba'asyir yang anti demokrasi dan anti pemerintah. Sebelum penangkapan, Baasyir berpidato mengecam pemerintah terkait dengan perlakuan terhadap dirinya dengan mengatakan bahwa orang

Islam yang mau menjalankan Islam dengan benar akan dicap sebagai Islam Garis Keras atau *Fundamentalis*. Ba'asyir mengatakan bahwa Islam adalah ideologi yang paling benar, paling cocok untuk mengatur kehidupan manusia dan dunia. Sedangkan demokrasi itu kurang ajar karena berupaya menetapkan Allah di posisi yang lebih rendah ketimbang manusia. Ba'asyir dalam ceramahnya menegaskan bahwa Ahmadiyah dan golongan lain seperti Jaringan Islam Liberal sebagai golongan *murtad*, yang dibentuk oleh orang *kafir* untuk mengobok-obok dan merusak Islam dari dalam. Serangan terhadap Islam ini menurut Ba'asyir disebut *Ghazwul fikri* atau perang pemikiran yang lebih berat ketimbang perang mengangkat senjata sehingga *Ahmadiyah* harus diusir dan diperangi. Negara Indonesia dianggap Ba'asyir adalah negara kafir dan pemerintahan di Indonesia bukan pemerintahan Islam, karena membiarkan sesuatu yang merusak Islam dari dalam dan dianggap sebagai hak asasi.

Meski begitu, *Koran Tempo* juga dalam teks yang sama menampilkan pendapat berbeda dengan Ba'asyir dari narasumber yang bertentangan dengan kelompok Ba'asyir.

Koran Tempo merepresentasikan bahwa Ideologi yang dianut Ba'asyir dianggap aneh, oleh narasumber lain seperti Tokoh *Jaringan Islam Liberal*, Ulil Abshar. Tokoh ini menyebut pemikiran Ba'asyir kacau.

Narasumber dalam berita ini adalah Ba'asyir Tokoh JIL, Ulil Abshar Abdalla dan Anggota Komnas Ham, Yoseph Adhi Prasetyo. Identitas Ba'asyir sebagai tokoh anti demokrasi dan anti pemerintah Indonesia yang dianggapnya kafir, coba dikonfrotir oleh anggota Jaringan Islam Liberal, yang mencoba mematahkan argumen Ba'asyir soal demokrasi yang anti Islam. Sikap Ba'asyir, yang melihat isu *Ahmadiyah* dan Jaringan Islam Liberal sebagai musuh Islam, ditampilkan begitu jelas, seakan disodorkan oleh *Koran Tempo* untuk menjelaskan siapa Ba'asyir sesungguhnya.

Upaya konfirmasi dan menjaga keseimbangan yang dilakukan wartawan terhadap narasumber, khususnya kelompok

terduga terorisme tidak dilakukan. Informasi yang disampaikan hanyalah fakta sebelum terjadinya penangkapan atas Ba'asyir yakni saat ada ceramah di Mesjid *Ikhwanul Qorib*, Babakan Priangan Bandung. Seolah-olah pernyataan dan isi ceramah Ba'asyir ini adalah alasan logis mengapa akhirnya *Amir* JAT ini ditangkap. Padahal tidak ada penjelasan dan bukti-bukti yang ditampilkan oleh polisi untuk memperkuat klaim bahwa Ba'asyir memang layak ditangkap Isi ceramah Ba'asyir ini kemudian ditanggapi oleh narasumber *Koran Tempo* dari *Jaringan Islam Liberal* dan pihak lain yang melihat ideologi yang dipegang Ba'asyir adalah keliru karena menganggap Demokrasi sebagai musuh Islam.

Analisis Berita 3

Tabel 5.4
Analisis Teks 3

JUDUL	Ba'asyir Dituding Terlibat Terorisme di Aceh
Narasumber	-Kepala Bareskrim Mabes Polri Komjen Ito Sumardi -Kadiv Humas Polri Edward Aritonang -anggota tim pengacara Muslim Mahendrata -hasil reportase wartawan <i>Koran Tempo</i> sendiri
Frame/pokok berita	Baasyir ditangkap karena diduga memiliki hubungan dengan kelompok teroris di Aceh -Basyir dituduh merestui bahkan memberi dana pada kelompok terorisme yang dipimpin oleh Abdullah Sunata

Representasi/representasi aktor	<ul style="list-style-type: none"> -Meski dituduh, Ba'asyir tidak ditampilkan suaranya -tak ada keseimbangan berita, Ba'asyir seolah dihilangkan dalam pemberitaan -<i>Koran Tempo</i> tidak melakukan verifikasi narasumber, dan tidak kritis dan menelan bulat-bulat pernyataan dari aparat kepolisian tanpa lebih dahulu mengecek kebenarannya, selain itu <i>Koran Tempo</i> tidak melakukan cover both sides
Nilai-nilai Berita	<ul style="list-style-type: none"> -Prominence (keterkenalan) -Konflik (isu terorisme) -important (menyangkut kepentingan orang banyak) -Proximity (dekat atau bersentuhan dengan kepentingan orang banyak)

Pada berita ketiga, yang berjudul **Ba'asyir Dituding Terlibat Terorisme di Aceh** (*Koran Tempo* edisi Selasa 10 Agustus 2010 halaman A2) memuat penjelasan pihak Kepolisian alasan mengapa Ba'asyir ditangkap.

Berita itu merepresentasikan dia ditangkap, karena adanya dugaan Ba'asyir memiliki keterkaitan dengan sejumlah aksi terorisme di beberapa daerah di antaranya Aceh. Polisi menduga ada keterkaitan antara Ba'asyir dengan Abdullah Sunata sebagai pemimpin gerakan pelatihan teroris di Aceh Besar.

Koran Tempo memuat Ba'asyir diduga turut dalam perencanaan awal sampai terbentuknya *Al Qaida Aminah* yang berfungsi sebagai basis militer di Aceh. Selain itu Ba'asyir diduga mengetahui semua rangkaian pelatihan teroris di Aceh dan mendapat laporan rutin pengelola di lapangan, Abu Tholut. Polisi

menjelaskan bahwa pihaknya masih mengumpulkan data dan bukti, tetapi polisi tidak sembarangan mengambil dan mengamankan orang tanpa bukti keterlibatan orang tersebut dalam kasus terorisme. Sementara itu, dari pihak Ba'asyir direpresentasikan memrotos adanya ketidakcermatan tuntutan dan UU atau pasal-pasal yang diterapkan untuk menjerat Ba'asyir.

Pada berita ketiga yang berjudul **Ba'asyir Dituding Terlibat Terorisme di Aceh** ini, identitas Ba'asyir sebagai tokoh penting dalam jaringan teroris dijelaskan secara gampalng. Polisi menduga ada keterkaitan antara Ba'asyir dengan Abdullah Sunata sebagai pemimpin gerakan pelatihan teroris di Aceh Besar. Ba'asyir diduga turut dalam perencanaan awal sampai terbentuknya *Al Qaida Aminah* yang berfungsi sebagai basis militer di Aceh. Tetapi sayangnya tidak disertai bukti yang memadai. Tanpa adanya konfirmasi, wartawan Koran Tempo begitu saja percaya pada klaim polisi bahwa Ba'asyir diduga megetahui semua rangkaian pelatihan teroris di Aceh dan mendapat laporan rutin pengelola di lapangan, Abu Tholut . Identitas Ba'asyir sebagai pimpinan jaringan teroris ini tidak disertai bukti kuat. Dugaan Polisi ini tidak begitu kuat, Polisi hanya bisa menjelaskan bahwa pihaknya masih mengumpulkan data dan bukti, tetapi polisi tidak sembarangan mengambil dan mengamankan orang tanpa bukti keterlibatan orang tersebut dalam kasus terorisme.

Pihak Ba'asyir tidak diminta konfirmasinya soal kebenaran tuduhan polisi bahwa Ba'asyir tidak hanya terlibat dalam gerakan terorisme di Aceh, tetapi juga terlibat dalam sejumlah kegiatan terorisme. Sumber kepolisian yang menyebut bahwa Baasyir terlibat dalam sejumlah aksi, dan diduga turut serta melakukan perencanaan, merestui dan mendanai pelatihan teroris di Aceh, tidak didukung bukti-bukti yang kuat atau lewat serangkaian investigasi jurnalistik lapangan yang bisa menguak kebenaran data yang diberikan polisi. Koran Tempo tidak menempatkan pembelaan dari kelompok Ba'asyir dalam porsi

yang seimbang, tetapi hanya percaya mentah-mentah pernyataan kepolisian.

Analisis Berita 4

Tabel 5.5
Analisis Teks 4

JUDUL	<i>Kesaksian dari Tanah Rencong Jerat Ba’asyir</i>
Narasumber	-Kepala Divisi Humas Edward Aritonang -Kepala Badan Reserse Mabes Polri Ito Sumardi -Imam Masjid Agung Kota Banjar H Mahfud Sidiq (semua narasumber yang dipilih tak ada satupun yang membela atau berempati kepada Baasyir
Frame/pokok berita	Kesaksian para pelaku dan saksi dari aksi terorisme di tanah Aceh, justru memberatkan dan menjerat Ba’asyir sebagai pelaku terorisme
Representasi/misrepresentasi aktor	-terjadi delegitimasi Ba’asyir -Suara Ba’asyir tidak ditampilkan - Berita berat sebelah, hanya jurnalisme klaim - <i>Koran Tempo</i> tidak cover both sides, tidak melakukan verifikasi narasumber dan tidak memberi kesempatan yang sama bagi kelompok Ba’asyir untuk menyampaikan informasi

Pada berita keempat yang berjudul **Kesaksian dari Tanah Rencong Jerat Ba'asyir** (*Koran Tempo*/Edisi no.3267/tahun X/ Selasa 10 Agustus 2010/ Halaman A4) Baasyir ditangkap adalah hasil pengembangan penyidik yang telah menangkap 102 tersangka teroris di Aceh.

Ada satu benang merah yang menghubungkan antara aksi terorisme di Aceh dengan Baasyir yaitu proses pelatihan kemiliteran di Aceh dan rencana kegiatan meledakan sejumlah sasaran, hingga temuan laboratorium di Cibiru, Bandung berkaitan dengan Abu Bakar Baasyir. Meski peran dan keterlibatan Baasyir belum jelas, dalam teks berita *Koran Tempo* menjelaskan bahwa penangkapan Baasyir tidak ada tendensi ataupun pengalihan dari isu yang sekarang berkembang, termasuk masalah rekening gendut perwira kepolisian. *Koran Tempo* merepresentasikan bahwa polisi berupaya memberi argumen kuat saat menangkap Ba'asyir karena bukti kuat yang melibatkan Ba'asyir dalam aksi terorisme agak lemah.

Identitas teroris yang ditangkap, Arifin dan Tomji tidak digambarkan secara detil, tetapi aksi keduanya dijadikan alasan mengapa Ba'asyir ditangkap. Secara detil, diakui oleh polisi belum bisa dijelaskan apa peranan dan keterlibatan Ba'asyir,

Mabes Polri, hotel, dan kedutaan besar asing di Jakarta jadi sasaran.

Kesaksian dari Tanah Rencong Jerat Ba'asyir

JAKARTA — Penangkapan Abu Bakar Ba'asyir, kemarin pagi, merupakan hasil pengembangan penyidikan tim Detasemen 88 Antiteror Kepolisian RI terhadap terduga pelaku teror yang tergabung dalam kelompok Aceh. Menurut Kepala Divisi Humas Mabes Polri Edward Arifin, setelah menangkap 102 tersangka teroris di Aceh pada 2 Juli lalu, Denas menangkap Arifin di Solo dan Tomji alias Warso di Indramayu, Jawa Barat.

"Arifin merupakan pencari akses untuk mendapatkan senjata yang dipakai latihan militer di Aceh, sedangkan Warso bertugas merekrut anggota yang akan dilatih di Aceh," kata Edward di kantornya kemarin.

Berdasar penangkapan itu, dilanjutkan, penyidikan terus berkembang ke penangkapan lima

orang di daerah Bandung pada Sabtu (7 Agustus) pekan lalu. Mereka adalah Rahrur Rozi Tanjung alias Bayu, Hamzah alias Helmi, Ghofur, Kurma Widodo alias Ujung, dan Us-tadz Kiki Muhammad Iqbal. Pada hari yang sama, sekitar pukul 11.45 WIB, tim Denas juga menangkap Ghofur di Subong.

"Dari rangkaian penangkapan itu, tim Denas menemukan satu benang merah yang menghubungkan dengan Abu Bakar Ba'asyir," kata Edward. Proses pelatihan kemiliteran di Aceh dan rencana kegiatan meledakan sejumlah sasaran, hingga temuan laboratorium di Cibiru, Bandung, menurut Edward, "Berkaitan dengan Abu Bakar Ba'asyir."

Secara detail, Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Ito Sumardi belum bisa menjelaskan pe-

ran dan keterlibatan Ba'asyir tersebut. "Nanti disampaikan saat ada hasil penyidikan tim kita. Saat ini belum bisa (komentar). Kita lakukan pengamanan, tahanan," ujarnya di kantor Wakil Presiden kemarin. Itu juga belum bisa memastikan apa saja jerat hukum yang akan dikenakan terhadap Ba'asyir.

Ito memastikan, dalam kasus penangkapan Ba'asyir tidak ada tendensi ataupun pengalihan dari isu yang sekarang berkembang, termasuk masalah rekening gendut perwira kepolisian. "Biarlah proses ini berjalan, apa yang dilakukan Polri tidak ada tendensi apa-apa," kata dia. "Ini murni profesional masalah hukum."

Edward melanjutkan, hingga saat ini polisi tidak menemukan adanya dokumen rencana penyerangan

terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam proses penangkapan mereka, penyidik hanya menemukan dokumen rencana penyerangan ke Markas Besar Kepolisian. "Penyidik menemukan beberapa dokumen, sketsa Markas Brigade Mobil Kepolisian Daerah Jawa Barat di Cikuh, Bandung," kata dia.

Sasaran lainnya adalah Mabes Polri di Jakarta, hotel bertaraf internasional, dan kedutaan besar asing di Jakarta. "Hotel dan kedutaan besar yang dituju lebih dari dua," kata Edward.

Soal penangkapan Ba'asyir, imam Masjid Agung Kota Banjar, Haji Mahfud Sidiq, mengaku keaget. Sepengalaman dia, materi pengajian Ba'asyir hanya tafsir Al-Quran biasa. ■ (KORAN TEMPO/10 AGUSTUS 2010)

tetapi sosok ini langsung ditahan. Meski Ba’asyir disebut-sebut, tak ada upaya *Koran Tempo* untuk menyeimbangkan berita dengan melakukan wawancara dengan Ba’asyir. Sejumlah narasumber yang digunakan hanyalah pihak kepolisian seperti Kepala Divisi Humas Mabes Polri Edward Aritonang, Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Ito Sumardi..Di bagian ending berita, hanya ada satu paragraf yang menampilkan Imam Masjid Agung Kota Banjar, Haji Mahfud Sidiq, tetapi narasumber ini tidak digali secara lebih rinci dan lengkap sebagaimana narasumber kepolisian, soal kesaksian dari Aceh yang akhirnya menjerat Ba’asyir .

unsur relasi antara wartawan dan narasumber terlihat amat timpang. Ini merupakan berita satu sisi, hanya mempercayai satu informasi yakni kepolisian tanpa melakukan investigasi apa betul bahwa kasus pelatihan teroris di Aceh itu memang melibatkan Ba’asyir. *Koran Tempo* menelan mentah-mentah informasi dan klam dari kepolisian tanpa mencoba memberi keseimbangan berita. Lead berita *Koran Tempo* yang menyinggung-nyinggung Ba’asyir tetapi tidak menyertakan adanya konfirmasi dari Ba’asyir.

Analisis Berita 5

Tabel 5.6
Analisis Teks 5

JUDUL	<i>Lima Serangkai Penebar Teror</i>
Narasumber	Juru Bicara Mabes Polri, Edward Aritonang
Frame/pokok berita	Ada keterkaitan antara penemuan lab pembuatan bom di Ci Biru dengan Ba’asyir
Representasi/misrepresentasi aktor	-ada delegitimasi narasumber -pelaku penebar teror dihilangkan dalam

	<p>pembicaraan/wacana</p> <p>-Meski disebut-sebut dalam pemberitaan, tetapi Ba'asyir dan lima orang tersangka tidak diberi kesempatan bicara,</p> <p>-<i>Koran Tempo</i> begitu saja percaya pada klaim kepolisian dan tidak mencoba melakukan Cover both sides atau melakukan investigasi langsung terkait statemen kepolisian</p> <p>-<i>Koran Tempo</i> cenderung menerapkan jurnalisme klaim yang hanya melakukan penilaian, tapi tidak melakukan investigasi dan melakukan verifikasi terhadap kebenaran berita</p>
Nilai-nilai Berita	<p>Importan, magnitude, dan proximity karena amat terkait dengan kepentingan banyak orang</p>

Lima Serangkai Penebar Teror

JAKARTA — Abu Bakar Ba'asyir dikaitkan dengan rencana teror setelah Detesemen Khusus 88 Antiteror menangkap lima ter-sangkanya di Bandung, Subang, dan

Padalarang, Jawa Barat. Sabtu pekan lalu, juru bicara Markas Besar Kepolisian RI, Inspektur Jenderal Edward Aritonang, men-
natakan polisi menemukan satu

benang merah yang menghu-bungkan Ba'asyir dengan jaring-an teroris di Tanah Air. Keleka-itan pengasah Pondok Pesantren Ngruki, Jawa Tengah, ini dimulai

dari proses pelatihan militer di Aceh hingga ditemukannya labo-ratorium kimia di Cibiru, Ban-dung, untuk mendukung rencana pengeboman selanjutnya.

INILAH KELIMA TERSANGKA ITU:



1
Fahrur Rozi Tanjung
ALIAS BARU

PERAN DAN BARANG BUKTI

Polisi membekuk keduanya di Jalan Manise, Kemang Sukaluyu, Cibiru, Bandung. Barang bukti berupa satu mobil Mitsubishi Gallant, yang diduga disisakan untuk bom mobil, diista polisi. Pemilik mobil adalah lelaki warga negara Prancis, dan isterinya warga negara Maroko. "Dia memberikan mobil tersebut ke-



2
Hamzah
ALIAS HELMI

pada kelompok ini," kata juru bi-cara Polri, Inspektur Jenderal Ed-ward Aritonang, kemarin. Polisi berkoordinasi dengan in-terpol untuk melacak jejak secaa-sang suamistri itu. "Untuk men-getahui siapa dia dan perannya dengan membeli satu mobil ber-nomor seri B-1600-KE yang disila-pkan sebagai bom mobil," ujarnya.

PERAN DAN BARANG BUKTI



3
Ghofur

Pada hari yang sama, sek-ter pada pukul 11.45 WIB, tim Detesemen Khusus 88 Antiteror menangkap Ghofur di Subang, Jawa Barat. Dari tangan lelaki ini, polisi menyit-
ta 54 butir amunisi kaliber 38, cairan kimia, asam nitrat, supek urea, dan tabung-tubung bahan kimia. "Sempat terjadi keajaiban karena dia berusaha lari dengan se-peda motor," kata Edward.

PERAN DAN BARANG BUKTI

Sarjana teknik kimia lu-lusan tahun 2000 ini di-tangkap di Jalan Cimariene, Padalarang, Bandung. Dia berperan sebagai teknisi la-boratorium yang mengatur camou-ran pembuatan bom. "Laboratoriumnya di Cibiru, Bandung," kata Edward. Polisi mengklaim, bom yang diista memiliki daya ledak cukup besar dan sangat berisiko bila dipindahkan dari laboratorium tersebut. "Terorisa dilakukan dispo-sisi (dimusnahkan) di labo-



4
Kurnia Widodo
ALIAS UJANG

torium itu tadi malam (Ming-gu malam). Ledakan meng-sabutkan rumah dan tembok dua lantai bisa samosai bergeser," kata Edward.



5
Ustadz Kiki

Polisi juga menokok Ustadz Kiki di terminal Cileunyi, Bandung, pa-da Sabtu lalu. Dalam penangkapan itu, polisi menyita aneka bahan baku bom, buku tentang jihad, supek urea, timbangan digital, detonator, bahan perakit, dan potasium klorat. "Bahan itu untuk mempersiapkan pembuatan bom mobil," katanya.

Pada teks berita kelima yang berjudul **Lima Serangkai Penebar Teror** (*Koran Tempo*, edisi Selasa, 10/8/2010 halaman A4) Ba'asyir dikaitkan dengan rencana teror setelah lima tersangka teroris ditangkap di Bandung. Menurut polisi ada benang merah yang menghubungkan Ba'asyir dengan jaringan teroris di tanah air. Benang merah keterlibatan Ba'asyir ini dimulai dengan proses pelatihan militer di Aceh, hingga ditemukannya laboratorium untuk mendukung rencana pengeboman selanjutnya. Narasumber yang dipilih *Koran Tempo* hanya satu sisi yaitu pihak aparat keamanan sedangkan suara dari pihak yang ditangkap diabaikan, dan pihak Ba'asyir yang dikaitkan dengan rencana teroris tidak dijadikan narasumber.

Yang paling menyolok adalah pada berita yang berjudul **Lima Serangkai Penebar Teror** (*Koran Tempo*, edisi Selasa 10/8/2010 halaman A4). Meski nama Ba'asyir disebut-sebut, dan dikaitkan dengan rencana teror, tapi tak ada upaya konfirmasi

dari Ba'asyir tentang benar tidaknya klaim polisi. Identitas Ba'asyir secara sepihak diekspos oleh *Koran Tempo* yang menelan secara bulat, klaim dari juru bicara Mabes Polri, Edward Aritonang .

Identitas narasumber yang bisa membuktikan keterlibatan Ba'asyir dibalik penemuan laboratorium tempat pembuatan bom teroris tidak dijelaskan. Narasumber satu-satunya untuk berita *Lima Serangkai Penebar Bom* hanyalah Juru Bicara Mabes Polri, Edward Aritonang, identitas narasumber ini jelas hanya sepihak menyuarakan kepentingan kepolisian, dan ketika menyatakan bahwa Ba'asyir terkait dengan rencana teror terkait dengan penemuan laboratorium kimia di Ci biru Bandung.

Tak ada narasumber lain yang dikutip oleh *Koran Tempo*, untuk mengimbangi pemberitaan satu sisi ini. *Koran Tempo* seakan hanya percaya bahwa informasi kepolisian yang menyebut Ba'asyir terkait dengan rencana teror adalah satu-satunya kebenaran.

Koran Tempo langsung percaya saja terhadap isi pernyataan dan klaim polisi soal keterlibatan Ba'asyir dalam sejumlah aksi terorisme, dan tidak melakukan investigasi untuk mencari kebenaran yang ada.

Meski judulnya lima serangkai penebar teror, tetapi narasumbernya hanya seragam yaitu dari pihak kepolisian belaka, ke lima orang yang dituduh terlibat dalam kegiatan laboratorium kimia tidak diberi ruang untuk bicara mengkonfirmasi apakah mereka memang benar-benar melakukan hal tersebut. Meski dalam sub judul ditulis sejumlah peran dan barang bukti, yang mengaitkan pelaku penebar teror, tetapi sumber yang digunakan *Koran Tempo* hanyalah Edward Aritonang, juru bicara kepolisian.

Analisis Berita 6

Tabel 5.7
Analisis Berita 6

JUDUL	<i>Sang Amir yang Sudah Lama Diincar</i>
Narasumber	-Ba'asyir -Jubir Kepolisian,Edward Aritonang -Mahendradata, tim pengacara muslim
Frame/pokok berita	-Polri semakin yakin soal dugaan keterlibatan Ba'asyir setelah menangkap Ubeid atau Luthfi Haesdaroh pada 12 April lalu di Medan -Ubeid mengaku pernah ada pertemuan dengan Ba'asyir membahas soal latihan di Aceh -Menurut Polisi, dugaan keterlibatan Ba'asyir dalam aksi terorisme makin mencuat setelah penggerebegan di Cibiru Bandung
Representasi/misrepresentasi aktor	Bukti-bukti yang ditunjukkan polisi masih amat lemah karena hanya berdasarkan pernyataan kepolisian atas hasil pemeriksaan salah satu tersangka, <i>Koran Tempo</i> tidak mencoba melakukan verifikasi
Nilai-nilai Berita	-important, prominence, proximity dan menarik perhatian pembaca

Pada teks berita ke enam yang berjudul ***Sang Amir yang Sudah Lama Diincar*** (*Koran Tempo*/Edisi no.3267/tahun X/ Selasa 10 Agustus 2010/ Halaman A3) Ba'asyir sebagai 'Amir' sudah lama diincar sejak 2008. Baasyir mendirikan *Jamaah Anshorut Tauhid (JAT)* setelah meninggalkan Majelis Mujahidin Indonesia pada tahun 2008. Tujuan pendirian JAT adalah *Daulah Islamiyah* yakni menginginkan peraturan di Negara ini sesuai dengan *syariat Islam*.

Koran Tempo merepresentasikan Ba'asyir yang menganut *Daulah Islamiyah* Ideologi ini jelas bertentangan dengan ideologi Pancasila yang dipegang teguh Indonesia. *Koran Tempo* merepresentasikan bahwa sebagai *Amir* (pimpinan), Ba'asyir memiliki kekuatan mutlak, Jamaah harus taat kepada *amir*, kecuali jika *amir* melakukan maksiat. Nama Baasyir mulai disebut-sebut, ketika Mei 2010, Densus 88 menangkap belasan anggota JAT di Pejaten, 7 di antaranya dijadikan tersangka kegiatan terorisme. Ba'asyir mulai dikaitkan terlibat aksi terorisme setelah april 2010 polisi menangkap Ubeid atau Luthfi Haedaroh di Medan. Ubeid adalah instruktur utama pelatihan kemiliteran *Alqaeda* Serambi Mekah Aceh.

Dalam teks berita ini *Koran Tempo* menegaskan bahwa dugaan keterlibatan Ba'asyir makin kuat setelah penggerebegan di Ci biru, Kota Bandung. Pelatihan militer di Aceh dan rencana kegiatan di Cibiru berkaitan dengan Abu Bakar Ba'asyir Meski

Sang Amir yang Sudah Lama Diincar

JAKARTA — Abu Bakar Ba'asyir mendirikan Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) setelah meninggalkan Majelis Mujahidin Indonesia pada 2008. Di organisasi baru ini, pemimpin Pondok Pesantren Al-Mukmin, Ngruki, Sukoharjo, Jawa Tengah, tersebut didapat sebagai amir atau ketua. Menurut Ba'asyir, JAT adalah sebuah jemaah, bukan organisasi. Itu berarti, siapa pun bebas masuk dan keluar. Tak ada seleksi serta sistem pengawasan yang ketat.

Sebagai amir, kata Ba'asyir, dia memiliki kekuasaan mutlak. "Jema-

ah harus taat kepada amir, kecuali jika amir melakukan maksiat," ujarnya. Mei lalu, dia menjelaskan, tujuan pendirian JAT adalah Daulah Islamiyah, yakni menginginkan peraturan di negara ini sesuai dengan syariat Islam.

Untuk mencapai tujuan tersebut, kata Ba'asyir, pihaknya menggunakan perjuangan melalui dakwah dan jihad. "Jihad tidak berarti meleakkan bom," ujarnya. Bom dileakkan hanya di daerah penung. Sedangkan Indonesia merupakan wilayah yang aman sehingga bom ti-

dak boleh dileakkan.

Mei lalu, Detasemen Khusus 88 Antiteror Kepolisian RI menangkap belasan anggota Jamaah Anshorut Tauhid di Pejaten, Jakarta Selatan. Belakangan, polisi menetapkan tujuh tersangka yang diduga terkait dalam kegiatan terorisme. Sisanya dibebaskan.

Nama Ba'asyir mulai disebut-sebut pada saat reka ulang di Pejaten. Saat itu para anggota Jamaah mengaku sedang menunggu kedatangan sang amir.

Polisi semakin yakin soal dugaan

keterlibatan Ba'asyir setelah menangkap Ubeid atau Luthfi Haedaroh pada 12 April lalu di Medan. Ubeid adalah instruktur utama pelatihan kemiliteran Al-Qaidah Serambi Mekah (Aceh). Dia mengakui pernah ada pertemuan dengan Ba'asyir membahas soal latihan di Aceh. Pertemuan itu juga dihadiri Mustajir, alumnus Mindanao.

Menurut polisi, dugaan keterlibatan Ba'asyir dalam aksi terorisme makin mencuat setelah penggerebegan di Cibiru, Kota Bandung, akhir pekan lalu. Dari tempat ini

tim antiteror menangkap lima orang yang diduga teroris. "Pelatihan militer di Aceh dan rencana kegiatan di Cibiru berkaitan dengan Abu Bakar Ba'asyir," ujar juru bicara Kepolisian RI, Inspektur Jenderal Edward Arifonang, setelah penangkapan Ba'asyir di Banjar, Jawa Barat, kemarin.

Mahendradatta dari tim pengacara Ba'asyir menyatakan klemnya menolak penangkapan itu. "Karena tidak jelas kejadian terorisme mana dan peristiwa apa," katanya di markas kepolisian. ■ RUTH UDEKA

begitu Mehendradata dari tim pengacara Ba'asyir mengatakan kliennya menolak penangkapan itu, karena tidak jelas tuduhan keterlibatan Ba'asyir dalam kejadian terorisme mana dan peristiwa apa.

Pada berita berjudul **Sang Amir yang Sudah Lama Diincar** (*Koran Tempo*/Edisi no.3267/tahun X/ Selasa 10 Agustus 2010/ Halaman A3) Identitas Ba'asyir dalam berita ini ditulis sebagai seorang "*Amir*" atau pemimpin dalam *khazanah* Islam.

Identitas ini melekat pada diri Ba'asyir sejak mendirikan *Jamaah Anshorut Tauhid (JAT)* setelah meninggalkan Majelis Mujahidin Indonesia pada 2008. Sebagai imam, Ba'asyir dianggap bertanggungjawab pada segala aksi para anggotanya yang berpegang teguh pada tujuan pendirian JAT adalah *Daulah Islamiyah* yakni menginginkan peraturan di Negara ini sesuai dengan syariat Islam. Identitas kelompok JAT ini secara ideologi digambarkan menyimpang, karena Ideologi ini jelas bertentangan dengan ideologi Pancasila yang dipegang teguh Indonesia

Berita ini tidak secara jelas mengungkap kapan Ba'asyir mengatakan secara langsung bahwa dia mendirikan JAT, dan menjelaskan bahwa sebagai Amir, Ba'asyir dia memiliki kekuasaan mutlak. Ada unsur *when dan where* yang hilang pada Lead berita, sehingga tidak jelas apakah wartawan Koran Tempo melakukan wawancara langsung, mengingat Ba'asyir sudah ditangkap polisi. Kendati banyak pihak yang dicoba ditonjolkan dalam berita untuk memberikan keyakinan bahwa Ba'asyir memang benar-benar terlibat dalam aksi terorisme, tetapi Ba'asyir seakan dikucilkan dan tidak direpresentasikan dalam berita. Koran Tempo seakanhanya percaya pada satu sumber belaka yaitu kepolisian.

Analisis Berita 7

Tabel 5.8
Analisis Teks 7

JUDUL	FPI Menilai Ba'asyir Korban Rekayasa
Narasumber	-Ketua FPI Muhammad Rizieg Shihab -Kadivhumas Polri Edward Aritonang
Frame/pokok berita	Ba'asyir adalah korban rekayasa isu terorisme dan dituding sebagai orang yang mendanai aksi terorisme di Aceh Polri membantah temuan FPI, Sufyan yang ditahan polisi bukan dari Brimob tetapi dari Sabhara Polres Depok yang dipecat karena tidak pernah masuk -Sufyan masuk kelompok Oman Abdurrahman tersangka bom Cimanggis dan dibawa untuk pelatihan ke Aceh
Representasi/misrepresentasi aktor	-Koran Tempo melakukan delegitimasi atas kelompok Islam yang diduga melakukan aksi terorisme -Koran Tempo begitu saja percaya tanpa mencoba melakukan investigasi kebenaran dari klaim kedua belah pihak, ini bisa menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat pada aksi aparat kepolisian

Nilai-nilai Berita

Proximity, prominence
(menyangkut/narasumber
orang terkenal, dan penting
karena isunya sangat dekat
dengan pembaca

FPI Menilai Ba'asyir Korban Rekayasa

JAKARTA — Abu Bakar Ba'asyir dalam teroris di Aceh? Itu kata polisi. Konon ada "teori" lain. Setidaknya, itulah yang diyakini oleh Ketua Front Pembela Islam (FPI) Muhammad Rizieq Shihab. Dia tidak percaya pemimpin Jamaah Anshorut Tauhid itu mendanai teroris di Aceh seperti dituduhkan oleh polisi.

"Ba'asyir adalah korban rekayasa isu terorisme," kata Rizieq di rumahnya di kawasan Petamburan, Jakarta, kemarin.

Rizieq mengaku punya temuan khusus soal itu. Dia mengatakan, tim investigasi FPI menemukan fakta yang berbeda dengan tuduhan polisi. "Teroris Aceh dibiayai oleh Sufyan Sauri, desertir anggota Brigade Mobil Polri, yang juga merekrut dan melatih militan di Aceh," kata Rizieq. Ia menuturkan, Sufyan telah dipecat dari kesatuannya beberapa tahun yang lalu dengan alasan poligami, jarang masuk, dan terlibat gerakan jahili. Namun, pada Februari 2009, menurut temuan FPI, Sufyan mengirim kelompok militan Aceh ke Jakarta.

nembak di Markas Komando Brimob," kata Rizieq. "Mereka berlatih dengan senjata AK-47 dan 50 peluru tajam dalam satu sesi. Satu militan dibekali uang satu selama sebulan di Ibu Kota."

Dengan temuan itu, FPI menduga, Sufyan merupakan tokoh sentral dalam pelatihan kelompok militan di Indonesia. Adapun Ba'asyir sekadar dijadikan tumbal. Dugaan seperti itu muncul dari pengakuan 13 tersangka teroris yang ditangkap di Pejaten, Jakarta Selatan, yang kemudian dilepas polisi. "Tiga di antaranya anggota kami," kata Munarman, Ketua Advokasi FPI. "Kami minta polisi membuka peran Sufyan ke publik," Rizieq menambahkan.

Saat diminta konfirmasi, Kepala Divisi Humas Mabes Polri Edward Aritonang menyatakan Sufyan, yang kini ditahan polisi, bukan anggota Brimob, melainkan Sabhara Polres Depok. Ia dipecat dari kesatuannya karena tidak pernah masuk. Lalu, Sufyan masuk kelompok Oman Abdulrahman, tersangka bom Cimanggis, dan dibawa untuk pelatihan ke Aceh. "Mereka merencanakan berangkat ke Palestina sebagai sukarelawan jihad," kata Edward semalam.

Berkaitan dengan tujuan itulah, Edward melanjutkan, Sufyan melatih delapan sukarelawan tersebut di lapangan tembak belakang Makro Brimob. Latihan tersebut dilakukan secara ilegal melalui teman Sufyan yang menjadi anggota Brimob. Mereka berlatih tak sampai sepekan. Kini, teman Sufyan yang memasukkan dia dan delapan anak buahnya telah diproses dan ditahan. "Senjata yang dipakai Sufyan dan kawan-kawan diperoleh dari temannya yang bertugas di bagian logistik Polri," ujar Edward. "Orang tersebut akhirnya juga diproses dan ditahan." ■ REZA

BAKURAH | HARAJIRAH SAFIRA | DWI WIDHA

Pada berita ke tujuh yang berjudul FPI Menilai Ba'asyir Korban Rekayasa (*Koran Tempo*/Edisi no.3267/tahun X/ Selasa 10 Agustus 2010/Halaman A4) Koran Tempo melakukan representasi sebagai berikut. Ba'asyir yang ditangkap polisi, adalah korban rekayasa isu terorisme dan dituding sebagai orang yang mendanai aksi terorisme di Aceh.

Dari hasil investigasi, FPI menemukan fakta bahwa teroris Aceh itu dibiayai oleh Sufyan Sauri disertir anggota Brigade Mobil Polri yang juga merekrut dan melatih militer di Aceh. Sufyan telah dipecat dari kepolisian, namun pada februari 2009 Sufyan mengirim kelompok militan Aceh ke Jakarta. Anehnya mereka berlatih menembak di markas Brimob, berlatih dengan senjata AK-47 dan 50 peluru tajam. Sufyan juga diduga merupakan tokoh sentral dalam pelatihan kelompok militan di

Indonesia. Adapun Ba'asyir sekedar dijadikan tumbal. Koran Tempo dalam teks berita ini melakukan cover both sides dengan menampilkan suara dari kepolisian. Polri membantah temuan FPI, Sufyan yang ditahan polisi bukan dari Brimob tetapi dari Sabhara Polres Depok yang dipecat karena tidak pernah masuk . Sufyan masuk kelompok Oman Abdurrahman tersangka bom Cimanggis dan dibawa untuk pelatihan ke Aceh.

Identitas Sofyan atau Sufyan yang menjadi tokoh utama terkesan kabur karena banyak informasi yang saling bertolak belakang. Informasi dari pihak kepolisian tidak sama dengan apa yang diyakini kepolisian. Sementara itu, pihak Ba'asyir yang menjadi topik pembicaraan justru tidak dimintai keterangan sehingga informasinya menjadi simpang siur.

Analisis Berita 8

Tabel 5.9
Analisis Teks 8

JUDUL	Polisi Yakini Mustawan Anggota JAT
Narasumber	-Wakil Jubir Mabes Polri, Kombes Ketut Untung Yoga -Muhammad Ahwan,pemimpin JAT -Kepala Bidang Penerangan Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Malaysia, Widyarka Ryananta
Frame/pokok berita	Polisi yakin Mustawan Ahabab WNI yang ditangkap di Kuala Lumpur adalah anggota Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) -Mustawan diduga bagian dari jaringan teroris yang beroperasi di Malaysia dan

	Indonesia -Pernyataan itu dibantah oleh Pemimpin JAT, karena tidak ada anggota JAT bernama Mustawan
Kelemahan/kekurangan	Tidak ada verifikasi pernyataan narasumber, termasuk data- data akurat hasil investigasi wartawan sendiri
Nilai-nilai Berita	Important, proximity, prominence

Pada berita ke delapan yang berjudul **Polisi Yakini Mustawan Anggota JAT** (*Koran Tempo*, Sabtu 14/8/2010) Mabes Polri yakin Mustawan Ahbab, WNI yang ditangkap di Kuala Lumpur adalah anggota *Jamaah Anshorut Tauhid (JAT)*. Mustawan ditangkap polisi Malaysia karena diduga bagian dari jaringan teroris yang beroperasi di Malaysia dan Indonesia. Dugaan polisi itu dibantah oleh pemimpin JAT Jawa Timur. Polisi dianggapnya selalu mencoba mengkaitkan setiap kegiatan terorisme dengan Abu Bakar Ba'asyir. *Koran Tempo* begitu percaya pada klaim polisi bahwa Mustawan memang adalah anggota *Jamaah Anshorut Tauhid (JAT)* dimana Ba'asyir sebagai imamnya. Tak ada upaya dari *Koran Tempo* melakukan konfirmasi dan investigasi untuk memverifikasi bahwa memang Mustawan adalah anggota JAT

Analisis Berita 9

Tabel 5.10
Analisis Teks 9

JUDUL	<i>Ba'asyir Dulmatin Dituduh Rancang Pelatihan Militer</i>
Narasumber	<ul style="list-style-type: none">-Ubaid Al Luthfi HaidarohAktivis JAT yang ditangkap pada Maret 2010 setelah ikut pelatihan militer di Aceh-peliputan <i>Koran Tempo</i>-Dokumen laporan kegiatan pelatihan militer di Aceh-Kuasa Hukum Ba'asyir , Achmad Michdan dari Tim Pengacara Muslim-Kepala Bidang Penerangan Umum Kombes Marwoto Soeto
Frame/pokok berita	<p>Ba'asyir diduga pernah bertemu Dulmatin pada Februari 2009 di sebuah rumah di Ngruki Sukoharjo membicarakan soal pelatihan militer di wilayah Aceh</p> <p>-Ubaid mengaku ikut hadir pada pertemuan antara Ba'asyir dan Dulmatin, buron tersangka teroris yang telah ditembak mati oleh polisi di pamulang Banten 9 Maret lalu</p>
Representasi/misrepresentasi aktor	<ul style="list-style-type: none">-Ba'asyir tidak mendapat kesempatan bicara-terjadi proses delegitimasi terhadap Ba'asyir

	- <i>Koran Tempo</i> tidak berupaya melakukan verifikasi, dan percaya begitu saja pernyataan aparat kepolisian tentang pertemuan Ba'asyir dan Dulmatin, dan <i>tidak cover bothsides</i>
Nilai-nilai Berita	Proximity, important dan prominence

Pada berita ke sembilan yang berjudul ***Ba'asyir Dulmatin Dituduh Rancang Pelatihan Militer*** (*Koran Tempo*/Edisi no.3267/tahun X/ 16 Agustus 2010/ Halaman A 2) *Koran Tempo* merepresentasikan bahwa Amir *Jamaah Ansharut Tauhid* (JAT) Abu Bakar Ba'asyir diduga pernah bertemu Dulmatin. Ba'asyir tersangka kasus terorisme yang ditangkap Detasemen Khusus 88 Anti Teror pada Senin Pekan lalu, diduga pernah bertemu dengan Dulmatin berdasarkan pengakuan Ubaid yang ditangkap polisi.

Ubaid mengaku ikut hadir pada pertemuan antara Ba'asyir dan Dulmatin, buron tersangka teroris yang telah ditembak mati oleh polisi di Pamulang Banten 9 Maret 2010. Dari hasil pemeriksaan polisi, Ubaid mengaku bahwa pada pertemuan itu Ba'asyir memberikan Rp 180 juta dan US \$ 5000 kepadanya pada November 2009. Menurut dokumen pemeriksaan itu, pelatihan militer di bukit Krueng Linteung, seperti yang dilaporkan ke Ba'asyir, dimulai pada 28 Januari 2010 tepat pukul 08:00 WIB. Dulmatin yang membukanya secara resmi, polisi bersikukuh bahwa Ba'asyir dan Dulmatin memang benar-benar bertemu dan membicarakan rencana pelatihan militer, tetapi pihak Ba'asyir membantah dan berargumen bisa saja informasi dari Ubaid itu tidak murni tetapi karena ditekan oleh aparat keamanan.

Identitas Ba'asyir yang disebut sebagai 'amir' atau pemimpin *Jamaah Ansharut Tauhid* (JAT) diduga pernah

bertemu dengan Dulmatin. Tetapi pertemuan tersebut hanya berdasarkan pengakuan dari Ubaid al Lutfi Haidaroh aktivis JAT yang telah ditangkap oleh Densus 88 Maret 2010.

Tidak jelas Identitas siapa narasumber yang bisa memastikan bahwa Amir Jamaah Anshorut Tauhid benar-benar bertemu dengan Dulmatin. *Koran Tempo* hanya mengaitkan dengan adanya dokumen pemeriksaan Ubaid, sedangkan Dulmatin sendiri adalah buronan teroris yang sudah ditembak mati oleh polisi di Pamulang Banten, 9 Maret 2010.

Koran Tempo tidak memberi kesempatan bagi Ba'asyir untuk melakukan konfirmasi mengenai identitas dan tuduhan yang diberikan polisi kepadanya. *Koran Tempo* hanya menyampaikan bantahan Ba'asyir dari kuasa hukum Ba'asyir di paragraf-paragraf akhir, sedang di judul dan *Lead*, koran ini lebih mengutamakan sumber resmi. Bantahan pendukung/pengacara Ba'asyir ditujukan pada 'identitas' Ubaid yang dianggap mereka mengaku dan mengatakan hal itu karena dibawah tekanan polisi,

BERITA UTAMA

KORAN TEMPO
SENIN, 16 AGUSTUS 2010

A2

Ba'asyir-Dulmatin Dituduh Rancang Latihan Militer

"Bisa saja pengakuan itu berdasar tekanan," kata Achmad Michdan

JAKARTA — Amir Jamaah Ansharut Tauhid (JAT) Abu Bakar Ba'asyir, tersangka kasus terorisme yang ditangkap Detasemen Khusus 88 Anti-teror pada Senin pekan lalu, diduga pernah bertemu dengan Dulmatin. Pertemuan itu berlangsung pada Februari 2010 di sebuah rumah toko di Ngruki, Sukoharjo, Jawa Tengah. Meski hanya bertemu selama sepelempat jam, Ba'asyir dan Dulmatin memutuskan hal penting, yakni menggelar pelatihan militer di wilayah Aceh.

Pertemuan Ba'asyir dengan Dulmatin itu terungkap lewat pengakuan Ubaid al-Lutfi Haidaroh, aktivis JAT yang ditangkap Densus 88 pada Maret lalu, setelah terlibat pelatihan militer di Aceh. Bahkan, seperti tertulis dalam dokumen pemeriksaan polisi, Ubaid ikut hadir dalam pertemuan antara Ba'asyir dan Dulmatin, buron tersangka teroris yang telah ditembak mati oleh polisi di Pamulang, Banten, 9 Maret lalu.

Setelah keputusan pelati-



Lutfi Haidaroh alias Ubaid

an militer di Aceh ditetapkan, dalam dokumen yang sama disebutkan bahwa Ba'asyir memberikan Rp 180 juta dan US\$ 5.000 kepada Ubaid pada November 2009 di Surakarta. Thoib, bendahara Jamaah Ansharut Tauhid, menyerahkan Rp 25 juta ke orang yang sama. "Dana ini dipakai Dulmatin untuk menyiapkan kegiatan pelatihan," begitu tertulis dalam dokumen, seperti dilansir majalah *Tempo* edisi terbit yang terbit hari ini.

Setelah uang di tangan, Ubaid ditemani Machfud, tersangka lain, berangkat ke Jakarta dengan bus Rosalia Indah. Mereka turun di terminal Lebak Bulus, lalu

mengantar uang ke kontrakan Dulmatin di Ciputat.

Melalui Ubaid, Dulmatin kembali meminta bantuan dana kepada Ba'asyir. Pertemuan 2009, Ubaid bertandang ke rumah Ba'asyir untuk mengambil uang. "Saat itu Ba'asyir memberikan uang Rp 5 juta dan meminta Ubaid kembali menemui Thoib, yang menyerahkan Rp 10 juta," demikian tertulis di dokumen itu. Terakhir, Dulmatin mendapat pucukan dana dari Thoib sebesar Rp 10 juta pada awal 2010.

Menurut dokumen pemeriksaan itu, pelatihan militer di bukit Krueng Linteung, seperti yang dilaporkan ke Ba'asyir, dimulai pada 28 Januari 2010 tepat pukul 09.00 WIB. Dulmatin yang membarkanya secara resmi.

Saat dimintai konfirmasi, Ba'asyir membantah pengakuan Ubaid bahwa dia pernah bertemu dengan Dulmatin di Ngruki pada Februari 2009. Bantahan itu disampaikan kuasa hukum Ba'asyir dari Tim Pengacara Muslim (TPM), Achmad Michdan.

Tak pernah ada pertemuan itu, Ba'asyir membantahnya," kata Michdan kepada *Tempo* kemarin. Kalau perte-

muan itu benar, ia melanjutkan, "Kenapa polisi tidak langsung tangkap Ba'asyir? Katanya polisi selalu mengikuti gerak-gerik ustaz."

Menurut dia, Ubaid adalah orang yang ditutup aksesnya oleh polisi untuk mendapat dampingan dari TPM. Jadi, bisa saja kesaksian tersebut berdasar tekanan. "Jangan dipercaya," ujar Michdan.

Dalam kaitan dengan penangkapan Ba'asyir, penyidik akan mengeluarkan surat keterangan penahanan setelah tersangka menjalani pemeriksaan 7 x 24 jam, seperti diatur dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana teror. "Besok (hari ini), kami keluarkan surat penahanan," kata Kepala Bidang Penerangan Umum Komisaris Besar Marwoto Soeto kemarin.

Selamat, Michdan menambahkan bahwa mulai hari ini, Ba'asyir menjadi tahanan kepolisian dan akan mengungsi di ruang tahanan Mabes Polri hingga 15 Desember 2010. "Ustad Ba'asyir melalui tim pengacara menandatangani surat penolakan berita acara penahanan," katanya.

● SETIYU WABO / (SUKMA DEWIKA / MAURIDNA SARIFA / ENI WISMA

dan wartawan tidak langsung mendapat pengakuan tersebut dari Ubaid karena Ubaid ditutup aksesnya dan tidak mendapatkan pendampingan dari pengacara dari TPM (Tim pengacara Muslim).

Ba’asyir yang dituduh rancang pelatihan militer tidak diberi kesempatan untuk menyanggah atau melakukan konfirmasi.Koran Tempo juga tidak secara kritis melakukan investigasi sendiri, dan hanya percaya pada keterangan kepolisian yang mengatakan bahwa Ba’asyir memang terlibat dalam perancangan pelatihan teroris di Aceh

Analisis Berita 10

Tabel 5.11
Analisis Teks 10

JUDUL	Ba’asyir Dituding Terkait jaringan Medan
Narasumber	-Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Iskandar Hasan -Kapolri, Bambang Hendarso Danuri -Jubir Ponpes Al Mukmin, Ade Hidayat -Penasehat Hukum MMI (Majelis Mujahidin Indonesia), Julheri Sinaga
Frame/pokok berita	- Abu Bakar Ba’asyir diduga memiliki keterkaitan dengan jaringan teroris medan yang satu persatu dibekuk polisi -Biaya pelatihan di Sinabung juga diduga berasal dari Ba’asyir -Pelatihan militer itu juga pernah menggelar latihan di

	<p>Sinabung dan Deli Serdang Sumatera Utara</p> <p>-Jubir Ponpes Al-Mukmin mengatakan tuduhan polisi bahwa Ba'asyir membiayai pelatihan militer mengada-ada. Untuk biaya hidup saja Ba'asyir justru dibantu orang lain, jadi darimana dia punya uang?</p>
Representasi/misrepresentasi aktor	<p>-ada upaya penghilangan pihak yang dituduh dan dikeluarkan dalam pembicaraan/wacana</p> <p>-ada ketidakseimbangan porsi kesempatan menyampaikan opini</p> <p>-Tak ada upaya verifikasi narasumber apakah sudah sesuai dengan kebenaran, - <i>Koran Tempo</i> percaya saja dan menelan mentah-mentah semua pernyataan pihak kepolisian soal keterlibatan Ba'asyir dalam aksi terorisme di Medan, walaupun mengutip narasumber pendukung Ba'asyir ditempatkan di akhir berita dan porsinya sangat sedikit</p>
Nilai-nilai Berita	<p>Proximity, prominence, dan important karena menyangkut kepentingan orang banyak</p>

Pada berita ke sepuluh yang berjudul **Ba'asyir Dituding Terkait jaringan Medan** (*Koran Tempo*, 21/9/2010, Halaman A 2) digambarkan bahwa Polisi yakin Abu Bakar Ba'asyir diduga terkait dengan jaringan teroris Medan. Ini berkat

kesaksian anggota teroris yang satu persatu dibekuk polisi. Direpresentasikan juga bahwa biaya pelatihan militer teroris jaringan Medan di Sinabung juga diduga berasal dari Ba'asyir. Begitu juga, para anggota jaringan teroris Alqaidah Tanzim Aceh tidak hanya pernah berlatih di Jalin Jantho Aceh, tapi pernah juga berlatih di Sinabung dan Deli Serdang, Sumatera Utara. Koran Tempo juga menampilkan perlawanan dari kelompok pro Ba'asyir. Menurut mereka tuduhan terhadap Ba'asyir mengada-ada karena untuk membiayai hidup saja Ba'asyir justru masih dibantu orang lain. Kalaupun Ba'asyir menggalang dana, itu bukan untuk kegiatan terorisme tetapi untuk aksi kegiatan kemanusiaan di Palestina.

Sosok Ba'asyir yang dituduh memiliki keterkaitan dengan jaringan teroris medan nyaris tanpa bukti. Identitas Ba'asyir sebagai aktor di balik jaringan teroris Medan ini hanya disampaikan secara sepihak oleh kepolisian, oleh Kepala Divisi



PENYERGAPAN TERORIS MEDAN KORAN TEMPO
SELASA, 21 SEPTEMBER 2010 **A2**

Ba'asyir Dituding Terkait Jaringan Medan

Mereka pernah berlatih di Sinabung dan Deli Serdang.

MEDAN — Kepala Divisi Humas Markas Besar Kepolisian RI Inspektur Jenderal Iskandar Hasan mengatakan Abu Bakar Ba'asyir diduga memiliki keterkaitan dengan jaringan teroris Medan, yang satu per satu dibekuk polisi. "Biaya pelatihan di Sinabung juga diduga berasal dari Ba'asyir," kata Iskandar dalam jumpa pers di Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara kemarin. Yang dimaksudkan Iskandar adalah pelatihan militer kelompok Medan yang sebelumnya disebutkan Kepala Polri Jenderal Bambang Hendarsa Danuri. Kepada wartawan, Bambang mengungkapkan, para

anggota jaringan teroris Al-Qaidah Tanzim Aceh tidak hanya pernah melakukan latihan militer di Jalin Jantho, Aceh Besar. Kelompok yang belakangan dituduh beraksi dalam sejumlah perampokan itu juga pernah menggelar latihan di Sinabung dan Deli Serdang, Sumatera Utara. "Kami luput dari informasi ini," kata Bambang. Menurut Bambang, pelatihan di Sinabung dan Deli Serdang baru diketahui saat para tersangka perampokan Bank CIMB Niaga Medan tertangkap. Menurut para tersangka, selain di Aceh, ada lokasi pelatihan di dua lokasi lain di Sumatera Utara. Namun ihwal keterkaitan para teroris dengan jaringan Jamaah Ansharut Tauhid, yang dipimpin Abu Bakar Ba'asyir, Bambang tak menjelaskan secara terperinci.

"Masih didalami," kata dia. Juru bicara Pondok Pesantren Al-Mulkin, Ade Hidayat, mengatakan tuduhan polisi bahwa Ba'asyir membiayai pelatihan militer mengada-ada. Pasihnya, kata dia, untuk biaya hidup saja Ba'asyir justru dibantu orang lain. "Saya murid beliau di pesantren, tahu kehidupan beliau, tahu keseharian beliau. Di rumah, kursi saja enggak ada, mobil dikasih orang, telepon dari saweran. Jadi dari mana beliau punya duit," kata Ade saat dihubungi tadi malam. Kalaupun Ba'asyir melakukan penggalangan dana dari pengikutnya, menurut Ade, itu bukan untuk aksi terorisme, melainkan untuk kegiatan kemanusiaan, seperti di Palestina. Tadi malam, sekitar pukul 20.00 WIB, belasan aktivis

Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) Sumatera Utara mendatangi Markas Detasemen Khusus 88 Antiteror Polda Sumatera Utara. Penasihat hukum MMI, Julherti Sinaga, mengatakan mereka datang untuk mempertanyakan alasan penangkapan Bendahara MMI Kasman Hadiyono, 43 tahun. Menurut Julherti, pihaknya menduga Kasman ditahan hanya karena memiliki kaitan sebagai abang ipar Marwan alias Nanong, yang tewas ditembak Denas 88 dalam penyerangan di Deli Serdang. Namun, di Markas Denas 88, para anggota MMI ini tidak mendapatkan informasi tentang Kasman. Belasan aktivis MMI itu lalu berangkat menuju Rumah Sakit Bhayangkara untuk mencari Kasman. ● BERSAMA SUDAHARI / SUKUNA MUKANDI / BAPANDANG ACEH / ANTITEROR / ANTAKSA

Humas Mabes Polri, Iskandar Hasan.

Penggambaran polisi bahwa Ba'asyir yang memiliki uang banyak sehingga mampu membiayai aktivitas gerakan teroris di Medan dan membiayai pelatihan teroris di Aceh, menurut juru bicara Pondok Pesantren Al Mukmin, terlalu mengada-ada, karena kehidupan sehari-hari Ba'asyir jauh dari cukup. Identitas para teroris di Aceh, yang diidentifikasi sebagai anggota jaringan teroris Al Qaidah Tanzim Aceh sendiri tidak dijelaskan, tetapi polisi meski tanpa bukti yang memadai langsung menuduh bahwa Abu Bakar Ba'asyir terkait dengan jaringan teroris Medan. Nara sumber utama dalam berita itu adalah pihak kepolisian dari Judul hingga enam paragraf berita, sedangkan bantahan dari pengikut Ba'asyir hanya diberikan tempat 2 paragraf.

Analisis Berita 11

Tabel 5.12
Analisis Teks 11

JUDUL	Kelompok Medan Dipimpin Abu Tholut
Narasumber	-Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri -Kadivhumas Mabes Polri Inspektur Jenderal Iskandar Hasan
Frame/pokok berita	-Kelompok teroris yang beroperasi di Medan, Sumut dan sekitarnya dipimpin oleh Abu Tholut alias Mustofa, dengan banyak nama samara seperti Pranata Yudha alias Herman alias Imron dan kini masih buron -Para tersangka yang ditangkap mengaku berkordinasi dengan

	<p>Abu Tholut</p> <ul style="list-style-type: none"> -Mengenai asal senjata yang digunakan oleh jaringan ini, polisi menduga kelompok yang disebut sebagai bagian dari jaringan teroris Al Qaidah Tanzim Aceh, berasal dari Negara-negara di Asia Tenggara -Otak berbagai perampokan itu berinisial I yang masih buron
Representasi misrepresentasi aktor	<ul style="list-style-type: none"> -terjadi penghilangan atau eksklusi subjek pemberitaan atau kelompok yang dituduh melakukan aksi terorisme dalam wacana -pihak yang dituduh tidak diberikan tempat,tidak memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan konfirmasi -<i>Koran Tempo</i> tidak melakukan verifikasi narasumber, tidak coverboth sides dan hanya percaya mentah-mentah pada apa yang dikatakan pihak kepolisian dan tidak melakukan investigasi sendiri untuk menemukan kebenaran dari informasi yang didapatkan di lapangan
Nilai-nilai Berita	Important, proximity dan prominence

Pada berita ke-11 yang berjudul **Kelompok Medan Dipimpin Abu Tholut** (*Koran Tempo*, 21/9/2010) Koran ini juga menelan bulat-bulat pernyataan polisi bahwa kelompok teroris di Medan diidentifikasi merupakan jaringan teroris yang dipimpin oleh Abu Tholut yang pernah menjadi *Ketua Mantiqi III Jamaah Islamiyah*. Kelompok teroris medan disebut sebagai bagian dari jaringan teroris *Al-Qaidah Tanzim Aceh*. Dalam pengungkapan teroris di Medan, polisi menyita sepucuk senjata api laras panjang, tiga pistol jenis FN dan ratusan peluru. Juga ditemukan peledak TNT seberat 1,5 kilogram, sangkur, parang, telepon selular, detonator, cakram digital serta berbagai



Mereka membeli senjata dari Filipina, Thailand, Kamboja, dan Vietnam.

MEDAN — Kelompok teroris yang berasal di Medan, Sumatera Utara, dan sekitarnya diidentifikasi merupakan jaringan yang dipimpin oleh Abu Tholut alias Mustafa. Pria ini diketahui memiliki banyak nama samaran lain, di antaranya Pranata Yachia alias Herman alias Imron, dan kini masih menjadi buron Detasemen Khusus 88 Antiteror.

"Para tersangka yang ditangkap mengaku berkoordinasi dengan Abu Tholut," kata Kepala Kepolisian RI Jenderal Bambang Hendarso. Dan dari dalam jumpa pers di Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Medan, kemarin sore.

Abu Tholut sebelumnya pernah divonis dalam kasus teroris selama delapan tahun. Namun ia hanya menjalani penahanan selama 4,5 tahun karena mendapat remisi berkali-kali.

Menurut Kepala Polri, setelah menjalani hukuman, Abu Tholut kembali terjun ke ja-

aringan pelaku terorisme. Meski begitu, Abu Tholut diperkirakan tidak secara langsung memimpin aksi perampokan Bank CIMB Niaga Medan pada 10 Agustus lalu dan aksi-aksi serupa di sekitar Sumatera Utara.

Berdasarkan penyidikan polisi, otak berbagai perampokan ini adalah seseorang berinisial I. "Saat ini ia juga masih buron," kata Bambang Hendarso.

Dalam penangkapan besaran-besaran terhadap anggota jaringan teroris yang melakukan pelatihan militer di Aceh beberapa waktu lalu, nama Abu Tholut sebenarnya sudah masuk radar petugas. Ia bahkan dimasukkan dalam daftar pencarian orang oleh polisi, bersama nama-nama besar dalam jaringan ini, seperti Umar Patek dan Taufik Gulaga.

Mengenai asal senjata yang digunakan oleh jaringan ini, polisi mencla kelompok yang

disebut sebagai bagian dari jaringan teroris *Al-Qaidah Tanzim Aceh* ini memperolehnya dari negara-negara di Asia Tenggara. "Mereka membeli senjata api dari Filipina dan negara-negara Asia Tenggara," kata Kepala Polri.

Kepala Divisi Humas Markas Besar Kepolisian Inspektur Jenderal Iskandar Hasan menyebutkan, selain Filipina, para teroris menyisir Thailand, Kamboja, dan Vietnam untuk membeli senjata api. "Semua yang dibeli adalah senjata bekas," tuturnya.

Dalam pengungkapan teroris di Sumatera Utara, polisi menyita sepucuk senjata api laras panjang AK-56 dan tiga pistol jenis FN dengan ratusan peluru. Juga ditemukan peledak TNT seberat 1,5 kilogram, sangkur, parang, telepon seluler, detonator, cakram digital, serta berbagai perangkat elektronik.

● SIKISTATA SILALAH/1 | SOETANA MONANG HASIBUAN

JEJAK ABU

1987: Latihan konilitoran di Kijanghian Angkatan IV tahun 1987/1988.

1987/1988: Menjadi instruktur kamp militer Al Islami di Jannah di Mualakar Udayabih, Filipina Selatan.

1999: Menjadi Ketua Mantiqi III Jannah Islamiyah sebelum tertangkap di Semarang. Selama menjadi Ketua Mantiqi III, ia menjadi proyek "uhuk" Pono, yang bertugas merekrut para pemuda Pono untuk dilatih militer. Proyek ini menghasilkan kelompok Terorist Haruh, yang akhirnya sudah banyak melakukan berbagai macam teror.

Juli 2003: Ditangkap polisi karena kepemilikan senjata api.

● ADUNG SIKISTATA | EVAN

rangkaian elektronik.

Identifikasi kelompok teroris Medan ini hanya berasal dari Kepala Kepolisian RI dan Kadiv Humas Mabes Polri, sedangkan informasi alternatif lain seputar sosok atau identitas para pelaku dari 'jaringan teroris' Medan ini tidak ada. *Koran Tempo* dengan wartawan Mustafa Silalahi/Soetana Monang Hasibuan, tidak menyertakan sumber alternatif lain selain pihak kepolisian untuk

mencari kebenaran sesungguhnya yang terjadi dan percaya saja pada apa yang diklaim polisi.

Sumber hanya Kapolri, *Koran Tempo* tidak mencoba melakukan konfirmasi dari kelompok Abu Tholut. Koran ini juga tidak melakukan investigasi langsung, apakah memang benar apa yang disampaikan oleh polisi terkait dengan kelompok teroris Medan yang melakukan aksi perampokan di CIMB Niaga. Begitu juga ketika Kapolri sebagai narasumber utama menyebut bahwa kelompok teroris medan ini bagian dari jaringan teroris *Al-Qaidah tanzim Aceh*, *Koran Tempo* tidak melakukan konfirmasi soal kebenaran klaim ini. Relasi *Koran Tempo* pada kelompok teroris di Medan seakan putus dan tidak ada

Analisis Berita 12

Tabel 5.13
Analisis Teks 12

JUDUL	Teroris Di Balik Perampokan Medan
Narasumber	Kapolri, Jenderal Bambang Hendarso Danuri
Frame/pokok berita	-Perampokan bersenjata yang menyerang Bank CIMB Niaga Medan pada 18 agustus 2010 dilakukan kelompok teroris yang selama ini diburu polisi -Kelompok perampok ini telah melakukan aksi serupa di sejumlah bank dan tempat penukaran uang Showroom kendaraan dan bank lain -hasil perampokan dipakai untuk membiayai rencana

	<p>operasi terorisme, termasuk untuk pelatihan militer serta pembelian senjata</p> <p>-itu yang disebut sebagai dana Fa'I .Dana</p> <p>dikumpulkan dari hasil perampokan yang mereka halalkan</p> <p>-Densus 88</p> <p>mengidentifikasi ada 33 anggota jaringan ini. Mereka juga terkait dengan jaringan teroris yang melakukan latihan militer di Aceh</p> <p>-Sebanyak 18 anggota jaringan ditangkap. 3 diantaranya tewas, dan sekitar 15 yang lain diburu</p>
Representasi/misrepresentasi aktor	<p>-aktor yang dibicarakan dalam pemberitaan justru tidak diberikan panggung</p> <p>-terjadi upaya eksklusif penghilangan aktor yang dibicarakan dan tidak ditampilkan dalam wacana secara seimbang</p> <p>-Sumber hanya sepihak, <i>Koran Tempo</i> tidak melakukan verifikasi atas pernyataan narasumber, <i>tidak cover both sides</i> dan cenderung percaya mentah-mentah apa yang dikatakan oleh pihak kepolisian</p>
Nilai-nilai Berita	<p><i>Important</i> karena menyangkut kepentingan orang banyak, <i>proximity</i> karena isu yang dianggap</p>

	sangat dekat dan punya keterkaitan dengan warga Indonesia
--	---

Pada berita ke-12 yang berjudul **Teroris Di Balik Perampokan Medan** (*Koran Tempo*, 21/9/2010), *Koran Tempo* menggambarkan bahwa perampokan bersenjata di Bank CIMB Niaga Medan pada 18 agustus 2010 dilakukan jaringan teroris yang sedang diburu polisi. *Koran Tempo* juga menjelaskan bahwa hasil perampokan dipakai untuk membiayai rencana operasi terorisme termasuk untuk pelatihan militer serta pembelian senjata dan amunisinya, yang disebut oleh kelompok teroris sebagai *dana (Fai)*. *Dana Fai* adalah dana yang dikumpulkan dari hasil perampokan yang mereka halalkan. Ada sekitar 33 anggota jaringan teroris di Medan, dan terkait dengan jaringan teroris yang melakukan latihan di Aceh. Jaringan ini telah merampok sejak April 2010 (Bank Sumut Medan dan menggondol Rp.600 juta), kemudian 3 juni 2010 merampok Bank BRI di Ampelas Medan dan mengambil Rp.60 juta, kemudian pada 12 juni 2010 merampok *money changer* di Belawan dan mengurus Rp 13 juta, dan pada 18 Agustus 2010 merampok Bank CIMB Niaga Medan dan merampas Rp 300 juta.

Perampokan bersenjata di Bank CIMB Niaga Medan pada 18 agustus 2010 dilakukan jaringan teroris yang sedang diburu polisi. Perampok diidentifikasi oleh pihak kepolisian, ada sekitar 33 anggota jaringan teroris di Medan, dan terkait dengan jaringan teroris yang melakukan latihan di Aceh. Mereka merampok untuk membiayai kegiatan terorisme mereka, dengan merampasnya dari harta non Muslim. Tetapi kebenaran sejati apakah mereka memang benar melakukan itu untuk kepentingan terorisme, tidak ditampilkan. *Koran Tempo*, khususnya wartawan Mustafa Silalahi dan Sutana Moenang Hasibuan, hanya menampilkan satu-satunya narasumber yakni Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri. Mereka tidak melakukan *cek ricek*

apakah berita atau klaim yang disampaikan oleh polisi memang benar-benar mengandung kebenaran.

Analisis Berita 13

Tabel 5.14
Analisis Teks 13

JUDUL	Aksi Perampokan Dianggap Halal
Narasumber	-Nasir mantan pemimpin Jamaah Islamiyah -Noorhuda Ismail, pengamat terorisme -Dynno Chressbon pengamat terorisme -Kapolri Bambang Hendarso Danuri -data Tempo
Frame/pokok berita	-Perampokan oleh kelompok teroris dilakukan terhadap harta yang mereka anggap halal yakni harta yang bukan milik muslim -Perampokan itu digunakan untuk menggalang dana, sebagai contoh perampokan terhadap Bank Lippo Medan (2003) dan took emas milik non muslim di Serang. Pemerintahpun dianggap kafir sehingga mereka merasa bebas berbuat apapun - Kelompok teroris meyakini bahwa uang rampokan sebagai <i>faT</i> atau pampasan perang, karena situasi saat

	<p>ini dianggap perang. <i>Fa'I</i> pun halal diambil dari kelompok di luar mereka</p> <p>-Perampokan itu digunakan untuk membiayai kegiatan terorisme, seperti membeli senjata, dan mengongkosi kegiatan organisasi</p> <p>- Data <i>Tempo</i> peristiwa Bom Natal (2000), Bom Bali I (12 Oktober 2002), bom Bali II (1 Oktober 2005) dibiayai dengan uang jarahan</p>
Representasi/misrepresentasi aktor	<p>Walaupun pernyataan itu seakan-akan didukung narasumber yang kuat, tetapi hanya satu sisi, itu dari narasumber yang pro pemerintah/aparat kepolisian sehingga informasinya tidak seimbang</p>
Nilai-nilai Berita	<p>Important karena berkaitan dengan kepentingan masyarakat banyak, juga prominence karena narasumbernya cukup terkenal, dan Proximity karena</p>

Pada teks berita ke-13 yang berjudul **Aksi Perampokan Dianggap Halal** (Koran Tempo, 21/9/2010) Koran Tempo menggambarkan bahwa hasil rampokan kelompok teroris dianggap halal, karena mereka merampok harta yang bukan milik orang Muslim.

Aksi Perampokan Dianggap Halal

JAKARTA — Mantan pemimpin Jamaah Islamiyah, Nasir Abbas, mengatakan perampokan oleh kelompok teroris dilakukan terhadap harta yang mereka anggap halal. "Yakni (harta) yang bukan milik muslim," kata Nasir kepada *Tempo* semalam.

Kegiatan itu dilakukan untuk menggalang dana guna membiayai aksi terorisme. "Perampokan hanya salah satu cara menggalang dana," kata dia. Nasir mencontohkan perampokan terhadap Bank Lippo Medan (2003) dan toko emas milik non-muslim di Serang. Pemerintah pun dianggap kafir sehingga mereka merasa bebas berbuat apa pun.

Pengamat terorisme Noorhuda Ismail mengatakan kelompok teroris meyakini uang rampokan sebagai *fa'i* atau pampasan perang, karena situasi saat ini dianggap perang. *Fa'i* pun halal diambil dari kelompok di luar mereka.

Adapun Dynno Chressbon, pemerhati terorisme, menyatakan metode *fa'i* menyumbang dana paling besar bagi kelompok teroris. "Karena itu sering digunakan," ujar Dynno. Bahkan dana *fa'i* dari Malaysia dan Filipina juga pernah masuk ke Indonesia.

Pada 18 Agustus silam, Bank CIMB Niaga di Jalan A.R. Hakim, Medan, dirampok oleh segerombolan pria.

Mereka mengkasak uang lebih dari Rp 300 juta dan mencabut nyawa Brigadir Satu Immanuel Simanjuntak, 28 tahun, anggota Brimob penjaga bank. Pada Ahad lalu, polisi berhasil membekuk 13 tersangka pelaku perampokan itu dan tiga di antaranya ditembak mati.

Kemarin Kepala Kepolisian RI Jenderal Bambang Hendarsno Danuri menyatakan perampokan itu digunakan untuk membiayai kegiatan terorisme, seperti membeli senjata dan mengongkosi kegiatan organisasi. Dalam keterangan pers di Markas Polda Sumatera Utara, Medan, itu, ia juga menuturkan,

kelompok teroris menghalalkan perampokan dan pembunuhan terhadap polisi.

Berdasarkan data *Tempo*, peristiwa bom Natal (2000), bom Bali I (12 Oktober 2002), dan bom Bali II (1 Oktober 2005) dibiayai dengan uang jarahan. Bom Bali I dibiayai dengan uang rampokan Rp 400 juta dari toko emas Elita Indah di Pertokoan Royal, Serang, Banten, akhir Maret 2002. Pelakunya kelompok Banten, yakni Abdul Rauf dan Andri Octavia. Adapun uang Rp 80 juta untuk membiayai bom Bali II antara lain diperoleh dari merampok toko ponsel di Pekalongan, Jawa Tengah, pada September 2005. ● ANDRIULAH | BAFWANING ARIH | JOEPE S

Dalam konsep para teroris, aksi perampokan hanya salah satu cara untuk menggalang dana, dan kelompok teroris meyakini bahwa uang rampokan sebagai '*fa'i*' atau pampasan perang, karena situasi di Indonesia saat ini dianggap suasana perang. Di sisi yang lain mereka menganggap Pemerintah Indonesia adalah kafir sehingga mereka bebas melakukan apa saja termasuk merampok harta warga non muslim. Metode *Fa'i* dianggap bisa menyumbang dana paling besar bagi kelompok teroris, sehingga sering dilakukan. Bahkan dana *fa'i* dari Malaysia dan Filipina juga pernah masuk ke Indonesia. Perampokan di Medan menurut polisi dilakukan kelompok teroris untuk membiayai kegiatan terorisme seperti membeli senjata dan mengongkosi kegiatan organisasi

Analisis dan Pembahasan Teks Berita

Meski Media merepresentasikan Ba'asyir ditangkap karena diduga terlihat sejumlah aksi terorisme di beberapa daerah termasuk di Aceh tapi sosok Ba'asyir yang ditampilkan tidak

diberi ruang bicara. Bisa disimpulkan Koran Tempo melakukan eksklusi. Eksklusi terjadi apabila ada aktor (seseorang/kelompok)

yang coba dihilangkan atau disembunyikan dalam pemberitaan. Proses Eksklusi ini menggunakan strategi dengan membungkusnya dalam pernyataan pihak-pihak berwenang dan memiliki kekuasaan untuk mendominasi pembicaraan /wacana yakni pihak kepolisian dan Densus 88.

Bahkan dalam sejumlah tuduhan, identitas narasumber yang menuduh itu sendiri tidak dijelaskan. Hal ini misalnya tampak pada berita berjudul : **Ba'asyir Dulmatin Dituduh Rancang Pelatihan Militer** (*Koran Tempo*/Edisi no.3267/tahun X/ 16 Agustus 2010/ Halaman A 2). Identitas Ba'asyir yang disebut sebagai 'amir' atau pemimpin Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) diduga pernah bertemu dengan Dulmatin . Tetapi pertemuan tersebut hanya berdasarkan pengakuan dari Ubaid al Lutfi Haidaroh aktivis JAT yang telah ditangkap oleh Densus 88 maret 2010. Tidak jelas Identitas siapa narasumber yang bisa memastikan bahwa *Amir Jamaah Anshorut Tauhid* benar-benar bertemu dengan Dulmatin. *Koran Tempo* hanya mengaitkan dengan adanya dokumen pemeriksaan Ubaid, sedangkan Dulmatin sendiri adalah buronan teroris yang sudah ditembak mati oleh polisi di Pamulang Banten, 9 Maret 2010.

Koran Tempo tidak memberi kesempatan bagi Ba'asyir untuk melakukan konfirmasi mengenai identitas dan tuduhan yang diberikan polisi kepadanya. *Koran Tempo* hanya menyampaikan bantahan Ba'asyir dari kuasa hukum Ba'asyir di paragraf-paragraf akhir, sedang di judul dan *Lead*, koran ini lebih mengutamakan sumber resmi.

Pengacara Ba'asyir juga tidak sependapat pada klaim polisi, mereka curiga 'identitas narasumber kepolisian' Ubaid yang mengaku dan mengatakan hal pasti karena berada dibawah tekanan polisi, dan wartawan tidak langsung mendapat pengakuan tersebut dari Ubaid karena Ubaid ditutup aksesnya dan tidak mendapatkan pendampingan dari pengacara dari TPM (Tim pengacara Muslim).

Bila dikaitkan dengan konteks pemberitaan bisa dijelaskan melalui Tabel di bawah ini.

Tabel 5.15
Konteks situasi yang digambarkan oleh media

Berita yang dianalisis	Context " <i>context of situation</i> " and " <i>context of culture</i> "	Bukti dalam teks
<p>CERAMAH BA'ASYIR SEBELUM DITANGKAP : "DEMOKRASI ITU KURANG AJAR"</p> <p>Analisis berita 1 <i>KORAN TEMPO</i> Selasa, 10 Agustus 2010</p>	<p>Jelas-jelas <i>Koran Tempo</i> secara tidak langsung berupaya mengaitkan penangkapan Ba'asyir dengan aktivitasnya sebagai penceramah agama Islam yang keras dan sebagai pemimpin Islam yang anti demokrasi dan mencoba mengaitkan penangkapannya dengan aksinya yang ingin menggoyang demokrasi . Sumber kepolisian yang dikutip oleh <i>Koran tempo</i> tidak memberikan informasi yang lengkap mengapa akhirnya Ba'asyir ditangkap.</p> <p>Eksklusi ini karena ada aktor (seseorang/kelompok) yang coba dihilangkan atau disembunyikan dalam pemberitaan. Proses Eksklusi ini</p>	<p>....Ba'asyir menyentil soal demokrasi. Menurut dia demokrasi yang berlandaskan suara terbanyak adalah kurang ajar (paragraph 4)</p> <p>...Ba'asyir beralasan , lewat demokrasi untuk menjalankan hokum Allah, orang harus meminta izin Manusia. (paragraph 5)</p> <p>Menurut dia Islam adalah ideology yang paling benar, yang paling cocok untuk mengatur kehidupan manusia dan dunia (paragraph 5)</p> <p>Dia mengatakan, dalam mengamalkan</p>

	menggunakan strategi dengan membungkusnya dalam pernyataan pihak-pihak berwenang dan memiliki kekuasaan untuk mendominasi pembicaraan /wacana yakni pihak kepolisian dan Densus 88	Islam orang memerlukan pemahaman yang benar. "Hidup harus berazaz tunggal dengan hokum Allah, mulai dari pribadi sampai Negara. Itulah Tuntutan <i>La Ilaha Ilallah</i> (paragraph 6)
SEBELUM DITANGKAP, BA'ASYIR KECAM DEMOKRASI <i>Koran Tempo</i> , Selasa 10 Agustus 2010	Ini dibuat oleh <i>Koran Tempo</i> untuk memperjelas posisi Baasyir sebagai pihak yang memang berseberangan dengan pemerintah, dengan mengangkat pendapatnya mengenai pemerintah saat ini yang dianggapnya <i>kafir</i> yang melindungi golongan <i>murtad</i> seperti kelompok <i>Ahmadiyah</i> dan <i>Jaringan Islam Liberal</i>	Ahmadiyah dan golongan lain seperti JIL (Jaringan Islam Liberal) itu golongan murtad. Mereka dibentuk orang kafir untuk merusak dan <i>mengobok-obok</i> Islam dari dalam. (paragraph 10) ...”tapi pemerintahan ini kan bukan pemerintah Islam.Negara ini bukan Negara Islam, tapi <i>Negara kafir</i> .Semua itu, meskipun merusak Islam, dianggap sebagai hak asasi” (paragraph 10)
Teks No/tgl : 3/ <i>Koran Tempo</i> /Edisi no.3267/tahun X/	-Ba’asyir coba dikaitkan terus dengan sejumlah aksi kekerasan terorisme di tanah air	ada keterkaitan antara Baasyir dan Abdullah Sunata sebagai pemimpin gerakan

<p>Selasa 10 Agustus 2010/Halaman A2</p> <p>Ba'asyir Dituding Terlibat Terorisme di Aceh</p>	<p>-Eksklusi jelas terlihat dari berita ini karena ada kelompok yang coba dihilangkan atau disembunyikan dalam pemberitaan. Proses Eksklusi ini menggunakan strategi dengan membungkusnya dalam pernyataan pihak-pihak berwenang dan memiliki kekuasaan untuk mendominasi pembicaraan /wacana yakni pihak kepolisian dan Densus 88</p> <p>-Ini untuk memberikan alasan pembenaran mengapa akhirnya Ba'asyir ditangkap, karena dia diduga terkait mendanai dan mengetahui rencana pelatihan militer di Aceh</p>	<p>pelatihan teroris di Aceh....(paragraph 3)</p> <p>....Baasyir mengetahui semua rangkaian pelatihan teroris di Aceh...(paragraph 4)</p> <p>...Dia mendapat laporan rutin pengelola di lapangan, Abu Tholut (paragraph 4)</p>
<p>Teks No/tgl : 4 /Koran Tempo/Edisi no.3267/tahun X/ Selasa 10 Agustus 2010/ Halaman A4</p> <p>Kesaksian dari Tanah Rencong Jerat Ba'asyir</p>	<p>Polisi mencoba mencari alasan pembenaran atas tindakan mereka menangkap Ba'asyir, sehingga secara hukum dan secara politik bisa dibenarkan tindakan kepolisian menangkap Ba'asyir yang dikenal memiliki pengikut yang banyak</p>	<p>Paragraf 4: "...tim Densus menemukan satu benang merah yang menghubungkan dengan Abu Bakar Baasyir, proses pelatihan kemiliteran di Aceh dan rencana kegiatan meledakan sejumlah sasaran, hingga temuan laboratorium di Cibiru bandung..."berkaitan</p>

		dengan Abu Bakar Baasyir”
<p>Teks No/tgl : 5/ <i>Koran Tempo</i>/Edisi no.3267/tahun X/ Selasa 10 Agustus 2010/Halaman A 4</p> <p>LIMA SERANGKAI PENEBAR TEROR</p>	<p>-meski diberi Judul Lima serangkai penebar terror, tetapi justru leadnya bicara tentang Ba’asyir. <i>Koran Tempo</i> dalam pemberitaan soal penangkapan lima tersangka di Bandung tetapi langsung di paragraph utamanya menyebut kata-kata Ba’asyir yang jelas-jelas tidak ada dalam peristiwa penangkapan tersebut</p> <p>-Eksklusi jelas terlihat dari berita ini karena ada kelompok yang coba dihilangkan atau disembunyikan dalam pemberitaan</p>	<p>Paragraph 1 “...Juru bicara Markas Besar Kepolisian RI, Inspektur Jenderal Edward Aritonang, me- ngatakan polisi menemukan satu benang merah yang menghubungkan Ba’asyir dengan jaringan teroris di Tanah Air...”</p> <p>Paragraf 1 “..., ini dimulai dari proses pelatihan militer di Aceh hingga ditemukannya laboratorium kimia di Cibiru, Bandung, untuk mendukung rencana pengeboman selanjutnya....</p>
<p>Teks No/tgl : 6 <i>/Koran Tempo</i>/Edisi no.3267/tahun X/ Selasa 10 Agustus 2010/ Halaman A3</p> <p>Sang Amir yang Sudah LamaDiincar</p>	<p>-Konteks ini Dikaitkan dengan gerakan JAT, sehingga alasan penangkapan Ba’asyir menjadi sangat masuk akal karena Terkait dengan tujuan JAT yang memang hendak mendirikan Daulah Islamiyah, yang bila diterapkan memang akan mengingkari berdirinya NKRI yang berlandaskan</p>	<p>“Dia menjelaskan tujuan pendirian JAT adalah <i>Daulah Islamiyah</i>, yakni menginginkan peraturan di Negara ini sesuai dengan <i>Syariat Islam</i>” (paragraph 3)</p>

	<p>Pancasila dan tidak berlandaskan <i>Syariat Islam</i></p> <p>-Konteks ini yang coba dibangun oleh <i>Koran Tempo</i> dengan menempatkan <i>flash back</i> pemberitaan ke bulan Mei, saat wawancara dengan Ba'asyir dilakukan tetapi diingatkan kembali ke <i>public</i> setelah Ba'asyir ditangkap Agustus 2010</p>	
<p>Teks No/tgl : 7 / <i>Koran Tempo</i>/Edisi no.3267/tahun X/ Selasa 10 Agustus 2010/Halaman A4</p> <p>FPI Menilai Ba'asyir Korban Rekayasa</p>	<p>-ada upaya membersihkan nama baik Ba'asyir yang coba dilakukan oleh kelompok Islam garis keras seperti Front Pembela Islam</p> <p>-Mereka mencoba membela Ba'asyir yang selalu disudutkan dan menjadi korban rekayasa, dituduh terlibat terorisme tetapi tidak pernah disodorkan argumentasi atau bukti-bukti yang memang menguatkan bahwa apa yang dituduhkan polisi memang benar adanya</p>	<p>Konon ada teori lain.Setidaknya, itulah yang diyakini oleh Ketua Front pembela Islam (FPI) Muhammad Rizieg Shihab. Dia tidak percaya pemimpin <i>Jamaah Anshorut Tauhid</i> itu mendanai teroris di Aceh seperti dituduhkan Polisi"... (paragraph 1)</p> <p>....Dengan temuan itu, FPI menduga Sufyan merupakan tokoh sentral dalam pelatihan kelompok militant di Indonesia. Adapun Ba'asyir sekedar dijadikan tumbal. Paragraph 6</p>

<p>Teks No/tgl : <i>Koran Tempo</i>/Edisi no.3267/tahun X/ 16 Agustus 2010/ Halaman A 2</p> <p>Ba'asyir Dulmatin Dituduh Rancang Latihan Militer</p>	<p>Konteks situasi yang ada adalah upaya melakukan pembenaran atas sikap polisi yang menangkap Ba'asyir sebagai alasan logis karena Ba'asyir diduga merestui dan mendanai kegiatan pelatihan militer bagi para teroris di Aceh. Perbuatan Ba'asyir adalah perbuatan yang tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan terorisme, dan sudah pernah dihukum sebelumnya tapi mengulangnya lagi</p> <p>Eksklusi jelas terlihat dari berita ini karena ada kelompok yang coba dihilangkan atau disembunyikan dalam pemberitaan</p>	<p>....Ubaid ikut hadir pada pertemuan antara Ba'asyir dan Dulmatin buron tersangka teroris yang telah ditembak mati oleh polisi di Pamulang Banten 9 Maret lalu.. (paragraph 2)</p> <p>...Ba'asyir memberikan Rp 180 juta dan US \$ 5000 kepadanya pada November 2009 di Surakarta (paragraph 3)</p>
---	---	---

Datr analisis teks secara keleseluruhan, Koran Tempo dalam sejumlah pemberitaan mereka begitu saja percaya pada satu sumber dan tidak berupaya mencari bukti-bukti penguat yang bisa memperkuat tuduhan atau di sisi yang lain menolak tuduhan tersebut. Dari table di bawah ini, sangat terlihat bahwa Koran Tempo begitu saja setuju apa saja yang disampaikan oleh aparat kepolisian mengenai Ba'asyir dan keterlibatan tokoh penting ini dalam aksi terorisme di tanah air. *Koran Tempo* mengabaikan kewajiban utama jurnalistik untuk melakukan verifikasi atas informasi yang disampaikan dengan

menampilkan bukti penguat. Koran Tempo dalam pemberitaan ini mengetengahkan alasan utama mengapa akhirnya kepolisian menangkap Ba'asyir Terkait kasus terorisme. Koran ini secara jelas mengamini tindakan aparat keamanan dan tidak mencari lebih dalam lagi apa yang sebenarnya terjadi.

Dari teks berita koran ini, ada upaya menggiring opini bahwa Ba'asyir adalah seorang tokoh Islam yang memang anti demokrasi. Bahkan istilah "Kurang Ajar" dalam Judul berita ini memperkuat posisi Ba'asyir yang memang anti terhadap demokrasi. Pada sisi yang lain, Koran Tempo memperlihatkan pandangan Ba'asyir yang menegaskan bahwa Islam adalah ideology yang paling benar dan cocok buat Indonesia, dan di sisi yang lain demokrasi itu salah karena bertentangan dengan Hukum Allah.

Pada berita yang lain Koran Tempo dalam pemberitaannya hendak menggambarkan bagaimana pandangan Ustadz Ba'asyir tentang kelompok-kelompok lain seperti Ahmadiyah dan golongan Islam Liberal. Pemahaman Ba'asyir tentang kedua golongan itu sebagai kelompok yang murtad menjadi pokok bahasan penting dalam berita ini. Begitu juga pernyataan Ba'asyir tentang pemerintahan Indonesia yang dianggap sebagai pemerintahan yang kafir mencerminkan bagaimana sikap Ba'asyir yang anti pemerintah. Koran Tempo lewat pemberitaan ini, sengaja digambarkan betapa pandangan Ba'asyir ini berbahaya dan sangat anti pemerintah, sehingga alasan penangkapan terhadap Ba'asyir Terkait dengan isu terorisme bisa diterima tanpa harus dicari bukti-bukti yang kuat.

Sedangkan sikap Koran Tempo dari hasil kajian teks memang cenderung membela kepentingan aparat kepolisian dan tidak memberi ruang atau porsi pemberitaan yang berimbang. Sikap ini wajar saja karena sesuai dengan kebijakan Koran Tempo yang berpihak pada mereka yang menjadi korban dari aksi-aksi terorisme yang dilakukan oleh kelompok Islam Garis Keras.

Tabel 5.16
Representasi
Sikap *Koran Tempo*

Berita yang dianalisis	Eksklusi/Inklusi	Bukti dalam teks
<p>CERAMAH BA'ASYIR SEBELUM DITANGKAP : "DEMOKRASI ITU KURANG AJAR"</p> <p>Analisis berita 1 <i>KORAN TEMPO</i> Selasa, 10 Agustus 2010</p>	<p>-<i>Koran Tempo</i> dalam pemberitaan ini mengetengahkan alasan utama mengapa akhirnya kepolisian menangkap Ba'asyir Terkait kasus terorisme.</p> <p>-Terjadi eksklusi karena <i>Koran Tempo</i> tidak menempatkan Ba'asyir sebagai narasumber yang bisa mengkonfirmasi tuduhan yang ditujukan padanya.</p> <p>-Koran ini secara jelas mengamini tindakan aparat keamanan dan tidak mencari lebih dalam lagi apa yang sebenarnya terjadi.</p>	<p>....Ba'asyir menyentil soal demokrasi. Menurut dia demokrasi yang berlandaskan suara terbanyak adalah kurang ajar (paragraph 4)</p> <p>...Ba'asyir beralasan , lewat demokrasi untuk menjalankan hukum Allah, orang harus meminta izin Manusia. (paragraph 5)</p> <p>Menurut dia Islam adalah ideology yang paling benar, yang paling cocok untuk mengatur kehidupan manusia dan dunia (paragraph 5)</p> <p>Dia mengatakan,</p>
	<p>-ada upaya menggiring opini bahwa Ba'asyir adalah seorang tokoh Islam yang memang anti demokrasi. Bahkan istilah "Kurang Ajar" dalam Judul berita ini memperkuat posisi Ba'asyir yang memang anti terhadap demokrasi</p>	<p>dalam mengamalkan Islam orang memerlukan pemahaman yang benar. "Hidup harus berazaz tunggal dengan hukum Allah, mulai dari pribadi sampai Negara. Itulah Tuntutan <i>La Ilaha Ilallah</i> (paragraph 6)</p>

	<p>- di sisi yang lain, <i>Koran Tempo</i> memperlihatkan pandangan Ba'asyir yang menegaskan bahwa Islam adalah ideologi yang paling benar dan cocok buat Indonesia, dan di sisi yang lain demokrasi itu salah karena bertentangan dengan Hukum Allah</p>	
<p>SEBELUM DITANGKAP, BA'ASYIR KECAM DEMOKRASI</p> <p>Koran Tempo, Selasa 10 Agustus 2010</p>	<p>-<i>Koran Tempo</i> dalam pemberitaan ini hendak menggambarkan bagaimana pandangan Ustadz Ba'asyir tentang kelompok-kelompok lain seperti Ahmadiyah dan golongan Islam Liberal</p> <p>-pemahaman Ba'asyir tentang kedua golongan itu sebagai kelompok yang murtad menjadi pokok bahasan penting dalam berita ini</p> <p>-begitu juga pernyataan Ba'asyir tentang pemerintahan Indonesia yang dianggap sebagai pemerintahan yang kafir mencerminkan bagaimana sikap Ba'asyir yang anti pemerintah</p>	<p><i>Ahmadiyah</i> dan golongan lain seperti JIL (<i>Jaringan Islam Liberal</i>) itu golongan <i>murtad</i>. Mereka dibentuk orang kafir untuk merusak dan <i>mengobok-obok</i> Islam dari dalam. (paragraph 10)</p> <p>...”tapi pemerintahan ini kan bukan pemerintah Islam.Negara ini bukan Negara Islam, tapi Negara kafir.Semua itu, meskipun merusak Islam, dianggap sebagai hak asasi” (paragraph 10)</p>

	<p>-lewat pemberitaan ini, sengaja digambarkan betapa pandangan Ba'asyir ini berbahaya dan sangat anti pemerintah, sehingga alasan penangkapan terhadap Ba'asyir Terkait dengan isu terorisme bisa diterima tanpa harus dicari bukti-bukti yang kuat.</p>	
<p>Teks No/tgl : 3/ <i>Koran Tempo</i>/Edisi no.3267/tahun X/ Selasa 10 Agustus 2010/Halaman A2</p> <p>Ba'asyir Dituding Terlibat Terorisme di Aceh</p>	<p><i>Koran Tempo</i> setuju dengan pernyataan dan tudingan pemerintah soal keterkaitan Ba'asyir dalam kasus terorisme di Aceh</p> <p>-Eksklusi jelas terlihat dari berita ini karena ada kelompok yang coba dihilangkan atau disembunyikan dalam pemberitaan</p> <p>-Koran tempo mengikuti hegemoni kekuasaan Negara dalam hal ini aparat kepolisian yang hanya berdasarkan pengakuan seorang tersangka kemudian melakukan tudingan terhadap Ba'asyir meskipun tak ada bukti-bukti yang kuat yang</p>	<p>ada keterkaitan antara Baasyir dan Abdullah Sunata sebagai pemimpin gerakan pelatihan teroris di Aceh....(paragraph 3)</p> <p>....Baasyir mengetahui semua rangkaian pelatihan teroris di Aceh...(paragraph 4)</p> <p>...Dia mendapat laporan rutin pengelola di lapangan, Abu Tholut (paragraph 4)</p>

	bisa menjelaskan hal tersebut	
<p>Teks No/tgl : 4 / <i>Koran Tempo</i>/Edisi no.3267/tahun X/ Selasa 10 Agustus 2010/ Halaman A4</p> <p>Kesaksian dari Tanah Rencong Jerat Ba'asyir</p>	<p><i>Koran Tempo</i> lewat pemberitaannya mengamini anggapan bahwa ada benang merah yang menghubungkan Abu Bakar Ba'asyir dengan proses pelatihan militer di Aceh dan rencana kegiatan meledakan bom di sejumlah lokasi di Indonesia Tetapi tanpa menggali lebih dalam bukti-bukti yang memperkuat hal tersebut</p> <p>Eksklusi jelas terlihat dari berita ini karena ada kelompok yang coba dihilangkan atau disembunyikan dalam pemberitaan</p>	<p>Paragraf 4: "...tim Densus menemukan satu benang merah yang menghubungkan dengan Abu Bakar Baasyir, proses pelatihan kemiliteran di Aceh dan rencana kegiatan meledakan sejumlah sasaran, hingga temuan laboratorium di Cibiru bandung..."berkaitan dengan Abu Bakar Baasyir"</p>
<p>Teks No/tgl : 5/ <i>Koran Tempo</i>/Edisi no.3267/tahun X/ Selasa 10 Agustus 2010/Halaman A 4</p> <p>LIMA SERANGKAI PENEBAR TEROR</p>	<p>-Dalam pemberitaan Terkait ditangkapnya lima orang peramu dan perakir bom, <i>Koran Tempo</i> menempatkan sosok Ba'asyir dalam lead, meskipun lokasi penemuan laboratorium berada jauh dari lokasi Ba'asyir</p> <p>-Eksklusi jelas terlihat dari berita ini karena</p>	<p>Paragraph 1 "...Juru bicara Markas Besar Kepolisian RI, Inspektur Jenderal Edward Aritonang, mengatakan polisi menemukan satu benang merah yang menghubungkan Ba'asyir dengan jaringan teroris di Tanah Air..."</p> <p>Paragraf 1</p>

	<p>ada kelompok yang coba dihilangkan atau disembunyikan dalam pemberitaan</p> <p>- semua pernyataan kepolisian soal adanya benang merah yang menghubungkan Ba'asyir dengan jaringan teoris di tanah air, ditelan mentah-mentah sebagai sebuah kebenaran tanpa harus melakukan investigasi dan penggalian lebih dalam</p>	<p>"..., ini dimulai dari proses pelatihan militer di Aceh hingga ditemukannya laboratorium kimia di Cibiru, Bandung, untuk mendukung rencana pengeboman selanjutnya....</p>
<p>Teks No/tgl : 6 /Koran Tempo/Edisi no.3267/tahun X/ Selasa 10 Agustus 2010/ Halaman A3</p> <p>Sang Amir yang Sudah LamaDiincar</p>	<p>-Sebenarnya ini pernyataan lama dari Ba'asyir di bulan Mei 2010 tetapi kembali diangkat oleh Koran Tempo pada Agustus 2010, tak lama setelah Ba'asyir ditangkap .</p> <p>-<i>Koran Tempo</i> seolah mengingatkan bahwa pandangan Ba'asyir memang berbahaya karena dia dengan mendirikan JAT memang berupaya menciptakan sebuah Negara yang peraturan-peraturannya sesuai dengan Syariat Islam</p> <p>-lewat pemberitaan ini, jelas sekali posisi <i>Koran</i></p>	<p>"Dia menjelaskan tujuan pendirian JAT adalah Daulah Islamiyah, yakni menginginkan peraturan di Negara ini sesuai dengan Syariat Islam" (paragraph 3)</p>

	<i>Tempo</i> yang mendukung penangkapan Ba'asyir karena secara ideologis, pendirian JAT memang bertentangan dengan Negara demokrasi Indonesia yang memang tidak berdasarkan Syariat Islam	
<p>Teks No/tgl : 7 /Koran Tempo/Edisi no.3267/tahun X/ Selasa 10 Agustus 2010/Halaman A4</p> <p>FPI Menilai Ba'asyir Korban Rekayasa</p>	<p><i>Koran Tempo</i> mencoba untuk memberikan alternative lain,sudut pandang lain tentang ketidakpercayaan sekelompok masyarakat dalam hal ini Front Pembela Islam soal ketidakterlibatan Ba'asyir dalam kasus terorisme di Aceh</p> <p>-Koran ini bahkan memperlihatkan adanya tokoh Sufyan yang mendanai kegiatan terorisme dan menjadikan Ba'asyir hanyalah sebagai tumbal</p>	<p>Konon ada teori lain.Setidaknya, itulah yang diyakini oleh Ketua Front pembela Islam (FPI) Muhammad Rizieg Shihab. Dia tidak percaya pemimpin Jamaah Anshorut Tauhid itu mendanai teroris di Aceh seperti dituduhkan Polisi"... (paragraph 1)</p> <p>....Dengan temuan itu, FPI menduga Sufyan merupakan tokoh sentral dalam pelatihan kelompok militant di Indonesia. Adapun Ba'asyir sekedar dijadikan tumbal. Paragraph 6</p>
<p>Teks No/tgl : Koran Tempo/Edisi no.3267/tahun X/ 16 Agustus 2010/</p>	<p>-Koran Tempo mengikuti permainan aparat keamanan yang menempatkan Ba'asyir</p>	<p>....Ubaid ikut hadir pada pertemuan antara Ba'asyir dan Dulmatin buron tersangka teroris</p>

<p>Halaman A 2</p> <p>Ba'asyir Dulmatin Dituduh Rancang Latihan Militer</p>	<p>sebagai orang yang bekerjasama dengan Dulmatin tersangka teroris yang sudah ditembak mati oleh polisi di Pamulang</p> <p><i>-Koran Tempo</i> mengamini saja pernyataan bahwa Ba'asyir dan Dulmatin merancang pelatihan militer hanya dengan mempercayai kesaksian Ubaid, orang yang ditangkap polisi Terkait dengan pelatihan militer terorisme di Aceh</p> <p>-begitu juga ketika Koran Tempo tidak secara kritis mencari bukti yang menguatkan dugaan polisi. Ketika polisi mengatakan bahwa Ba'asyir memberikan Rp 180 juta dan US \$ 5000 kepada Ubaid, Koran Tempo tidak menguatkan temuan ini dengan memberikan alternative informasi yang bisa memperkuat data yang disodorkan polisi</p>	<p>yang telah ditembak mati oleh polisi di pamulang Banten 9 Maret lalu.. (paragraph 2)</p> <p>...Ba'asyir memberikan Rp 180 juta dan US \$ 5000 kepadanya pada November 2009 di Surakarta (paragraph 3)</p>
--	---	--

Selain itu ada sejumlah unsur dalam berita yang tidak dimunculkan oleh koran Tempo terkait pemberitaan aksi

terorisme diantaranya alasan penangkapan Ba’asyir memang tidak dijelaskan dalam berita pendek Koran Tempo ini, akhirnya media ini mencoba mengkaitkan dengan ceramah Ba’asyir di Bandung yang mengkritisi soal demokrasi, begitu juga saat Ba’asyir dituding terlibat aksi terorisme di sejumlah tempat alasan penangkapan Baasyir tidak jelas, dan tidak ada kejelasan soal posisi Baasyir dalam struktur gerakan terorisme di Aceh, juga pasal-pasal atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Baasyir sehingga dia layak ditangkap polisi gara-gara aksi terorisme dan bukti-bukti yang memadai yang bisa membuktikan secara jelas keterlibatan Baasyir dalam kasus terorisme di Aceh

Untuk lebih lengkap, bisa dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 5.17
Aktor atau Wacana (seseorang/kelompok/gagasan)
Yang Dihilangkan atau Disembunyikan

Berita yang dianalisis	Unsur yang dikaburkan atau dihilangkan
<p>CERAMAH BA’ASYIR SEBELUM DITANGKAP : “DEMOKRASI ITU KURANG AJAR”</p> <p>Analisis berita 1 <i>KORAN TEMPO</i> Selasa, 10 Agustus 2010</p>	<p>Alasan penangkapan Ba’asyir memang tidak dijelaskan dalam berita pendek Koran Tempo ini, akhirnya media ini mencoba mengkaitkan dengan ceramah Ba’asyir di Bandung yang mengkritisi soal Demokrasi</p> <p>Hal yang tidak disampaikan oleh media, adalah proses penangkapan yang dilakukan oleh aparat keamanan mengingat jumlah yang ditangkap lebih dari sebelas orang. Tidak mungkin apabila penangkapan tersebut tidak memerlukan proses yang alot dan lama</p> <p>Eksklusi jelas terlihat dari berita ini karena ada kelompok yang coba dihilangkan atau</p>

	<p>disembunyikan dalam pemberitaan</p> <p>Proses Eksklusi ini menggunakan strategi dengan membungkusnya dalam pernyataan pihak-pihak berwenang dan memiliki kekuasaan untuk mendominasi pembicaraan /wacana yakni pihak kepolisian dan Densus 88</p>
<p>SEBELUM DITANGKAP, BA'ASYIR KECAM DEMOKRASI</p> <p><i>Koran Tempo</i>, Selasa 10 Agustus 2010</p>	<p>Dalam teks tidak ditulis apa yang ada dibalik peristiwa penangkapan Basyir. Sehingga terkesan ada ketidak jelasan alasan mengapa dia akhirnya ditangkap</p> <p>Hal yang tidak dicantumkan adalah alasan utama di balik penahanan tersebut, apakah karena tekanan dari pihak luar (Amerika misalnya)</p> <p>Eksklusi jelas terlihat dari berita ini karena ada kelompok yang coba dihilangkan atau disembunyikan dalam pemberitaan.</p> <p>Proses Eksklusi ini menggunakan strategi dengan membungkusnya dalam pernyataan pihak-pihak berwenang dan memiliki kekuasaan untuk mendominasi pembicaraan /wacana yakni pihak kepolisian dan Densus 88</p>
<p>Teks No/tgl : 3/ <i>Koran Tempo</i>/Edisi no.3267/tahun X/ Selasa 10 Agustus 2010/Halaman A2</p> <p>Ba'asyir Dituding Terlibat Terorisme di</p>	<p>Alasan penangkapan Baasyir yang tidak jelas, -tidak ada kejelasan soal posisi Baasyir dalam struktur gerakan terorisme di Aceh</p> <p>Pasal-pasal atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Baasyir sehingga dia layak ditangkap polisi gara-gara aksi terorisme</p>

<p>Aceh</p>	<p>-bukti-bukti yang memadai yang bisa membuktikan secara jelas keterlibatan Baasyir dalam kasus terorisme di Aceh</p> <p>Eksklusi jelas terlihat dari berita ini karena ada kelompok yang coba dihilangkan atau disembunyikan dalam pemberitaan</p> <p>Proses Eksklusi ini menggunakan strategi dengan membungkusnya dalam pernyataan pihak-pihak berwenang dan memiliki kekuasaan untuk mendominasi pembicaraan /wacana yakni pihak kepolisian dan Densus 88</p>
<p>Teks No/tgl : 4 /<i>Koran Tempo</i>/Edisi no.3267/tahun X/ Selasa 10 Agustus 2010/ Halaman A4</p> <p>Kesaksian dari Tanah Rencong Jerat Ba'asyir</p>	<p>ada yang tidak jelas soal bukti-bukti yang memang ada yang memperkuat alasan polisi menangkap Ba'asyir</p> <p>-hal yang tidak dicantumkan dalam teks adalah pembelaan dari diri Ba'asyir sendiri.</p> <p>-Ba'asyir menjadi objek pembicaraan tetapi Koran Tempo tidak memberi porsi yang seimbang kepada pihak Ba'asyir untuk menyeimbangkan opini yang ada</p> <p>Eksklusi jelas terlihat dari berita ini karena ada kelompok yang coba dihilangkan atau disembunyikan dalam pemberitaan.</p> <p>Proses Eksklusi ini menggunakan strategi dengan membungkusnya dalam pernyataan pihak-pihak berwenang dan memiliki kekuasaan untuk mendominasi pembicaraan /wacana yakni pihak kepolisian dan Densus 88</p>
<p>Teks No/tgl : 5/ <i>Koran Tempo</i>/Edisi no.3267/tahun X/</p>	<p>-ketidakjelasan soal bukti-bukti yang bisa memperkuat tuduhan bahwa Ba'asyir memang bisa dijerat dengan pasal-pasal</p>

<p>Selasa 10 Agustus 2010/Halaman A 4</p> <p>LIMA SERANGKAI PENEBAR TEROR</p>	<p>terorisme</p> <p>-dari berita diatas tidak ada satu bukti pun yang bisa secara logis Dikaitkan dengan peranan dan posisi Ba'asyir dalam kasus penemuan laboratorium di Ci Biru Bandung</p> <p>-meskipun Ba'asyir disebut-sebut dalam body berita, bahkan oleh Edwad Aritonang disebutkan ada benang merah yang bisa dihubungkan dengan Ba'asyir, tetapi pihak Ba'asyir tidak diberi kesempatan berbicara atau mengkonfirmasiannya, demikian juga para tersangka yang ditangkap tidak diberi ruang bicara untuk membela diri apakah benar mereka terlibat atau tidak sesuai yang dituduhkan kepada mereka oleh polisi</p> <p>Eksklusi jelas terlihat dari berita ini karena ada kelompok yang coba dihilangkan atau disembunyikan dalam pemberitaan.</p> <p>Proses Eksklusi ini menggunakan strategi dengan membungkusnya dalam pernyataan pihak-pihak berwenang dan memiliki kekuasaan untuk mendominasi pembicaraan /wacana yakni pihak kepolisian dan Densus 88</p>
<p>Teks No/tgl : 6 /<i>Koran Tempo</i>/Edisi no.3267/tahun X/ Selasa 10 Agustus 2010/ Halaman A3</p> <p>Sang Amir yang Sudah Lama Diincar</p>	<p>Ada ketidakjelasan apakah benar-benar Koran Tempo mewawancarai Ba'asyir</p> <p>Terkait soal JAT di paragraph-paragraf awal, terlihat tidak ada kejelasan soal When (kapan wawancara itu dilakukan) dan Where (dimana wawancara tersebut dilakukan)</p> <p>-tak ada bukti yang benar-benar bisa menjelaskan keterlibatan Ba'asyir dalam sejumlah kasus terorisme</p> <p>-satu-satunya argument yang disodorkan polisi adalah pengakuan dari Ubeid,</p>

	instruktur pelatihan militer di Aceh yang mengaku telah melakukan pertemuan dengan Ba'asyir
<p>Teks No/tgl : 7 /Koran Tempo/Edisi no.3267/tahun X/ Selasa 10 Agustus 2010/Halaman A4</p> <p>FPI Menilai Ba'asyir Korban Rekayasa</p>	<p>-ada ketidakjelasan sebenarnya siapa itu Sufyan, karena ada informasi yang seakan ditutup-tutupi, mengingat Sufyan justru berlatih di markas Brigade Mobil sebelum menggelar pelatihan militer di Aceh</p> <p>-kemudian tidak ada bukti penjelasan mengapa akhirnya Sufyan dikait-kaitkan dengan Ustadz Ba'asyir. Sehingga muncul kesan bahwa peristiwa penangkapan ini hanya rekayasa dan Ba'asyir dijadikan korban atau tumbal</p> <p>Tak ada informasi dan penjelasan dari objek/subjek yang tengah dibicarakan, khususnya dari Sufyan dan Ba'asyir sendiri yang jadi topic pembicaraan</p>
<p>Teks No/tgl : <i>Koran Tempo</i>/Edisi no.3267/tahun X/ 16 Agustus 2010/ Halaman A 2</p> <p>Ba'asyir Dulmatin Dituduh Rancang Latihan Militer</p>	<p>Tidak ada fakta atau bukti yang bisa memperkuat tuduhan atau tudingan polisi bahwa Ba'asyir benar-benar bertemu dan ikut merancang pelatihan militer bersama Dulmatin, tersangka teroris yang sudah ditembak polisi</p> <p>Polisi hanya berlandaskan hasil pemeriksaan terhadap Ubaid, tanpa bisa memberikan bukti-bukti mengenai kebenarannya</p> <p>Proses Eksklusi ini menggunakan strategi dengan membungkusnya dalam pernyataan pihak-pihak berwenang dan memiliki kekuasaan untuk mendominasi pembicaraan /wacana yakni pihak kepolisian dan Densus 88</p>

Dari sisi Inklusi dalam pemberitaan soal terorisme muncul juga dalam proses pemilihan narasumber dan fakta-fakta yang disodorkan media ini kepada masyarakat seputar penangkapan terorisme dan pemberitaan soal Ba’asyir. Koran Tempo tidak secara jelas menggambarkan apa alasan dan sebab-sebab dibalik penangkapan Ba’asyir. Sehingga Koran Tempo dianggap kurang memenuhi unsur keadilan dalam pemberitaan dengan melakukan pencarian fakta di lapangan, atau paling tidak tidak ditemukan upaya mewawancarai narasumber dari pihak minoritas yakni mereka-mereka yang dituduh atau sebagai tersangka terorisme.

Dari aktor sosial yang disebut dalam wacana, bagaimana mereka ditampilkan dan dengan strategi apa pemarjinalan atau pengucilan itu dilakukan. Koran Tempo melakukan hal itu, dengan tidak memberi kesempatan kepada pihak yang dituduh melakukan pembelaan atau sekedar melakukan konfirmasi. Untuk lebih jelasnya dalam melihat proses Inklusi bisa dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.18
Inklusi

Berita yang dianalisis	bagaimana mereka ditampilkan ? dan dengan strategi apa pemarjinalan atau pengucilan itu dilakukan
CERAMAH BA’ASYIR SEBELUM DITANGKAP : “DEMOKRASI ITU KURANG AJAR” Analisis berita 1 <i>KORAN TEMPO</i> Selasa, 10 Agustus	Pemarjinalan dilakukan dengan tidak memberi kesempatan Ba’asyir melakukan konfirmasi atas apa yang dituduhkan kepadanya Strategi yang dilakukan dengan cara seakan-akan <i>Koran Tempo</i> memberi ‘alasan penguat’ mengapa akhirnya Ba’asyir ditangkap tetapi ini bukan dari mulut Ba’asyir sendiri

2010	Alasan mengapa Ba'asyir ditangkap tidak jelas atau abstrak, sehingga terjadi proses inklusi dalam pemberitaan Ba'asyir
SEBELUM DITANGKAP, BA'ASYIR KECAM DEMOKRASI <i>Koran Tempo</i> , Selasa 10 Agustus 2010	<p>Pemarjinalan yang dilakukan dengan tidak memberi kesempatan Ba'asyir melakukan konfirmasi apakah dia memang benar-benar mengecam demokrasi dan karena itulah akhirnya dia ditangkap</p> <p>Strategi yang dilakukan dengan seakan-<i>akan Koran Tempo</i> memberi 'alasan penguat' mengapa akhirnya Ba'asyir ditangkap yakni karena Ba'asyir mengecam demokrasi tetapi ini opini koran Tempo sendiri tidak didukung fakta-fakta yang kuat</p>
Teks No/tgl : 3/ <i>Koran Tempo</i> /Edisi no.3267/tahun X/ Selasa 10 Agustus 2010/Halaman A2 Ba'asyir Dituding Terlibat Terorisme di Aceh	<p>-Proses Inklusi ini berhubungan dengan pertanyaan bagaimana seseorang atau kelompok aktor dimasukan atau ditampilkan atau direpresentasikan ke dalam sebuah berita. Dalam berita ini Ba'asyir dituduh tetapi dia tidak diberi kesempatan membela diri, paling tidak mengkonfirmasi kebenaran dari tuduhan bahwa dirinya terlibat terorisme di Aceh</p> <p>-Terjadi proses asosiasi, dimana aktor Strategi ditampilkan tidak 'sendiri' tetapi justru terkait dengan kelompok yang lebih besar, yaitu kelompok terorisme Aceh.</p>
Teks No/tgl : 4 / <i>Koran Tempo</i> /Edisi no.3267/tahun X/ Selasa 10 Agustus	<p>-Ada unsur Inklusi dalam berita ini . Yaitu, pemarjinalan yang dilakukan dengan tidak memberi kesempatan Ba'asyir konfirmasi apakah Ba'asyir benar-benar terlibat aksi terorisme di Aceh dan mendanai kegiatan</p>

<p>2010/ Halaman A4</p> <p>Kesaksian dari Tanah Rencong Jerat Ba'asyir</p>	<p>pelatihan mereka</p> <p>-Selain itu unsur <i>interdeninasi</i> terjadi karena pelaku tidak digambarkan secara jelas atau anonim. Biasanya anonimitas ini terjadi karena wartawan belum mendapatkan bukti yang kuat untuk menulis, sehingga lebih aman ditulis anonim</p> <p>- juga Terjadi proses <i>asosiasi</i>, dimana aktor ditampilkan tidak 'sendiri' (Ba;asyir) tetapi justru terkait dengan kelompok yang lebih besar, yaitu kelompok terorisme di tanah Aceh yang tertangkap dan mengakui keterlibatan Ba'asyir dalam aksi terorisme mereka</p>
<p>Teks No/tgl : 5/ <i>Koran Tempo</i>/Edisi no.3267/tahun X/ Selasa 10 Agustus 2010/Halaman A 4</p> <p>LIMA SERANGKAI PENEBAR TEROR</p>	<p>-Ada unsur Inklusi dalam berita ini . Yaitu, pamarjinalan yang dilakukan dengan tidak memberi kesempatan Ba'asyir dan lima pelaku yang diduga teroris itu melakukan konfirmasi apakah mereka benar-benar terlibat di Cibiru dan karena itulah akhirnya mereka ditangkap</p> <p>-Ini unsur <i>interdeninasi</i> terjadi karena pelaku tidak digambarkan secara jelas atau anonim. Biasanya anonimitas ini terjadi karena wartawan belum mendapatkan bukti yang kuat untuk menulis, sehingga lebih aman ditulis anonim</p> <p>- juga Terjadi proses <i>asosiasi</i>, dimana aktor Strategi ditampilkan tidak 'sendiri' tetapi justru terkait dengan kelompok yang lebih besar, yaitu kelompok terorisme yang dipimpin Ba'asyir.</p>
<p>Teks No/tgl : 6 /<i>Koran Tempo</i>/Edisi no.3267/tahun X/</p>	<p>-Terjadi ketidakjelasan informasi mengenai suatu peristiwa atau aktor sosial ditampilkan dengan memberi petunjuk</p>

<p>Selasa 10 Agustus 2010/ Halaman A3</p> <p>Sang Amir yang Sudah Lama Diincar</p>	<p>yang konkret. Dalam berita ini yang ditampilkan adalah abstraksi</p> <ul style="list-style-type: none"> - juga Terjadi proses <i>asosiasi</i>, dimana Ba'asyir ditampilkan tidak 'sendiri' tetapi justru dia adalah Amir atau pimpinan kelompok yang lebih besar, yaitu kelompok Islam Garis Keras <i>Jamaah Anshorut Tauhid</i>
<p>Teks No/tgl : 7 /Koran Tempo/Edisi no.3267/tahun X/ Selasa 10 Agustus 2010/Halaman A4</p> <p>FPI Menilai Ba'asyir Korban Rekayasa</p>	<p>-Ada unsur Inklusi dalam berita ini . Yaitu, pemarjinalan yang dilakukan dengan tidak memberi kesempatan Ba'asyir konfirmasi apakah Ba'asyir benar-benar terlibat aksi terorisme ataukah dia hanya korban rekayasa konflik internal di Kepolisian</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terjadi ketidakjelasan informasi mengenai suatu peristiwa atau aktor sosial ditampilkan dengan memberi petunjuk yang konkret. Dalam berita ini yang ditampilkan adalah abstraksi
<p>Teks No/tgl : Koran Tempo/Edisi no.3267/tahun X/ 16 Agustus 2010/ Halaman A 2</p> <p>Ba'asyir Dulmatin Dituduh Rancang Latihan Militer</p>	<p>Terjadi ketidakjelasan informasi mengenai suatu peristiwa atau aktor sosial ditampilkan dengan memberi petunjuk yang konkret. Dalam berita ini yang ditampilkan adalah abstraksi. Tak ada bukti yang benar benar kuat yang bisa membuktikan bahwa Ba'asyir dan Dulmatin merancang latihan militer</p> <ul style="list-style-type: none"> - juga Terjadi proses <i>asosiasi</i>, dimana Ba'asyir ditampilkan tidak 'sendiri' tetapi justru dia adalah pimpinan kelompok yang lebih besar, bahkan bersama Dulmatin menyusun rencana aksi yang besar

Walaupun media massa mungkin menganut jurnalisme advokasi dan memiliki konsep penting tentang keseimbangan narasumber dan aturan tentang peliputan yang cover both sides, dalam pemberitaan soal Ba'asyir yang dikaitkan dengan isu terorisme tidak nampak upaya Koran Tempo untuk menampilkan fakta yang seimbang. Banyak sekali ketidakjelasan yang dihadirkan dalam teks berita, dimana Koran Tempo hanya bersandarkan pada sumber satu arah yaitu sumber kepolisian, dan seakan apa saja fakta atau pendapat dari kepolisian merupakan satu-satunya kebenaran yang tidak perlu dicermati lagi apakah ini merupakan sebuah kebohongan atau rekayasa belaka.

Keberpihakan Koran Tempo pada pemerintah muncul dalam proses pemilihan narasumber dan fakta-fakta yang disodorkan media ini kepada masyarakat seputar penangkapan terorisme dan pemberitaan soal Ba'asyir. Tak ada upaya Koran Tempo untuk memenuhi unsur keadilan dalam pemberitaan dengan melakukan pencarian fakta di lapangan, atau paling tidak tidak ditemukan upaya mewawancarai narasumber dari pihak minoritas yakni mereka-mereka yang dituduh atau sebagai tersangka terorisme. Walaupun ini dilakukan, fakta yang dimunculkan juga tidak dilengkapi dengan bukti-bukti, hanya berdasarkan pendapat serta pengakuan narasumber.

BAB VI

KEBIJAKAN KORAN TEMPO TERKAIT TERORISME

Kebijakan *Koran Tempo* terkait pemberitaan Terorisme

Dari kajian teks yang ada, dapat ditemukan bahwa kebanyakan berita terorisme yang disajikan oleh *Koran Tempo* sangat mengabaikan nilai-nilai jurnalistik yang mengedepankan adanya keberimbangan pemberitaan. Terbukti saat informasi soal kejadian atau peristiwa terorisme, *Koran Tempo* lebih banyak percaya kepada klaim dan pernyataan dari lembaga atau badan yang berwenang seperti pihak Kepolisian dan Densus 88. Secara etis, seharusnya media massa memiliki konsep penting tentang keseimbangan narasumber. Walaupun *Tempo* mengklaim diri sebagai pengusung jurnalisme baru yang dianggap sebagai jurnalisme advokasi selayaknya *Tempo* menghargai etika jurnalistik. *Koran Tempo* adalah bagian dari media massa yang belajar dan mengerti bagaimana aturan tentang peliputan yang *cover both sides*. Tetapi, dalam pemberitaan soal Ba'asyir yang dikaitkan dengan isu terorisme tidak nampak upaya *Koran Tempo* untuk menampilkan fakta yang seimbang. Dari sejumlah berita yang dianalisis, banyak sekali ditemukan ketidakseimbangan berita. Ada kecenderungan bahwa *Koran Tempo* hanya bersandarkan pada sumber satu arah yaitu sumber kepolisian, dan seakan apa saja fakta atau pendapat dari kepolisian merupakan satu-satunya kebenaran yang tidak perlu dicermati lagi apakah ini merupakan sebuah kebohongan atau rekayasa belaka. Dari dimensi representasi, *Koran Tempo* melakukan representasi tentang aktivitas sekelompok orang Indonesia yang berideologi di luar Pancasila, yang diberi cap sebagai teroris dan terkait dengan sosok seorang 'amir' atau pemimpin yang bernama Abu Bakar Ba'asyir. Peranan Ba'asyir dalam sejumlah teks yang dianalisis

sangat penting, karena dipandang sebagai orang yang paling bertanggungjawab atau paling tidak mendukung sejumlah aksi terorisme di tanah air.

Koran Tempo dalam teks yang dianalisis merepresentasikan, Ba'asyir ditangkap karena diduga terlihat sejumlah aksi terorisme di beberapa daerah termasuk di Aceh. *Koran Tempo* juga merepresentasikan adanya ideologi Ba'asyir yang jelas-jelas menentang demokrasi yang disebutnya sebagai 'kurang ajar'. Dia juga digambarkan, menyebut pemerintah Indonesia sebagai pemerintah yang kafir dan tidak sesuai dengan ajaran Islam karena melakukan pembiaran terhadap aktivitas Jaringan Islam Liberal dan kelompok *Ahmadiyah*. Dari berita yang ditulis *Koran Tempo* setelah penangkapan Ba'asyir pada 9 Agustus 2010, media ini seakan memiliki banyak amunisi untuk menempatkan Abu Bakar Ba'asyir sebagai orang yang layak ditangkap dan diduga kuat terkait dengan jaringan terorisme internasional *Al-Qaidah*. *Koran Tempo* mengemas pemberitaan yang menonjolkan ketidaksukaan Ba'asyir dengan ideologi Pancasila khususnya demokrasi. Hal ini jelas sekali ditunjukkan lewat berita berjudul : **Ceramah Ba'asyir Sebelum Ditangkap : " Demokrasi itu kurang ajar"** Edisi Selasa, 10 Agustus 2010, sehari setelah Ba'asyir ditangkap polisi.

Pemberitaan gencar soal isu dibalik penangkapan Ba'asyir di *Koran Tempo* ini, sebenarnya sebagai tanggapan atas peristiwa berita yaitu Ba'asyir ditangkap. Jelas sekali berbeda dengan pemberitaan Koran Republika di hari yang sama yang hanya memberitakan berita kecil soal tertangkapnya Ba'asyir oleh kepolisian dengan dugaan terlibat kasus terorisme.

Dalam cover Story *Koran Tempo* merepresentasikan, Ba'asyir ditangkap karena diduga terlihat sejumlah aksi terorisme di beberapa daerah termasuk di Aceh, padahal tak ada bukti kuat yang menjelaskan peran dan posisinya dalam jaringan tersebut. *Koran Tempo* meski tidak melakukan investigasi, atau melakukan konfirmasi langsung, percaya saja dengan pernyataan pihak kepolisian. Alasan penangkapan Ba'asyir

memang tidak dijelaskan oleh pihak yang berwenang dalam berita pendek *Koran Tempo* ini, tetapi media ini mencoba mengkaitkan dengan ceramah Ba'asyir di Bandung yang mengkritisi soal Demokrasi

Sebenarnya, peristiwa yang terjadi hanyalah sebuah aksi penangkapan Ba'asyir tetapi *Koran Tempo* justru memberi warna lain dalam beritanya dengan menjelaskan adanya 'ceramah' Ba'asyir sebelum dirinya ditangkap yang memang mengkritik dan menghujat demokrasi. Contoh lain pada berita yang berjudul **Lima Serangkai Penebar Teror** (*Koran Tempo*, edisi Selasa 10/8/2010 halaman A4). Meski nama Ba'asyir disebut-sebut, dan dikaitkan dengan rencana teror, tapi tak ada upaya konfirmasi dari Ba'asyir tentang benar tidaknya klaim polisi. Identitas Ba'asyir secara sepihak diekspos oleh *Koran Tempo* yang menelan secara bulat, klaim dari juru bicara Mabes Polri, Edward Aritonang . Identitas narasumber yang bisa membuktikan keterlibatan Ba'asyir di balik penemuan laboratorium tempat pembuatan bom teroris tidak dijelaskan.

Keberpihakan *Koran Tempo* pada pemerintah muncul dalam proses pemilihan narasumber dan fakta-fakta yang disodorkan media ini kepada masyarakat seputar penangkapan terorisme dan pemberitaan soal Ba'asyir. Tak ada upaya *Koran Tempo* untuk memenuhi unsur keadilan dalam pemberitaan dengan melakukan pencarian fakta di lapangan, atau paling tidak tidak ditemukan upaya mewawancarai narasumber dari pihak minoritas yakni mereka-mereka yang dituduh atau sebagai tersangka terorisme. Kalaupun ini dilakukan, fakta yang dimunculkan juga tidak dilengkapi dengan bukti-bukti, hanya berdasarkan pendapat serta pengakuan narasumber.

Kendati begitu, kenyataan itu dibantah oleh Direktur Utama *Tempo*, Bambang Harymurti saat diwawancarai oleh peneliti. Menurut dia, *Koran Tempo* sudah berupaya sedemikian rupa sebagai media yang menerapkan jurnalisme surat kabar profesional.

"..Kalau saya sih melihat *Koran Tempo* menjalankan apa yang kita sebut jurnalisme saja . Jadi kebetulan aja di Indonesia itu mayoritas terorisnya Islam di India khan ada teroris sikhnya, teroris hindu ada. Tapi khan sebenarnya teroris itu nggak ada kaitannya dengan agamanya tapi itu Cuma pembenarannya, untuk hal yang bukan utamanya agamanya. Iya kita... jurnalismenya." (Harymurti, 2014)

Menurut Bambang Harymurti, tidak benar ada anggapan bahwa *Koran Tempo* tidak membela kepentingan mereka yang terzalimi dalam pemberitaan soal teroris, tetapi memang wartawan sering kesulitan di lapangan apabila mencari narasumber yang berimbang.

Hal ini bisa dilihat dari hasil wawancara di bawah ini:



Question :

Dari hasil kajian teks ada temuan bahwa untuk laporan berita-berita teroris, narasumber yang dipilih adalah narasumber resmi seperti Densus 88 atau aparat kepolisian? Komentar Bapak?

Bambang Harymurti:

"...Nggak ada kebijakan khusus, ini masalah akses saja. Memang sekarang ada perbedaan antara kelompok teroris jaman dulu

dengan kelompok Alqaeda- Jemaah Islamiah. Kalau dulu itu mereka justru mengklaim, ini mereka lakukan sehingga media juga gampang melakukan ini. Sekarang khan susah, kita mau tanya siapa? Kalau kita mau melakukan azaz keberimbangan, kita harus nanya siapa? Bayangkan kalau pak Indi sebagai wartawan, mau pengen banget agar beritanya berimbang nih, ada pengeboman ..meledak terus mau nanya siapa nih? Polisi kasih keterangan yah kan, terus pelakunya bom bunuh diri sudah mati, terus mau nanya siapa karena nggak ada yang klaim yang melakukan siapa. Artinya wartawan akhirnya mengambil narasumber yang available saja, khan kita nggak bisa ngarang-ngarang. Nanti kita bisa dianggap spekulatif gini gini. Jadi ini soal akses pada sumber yang bisa menceritakan tentang orang-orang ini. Misalnya kita cari soal Gayus, terus gayusnya nggak mau ngomong, keluarganya nggak mau ngomong, lawyernya nggak mau ngomong terus bagaimana wartawan?"...

Menurut dia, wartawan di lapangan bukan sengaja menghindari mencari narasumber yang berimbang dari kedua belah pihak, tetapi kenyataannya di lapangan agak sulit untuk menemukan narasumber yang bisa mewakili pihak terorisme.

Persoalannya adalah masalah 'akses' informasi. Tak ada informasi apapun dari pihak yang diduga terkait terorisme. Karena narasumber yang didapat terbatas dan akses ke dalam kelompok terorisme tidak mungkin, maka *Koran Tempo* sebagaimana koran lainnya di Indonesia menyandarkan diri pada pernyataan narasumber resmi yakni pihak kepolisian.

".....sebagai wartawan kami pengen banget agar beritanya berimbang nih, ada pengeboman ..meledak terus mau nanya siapa nih? Polisi kasih keterangan yah kan, terus pelakunya bom bunuh diri sudah mati, terus mau nanya siapa karena nggak ada yang klaim yang melakukan siapa. Artinya wartawan akhirnya mengambil narasumber yang available saja, khan kita nggak bisa ngarang-ngarang. (Harymurti, 2014)

Bambang Harymurti sendiri mengakui bahwa memang *Koran Tempo* itu tidak netral, dan menurut dia pers memang harus tidak netral tetapi pers harus memiliki sikap. Menurut dia, ideologi media, khususnya *Koran Tempo* adalah bagaimana membela kepentingan umum, dan membela kelompok-kelompok yang terzalimi oleh kekuasaan.

"....Media itu nggak ada yang netral dan nggak boleh netral sebetulnya menurut saya. saya kebetulan sudah melakukan reportase kelompok Ba'asyir dan Abdullah Sungkar sejak tahun 85 jadi saya yah cukup kenal dengan mereka itu, kalau saya sih gini. Kalo disebut ideologinya Tempo yah karena kita ingin jadi jurnalis profesional, dan ini yang sering salah orang menganggap bahwa jurnalisme itu harus netral, Tidak. Jurnalisme itu ideologinya adalah membela kepentingan publik. Nah tindakan yang disebut terorisme ini khan merugikan kepentingan publik jadi keberpihakan kita yah pada publik, dalam hal ini yah keselamatan publik. Jadi kalo ada orang terlepas dia pakai agama apapun, naro bom di pasar yah itu namanya teroris. Karena publik yang dirugikan, lain kalau misalnya dia mengebom markas tentara atau targetnya jelas....(Harymurti,2014)

Sebagai media profesional, ujar Bambang Harymurti, *Koran Tempo* memiliki ideologi yang jelas yaitu membela kepentingan publik, dan karena tindakan terorisme itu merugikan kepentingan publik maka wajar saja *Koran Tempo* tidak netral dalam mengemukakan persoalan terorisme. Menurut dia prinsip jurnalisme sebenarnya ada dua yaitu pertama pers itu harus membela kepentingan publik, kedua pers biasanya cenderung membela kaum 'underdog' yakni siapa saja, siapapun yang dizalimi saat itu.

"...Jadi prinsipnya jurnalisme itu ada dua sebenarnya. Pertama dia membela kepentingan publik, Kedua biasanya cenderung

membela underdog, siapapun dizalimi saat itu. Sekarang misalnya siapa yang berani membela ahmadiyah? Media? Tapi dulu siapa yang berani bela Amir Biki, sekarang kebetulan kelompok Amir Biki berkuasa, yang dia tindas kita bela. Jadi sebenarnya gitu saja sederhana, coba lihat dalam posisinya terbalik. Kalau sekarang tempo sering dianggap anti dengan Islam, karena sekarang khan yang melakukan kezaliman itu FPI, segala macam. Tapi dulu jaman FPI di orde baru, Siapa yang berani membela mereka saat diperlakukan oleh anak buah Benny Murdani ? (Harymurti, 2014)

Dari pernyataan Bambang Harymurti, keberpihakan *Tempo* membela kepentingan kaum tertindas khususnya kaum Islam di tanah air sejak dulu. Dia meyebut bahwa *Tempo* membela kelompok Muslim yang terzalimi di tanah air, seperti kelompok Ahmadiyah dan kelompok Amir Biki di era Orde Baru.

"Sekarang misalnya siapa yang berani membela Ahmadiyah? Media? Tapi dulu siapa yang berani bela Amir Biki, sekarang kebetulan kelompok Amir Biki berkuasa, yang dia tindas kita bela. Jadi sebenarnya gitu saja sederhana, coba lihat dalam posisinya terbalik. Kalau sekarang tempo sering dianggap anti dengan Islam, karena sekarang khan yang melakukan kezaliman itu FPI, segala macam. Tapi dulu jaman FPI di orde baru, Siapa yang berani membela mereka saat diperlakukan oleh anak buah Benny Murdani ?

Menurut Bambang, *Koran Tempo* sudah menerapkan prinsip-prinsip jurnalisme *Tempo* yang memang membela mereka yang tertindas, meski saat ini 'tentang siapa' yang mereka bela berbeda dibanding semasa Orde Baru.

"..Jadi jurnalisme kita pertama membela kepentingan publik dan terutama orang-orang yang terzalimi. Itu yang harus dibela. Ngak tahu apa-apa, lagi enak-enak makan di warung dibom sama teroris, apa salahnya dia wong dia bukan musuhny teroris, mengapa mereka tidak pergi ke Israel, kalau

mereka merasa musuh Islam adalah Israel mengapa mereka tidak pergi ke Israel saja, berjuang di sana. Ngapain ngebom-ngebom orang Islam sendiri, supir taksi lagi. Anak istrinya gimana kalau mati bapaknya? (Harymurti, 2014)

Lebih jauh lagi, Bambang mengemukakan bahwa *Tempo* membela hak orang-orang atau rakyat yang menjadi korban atau 'terzalimi' oleh aksi terorisme. Menurut dia, aksi terorisme berdasarkan agama, bahkan yang menyebut-nyebut berdasarkan agama adalah salah. Sebab menurut dia Islam sendiri tidak mengajarkan hal tersebut. Hal ini bukan berarti bahwa *Koran Tempo* tidak membela kepentingan Islam atau bukan berarti bahwa *Koran Tempo* sendiri seolah disetir kelompok Islam Liberal misalnya.

"Kalau saya pikir, saya sebagai orang Islam kita akan melihat apa yang ditulis Quran dan apa yang dilakukan Nabi. Nabi sendiri khan tidak pernah melakukan kegiatan terorisme, artinya selalu tindakannya kalau pun perang dilandasi untuk membela diri. Jadi kalau buat saya, kalau khan kita sebagai umat Islam pasti mengikuti apa kata Al-Quran dan apa yang dilakukan Nabi, khan Nabi sendiri tidak pernah melakukan aksi terorisme. Jadi terorisme dan Islam jelas bertentangan, siapapun itu kalau ada yang melakukan aksi terorisme apalagi yang mengatasnamakan Islam itu pasti tidak Islami yang bertentangan dengan Islam. (Harymurti, 2014)

Dari hasil wawancara dengan Bambang Harymurti, soal keberpihakan *Tempo* memang jelas kepada kepentingan rakyat yang amat dirugikan oleh aksi-aksi terorisme. Selain itu, kalau ada kesan *Koran Tempo* berseberangan dengan kelompok Islam sehingga terkesan *Tempo* memusuhi gerakan Islam garis keras itu wajar. Menurut dia, ketika di era Orde Baru, *Tempo* membela siapapun yang tertindas oleh kekuasaan dan saat itu *Tempo* justru membela kelompok Islam yang tertindas dan itu

bsa dibuktikan dengan banyaknya peliputan dan reportase soal perlawanan mereka melawan rezim Orde Baru.

Sementara itu, Redaktur *Koran Tempo*, Yudhono Akhmadi (Redaktur Utama Internasional-Nusa untuk majalah-koran dan Online Tempo dan Redaktur Desk Nasional, Efri NP Ritonga menanggapiinya beragam.

Menurut Yudono, Terorisme di Indonesia baru mencuat setelah menurunnya kontrol negara terhadap kehidupan bermasyarakat di akhir rezim Soeharto. Setelah itu, terorisme makin subur seiring dengan kebebasan berdemokrasi di era Reformasi. Menurut dia, akar dari terorisme adalah ketimpangan kesejahteraan dan pendidikan, sehingga



orang yang tengah terpuruk dan kurang berpendidikan, gampang dipengaruhi kelompok tertentu untuk direkrut menjadi teroris. Bagi senior editor *Koran Tempo* ini, Langkah polisi dan pemerintah untuk tindakan kuratif melawan terorisme cukup berhasil, tapi upaya pencegahannya masih kurang. Ini terlihat dari terus bertambahnya jaringan teroris meski para pentolan sekelas Noordin M Top, Ashari, kelompok lamongan dan lain-lain tertangkap. Saat ditanya bagaimana posisi *Koran Tempo* dalam kasus terorisme di Indonesia, Yudono menjawab bahwa *Koran Tempo* memang menganggap terorisme sebagai musuh.

"*Koran tempo* memandang terorisme sebagai musuh bersama yang harus diperangi. *Koran tempo* tidak mau terlalu gencar memberitakan 'keinginan' para teroris, karena *koran Tempo* tidak mau dijadikan alat atau corong buat terorisme

dalam segala aksi mereka,” ujar Yudono yang bertanggungjawab penuh pada pemberitaan internasional, dan nusantara pada Koran, majalah dan online *Tempo*.

Sementara itu dari hasil wawancara dengan Redaktur Desk Nasional *Koran Tempo* , Efri NP Ritonga, tidak ada kebijakan resmi dari *Koran Tempo* saat meliput peristiwa terorisme di tanah air.

“..Tidak ada pedoman khusus bagi peliputan terorisme. Standar saja yakni sesuai dengan kode etik jurnalistik, berimbang, berpihak pada kepentingan publik, tidak berprasangka, terus-menerus menggali kebenaran di balik cerita, dan menyajikan berita sesuai fakta. ” (Ritonga :2013)

Menurut Efri Ritonga yang bertanggungjawab terhadap pemuatan berita-berita politik termasuk di dalamnya berita terorisme, tidak ada kebijakan yang mengharuskan wartawan *Koran Tempo* memuat atau tidak berita seputar terorisme. Hal ini tercermin dari penjelasan berikut:

“ Tidak ada kebijakan yang mengharuskan pemuatan berita terorisme atau berita apa pun juga. Setiap berita yang akan dimuat di Koran Tempo harus lolos seleksi layak berita. Kriterianya antara lain:

dampaknya bagi kepentingan masyarakat, apakah melibatkan **tokoh** penting atau tidak, apakah memberi **inspirasi** atau tidak, seberapa

dahsyat peristiwanya, dan ada unsur **kebaruan**,” (Ritonga, 2013)



Dari hasil wawancara, Efri menegaskan pemuatan berita di *Koran Tempo* disesuaikan dengan 'aturan' atau media routine yang ada di *Tempo* yang memiliki aturan-aturan Jurnalisme seperti bahwa setiap berita yang akan dimuat harus lolos seleksi sebagai berita yang layak dimuat sesuai kriteria tertentu.

Ada sejumlah kriteria dimana sebuah berita bisa dianggap layak atau tidak yang disebut sebagai nilai-nilai berita seperti apakah berita tersebut –termasuk berita terorisme– seperti berdampak, dan memang penting bagi masyarakat.

Kriteria yang lain misalnya apakah berita seputar terorisme itu melibatkan orang-orang penting (nilai prominence) seperti apakah melibatkan petinggi negara seperti Presiden, Kepala Polri, tokoh atau figur masyarakat seperti 'Ba'asyir, tokoh lain yang bisa menarik perhatian para pembaca *Koran Tempo*.

"Setiap berita yang akan dimuat di *Koran Tempo* harus lolos seleksi layak berita. Kriterianya antara lain: **dampaknya** bagi kepentingan masyarakat, apakah melibatkan **tokoh** penting atau tidak, apakah memberi **inspirasi** atau tidak, seberapa **dahsyat** peristiwanya, dan ada unsur **kebaruan**," (Ritonga, 2013)

Begitu juga soal aktualitas atau kebaruan dan dahsyat peristiwanya ini menyangkut sesuatu yang memang menjadi pedoman umum di dunia jurnalistik yang tidak hanya berlaku di *Koran Tempo* tetapi juga berlaku di media lain, karena tanpa adanya nilai berita maka tak akan ada manfaatnya sebuah berita ditulis.

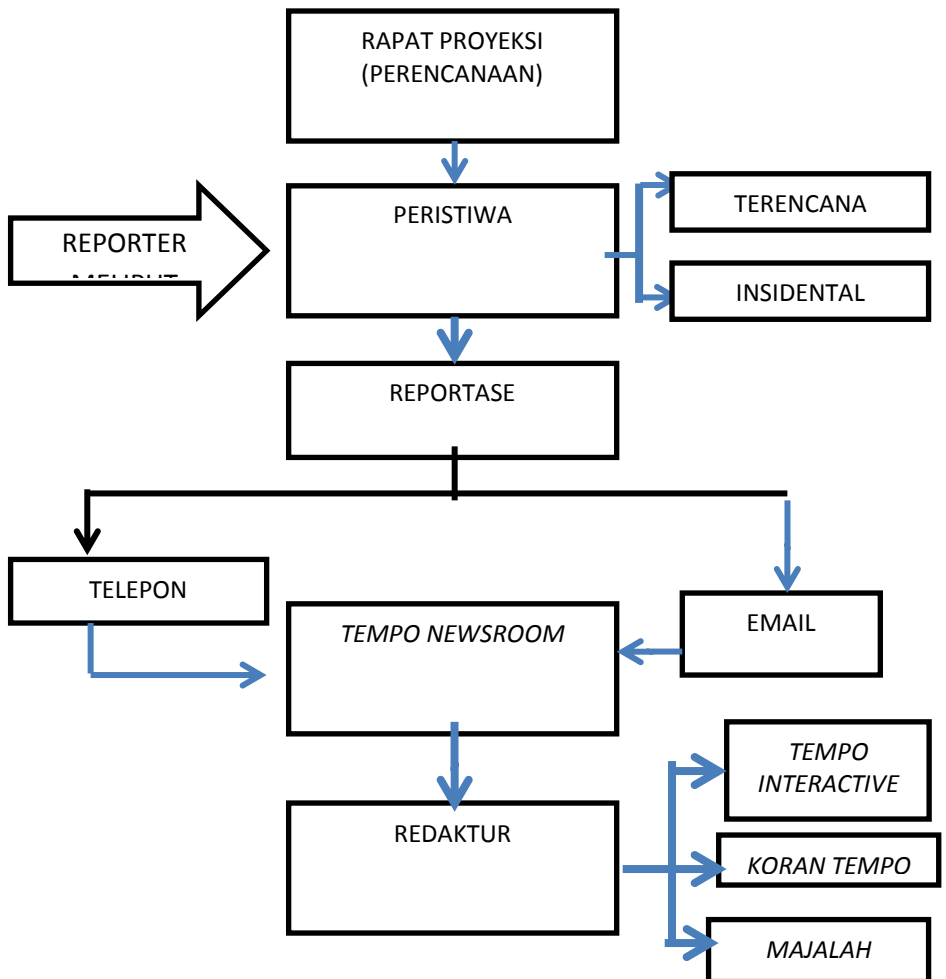
Dari sisi '*magnitude*' atau 'seberapa dahsyat' peristiwa yang diberitakan sehingga bisa menarik perhatian pembaca, menurut Efri, berita-berita terorisme sangat layak diberitakan karena biasanya dibarengi peristiwa yang dahsyat dengan korban yang tidak sedikit.

Terkait dengan media routine yang dilakukan *Koran Tempo* sebagai bagian dari Grup *Tempo*, semua berita termasuk berita-berita seputar aksi terorisme melalui proses dan alur yang sudah ditentukan.

Pada prinsipnya semua pemberitaan, termasuk juga berita-berita seputar terorisme didasarkan pada routine media yang telah ditetapkan, khususnya setelah melalui rapat proyeksi atau perencanaan dan diolah oleh redaktur bersangkutan yang disesuaikan dengan kebijakan umum *Tempo*.

BAGAN 6.1

ALUR BERITA DI *TEMPO* SECARA UMUM



Sumber : Company Profile *Tempo*

Ketika ditanya mengapa *Koran Tempo* lebih sering mengutip sumber resmi kepolisian atau Densus 88 dan jarang memberi kesempatan pada pihak keluarga korban, Efri mengatakan Tidak pernah ada penjataan berita di Koran Tempo. Kembali saja ke lima kriteria layak berita di atas. Informasi dari siapa yang masuk kategori layak berita? Apakah dari Kepolisian atau keluarga tersangka terorisme?

Meski begitu, menurut dia Wartawan tidak boleh percaya mentah-mentah kepada semua narasumbernya, termasuk Kepolisian. Informasi lisan harus didukung dengan dokumen, reportase, dan diuji dengan pernyataan dari pihak-pihak lain. Dalam konteks terorisme, *Koran Tempo* selalu mencari bukti pendukung, mewawancarai polisi, TNI, pakar, anggota keluarga tersangka, warga setempat, dan menerjunkan tim ke lapangan. Semua informasi yang diperoleh disaring, dianalisis, diperdebatkan sampai didapat rangkaian cerita yang bias dipertanggungjawabkan.

Menanggapi sikap *Tempo* yang terkadang dianggap kurang memberikan porsi yang seimbang dalam pemberitaan terorisme bisa dipahami mengingat persoalan terorisme ini merupakan persoalan yang pelik dan membutuhkan penanganan khusus.



Hal ini diungkapkan oleh wartawan senior Ib Alit Wiraatmaja yang sekarang menjabat sebagai anggota Dewas LPP Radio Republik Indonesia. Menurut dia, memang seharusnya Koran Tempo memberitakan persoalan terorisme dari berbagai segi. Menurut dia, perlu diberitakan dari berbagai sisi, atau cover

both sides. Media harus mempertimbangkan dampak dari pemberitaannya pada masyarakat.

“Dalam peliputan terorisme memang kita tidak bisa hanya cover both sides, tetapi multi sides wartawan harus juga melihat dampak dari pemberitaan terorisme, dampaknya pada keluarga korban, dampaknya kepada psikologi keluarga korban, dampaknya pada ketakutan rakyat banyak. Juga harus dipertimbangkan keamanan negara, Negara harus menjamin keamanan rakyatnya dan terorisme sebagai musuh negara harus diberantas habis” (Wiraatmaja,: 2013)

Alit sendiri sepakat dengan Yudono yang menganggap bahwa terorisme adalah masalah bangsa, masalah yang terkait dengan keamanan negara. Sebagai musuh negara, media menganggapnya juga sebagai musuh bersama media. Tetapi dalam penanganan beritanya memang harus mengedepankan apakah berita tersebut berdampak atau tidak bagi masyarakat.

“Perlu disadari bahwa kita tidak mau negara Indonesia ini disebut sebagai sarang teroris, sehingga wajar saja kalau media sendiri tidak mau dijadikan semacam ‘corong’ dari terorisme. Media lebih mengutamakan kepentingan rakyat banyak yang memang tidak menyukai terorisme. Sehingga wajar saja, media cenderung mengungkap peristiwa saja, menggunakan sumber-sumber resmi seperti Densus 88 dan Kepolisian dan menerapkan prinsip peace journalism yang mengedepankan solusi atas persoalan rakyat. Media dalam hal terorisme akan berada di belakang pemerintah untuk melawan bersama,” (Wiratmaja, 2013)

Intertekstualitas

Di sisi intertekstualitasnya, maka bisa didapatkan temuan sebagai berikut. *Koran Tempo* dalam pemberitaan ini mengetengahkan alasan utama mengapa akhirnya kepolisian menangkap Ba'asyir Terkait kasus terorisme. Koran ini secara jelas mengamini tindakan aparat keamanan dan tidak mencari lebih dalam lagi apa yang sebenarnya terjadi. -ada upaya menggiring opini bahwa Ba'asyir adalah seorang tokoh Islam yang memang anti demokrasi.

Bahkan istilah " *demokrasi Kurang Ajar'* dalam Judul berita ini memperkuat posisi Ba'asyir yang memang anti terhadap demokrasi di sisi yang lain, Koran Tempo memperlihatkan pandangan Ba'asyir yang menegaskan bahwa Islam adalah ideology yang paling benar dan cocok buat Indonesia, dan di sisi yang lain demokrasi itu salah karena bertentangan dengan Hukum Allah. *Koran Tempo* memperlihatkan pandangan Ba'asyir yang menegaskan bahwa Islam adalah ideology yang paling benar dan cocok buat Indonesia, dan di sisi yang lain demokrasi itu salah karena bertentangan dengan Hukum Allah.

Kecenderungan *Koran Tempo* yang seringkali mengabaikan narasumber yang berimbang sebagaimana diungkap oleh Direktur Utama *Tempo*, terkait dengan sulitnya akses pada narasumber. Berbeda dengan aksi terorisme di tempat lain, aksi terorisme menurut Bambang Harymurti di Indonesia dilakukan seolah sebagai silent operation, dimana tidak ada yang mengakui siapa yang harus bertanggungjawab dalam suatu aksi terorisme.

Saat berhadapan dengan terorisme, banyak media termasuk *Koran Tempo* akan sulit menuliskannya secara objektif, karena narasumber yang bisa dimintai keterangan seringkali sulit karena aksi teroris di Indonesia amat berbeda dengan aksi teroris di Amerika . Setelah menjalankan aksinya, teroris Indonesia seringkali tidak terdeteksi secara jelas siapa mereka. Dan dalam keadaan tidak berimbang dari sisi narasumber,

Koran Tempo tetap harus menuliskan beritanya kendati tak bisa cover both sides.

Lebih jauh lagi, keberpihakan media –dalam hal ini *Koran Tempo*—seolah-olah kepada pihak aparat keamanan sangatlah logis karena dalam hal pemberitaan terorisme, *Koran Tempo* memang tidak netral melainkan memihak rakyat yang terzalimi aksi terorisme. Hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan Direktur Utama *Tempo*, Bambang Harymurti berikut ini:

“...Jadi prinsipnya jurnalisme itu ada dua sebenarnya. Pertama dia membela kepentingan publik, Kedua biasanya cenderung membela underdog, siapapun dizalimi saat itu. Sekarang misalnya siapa yang berani membela ahmadiyah? Media? Tapi dulu siapa yang berani bela Amir Biki, sekarang kebetulan kelompok Amir Biki berkuasa, yang dia tindas kita bela. Jadi sebenarnya gitu saja sederhana, coba lihat dalam posisinya terbalik. Kalau sekarang tempo sering dianggap anti dengan Islam, karena sekarang khan yang melakukan kezaliman itu FPI, segala macam. Tapi dulu jaman FPI di orde baru, Siapa yang berani membela mereka saat diperlakukan oleh anak buah Benny Murdani ? Jadi jurnalisme kita pertama membela kepentingan publik dan terutama orang-orang yang terzalimi. Itu yang harus dibela. Ngak tahu apa-apa, lagi enak-enak makan di warung dibom sama teroris, apa salahnya dia wong dia bukan musuhnya teroris, mengapa mereka tidak pergi ke Israel, kalau mereka merasa musuh Islam adalah Israel mengapa mereka tidak pergi ke Israel saja, berjuang di sana. Ngapain ngebom-ngebom orang Islam sendiri, supir taksi lagi. Anak istrinya gimana kalau mati bapaknya? (Harymurti, 2014)

Menurut Bambang lagi, keberpihakan media di Indonesia terhadap korban terorisme mengingat bahwa media tersebut tidaklah media netral, dan mengapa mereka terkesan hanya membela kepentingan pemerintah, bahkan tidak memberi kesempatan bagi kelompok teroris untuk berbicara karena

memang *Tempo* membela kepentingan publik. Dia membantah bahwa *Koran Tempo* memang memusuhi Islam, dan karena banyak aksi terorisme dilakukan oleh mereka yang tergolong kelompok radikal Islam garis keras.

"Kalau sekarang *Tempo* sering dianggap anti dengan Islam, karena sekarang khan yang melakukan kezaliman itu FPI, segala macem. Tapi dulu jaman FPI di orde baru, Siapa yang berani membela mereka saat diperlakukan oleh anak buah Benny Murdani ? " ujar Bambang lagi. Jurnalisme *Tempo* pertama-tama adalah bagaimana membela kepentingan publik dan terutama membela orang-orang yang terzalimi.

"Itu yang harus dibela. Ngak tahu apa-apa, lagi enak-enak makan di warung dibom sama teroris, apa salahnya dia wong dia bukan musuhnya teroris, mengapa mereka tidak pergi ke Israel, kalau mereka merasa musuh Islam adalah Israel mengapa mereka tidak pergi ke Israel saja, berjuang di sana. Ngapain ngebom-ngebom orang Islam sendiri, supir taksi lagi. Anak istrinya gimana kalau mati bapaknya? (Harymurti, 2014)

Pernyataan Bambang Harymurti soal bagaimana posisi *Tempo* dalam menggambarkan terorisme dan Islam, perlu dikaji ulang karena dalam praktiknya, *Koran Tempo* seringkali tidak melakukan upaya mencari keberimbangan berita, dan terkesan *Koran Tempo* hanya menyudutkan kelompok Islam yang dituduh melakukan aksi terorisme tanpa ada upaya yang cukup untuk melakukan pembuktian apakah klaim tersebut benar atau tidak.

Dari hasil kajian teks berita dan hasil wawancara, ada kecenderungan wartawan *Koran Tempo* tidak membedakan mana yang dianggap fakta, mana yang dianggap sebagai 'klaim' atas fakta tersebut. Artinya, pernyataan sudah terjadi sesuatu peristiwa yang disampaikan oleh narasumber kepolisian adalah belum tentu fakta sesungguhnya tetapi adalah klaim kepolisian terhadap peristiwa.

Hal ini ditegaskan oleh Farid Gaban, mantan wartawan *Tempo* sebagai kekurangan mendasar awak media Koran Tempo saat menyampaikan berita soal terorisme. Persepsi masyarakat tentang terorisme di Indonesia dibentuk oleh pemberitaan media. Banyak warga masyarakat, secara umum, menerima apa yang ditulis koran sebagai fakta. Ketika seorang wartawan menulis "Teroris, yang mendalangi pembunuhan polisi, ditembak mati karena melawan", pembaca umumnya akan beranggapan si wartawan tahu persis: bahwa yang ditembak itu benar-benar teroris. Tahu persis, bahwa yang ditembak itu mendalangi pembunuhan polisi. Tahu persis bahwa mereka ditembak mati itu karena melawan.

Tapi, benarkah si wartawan tahu persis tentang semua itu? Dalam banyak kasus, wartawan hanya mengutip sumber (polisi). Sebenarnya, mudah menandai mana fakta (jurnalistik) dan klaim. Yakni dengan menelusuri sumber-sumber yang ada dalam sebuah berita. Sourcing, atau atribusi terhadap sumber, merupakan elemen terpenting dalam sebuah berita. (Gaban, 2014).

Gaban melihat berita *Koran Tempo* soal terorisme yang dianggapnya tidak cermat, yang dimuat salah satu koran terbaik di Indonesia, yang wartawannya pintar dan cerdas. Sebagai contoh misalnya berita terorisme, misalnya berita berjudul TERORIS CIPUTAT DALANG LIMA PENEMBAKAN POLISI" (*Koran Tempo*, 02/01/2014).

Berita headline seputar penangkapan teroris itu mengandung enam alenia. Seluruh cerita (semua alenia) dibangun dari wawancara/ Pernyataan empat sumber: Kapolri Sutarmanto, Ajun Inspektur Satu Patah Saktiyono, Humas Polri Boy Rafli Anwar, Pengamat teroris Noor Huda Ismail.

Berita ini dilengkapi dengan berita lain di halaman dalam: "Pelaku Rencanakan Pengeboman 30 Vihara". Berita 8 alenia ini sepenuhnya dikutip dari satu sumber: Boy Rafli Anwar. Walhasil,



hampir seluruh cerita teroris yang menjadi berita utama *Koran Tempo* ini, yang akan menancap di kepala pembacanya, dibangun dari klaim polisi. Walaupun dikutip sumber bukan polisi, Noor Huda Ismail, adalah pengamat yang dekat dengan polisi.

Berita headline *Koran Tempo* itu secara keseluruhan memperlihatkan polisi sebagai korban teroris. Bahwa rangkaian

penembakan polisi beberapa bulan terakhir adalah ulah teroris. Termasuk kematian Brigadir Kepala Sukardi di depan Kantor KPK -- yang penjelasan masuk akal nya lebih karena persaingan bisnis pengawalan. *Koran Tempo* juga membiarkan pernyataan kabur: teroris merampok uang untuk membiayai operasi teror di Poso (Sulawesi) tanpa ada penjelasan lebih jauh.

Detil-detil itu sepertinya tak penting dan agak membingungkan bagi pembaca awam. Tapi, mereka akan menangkap kesan umum bahwa Polisi hebat membunuh teroris. Tapi benarkah seperti itu? Ini bukan kasus pertama. Dan tak hanya *Koran Tempo* yang menulis seperti itu. Bayangkan bagaimana persepsi masyarakat dicekoki oleh klaim polisi seperti itu. Sementara para wartawan tunduk sebagai humasnya tanpa daya kritis.

Dalam pemberitaan soal aksi terorisme yang peneliti teliti terlihat bahwa awak media *Koran Tempo* hanya mengandalkan 'klaim kepolisian' atas fakta atau peristiwa yang

ada dan mengabaikan hak masyarakat untuk mengetahui kejadian sesungguhnya yang terjadi.

Dari sejumlah teks yang dianalisis, *Koran Tempo* memang terlihat cenderung menerapkan jurnalisme klaim sebagaimana diungkap oleh Farid Gaban. Di lapangan, saat berhadapan dengan aksi terorisme dan tidak ada sumber lain atau sumber alternatif yang mewakili kepentingan pelaku, maka *Koran Tempo* akan menggunakan sumber kepolisian dan begitu saja percaya pada pernyataan polisi.

Demikian juga saat menggambarkan penangkapan sejumlah orang yang dianggap pelaku terorisme di Ci Biru Bandung, *Koran Tempo* seakan 'berada' di lokasi dan menggambarkan dengan detil apa yang ditemukan di laboratorium para pembuat bom tersebut dan mengesankan bahwa wartawan *Koran Tempo* itu berada di lokasi dan benar-benar tahu persis apa yang terjadi, padahal semua informasi tersebut hanya berasal dari pihak kepolisian.

Kalaupun dianggap sebagai *jurnalisme advocacy* yang memang bertujuan untuk menyadarkan masyarakat bahwa aksi terorisme itu sangat merugikan, dan membuat banyak pihak terzalimi, tetapi *Koran Tempo* mengabaikan prinsip penting dalam jurnalisme yakni unsur *cover both sides*. Kalau pun alasan yang diajukan oleh *Koran Tempo* bahwa mereka kesulitan mendapat akses dari kelompok teroris yang menjadi pelaku, sebenarnya bisa diatas dengan mewawancarai tim pengacara Muslim, atau pihak keluarga, atau saksi mata yang berada di lokasi atau mengetahui apa yang benar-benar terjadi, sehingga apa yang disampaikan *Koran Tempo* tidak hanya 'klaim' tentang sebuah kebenaran tetapi kebenaran itu sendiri.

Apabila dianggap bahwa *Koran Tempo* cenderung kurang *coverboth*, menurut Wartawan senior yang juga pengurus PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Pusat, Noeh Hatumena ini wajar karena seringkali ada keterbatasan bagi wartawan untuk melakukan kegiatan investigatif reporting. Tidak mungkin juga wartawan punya banyak waktu untuk melakukan penyelidikan sendiri tentang pergerakan terorisme di tanah air.

Menurut Noeh, terorisme itu “barang baru” bagi masyarakat Indonesia yang secara historis turun temurun hidup dalam kekerabatan sosial..Terorisme itu ibarat sesuatu yang dipaksakan harus ada di Indonesia oleh kepentingan-kepentingan global yang sifatnya fundamentalis yang bergerak secara tertutup di lingkungan mereka . Sementara itu orang-orang



Indonesia yang ‘*humble*’ dengan kualitas pendidikan formal tetapi fanatik dimanfaatkan dan terjerumus melakukan itu mengikuti agenda kepentingan fundamentalisme itu.

Dari hasil wawancara dengan mantan wartawan *LKBN Antara* ini, terorisme di Indonesia masih jadi sesuatu yang baru. Terorisme itu ibarat hantu tanpa bentuk dan dibentuk oleh elemen-elemen yang berkepentingan.

“.....Dengan kata lain, terorisme tersebut ibarat hantu tanpa bentuk dan dicreate oleh elemen-elemen yang berkepentingan dan Densus atas nama pemerintah melakukan tugasnya untuk sebuah tujuan yang jujur saja merupakan barang asing bagi awam Indonesia termasuk pers, makanya sumbernya hanya sepihak dan pers sepertinya telah dikondisikan untuk hanya pegang sumber satu itu tanpa mengeksplor lebih dalam dengan cara sendiri. Saya pribadi pikir pers kita terjebak dalam agenda pemerintah karena jarang ada pemberitaan terorisme yang berdasarkan teknik investigasi”. (Hatumena , 2013)

Lain lagi pendapat wartawan senior *Kompas* Pepih Nugraha terkait aksi terorisme dan pemberitaan seputar terorisme. Menurut dia terorisme di Indonesia dilakukan oleh kelompok radikal yang terorganisir. Dari penyergapan dan pelumpuhan yang dilakukan aparat keplosian (Densus 88), teroris mengarah pada satu kelompok radikal keagamaan, yaitu Islam. Organisasi teroris, di manapun dia eksis, memiliki tujuan. Ada tujuan sampingan, ada tujuan utama. Ada tujuan jangka pendek-menengah-panjang, sebagaimana sebuah organisasi.

"...Menilik pada teroris di Indonesia, tujuan utama terorisme dengan melakukan pembunuhan dengan cara pengebomam (bom bunuh diri, misalnya), adalah mendirikan satu negara, atau satu kekhalifahan mencakup regional tertentu yang terbebas dari sekat negara. Bisa jadi, misalnya, bertujuan mendirikan kekhalifahan yang mencakup Asia Tenggara. Yang digoyang tentu saja pemerintahan yang sah, sedangkan simbol yang dianggap paling pas bagi pengacauan keamanan (bagi teroris) adalah dengan menjadikan aparat keamanan, dalam hal ini polisi (wa bil khusus Densus 88), sebagai musuh. Maka dalam beberapa peristiwa berdarah, polisi menjadi sasaran mereka (teroris). Belum pernah tersebut aparat pertahanan seperti tentara atau simbol-simbol pertahanan (Kodim, Korem, Koramil) yang menjadi sasaran, yang terjadi adalah sasaran terhadap simbol kepolisian seperti Polsek, Polres," (Nugraha , 2013)

Dengan kata lain, menurut Pepih Terorisme adalah cita-cita, bahkan ideologi. Karena ideologi, mereka menjalankan tugas atas dasar ideologi teror yang disepakati organisasi. Penyebab teror di Indonesia bukan semata-mata kekecewaan terhadap pemerintah, misalnya, lebih karena cita-cita (*ideologi*) mendidikan kekhalifahan itu, sehingga pada saat negara gagal (*fail state*) atau berhasil, mereka tetap melancarkan aksi teror mereka, sebelum cita-cita mereka tercapai dan menjalankan ideologi (*syariah*) di seluruh dunia. Media massa tentu saja harus memberitakannya, terutama memberi pemahaman kepada

pembaca dalam mengidentifikasi (calon) pelaku yang biasanya berbaur di lingkungan mereka, apa saja yang harus mereka lakukan (*the news that we can use*).

Lalu bagaimana pemberitaan aksi terorisme di Indonesia?

Menurut pepih, Pemberitaan media massa Indonesia terhadap tersangka teroris garis keras mengerucut pada kelompok Islam garis keras. Ini harus dibuktikan baik di pengadilan maupun dari sisi intelijen. Sebab, kelompok lain yang bahkan mereka yang dikatakan "garis lunak" atau teror lain mengatasnamakan premanisme, keagamaan non-Muslim (kalau ada), akan menggunakan stigma ini untuk melakukan apapun yang mereka mau, meski sampai saat ini belum terbukti dilakukan.



"...Islam garis keras dalam pemahaman saya, yaitu mereka yang tetap ingin mengubah haluan negara menjadi sebuah syariah yang mendunia, yang berlaku di manapun. Sedangkan Indonesia dianggap harus bisa menunjukkan dirinya (di sisi teroris) sebagai negara Islam terbesar, sehingga radikaliasi mereka anggap harus dimulai di sini, di Indomesia, khususnya untuk kawasan Asia Tenggara. (Nugraha,2013)

Dari sisi pemberitaan, diakui Pepih Nugraha bahwa kasus terorisme merupakan kasus yang sensitif sehingga perlu penanganan khusus.

"...Saya tidak tahu kebijakan koran lain, tetapi memang karena terorisme masuk kategori "berita sensitif", maka sumber resmi densus atau kepolisian, akan menjadi sumber paling kredibel dan aman. Bahwa kelak akan diliput dari sisi keluarga korban teroris, itu bisa saja dan masuk nilai berita menarik karena pembaca bisa mengetahui sisi lain dari keluarga teroris dan bahkan si teroris itu sendiri. Namun demikian, hal ini baru akan dilakukan ketika kepolisian sudah mengumumkan tersangka teroris (meninggal atau masih hidup). Kalau baru spekulasi, itu tidak akan dilakukan.(Nugraha, 2013)

Kegamangan wartawan atau editor *Koran Tempo* dalam memberitakan kasus-kasus terorisme yang berafiliasi pada gerakan fundamentalis Islam menurut wartawan senior *LKBN ANTARA*, Benny Siga Butar butar merupakan sesuatu hal yang wajar. Biar bagaimanapun, *Koran Tempo* adalah anak perusahaan dari *Majalah Tempo* dimana nilai-nilai 'liberalisme' yang ditularkan Goenawan Mohamad juga terasa di media-media yang ada di bawah naungan *Group Tempo*.



" Hal itu wajar saja, karena *Koran Tempo* adalah bagian dari *Group Tempo* yang dulu dibidani oleh Goenawan Mohamad. Sosok Goenawan ini pasti akan mempengaruhi semangat semua wartawan dan redaktur yang bekerja di *Koran Tempo*. Sikapnya yang kritis terhadap kelompok Islam

fundamentalis itu erat kaitannya dengan kelompok Islam Liberal yang disokongnya, pasti sedikit banyak berpengaruh pada kebijakan redaksi mereka saat menggambarkan terorisme.” (Butar-butur, Beni siga, 2013)

Mengapa *Koran Tempo* menjadi tidak kritis terhadap pemerintah khususnya dalam pemberitaan terorisme menurut Benny karena kebijakan *Koran Tempo* adalah kebijakan yang sama dengan kebijakan *Tempo* yang menganggap bahwa terorisme apalagi yang didukung oleh kelompok radikal atau kelompok Islam garis keras harus dianggap sebagai musuh bersama.

Menurut Benny, kekritisan *Tempo* dalam menulis berita-berita yang menyangkut kebijakan dan politik Orde Baru seakan hilang tak berbekas saat menulis dan menyiarkan berita-berita terorisme. Contoh yang paling terasa, saat pemberitaan tersangka terorisme yang ditembak mati oleh petugas Densus 88, *Koran Tempo* begitu saja percaya pada keterangan sumber kepolisian dan tidak melakukan investigasi sendiri.

“ Dulu *Tempo* dikenal kritis terhadap narasumber pemerintah , khususnya Orde Baru. *Tempo* tidak akan begitu saja menerima informasi dari mereka. Mereka akan melakukan cek ricek , bahkan kalau perlu wartawannya melakukan investigatif reporting. Tetapi dalam pemberitaan kasus-kasus terorisme, *Koran Tempo* cenderung percaya saja pada info dari Densus 88 atau Kepolisian. Kayaknya mereka tidak melakukan cek ricek apalagi melakukan investigatif reporting,” (Butar-butur,, 2013)

Pendapat senada juga disampaikan oleh wartawan *Harian Rakyat Merdeka*, Marula Sardi. Menurut dia, soal mengapa *Koran Tempo* cenderung hanya percaya pada narasumber pemerintah dalam pemberitaan terorisme itu karena mungkin kebijakannya seperti itu. Tetapi apabila dilihat dari sudut pandang ideologi media, menurut Marula , *Koran Tempo*

sebagaimana juga majalah *Tempo* lebih mejadi perpanjangan kepentingan Barat.

"Kalau merujuk pada ideologi media, tempo lebih menjadi corong barat. Dia begitu keras dengan Islam dan terorisme. Namun soal feminisme misalnya *Koran Tempo* sangat mendukung," (Sardi, 2013)

Sedangkan narasumber lain, Taufiq Rahman, editor senior di *Harian Republika*, pemberitaan terorisme merupakan persoalan biasa. Secara khusus tidak ada pedoman untuk liputan terorisme. Di *Republika*, mereka menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah dan peliputan cover both sides sehingga media ini tak gampang memberi cap teroris karane cap teroris itu menjadi wewenang di pengadilan. Dia melihat di Indonesia, definisi mengenai apa atau siapa teroris itu kacau balau karena lebih banyak muatan politisnya. Bahkan, dia sendiri agak meragukan terorisme yang sesungguhnya ada di Indonesia.



" melihat kultur di Indonesia sangat susah menjadikan mereka teroris. Kalau imam Samudra dan kawan kawan bisa menghancurkan bali, mereka punya potensi untuk kudeta dong. Aksi teror seringkali sporadis. Pengungkapan aksi terduga teroris atau penangkapan mereka seringkali memiliki relasi dengan kondisi di Jakarta. Terorisme seringkali menjadi semacam pengalihan isu publik. Blow up penangkapan teroris seperti dilakukan TV One menjadikan publik semakin tahu kalau isu teroris seperti main-main saja. Ia seperti sinetron dan menjadikan publik semakin tidak percaya dengan isu terorisme. Media sebaiknya wajar saja mensikapi soal ini serta lebih

cerdas lagi dalam mengungkapkan fakta-fakta yang ada di lapangan..” (Taufiqrahman, 2013)

Secara spesifik tidak ada pedoman untuk liputan terorisme di *Republika*. Kebijakan peliputan menurut aturan standar saja seperti liputan yang lain seperti teknik cover both sides, mengedepankan azas praduga tak bersalah. Menurut dia, *Republika* terbiasa menggunakan sebutan terduga teroris hal itu karena pemberian cap teroris atau bukan, menjadi wewenang pengadilan.



Ketika ditanya bagaimana sikap media terkait pemberitaan terorisme yang seringkali dikaitkan dengan gerakan Islam garis keras, Taufiq menegaskan bahwa tak ada perhatian secara spesifik terkait hal itu. Menurut dia, *Republika* juga memberitakan secara keras kelompok Islam garis keras seperti Front Pembela Islam

kalau kelompok ini justru merusak citra Islam.

..”tidak ada perhatian secara spesifik sih. Kami justru menghantam kelompok-kelompok garis keras yang justru merusak citra Islam. Dengan FPI misalnya, kami tak segan mengungkap sisi negatifnya kalau memang negatif. Kami seringkali bertanya-tanya juga sih..mengapa terorisme cenderung dikaitkan dengan islam? ada apa ini?

Ketika ditanya mengapa sejumlah media massa di Indonesia, termasuk juga *Koran Tempo* di dalamnya yang cenderung lebih mengutamakan sumber resmi dari kepolisian dan Densus 88 dan di sisi lain mengabaikan kepentingan keluarga pelaku terorisme, Taufiq mengatakan ini merupakan sesuatu yang wajar karena operasi para terduga teroris itu seringkali bersifat tertutup. Sumber-sumber resmi di lapangan seperti Kepolisian dan Densus 88 diperlukan untuk keperluan klarifikasi temuan, karena itu polisi atau Densus 88 menjadi sumber utama.

"...sumber-sumber resmi atau densus 88 untuk klarifikasi dari temuan temuan di lapangan. Karena dalam operasi terduga teroris seringkali bersifat tertutup. Karena itu polisi atau densus 88 menjadi sumber utama. Selain polisi tentu saja dilakukan kroscek di lapangan untuk memperkaya dan memperjelas pokok persoalan. Tak semua terduga teroris dan keluarganya mau berbicara dengan kalangan pers Baasyir termasuk salah satu orang--yang dicap sebagai teroris--, dan mau terbuka dengan kalangan pers. (Taufiqrahman, 2013)

Apakah berita terorisme merupakan berita yang teramat penting dan layak jual? Menurut Taufiqrahman, ini harus dipandang sebagai sesuatu yang 'situasional' atau tergantung kasusnya masing-masing. Masyarakat Indonesia sepertinya sudah mulai bosan dan paham bahwa aksi terorisme tak lebih dari aksi kriminal biasa yang dikemas menjadi aksi teroris. Bahkan menurut dia, saat-saat ini berita seputar terorisme kalah populer dibanding kasus korupsi, pertandingan sepakbola atau pemberitaan seputar Timnas PSSI yang sedang naik daun. Masyarakat sering curiga bahwa penangkapan teroris dan ekspos kepolisian yang besar-besaran terkait hal itu seringkali merupakan pengalihan isu, agar masyarakat tidak terlampaui fokus dengan topik pembahasan peristiwa tertentu.

Apabila disimpulkan dari hasil wawancara dengan narasumber terkait dengan pemahaman mereka soal terorisme

dan pemberitaan seputar terorisme bisa terlihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 6.1
Pemahaman soal terorisme dan pemberitaan terorisme di Indonesia

ISU penting	Nara sumber	Transkrip wawancara
1.Isu terorisme banyak muatan politik 2.terorisme diragukan bisa ada di Indonesia 3.terorisme seringkali menjadi semacam pengalihan isu publik	Taufiqrahman Redaktur Harian <i>Republika</i>	...”definisi terorisme kacau kalau di Indonesia, karena lebih banyak muatan politisnya. Aku juga meragukan terorisme yang sesungguhnya ada di Indonesia. Melihat kultur di Indonesia sangat susah menjadikan mereka teroris. Kalau imam samudra dan kawan kawan bisa menghancurkan bali, mereka punya potensi untuk kudeta dong. Aksi teror seringkali sporadis. Pengungkapan aksi terduga teroris atau penangkapan mereka seringkali memiliki relasi dengan kondisi di Jakarta. Terorisme seringkali menjadi semacam pengalihan isu publik,”
1.masih banyak sel-sel terorisme di Indonesia 2.terorisme itu ibarat api dalam sekam sehingga media harus	IB Alit Wiratmaja wartawan senior dan Anggota Dewan Pengawas	Sepanjang itu fakta kenapa tidak? Tetapi perlu diingat bahwa media harus mendukung upaya pemberantasan terorisme di Indonesia mengingat bahwa masih banyak sel-sel

dukung pemberantasan terorisme	Lembaga <i>Penyiaran Publik RRI</i>	terorisme di Indonesia misalnya di Poso, itu ibarat api dalam sekam. Sehingga 'yang anti' teror itu masih diperlukan
<p>1.terorisme sudah kurang menarik 2.ada upaya mengaburkan isu politik lewat penangkapan teroris</p> <p>1.terorisme ibarat hantu tanpa bentuk dan diciptakan oleh elemen yang berkepentingan 2.terorisme adalah barang baru, asing buat wartawan 3. jarang ada pemberitaan terorisme lewat teknik investigatif</p>	<p>Marula Sardi <i>Wartawan Harian Rakyat Merdeka Jakarta</i></p> <p>Mohammad Noeh Hatunema <i>Pengurus PWI Pusat</i></p>	<p>Terorisme di Indonesia sudah kurang menarik lagi. Tiga tahun terakhir tidak ada berita besar soal teroris. Yang menarik justru sekarang muncul asumsi kalau densus menangkap teroris, isu politik apa yang dikaburkan. Pandangan itu juga ada pada wartawan</p> <p>Terorisme ibarat hantu tanpa bentuk dan dicreate oleh elemen-elemen yang berkepentingan dan Densus atas nama pemerintah untuk sebuah tujuan yang jujur saja merupakan barang asing bagi awam Indonesia termasuk pers, makanya sumbernya hanya sepihak dan pers sepertinya dikondisikan untuk hanya pegang sumber yang satu itu tanpa mengeksplor lebih dalam dengan cara pers sendiri. Saya pribadi pikir pers kita terjebak dalam agenda pemerintah karena jarang ada pemberitaan berdasar investigative</p>
1.teroris di Indonesia	Pepih Nugraha Wartawan	Terorisme di Indonesia dilakukan oleh kelompok

dilakukan oleh kelompok radikal terorganisir 2.teroris mengarah pada satu kelompok radikal keagamaan yaitu islam	<i>Kompas</i>	radikal yang terorganisir. Saya tidak akan menyebut nama organisasinya, akan tetapi dari penyergapan dan pelumpuhan yang dilakukan aparat keplosian (Densus 88), teroris mengarah pada satu kelompok radikal keagamaan, yaitu Islam
Terorisme ada karena sebagian kecil masyarakat mendukung atau toleran terhadap gerakan tersebut	Erfi NP Ritonga RedakturDesk Nasional <i>Koran Tempo</i>	Terorisme di Indonesia ada karena sebagian kecil masyarakat mendukung atau minimal toleran terhadap gerakan tersebut
1.terorisme mencuat setelah menurunnya kontrol negara terhadap kehidupan masyarakat di akhir rezim soeharto 2.terorisme makin subur seiring kebebasan berdemokrasi di era reformasi 3. akarnya adalah ketimpangan kesejahteraan dan minimnya pendidikan	Yudono Anwar Redaktur <i>Koran Tempo</i>	Terorisme di Indonesia baru mencuat setelah menurunnya kontrol negara terhadap kehidupan bermasyarakat di akhir rezim Soeharto. Setelah itu, terorisme makin subur seiring dengan kebebasan berdemokrasi di era Reformasi. Apa penyebab terjadinya terorisme? Akar dari terorisme adalah ketimpangan kesejahteraan dan pendidikan, sehingga orang yang tengah terpuruk dan kurang berpendidikan, gampang dipengaruhi kelompok tertentu untuk direkrut menjadi teroris

Kemudian soal sikap Koran Tempo yang dianggap kurang seimbang dalam pemberitaan aksi terorisme yang bernafaskan gerakan Islam garis keras, dari sejumlah narasumber wartawan yang saya wawancarai bisa dirangkum sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 6.2

Tentang pemberitaan *Koran Tempo* soal terorisme

Narasumber	Tanggapan soal sikap koran Tempo saat memberitakan terorisme	Transkrip wawancara
Bambang Harymurti Direktur Utama Tempo	<i>Ini masalah kesulitan akses saja, tetapi Koran Tempo sudah melaksanakan jurnalisme yang baik</i> <i>Tak ada yang mau mengklaim bertanggung jawab</i>	"...Nggak ada kebijakan khusus, ini masalah akses saja. Memang sekarang ada perbedaan antara kelompok teroris jaman dulu dengan kelompok Al-qaeda-Jemaah Islamiah. Kalau dulu itu mereka justru mengklaim, ini mereka lakukan sehingga media juga gampang melakukan ini. Sekarang khan susah, kita mau tanya siapa? Kalau kita mau melakukan azaz keberimbangan, kita harus nanya siapa? Bayangkan kalau pak Indi sebagai wartawan, mau pengen banget agar beritanya berimbang nih, ada pengeboman ..meledak terus mau nanya siapa nih? Polisi kasih keterangan yah kan, terus pelakunya bom bunuh diri sudah mati, terus mau nanya siapa karena nggak ada yang klaim yang melakukan siapa. Artinya

<p>Yudono Redaktur Majalah, Koran dan Online Tempo</p>	<p><i>Wartawan sudah melakukan jurnalisme dengan mewawancarai narasumber dan tidak mengarang berita, dan spekulatif</i></p> <p>1. Tempo memegang teguh prinsip praduga tak bersalah</p> <p>2. Pemberitaan terorisme dan teroris harus menyertakan keterangan dari pihak yang diduga teroris</p> <p>3. Koran Tempo memandang bahwa terorisme adalah musuh bersama</p>	<p>wartawan akhirnya mengambil narasumber yang available saja, khan kita nggak bisa ngarang-ngarang. Nanti kita bisa dianggap spekulatif gini gini. Jadi ini soal akses pada sumber yang bisa menceritakan tentang orang-orang ini</p> <p>"Koran Tempo tetap harus memegang prinsip praduga tak bersalah. Pemberitaan tentang terorisme dan teroris yang sudah terbukti tetap harus menyertakan keterangan dari pihak-pihak teroris. Ini semata-mata untuk memberikan peliputan yang utuh.</p> <p>"Koran Tempo memandang terorisme sebagai musuh bersama yang harus diperangi. <i>Koran Tempo</i> tidak mau terlalu gencar memberitakan 'keinginan' para</p>
---	---	--

	<p>4. Tak ada campur tangan owner karena ada mekanisme nya</p>	<p>teroris, karena <i>Koran Tempo</i> tidak mau dijadikan alat atau corong buat terorisme dalam segala aksi mereka</p> <p>Enggak ada intervensi dari pemilik <i>Tempo</i> atau pihak lain seperti Goenawan Mohammad. Pemilik <i>Tempo</i> mayoritas adalah karyawan melalui Yayasan karyawan. Sebagian lain dipegang perorangan dan publik.</p>
<p>Efri NP Ritonga Redaktur Desk Nasional <i>Koran Tempo</i></p>	<p>1. Tak ada kebijakan yang mengharuskan pemuatan berita terorisme</p> <p>2. Pemuatan berita terorisme harus lolos seleksi layak berita</p>	<p>Tidak ada kebijakan yang mengharuskan pemuatan berita terorisme atau berita apa pun juga. Setiap berita yang akan dimuat di <i>Koran Tempo</i> harus lolos seleksi layak berita. Kriterianya antara lain: dampaknya bagi kepentingan masyarakat, apakah melibatkan tokoh penting atau tidak, apakah memberi inspirasi atau tidak, seberapa dahsyat peristiwa nya, dan ada unsur kebaruan. – 'Tidak pernah ada penjataan berita di <i>Koran Tempo</i>. Kembali saja ke lima kriteria layak berita di atas. Informasi dari siapa yang masuk kategori layak berita? Apakah dari Kepolisian atau keluarga tersangka terorisme?</p>
<p>Benny Siga Butarbutar</p>	<p>1. Pemberitaan <i>Koran Tempo</i> terpengaruh</p>	<p><i>Koran Tempo</i> adalah bagian dari Group <i>Tempo</i> yang dulu dibidani oleh Goenawan Mohamad. Sosok</p>

Kepala Redaksi Internasional <i>LKBN Antara</i> Mantan pengurus PWI jaya	Goenawan Mohammad 2. <i>Koran tempo</i> mengusung sikap kritis terhadap Islam Fundamental	Goenawan ini pasti akan mempengaruhi semangat semua wartawan dan redaktur yang bekerja di <i>Koran Tempo</i> . Sikapnya yang kritis terhadap kelompok Islam fundamentalis itu erat kaitannya dengan kelompok Islam Liberal yang disokongnya, pasti sedikit banyak berpengaruh pada kebijakan redaksi mereka saat menggambarkan terorisme
Marula Sardi wartawan Harian <i>Rakyat Merdeka</i>	1. <i>Koran Tempo</i> jadi corong kepentingan barat 2. <i>Koran Tempo</i> begitu keras dengan Islam namun soal feminisme mendukung	Itu kebijakan redaksi <i>tempo</i> . Tapi kalau merujuk pada ideologi media, <i>tempo</i> lebih menjadi corong barat. Dia begitu keras dengan Islam dan terorisme. Namun soal feminisme misalnya sangat mendukung
I.B Alit Wiratmaja Dewan Pengawas LPP RRI <i>Wartawan senior</i>	1. Media (termasuk <i>Koran Tempo</i>) cenderung melihat terorisme sebagai musuh bersama 2. Media tak mau dijadikan atau dikesankan sebagai corong teroris	Perlu disadari bahwa kita tidak mau negara Indonesia ini disebut sebagai sarang teroris, sehingga wajar saja kalau media sendiri tidak mau dijadikan semacam 'corong' dari terorisme. Media lebih mengutamakan kepentingan rakyat banyak yang memang tidak menyukai terorisme. Sehingga wajar saja, media cenderung mengungkap peristiwa saja, menggunakan sumber-sumber resmi seperti Densus 88 dan Kepolisian
		--sumber-sumber resmi atau

<p>Taufiqrahman Redaktur Senior <i>Harian</i> <i>Republika</i></p>	<p>1.Untuk klarifikasi pakai sumber resmi saja, karena operasi terduga teroris biasanya bersifat tertutup</p> <p>2.Tak semua terduga teroris mau berbicara pada pers</p>	<p>densus 88 untuk klarifikasi dari temuan temuan di lapangan. Karena dalam operasi terduga teroris seringkali bersifat tertutup. Karena itu polisi atau densus 88 menjadi sumber utama. Selain polisi tentu saja dilakukan kroscek di lapangan untuk memperkaya dan memperjelas pokok persoalan. Tak semua terduga teroris dan keluarganya mau berbicara dengan kalangan pers</p> <p>Baasyir termasuk salah satu orang--yang dicap sebagai teroris--, dan mau terbuka dengan kalangan pers.</p>
<p>Pepih Nugraha Redaktur senior <i>Kompas</i></p>	<p>terorisme merupakan berita yang sensitif maka sumber resmi jadi sumber yang paling kredibel</p>	<p>karena terorisme masuk kategori "berita sensitif", maka sumber resmi densus atau kepolisian, akan menjadi sumber paling kredibel dan aman. Bahwa kelak akan diliput dari sisi keluarga korban teroris, itu bisa saja dan masuk nilai berita menarik karena pembaca bisa mengetahui sisi lain dari keluarga teroris dan bahkan si teroris itu sendiri. Namun demikian, hal ini baru akan dilakukan ketika kepolisian sudah mengumumkan tersangka teroris (meninggal atau masih hidup). Kalau baru spekulasi, itu tidak akan dilakukan.</p>
<p>Farid Gaban Mantan Wartawan/edit or Tempo</p>	<p><i>Koran Tempo</i> hanya menganut jurnalisme klaim, tidak melakukan</p>	<p>pembaca umumnya akan beranggapan si wartawan tahu persis: bahwa yang ditembak itu benar-benar teroris Tahu persis, bahwa yang ditembak itu mendalangi pembunuhan</p>

	<p>investigasi yang benar dan akurat tentang kejadian</p> <p>Masyarakat seakan-akan disugahi pemberitaan yang sesuai kenyataan tetapi sebenarnya peristiwa yang disampaikan hanyalah peristiwa konstruksi dari kepolisian dan wartawan tidak melihat dan mengetahui persis apa yang sungguh-sungguh terjadi</p>	<p>polisi.Tahu persis bahwa mereka ditembak mati itu karena melawan.</p> <p>Tapi, benarkah si wartawan tahu persis tentang semua itu? Dalam banyak kasus, wartawan hanya mengutip sumber (polisi). Sebenarnya, mudah menandai mana fakta (jurnalistik) dan klaim. Yakni dengan menelusuri sumber-sumber yang ada dalam sebuah berita. Sourcing, atau atribusi terhadap sumber, merupakan elemen terpenting dalam sebuah berita.</p>
--	---	---

Ketika disampaikan pertanyaan seputar apakah pemberitaan terorism memiliki nilai jual tinggi dan bisa menguntungkan , sejumlah narasumber membenarkan meski ada yang kurang setuju. Secara rinci pendapat mereka bisa dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 6.3
Pemberitaan Terorisme dan nilai jual berita

Narasumber	Apakah pemberitaan soal teroris merupakan primadona dan layak dijual dan disukai pembaca bahkan oleh pemasang iklan?	Transkrip wawancara
Bambang Harymurti Direktur Utama <i>Tempo</i>	Seringkali gara-gara pemuatan berita terorisme justru mengurangi pemasukan iklan <i>Tempo</i>	"...yah kadang-kadang bila berita seperti ini dimuat kadang menyingkirkan halaman iklan yang ada, jadi sebenarnya <i>Tempo</i> tidak melihat bahwa berita terorisme itu laku dijual atau tidak tetapi merupakan kebijakan <i>Tempo</i> memberitakan hal tersebut.."
Pepih Nugraha Redaktur senior <i>Kompas</i>	Layak jual karena didalamnya ada nilai berita	Ya. Berita teroris laku dijual, karena di dalamnya ada Konflik, dramatisasi dan ketegangan yang memenuhi nilai-nilai berita yang akan diserap pembaca.
Taufiqrahman Redaktur Senior	1. Tergantung situasi	" situasional saja sih kayaknya.. masyarakat seperti sudah mulai bosan dan paham

<i>Republika</i>	2. Masih kalah populer dengan isu korupsi, sepakbola atau Timnas PSSI	<p>bahwa terorisme tak lebih dari aksi kriminal biasa yang dikemas menjadi aksi teroris.</p> <p>Terorisme masih kalah populer dengan isu korupsi, sepakbola, atau Timnas PSSI yang lagi naik daun.</p>
Marula Sardi wartawan Harian <i>Rakyat Merdeka</i>	Terorisme bisa menarik jika melihat magnitude (besar atau penting kejadian)	Terorisme bisa menarik melihat besaran kejadiannya. Kalau cuma densus menangkap dan membunuh teroris paling cuma menempati ruang kecil di halaman depan. Tapi kalau bom besar baru jadi isu Besar.
Yudono Anwar Redaktur Majalah, Koran dan Online <i>Tempo</i>	Masih menarik untuk jadi headline asalkan harus besar magnitudenya	Berita terorisme masih menarik untuk jadi Headline, namun harus besar magnitude nya. bila tokoh terorisnya termasuk gembong, kerusakan yg ditimbulkan cukup besar misalnya, maka berita terorisme bisa jadi HL
Efri NP Ritonga Redaktur Desk Nasional <i>Koran Tempo</i>	Berita terorisme bisa layak, apabila lolos seleksi kelayakan berita	<p>-Tidak ada kebijakan yang mengharuskan pemuatan berita terorisme atau berita apa pun juga. Setiap berita yang akan dimuat di Koran Tempo harus lolos seleksi layak berita.</p> <p>Kriterianya antara lain: dampaknya bagi kepentingan masyarakat, apakah melibatkan tokoh penting atau tidak, apakah memberi inspirasi atau tidak,</p>

		seberapa dahsyat peristiwanya, dan ada unsur kebaruan .
Benny Siga Butarbutar Kepala Redaksi <i>Internasional</i> <i>LKBN Antara</i> Mantan pengurus PWI jaya	Sangat layak karena mengganggu dan merongrong wibawa pemerintah	Sangat layak, karena kegiatan terorisme merupakan kegiatan yang merongrong wibawa pemerintah dan bisa saja mengganggu keamanan nasional. Ada efek important, besaran dan dampaknya bagi masyarakat luas, terutama saat terjadi pengrusakan fasilitas umum atau pembunuhan massa menggunakan bom bunuh diri
I.B Alit Wiratmaja Dewan Pengawas LPP <i>RRI</i> <i>Wartawan senior</i>	Layak tetapi harus dilihat dulu, karena tidak semua persoalan terkait terorisme harus diungkapkan ke masyarakat lewat media	Tetapi memang persoalan terorisme itu khan banyak, ada yang masih dalam taraf penyidikan, ada yang penyelidikan sehingga mungkin ada yang tidak perlu diungkapkan ke media. Mungkin terkadang media hanya diberikan latar belakang, tidak semua persoalan terkait terorisme harus diungkapkan ke masyarakat lewat media, mungkin karena masih dalam fase penyelidikan

Dari struktur bahasa yang muncul, dari proses Diskursif di ruang redaksi dan analisis Makro bisa ditarik garis tegas bahwa pada hakekatnya informasi apapun tidak akan lepas dari kekuatan informasi dari pihak penguasa yang dominan. Dalam konteks Indonesia, pemberitaan soal terorisme memang tidak memiliki banyak pintu masuk. Informasi yang muncul hanya berasal dari pihak-pihak yang memiliki kekuatan serta legitimasi

informasi. Dalam hal ini adanya kekuatan dari Kepolisian dan Detasemen Khusus Anti Teror yang hanya menyediakan informasi satu sisi. Pada pemberitaan soal terorisme yang dilakukan *Koran Tempo* pada era tahun 2010, jelas terlihat kepincangan informasi dimana informasi soal 'kejadian yang sesungguhnya' hanya berasal dari satu pintu yaitu pihak kepolisian. Tak ada alternative lain informasi yang bisa menempatkan informasi soal terorisme di tanah air menjadi lebih seimbang. Dari sejumlah narasumber wartawan senior, bahkan redaktur *Koran Tempo* sendiri mengakui bahwa terorisme di Indonesia adalah musuh bersama dan sebagai media mereka tidak bersedia apabila media mereka dijadikan corong atau alat kepentingan mereka.

"*Koran Tempo* memandang terorisme sebagai musuh bersama yang harus diperangi. *Koran Tempo* tidak mau terlalu gencar memberitakan 'keinginan' para teroris, karena koran Tempo tidak mau dijadikan alat atau corong buat terorisme dalam segala aksi mereka (Yudono, 2013)

Sebagai sebuah kekuatan media di era reformasi ini, *Koran Tempo* seakan gamang dan tidak mampu menarik kesimpulan sendiri dari fakta atau data yang mereka terima dari kepolisian. Terkait isu terorisme dan hanya bersandar pada informasi yang berasal dari negara dalam hal ini dari pihak kepolisian dan tidak banyak memperhatikan dan memberi posisi yang sama terhadap pihak-pihak terkait yang dibicarakan.

Peristiwa terorisme sebenarnya punya nilai jual tinggi apabila punya dampak yang besar dan memiliki kelayakan berita yang memadai sehingga perlu diangkat sebagai berita di halaman pertama. Pemahaman wartawan memang beragam mengenai apa itu terorisme, khususnya di Indonesia. Paling tidak dari narasumber yang penulis wawancarai, terorisme di Indonesia memang dilakukan oleh kelompok radikal yang terorganisir, meski ada juga wartawan yang melihat bahwa

persoalan terorisme tak bisa begitu saja dikaitkan dengan kelompok Islam.

Menurut wartawan Kompas, Pepih Nugraha terorisme di Indonesia dilakukan oleh kelompok radikal yang terorganisir.

"..Saya tidak akan menyebut nama organisasinya, akan tetapi dari penyergapan dan pelumpuhan yang dilakukan aparat kepolisian (Densus 88), teroris mengarah pada satu kelompok radikal keagamaan, yaitu Islam. Organisasi teroris, di manapun dia eksis, memiliki tujuan. Ada tujuan sampingan, ada tujuan utama. Ada tujuan jangka pendek-menengah-panjang, sebagaimana sebuah organisasi. Menilik pada teroris di Indonesia, tujuan utama terorisme dengan melakukan pembunuhan dengan cara pengebomam (bom bunuh diri, misalnya), adalah mendirikan satu negara, atau satu kekhalifahan mencakup regional tertentu yang terbebas dari sekat negara. Bisa jadi, misalnya, bertujuan mendirikan kekhalifahan yang mencakup Asia Tenggara. Yang digoyang tentu saja pemerintahan yang sah, sedangkan simbol yang dianggap paling pas bagi pengacauan keamanan (bagi teroris) adalah dengan menjadikan aparat keamanan, dalam hal ini polisi (wa bil khusus Densus 88), sebagai musuh. Maka dalam beberapa peristiwa berdarah, polisi menjadi sasaran mereka (teroris). Belum pernah tersebut aparat pertahanan seperti tentara atau simbol-simbol pertahanan (Kodim, Korem, Koramil) yang menjadi sasaran, yang terjadi adalah sasaran terhadap simbol kepolisian seperti Polsek, Polres, dan seterusnya." (Nugraha, pepih, 2013).

Pendapat wartawan Kompas tersebut agak berbeda dengan wartawan Republika dan Rakyat Merdeka. Menurut Redaktur Harian Republika persoalan terorisme merupakan persoalan yang membingungkan dan agak terlalu sulit apabila langsung dikaitkan dengan gerakan Islam.

"Aku melihat definisi terorisme kacau kalau di Indonesia, karena lebih banyak muatan politisnya. Aku juga meragukan

terorisme yang sesungguhnya ada di Indonesia. Melihat kultur di Indonesia sangat susah menjadikan mereka teroris. Kalau imam samudra dan kawan kawan bisa menghancurkan bali, mereka punya potensi untuk kudeta dong.

Aksi teror seringkali sporadis. Pengungkapan aksi terduga teroris atau penangkapan mereka seringkali memiliki relasi dengan kondisi di Jakarta. Terorisme seringkali menjadi semacam pengalihan isu publik. Blow up penangkapan teroris seperti dilakukan TV One menjadikan publik semakin tahu kalau isu teroris seperti main-main saja. Ia seperti sinetron dan menjadikan publik semakin tidak percaya dengan isu terorisme. Media sebaiknya wajar saja mensikapi soal ini serta lebih cerdas lagi dalam mengungkapkan fakta-fakta yang ada di lapangan.(Taufiqrahman,2013)

Pemberitaan aksi terorisme dengan begitu memang mejadi begitu sulit mengingat akses wartawan pada kelompok terduga teroris agak sulit, sehingga wartawan termasuk juga *Koran Tempo* terpaksa mengandalkan sumber-sumber resmi yaitu pihak kepolisian dan Densus 88. Sebagai sebuah bahan berita, aksi terorisme memang memiliki nilai sehingga bisa diangkat sebagai berita di halaman utama. Meski begitu meminjam istilah Lowenthal (dalam Hardt , 1992:227) soal kepalsuan kolektif, pemberitaan terorisme di Indonesia khususnya pada *Koran Tempo* sangat merasakan hal tersebut. Lowenthal (1989:119) mengungkap adanya penindasan imajinasi dan akibat budaya massa yang memperteguh dan memberi isyarat instruksi dalam dunia kapitalis akhir yang mendorong kepalsuan kolektif. Berita-berita yang disajikan oleh media di Indonesia, termasuk juga di *Koran Tempo* merupakan berita yang sudah dikonstruksi oleh aparat keamanan, sehingga tak ada interpretasi lain dari data yang ditampilkan. Hal ini wajar karena ada dampak luar biasa di balik sebuah pemberitaan terorisme, sehingga perlu dipertimbangkan banyak hal.

"...Dalam peliputan terorisme memang kita tidak bisa hanya *cover both sides*, tetapi *multi sides* wartawan harus juga melihat dampak dari pemberitaan terorisme, dampaknya pada keluarga korban, dampaknya kepada psikologi keluarga korban, dampaknya pada ketakutan rakyat banyak. Juga harus dipertimbangkan keamanan negara, Negara harus menjamin keamanan rakyatnya dan terorisme sebagai musuh negara harus diberantas habis," (wiratmaja,2013)

Memang ada opini atau sikap media dalam pemberitaan-pemberitaan media soal terorisme, khususnya mengenai data atau pernyataan dari Densus 88 dan pihak kepolisian, tetapi ini masih bisa dipahami dalam konteks bahwa ada pertarungan ideologi antara ideologi yang dianut negara Indonesia dan diamini oleh media-media di Indonesia dengan ideologi pelaku aksi terorisme yang hendak menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi Islam. Sikap Koran Tempo amat terasa ketika media itu membahas secara panjang lebar isu JAT dimana Ba'asyir sebagai pemimpin utamanya. Ba'asyir sendiri, secara terang-terangan menolak Pancasila sebagai dasar negara. Pernyataan keras Ba'asyir dilansir sejumlah media (online) yang menjelaskan sikapnya pada Pancasila. Menurut Ba'asyir, Pancasila adalah ideologi Syirik dan Haram untuk diamalkan.

"Sebagai seorang Muslim saya hanya wajib setia (*berwala'*) kepada Syariat Islam, daulah/kafilah islamiyah saja. Dilarang keras setia dan taat pada ideologi-ideologi ciptaan akal manusia, ajaran agama-agama diluar Islam dan dilarang taat kepada negara-negara kafir,"(www.Voa-islam)

Argumen ini oleh Ba'asyir dikaitkan dengan Al Quran surat Al-An'am (6):153, yang menjelaskan bahwa Allah SWT dalam ayat ini menerangkan bahwa pertama, seorang muslim hanya wajib setia kepada jalan Allah (*Syari'at Islam*) saja, kedua Muslim dilarang bersetia (*berwala'*) kepada jalan-jalan lain yang oleh Ba'asyir adalah agama-agama di luar Islam dan ideologi-ideologi hasil ciptaan akal manusia (bikin Soekarno) seperti

demokrasi, sosialis, kapitalis,liberalis, Pancasila dan sebagainya. Ketiga, menurut tafsiran Ba'asyir, ciri orang bertaqwa hanya setia (*berwala'*) kepada *Syari'at Islam* saja dan membuang semua ajaran di luar Islam dan ideologi-ideologi ciptaan akal manusia sebagai dasar yang mengatur semua aspek kehidupan baik pribadi, keluarga, masyarakat dan negara. Lewat argumen ini, maka Ba'asyir menegaskan bahwa Pancasila adalah ideologi syirik dan haram diamalkan, dan dia hanya bersedia setia dan taat kepada hukum Allah SWT.

Secara khusus, *Koran Tempo* dalam pemberitaan seputar dan sekitar penangkapan Ba'asyir – yang dituduh berada di balik gerakan dan mendanai pelatihan terorisme di tanah air, menjelaskan sikap dan ideologi Ba'asyir ini yang mengkritik pedas soal demokrasi yang dianggapnya sebagai sesuatu yang kurang ajar.Dan digambarkan secara jelas (lewat level teks berita) bagaimana Ba'asyir menilai pemerintah SBY ini adalah pemerintah yang kafir, yang memperbolehkan hadirnya Ahmadiyah dan Jaringan Islam Liberal yang dianggapnya sebagai musuh-musuh Islam. Kendati begitu dalam berita berjudul ***Sebelum Ditangkap Ba'asyir kecam Demokrasi (Koran Tempo*** edisi Selasa 10 Agustus 2010 Halaman A3) juga ditampilkan narasumber yang menentang pandangan Ba'asyir terkait dengan ideologi demokrasi dan Islam. Tokoh JIL yang ditampilkan dalam berita tersebut justru menyebut bahwa pandangan ekstrim Ba'asyir bukanlah pandangan umum dari ulama atau umat Islam semuanya.

Media termasuk *Koran Tempo*, tentu saja memiliki 'ideologi' sendiri. Sebagaimana Shoemaker dan Reese melihat bahwa isi media –tentu saja dalam hal ini pemberitaan terorisme-, dilatarbelakangi ide besar yaitu ideologi yang mempengaruhi faktor ekstramedia,organisasi,rutinitas media dan sisi individual pekerja media (Shoemaker & Reese, 1997).

Ideologi itu sendiri dibangun oleh kelompok yang dominan dengan tujuan untuk mereproduksi dan melegetimasi dominasi mereka. Menurut Benedetto Fountana (1993) "*Hegemony and power: on the relation between Gramsci and*

Machiavelli, strategi kelompok dominan adalah membuat kesadaran khalayak bahwa dominasi itu diterima secara 'taken for granted' sebagaimana juga yang terjadi di media. Ideologi menurut dia, adalah suatu kepercayaan seseorang atau sekelompok orang yang muncul sebagai bentuk atau perwujudan hegemoni yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang. Hegemoni terjadi ketika ide atau gagasan kelompok dominan atau penguasa diterima sebagai suatu 'commonsense'. Melalui hegemoni, termasuk juga di media, ideologi kelompok yang dominan dapat disebarkan dan kepercayaan dapat ditularkan.

Terkait dengan ideologi Pancasila, tentu *Koran Tempo* tidak mau dianggap bertentangan dengan pemerintah dalam pemberitaan terorisme yang mengancam keamanan negara, di sisi yang lain media ini juga tak ingin dianggap sebagai corong pelaku terorisme dengan memberi tempat bagi opini atau pendapat yang pro terhadap aksi terorisme.

"....Perlu disadari bahwa kita tidak mau negara Indonesia ini disebut sebagai sarang teroris, sehingga wajar saja kalau media sendiri tidak mau dijadikan semacam 'corong' dari terorisme. Media lebih mengutamakan kepentingan rakyat banyak yang memang tidak menyukai terorisme. Sehingga wajar saja, media cenderung mengungkap peristiwa saja, menggunakan sumber-sumber resmi seperti Densus 88 dan Kepolisian dan menerapkan prinsip *peace journalism* yang mengedepankan solusi atas persoalan rakyat. Media dalam hal terorisme akan berada di belakang pemerintah untuk melawan bersama. (IB Ali wiratmaja, 2013)

Begitu juga bila dikaitkan dengan konsep Wright Mills dalam bukunya *The Power Elite* (dalam Hardt,1992: 211) media lebih berorientasi pasar yang memfasilitasi 'kebutuhurufan psikologis) dibandingkan wacana publik dan pencerahan. Media menurut Mills adalah pemimpin 'dunia palsu' yang menyajikan realitas eksternal dan pengalaman internal serta penghancuran privasi dengan cara menghancurkan peluang pertukaran opini yang masuk akal dan tidak terburu-buru serta manusiawi.

Pemberitaan aksi terorisme pada *Koran Tempo* lebih banyak menyajikan realitas yang diharapkan muncul oleh penguasa. Media menjadi agen pemerintah dalam menyajikan realitas yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah. Ini sebenarnya agak bertolak belakang dengan kebiasaan *Tempo* dalam berhubungan dengan penguasa. Di era Orde Baru seringkali *Tempo* berseberangan dengan pemerintah, bahkan *Tempo* pernah dibreidel dan ditutup karena beritanya melawan kebijakan pemerintah. Hal ini juga terjadi saat media memberitakan terorisme. Dari analisis teks *Koran Tempo* khususnya ketika menggambarkan keterkaitan antara Ba'asyir dengan peristiwa dan pelaku terorisme di sejumlah tempat. Bukti-bukti yang tidak memadai, dan hanya berlandaskan pada pengakuan orang-orang yang ditangkap gara-gara terorisme. Ketidak seimbangan pemberitaan, opini tak berdasarkan fakta, dan jurnalisme klaim dilakukan Harian *Koran Tempo* bahkan di halaman pertamanya. Padahal di era Orde Baru, *Tempo* terkenal sebagai media yang kritis terhadap informasi dan pernyataan sumber-sumber pemerintah, dan tidak bisa begitu saja percaya dari informasi searah dari pemerintah.

Sejalan dengan Mills, yang mengajukan pandangan pesimistik tentang media, *Koran Tempo* memainkan peranan penting dalam menjalankan kekuasaan. Sejalan dengan Mills yang mengatakan bahwa media membantu menciptakan salah satu problem besar dalam masyarakat kontemporer yakni pembangkangan atas kekuasaan oleh masyarakat. Mills menegaskan bahwa kekuatan itu ada di segelintir orang (media) yang menggunakan strategi manipulasi untuk membuat kelihatannya pro rakyat atau setidaknya sekelompok besar di antara mereka.

Selain itu pada pemberitaan aksi terorisme, jarang atau hampir tidak ditemukan adanya kegiatan *investigative reporting* di media untuk menguak persoalan sebenarnya termasuk *Koran Tempo* saat memberitakan isu terorisme yang beroperasi secara tertutup. Dan dalih yang sering diungkap *Koran Tempo* adalah mereka sangat kekurangan akses untuk menjangkau sumber

yang bisa menyuarakan kelompok terduga terorisme. *Koran Tempo* juga sejalan dengan ideologi media Tempo yang memang tidak netral karena hanya membela mereka-mereka yang terzalimi dan menjadi korban aksi terorisme.

BAB VII

KORAN TEMPO BERAT SEBELAH?

Susahkah Mencari Narasumber yang seimbang?

Setelah tidak ada lagi peristiwa besar yang terkait dengan peledakan bom dan aksi terorisme, media massa termasuk di dalamnya *Koran Tempo* menyadari bahwa isu seputar terorisme merupakan isu dengan nilai berita yang tinggi dan itulah sebabnya dalam pemberitaan soal penangkapan Ba'asyir pada minggu pertama Agustus 2010, *Koran Tempo* membingkainya dengan berbagai berita terkait yang kebanyakan merupakan berita pengembangan.

Dari sisi representasi, *Koran Tempo* melakukan representasi tentang aktivitas sekelompok orang Indonesia yang berideologi di luar Pancasila, yang diberi cap sebagai teroris dan terkait dengan sosok seorang 'amir' atau pemimpin yang bernama Abu Bakar Ba'asyir. Peranan Ba'asyir dalam sejumlah teks yang dianalisis sangat penting, karena dipandang sebagai orang yang paling bertanggungjawab atau paling tidak mendukung sejumlah aksi terorisme di tanah air.

Koran Tempo dalam teks yang dianalisis merepresentasikan, Ba'asyir ditangkap karena diduga terlihat sejumlah aksi terorisme di beberapa daerah termasuk di Aceh. *Koran Tempo* juga merepresentasikan adanya ideologi Ba'asyir yang jelas-jelas menentang demokrasi yang disebutnya sebagai 'kurang ajar'. Dia juga digambarkan, menyebut pemerintah Indonesia sebagai pemerintah yang kafir dan tidak sesuai dengan ajaran Islam karena melakukan pembiaran terhadap aktivitas *Jaringan Islam Liberal* dan kelompok *Ahmadiyah*. Dari

berita yang ditulis Koran Tempo setelah penangkapam Ba'asyir pada 9 Agustus 2010, media ini seakan memiliki banyak amunisi untuk menempatkan Abu Bakar Ba'asyir sebagai orang yang layak ditangkap dan diduga kuat terkait dengan jaringan terorisme internasional Al-Qaidah. *Koran Tempo* mengemas pemberitaan yang menonjolkan ketidaksukaan Ba'asyir dengan ideologi Pancasila khususnya demokrasi. Hal ini jelas sekali ditunjukkan lewat berita berjudul : **Ceramah Ba'asyir Sebelum Ditangkap : "Demokrasi itu kurang ajar"** Edisi Selasa, 10 Agustus 2010, sehari setelah Ba'asyir ditangkap polisi.

Pemberitaan gencar soal isu dibalik penangkapan Ba'asyir di *Koran Tempo* ini, sebenarnya sebagai tanggapan atas peristiwa Ba'asyir ditangkap. Jelas sekali berbeda dengan pemberitaan Koran *Republika* di hari yang sama yang hanya memberitakan berita kecil soal tertangkapnya Ba'asyir oleh kepolisian dengan dugaan terlibat kasus terorisme.

Koran Tempo lewat pemberitaannya hendak menegaskan bahwa ada keterkaitan antara peranan Ba'asyir sebagai perencana, Ba'asyir tidak hanya terlibat di Terorisme Aceh, tetapi di sejumlah gerakan terorisme lainnya di tanah air. Representasi ini untuk memberikan alasan pembenaran mengapa akhirnya Ba'asyir ditangkap, karena dia diduga terkait mendanai dan mengetahui rencana pelatihan militer di Aceh, meskipun polisi belum memiliki bukti yang kuat mengenai kebenaran dugaan keterlibatan Ba'asyir dalam kasus-kasus tersebut.

Ada kejanggalan bila dilihat dari sudut jurnalisme, meskipun *Koran Tempo* mengangkat persoalan Ba'asyir dan keterlibatannya dalam kasus-kasus terorisme tetapi koran ini tak secara serius menggarap keseimbangan berita. Katakanlah, dalam berita tersebut ada kaitan erat antara terorisme Aceh dengan Ba'asyir, seharusnya *Koran Tempo* mengimbangi pemberitaan dengan mewawancarai Ba'aasyir atau pihak-pihak yang pro Ba'asyir.

Sebenarnya agak aneh kalau media massa sebesar *Koran Tempo* dengan jaringan wartawannya dan relasi hubungannya

dengan berbagai narasumber tidak bisa mengkonfirmasi situasi ini.

Dalam pemberitaan yang lain *Koran Tempo* secara yakin menegaskan bahwa aksi perampokan di Medan itu dalam rangka mengumpulkan dana (Fai) untuk kegiatan jaringan terorisme. Padahal, tak ada satu konfirmasi pun yang membenarkan hal itu. ***Koran Tempo*** merujuk juru bicara kepolisian yang menjelaskan bahwa di mata para teroris, Pemerintah Indonesia pun dianggap kafir oleh para pelaku terorisme sehingga mereka bebas melakukan apa saja termasuk merampok harta warga non muslim.

Bisa disimpulkan bahwa representasi yang dilakukan *Koran Tempo* adalah representasi yang menyodorkan pemberitaan hasil konstruksi media tentang aksi terorisme. Konstruksi atas realitas peristiwa terorisme ini dipengaruhi ideologi media *Koran Tempo* yang memang membela mereka yang terzalimi dan tertindas oleh aksi terorisme atau paling tidak yang menjadi korban aksi terorisme.

Ada upaya *Koran Tempo* melakukan eksklusi dan inklusi dalam pemberitaan soal terorisme di Indonesia. Pihak yang digambarkan dan menjadi pokok pembicaraan justru tidak diberi tempat yang layak, atau bahkan 'dihilangkan' dalam wacana.

Bisa disimpulkan *Koran Tempo* melakukan eksklusi. Eksklusi terjadi apabila ada aktor (seseorang/kelompok) yang coba dihilangkan atau disembunyikan dalam pemberitaan. Proses eksklusi ini menggunakan strategi dengan membungkusnya dalam pernyataan pihak-pihak berwenang dan memiliki kekuasaan untuk mendominasi pembicaraan /wacana yakni pihak kepolisian dan Densus 88.

Inklusi dalam pemberitaan soal terorisme muncul juga dalam proses pemilihan narasumber dan fakta-fakta yang disodorkan media ini kepada masyarakat seputar penangkapan terorisme dan secara khusus pemberitaan soal penangkapan terhadap Ba'asyir. *Koran Tempo* tidak secara jelas menggambarkan apa alasan dan sebab-sebab di balik penangkapan Ba'asyir. Sehingga *Koran Tempo* dianggap kurang

memenuhi unsur keadilan dalam pemberitaan dengan melakukan pencarian fakta di lapangan, atau paling tidak tidak ditemukan upaya mewawancarai narasumber dari pihak minoritas yakni mereka-mereka yang dituduh atau sebagai tersangka terorisme.

Inklusi ini jelas terlihat dari aktor sosial yang disebut dalam wacana, bagaimana mereka ditampilkan dan dengan strategi apa pemarginalan atau pengucilan itu dilakukan. *Koran Tempo* melakukan hal itu, dengan tidak memberi kesempatan kepada pihak yang dituduh melakukan pembelaan atau sekedar melakukan konfirmasi.

Contohnya saat mengungkapkan adanya tuduhan, identitas narasumber yang menuduh itu sendiri tidak dijelaskan, demikian pula isu yang digambarkan bersifat abstrak dan tidak jelas. Hal ini misalnya tampak pada berita berjudul : **Ba'asyir Dulmatin Dituduh Rancang Pelatihan Militer** (*Koran Tempo*/Edisi no.3267/tahun X/ 16 Agustus 2010/ Halaman A 2). Identitas Ba'asyir yang disebut sebagai '*amir*' atau pemimpin *Jamaah Anshorut Tauhid (JAT)* diduga pernah bertemu dengan Dulmatin . Tetapi pertemuan tersebut hanya berdasarkan pengakuan dari Ubaid al Lutfi Haidaroh aktivis JAT yang telah ditangkap oleh Densus 88 maret 2010. Tidak jelas Identitas siapa narasumber yang bisa memastikan bahwa *Amir Jamaah Anshorut Tauhid* benar-benar bertemu dengan Dulmatin.

Koran Tempo dalam representasi pemberitaannya cenderung membela kelompok Densus 88 dan pihak kepolisian. Dalam hal ini agak berbeda dengan kecenderungan umum *Tempo* yang sering kritis dan melawan kebijakan pemerintah Orde Baru yang dianggap bertentangan dengan kemanusiaan. Walaupun ada fakta atau data dari pihak Ba'asyir dan kelompok minoritas yang menjadi objek pemberitaan ditempatkan pada posisi di bawah, bahkan *Koran Tempo* seolah tidak berupaya mencari sumber yang sesuai. Walaupun mereka mengungkapkan persoalan dari kacamata Ba'asyir dan pendukungnya, porsi pemberitaan yang diberikan kepada mereka sangatlah kecil. Dari hasil analisis data dan wawancara dengan sejumlah narasumber bisa disimpulkan beberapa hal di antaranya:

Dari sisi representasi dan konstruksi realitas, *Koran Tempo* dalam sejumlah pemberitaan mereka begitu saja percaya pada satu sumber dan tidak berupaya mencari bukti-bukti penguat yang bisa memperkuat tuduhan atau di sisi yang lain menolak tuduhan tersebut. *Koran Tempo* jelas menerapkan jurnalisme klaim, yakni menelan mentah-mentah apapun informasi terkait dengan pelaku terorisme dan semua informasi dari pihak kepolisian tanpa menyadari bahwa bisa saja informasi itu tidak berlandaskan kenyataan sama sekali.

Koran Tempo cenderung setuju apa saja yang disampaikan oleh aparat kepolisian, atau melakukan tindak jurnalisme klaim, mengenai Ba'asyir dan keterlibatan tokoh penting ini dalam aksi terorisme di tanah air. *Koran Tempo* mengabaikan kewajiban utama jurnalistik *Advocacy*nya dengan melakukan verifikasi atas informasi yang disampaikan dengan menampilkan bukti penguat.

Koran Tempo dalam sejumlah pemberitaan ini memang mengetengahkan alasan utama mengapa akhirnya kepolisian menangkap Ba'asyir terkait kasus terorisme. Tetapi *Koran* ini secara jelas hanya percaya begitu saja, pada klaim aparat, tidak mengkritisi informasi dari aparat keamanan dan tidak mencari lebih dalam lagi apa yang sebenarnya terjadi di lapangan.

Pada berita yang lain *Koran Tempo* dalam pemberitaannya hendak menggambarkan bagaimana pandangan Ustadz Ba'asyir tentang kelompok-kelompok lain seperti *Ahmadiyah* dan golongan Islam Liberal. Pemahaman Ba'asyir tentang kedua golongan itu sebagai kelompok yang *murtad* menjadi pokok bahasan penting dalam berita ini. Begitu juga pernyataan Ba'asyir tentang pemerintahan Indonesia yang dianggap sebagai pemerintahan yang kafir mencerminkan bagaimana sikap Ba'asyir yang anti pemerintah. *Koran Tempo* lewat pemberitaan ini, sengaja digambarkan betapa pandangan Ba'asyir ini berbahaya dan sangat anti pemerintah, sehingga alasan penangkapan terhadap Ba'asyir Terkait dengan

isu terorisme bisa diterima tanpa harus dicari bukti-bukti yang kuat.

Koran Tempo tidak mampu memberikan informasi yang lengkap dan actual seputar peristiwa yang dimunculkan dalam pemberitaan. Media, dalam hal ini termasuk *Koran Tempo* kemudian mengambil peran di dalam mendominasi isi pesan dan melegitimasi kelas dominan. Sebagai bagian dari Pers yang berada di Negara berazaskan Pancasila, pilihan yang diambil *Koran Tempo* merupakan pilihan yang logis karena biar bagaimanapun kelas dominan (dalam hal ini Negara) akan sangat berpengaruh pada pemberitaan isu terorisme. Tempo lewat pemberitaannya hendak menegaskan bahwa ada keterkaitan antara peranan Ba'asyir sebagai perencana, Ba'asyir tidak hanya terlibat di Terorisme Aceh, tetapi di sejumlah gerakan terorisme lainnya di tanah air. Representasi ini untuk memberikan alasan pembenaran mengapa akhirnya Ba'asyir ditangkap, karena dia diduga terkait mendanai dan mengetahui rencana pelatihan militer di Aceh, meskipun polisi belum memiliki bukti yang kuat mengenai kebenaran dugaan keterlibatan Ba'asyir dalam kasus-kasus tersebut.

Kejanggalan itu ada

Ada kejanggalan bila dilihat dari sudut *jurnalisme investigasi*, atau bila dikaitkan dengan *advocacy journalism* yakni soal keseimbangan informasi. Meskipun *Koran Tempo* mengangkat persoalan Ba'asyir dan keterlibatannya dalam kasus-kasus terorisme tetapi koran ini tak secara serius menggarap keseimbangan berita. Katakanlah, dalam berita tersebut ada kaitan erat antara terorisme Aceh dengan Ba'asyir, seharusnya *Koran Tempo* mengimbangi pemberitaan dengan mewawancarai keluarga , pengacara atau bahkan Ba'asyir sendiri atau pihak-pihak yang pro Ba'asyir.

Agak aneh sebenarnya kalau media massa sebesar *Koran Tempo* dengan jaringan wartawannya dan relasi hubungannya dengan berbagai narasumber tidak bisa mengkonfirmasi situasi ini. Dari teks berita di atas, terlihat bahwa secara sepihak *Koran Tempo* menuduh Ba'asyir terlibat dan disangkakan menerima laporan dari Abdulah Sunata sebagai pelaksana tugas terorisme di Aceh, tapi tidak didukung bukti dan data yang memperkuat klaim tersebut. Kedua, persoalan terorisme di Indonesia merupakan persoalan yang peka, dan organisasi yang melakukannya juga tertutup dan merupakan sel-sel yang tidak terbuka secara terang-terangan sehingga media termasuk *Koran Tempo* tidak bisa langsung mendapatkan informasi dari tangan pertama dan cenderung percaya pada keterangan resmi pemerintah dalam hal ini pihak kepolisian dan Densus 88. Aksi terorisme mulai muncul ketika rezim Soeharto berangsur lemah dan kebebasan berdemokrasi, dan menetapkan azas organisasi di luar Pancasila tidak bermasalah. Dan sebagai media, *Koran Tempo* juga berada pada barisan media yang menganggap terorisme sebagai musuh bersama yang menggerogoti kesatuan bangsa dari dalam dan harus diperangi.

Dari hasil wawancara, dan intertekstualitas bisa ditarik kesimpulan tegas bahwa *Koran Tempo* tidak mau dijadikan 'corong' atau alat dari kelompok terorisme yang ingin memanfaatkan publikasi media atas segala aksinya yang merugikan rakyat. Dari dimensi praktik wacana meski secara tersurat *Koran Tempo* berupaya melakukan jurnalisme profesional, dan melakukan peliputan *cover both sides*, tapi dari hasil teks membuktikan berbeda. Menanggapi kelemahan itu, narasumber resmi *Koran Tempo* menyebutnya sebagai konsekuensi sebuah sikap keberpihakannya terhadap korban aksi terorisme dan menganggap kelompok terorisme di Indonesia tidak memberi akses kepada wartawan *Koran Tempo* sehingga wajar saja apabila pemberitaannya tidak seimbang.

Terkait dengan representasi kelompok yang dianggap teroris seperti Ba'asyir, *Koran Tempo* kurang memberi tempat bagi narasumber yang pro kelompok teroris. Dan *Koran Tempo* tidak bisa membedakan mana berita fakta, mana berita yang berasal dari klaim sumber kepolisian. Sebagai contoh, meski nama Ba'asyir disebut-sebut, dan dikaitkan dengan rencana teror, tapi tak ada upaya konfirmasi dari Ba'asyir tentang benar tidaknya klaim polisi. Identitas Ba'asyir secara sepihak diekspos oleh *Koran Tempo* yang menelan secara bulat, klaim dari juru bicara Mabes Polri, Edward Aritonang. Identitas narasumber yang bisa membuktikan keterlibatan Ba'asyir di balik penemuan laboratorium tempat pembuatan bom teroris tidak dijelaskan.

Misalnya narasumber satu-satunya untuk berita Lima Serangkai Penebar Bom hanyalah Juru Bicara Mabes Polri, Edward Aritonang, identitas narasumber ini jelas hanya sepihak menyuarakan kepentingan kepolisian, dan ketika menyatakan bahwa Ba'asyir terkait dengan rencana teror terkait dengan penemuan laboratorium kimia di Ci biru Bandung. Tak ada narasumber lain yang dikutip oleh *Koran Tempo*, untuk mengimbangi pemberitaan satu sisi ini. *Koran Tempo* seakan hanya percaya bahwa informasi kepolisian yang menyebut Ba'asyir terkait dengan rencana teror adalah satu-satunya kebenaran. *Koran Tempo* bersama-sama media besar lainnya di Indonesia memandang aksi terorisme sebagai aksi yang perlu diberantas, sehingga pihak media tidak terlalu mempersoalkan kebenaran data atau harus meneliti lebih jauh kebenaran di balik fakta dan pernyataan Kepolisian dan Densus 88 terkait pelaku dan kegiatan terorisme.

Temuan-temuan yang dihasilkan dalam buku ini banyak. Terkait dengan kajian tekstual berita-berita seputar aksi terorisme dan kesulitan utama adalah bagaimana teks tersebut sebenarnya mencerminkan fakta sesungguhnya di lapangan. Proses pemberitaan yang mengikuti alur dan ritme media massa termasuk *Koran Tempo* ini akan lebih baik apabila didukung dengan temuan-temuan lain di lapangan seputar informasi sesungguhnya soal kejadian terorisme yang ada. Kesulitan narasumber di lapangan membuat wartawan kesulitan

merangkai data dan fakta menjadi berita yang lebih bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Saran peneliti adalah akan lebih baik lagi apabila penelitian ini ditindaklanjuti dengan penelitian mendalam yang melihat secara khusus bagaimana para tokoh yang dituduh dan diduga sebagai pelaku terorisme menggambarkan sendiri tentang aksi yang mereka lakukan. Lewat kajian yang mendalam, dan wawancara khusus dengan pelaku terorisme maka akan bisa dielaborasi temuan yang mendalam akar persoalan terorisme dalam konteks Indonesia yang mungkin berbeda dengan penggambaran aksi terorisme di luar Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Abduh, Umar, 2003, *Konspirasi Intelijen dan Gerakan Islam Radikal*, Center For Democracy and social studies, Jakarta

Alaili, O dasua, 1991, *Media Coverage Of Terrorism: Methods of Diffusion*, Sage Publications, Inc

Berger, Peter & Thomas, 1967 *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociological of Knowledge*. NY, A Double Day Anchor Book

Berman, Dave, (2004) *Advocacy Journalism, The Least You Can Do, and The No Confidence Movement.*" 29 June 2004. Independent Media Center

Briggs, adam & Paul Cobley (1998) *The Media: An Introduction*, Harlow: Longman.

Bungin, Burhan. 2008. *Sosiologi Komunikasi (Teori, Paradigma, dan Discourse Teknologi Komunikasi di Masyarakat)*. Jakarta: Kencana Prenada Media ,Group

Careless, Sue (2000) *Advocacy journalism" The Interim, May 2000*

Cavallaro, Dani, (2004). *Critical and Cultural Teory. Teori Kritis dan Teori Budaya*. Yogyakarta : Niagara

Chesney, Robert, (1998) *Konglomerasi Media Massa dan ancaman terhadap Demokrasi: Aliansi Jurnalis Independen*

_____, 2001, 'Global Media, Neoliberalism, and Imperialism,'

-----, 1997, 'The Communication Revolution: The Market and the Prospect for Democracy.

Curran, James. (1997). Mass Media and Democracy: A Reappraisal.

Curran, James And Michael Gurevitch (ed), Mass Media and Society. Third Edition. London: Arnold

Denzin, Norman K. and Yvonna S. Lincoln, eds., 1994, Handbook of Qualitative Research, Thousand Oaks, CA: Sage

Denzin, Norman K. and Yvonna S. Lincoln, eds., (2009), Handbook of Qualitative Research, Thousand Oaks, CA: Sage, edisi terjemahan Pustaka Pelajar, Jogjakarta

Enders, Walter and Todd Sandler. 2006, The Political Economy of Terrorism. Cambridge: Cambridge University

Fiske, John, 1990 Introduction to Communication Studies, Routledge London

Fountana, Benedetto (1993) Hegemony and power: on the relation between Gramsci and Machiavelli, University Of Minasota press

Galtung, John and Mari H. Ruge. 1965. "The structure of foreign news. *Journal of Peace Research* 2: 64-91

Golose, Petrus Reinhard, 2010, Deradikalisasi Terorisme, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta

Guba and Lincoln (1994) :Competing Paradigms in Qualitative Research," in Denzin and Lincoln (eds).Handbook of qualitative Research.London, Sage Publication.

Neumann,L. (1997), Social Research Methods: Qualitative and quantitative approaches. Third edition. New York: Allyn and Bacon.

Graeme, 1999. Media And Pop Culture (terjemahan 2008)
"Media dan Budaya Populer",

Hoffman,Bruce,1998, *Inside Terorisme*, Columbia University Press

Hamad, Ibnu 2004,Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa : Sebuah studi Critical Discourse Analysis Terhadap Berita-berita Politik, Jakarta:Granit

Hall, Stuart, 1997 *Representation: Cultural Representations and Signifying Practices*. London: SAGE Publications Ltd

Hardt, Hanno, (1992), Critical Communication studies, London & New york Routledge

Hartley,John (1982) Understanding News, London & New York:

Holmes, David. (2012). Teori Komunikasi: Media, Teknologi, dan Masyarakat.Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Jaworski, A., Coupland, N., (1999), (Eds), *The Discourse Reader*, London: Routledge).

Kovach,Bill & Tom Rosenstiel (2001), *The Elements of Journalism , What Newspeople Should Know and the Public Should Expect* (New York: Crown Publishers)

Krueger, Alan B, 2007, *What Makes a Terrorist*, Princeton University Press

Kusumah, Mulyana W, (2002) *Terorisme dalam Perspektif Politik dan Hukum*

Leeuwen,Theo Van, The Representation of social actors, dalam Carmen Rosa Caldas-Coulthard, *Text and Practice* (1996), Routledge, London

Lockyer, Adam, 2003, 'Relationship Between the Media and Terrorism' *The Australian National University*

Makassary,Ridwan 2003, Terorisme berubah agama, Jakarta : Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah : Konrad Adenauer Stiftung

McQuail, Denis, 1991, *Mass Communication Theory*. (2nd Edition ed.), Sage, Newbury Park, CA

Nainggolan, Poltak Partogi, 2002, Analisis CSIS: Isu-isu Non-Tradisional Bentuk Baru Ancaman Keamanan

Orwell,George 1946, 'Politics and the English Language' First published: *Horizon*. — GB, London.

Prajarto,Nunung ,2004, Terorisme dan Media Massa: Debat Keterlibatan media, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol 8 Nomor1, Juli 2004

Ritzer, George & Douglas J. Goodman, 2004, *Teori Sosiologi Modern* (Edisi 6) ,Penerbit: Prenada Media Group

Silke, A. (Ed.). (2004). Research on Terrorism: Trends, Achievements and Failures. London : Frank Cass. *Schutz, Alfred : An Intellectual Biography*. Chicago and London, The University of Chicago Press

Schudson, Michael (1996) *The Power of News*, Harvard University Press

Shoemaker, Pamela dan Stephen D. Reese (1996), dalam *Mediating The Message: Theories of Influences on Mass Media Content*

Tuchman, Gaye, 1978, *Making News: A Study in the Construction of Reality*. The Free Press, New York

Wallace, Walter (1979). The Logic of Science in Sociology. New York: Aldine Publishing Company.

Wilkinson, Paul, 1997, Terrorism and the Liberal State, London: Macmillan

Wodak, Ruth 2005, *A new agenda in (critical) discourse analysis: theory, methodology, and interdisciplinary*, John Benjamins Publishing Company

Berita Media

ABC Radio, 14 September 2000)

Gatra, 28 Agustus 2008

Kompas, 11 November 2005

Kompas, 18 Juli 2009

Kompas, 8 Oktober 2009

Koran Tempo, 15 Maret 2010

Koran Tempo, 10 Agustus 2010

Koran Tempo, 14 Agustus 2010

Koran Tempo, 16 agustus 2010
Koran Tempo 21 September 2010
majalah Tempo, No. 07/VI, Oct 18-24, 2005
majalah Pantau Tahun II/No.16/2001 yang berjudul *Konflik Nan*
'Tak Kunjung Padam Rakyat
Merdeka, Senin, 13/5/2013)
Republika, 26 Juli 2009
Sanyata Sumanasa Wira Edisi Januari
Suaramerdeka, (29/5/2008)

Website/Media Online/lain-lain

Antara, Kamis, 17 September 2009)
(<http://www.antarajatim.com>, 03 Agst 2011 12:35:10).
<http://www.pps.ui.ac.id/new>, Sabtu, 23 Agustus 2008
<http://www.detiknews.com/read/2009/07/17/161656/1167203/10>
Jumat,17/07/2009 Data Ledakan Bom di Indonesia 2000-2009
Kompas.com, Kamis, 17 September 2009
Media, Terorisme, dan Islam Dr. Tjipta
Lesman <http://www.cmm.or.id> okezone.com Sabtu, 15
Mei 2010
Okezone.com , diakses 4 Mei 2010

<http://abc.net.au/news/indepth/bali/default.htm>
Unpad.ac.id, 22/06
www.Voa-islam
<http://www.tempo.co.id/hq/timeline/2004/04/17/tml,20040417-01.id.html>
<http://news.okezone.com/read/2010/05/15/337/332830>
<http://www.kompas.com/lipsus072009/ledakanmegakuningan>
Selasa,13/10/2009

<http://www.lazuardibirru.org/berita/infografis/para-gembong-teroris-di-indonesia>,(21 oktober 2012)

Company Profile *Tempo, Alur Berita Tempo secara umum*

Terorisme Global, Pidato BJ Habibie pada seminar "Peran Ulama Pesantren dalam Mengatasi Terorisme Global", Pondok Pesantren Kempek Cirebon, 16-18 Maret 2012.

<http://www.scribd.com/doc/86164274/Terrorisme-Global>

Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Adisti, Vidia (2005) ***Penyebaran sel-sel aktif Terorisme internasional di Indonesia pasca Bom Bali 2002***, skripsi Fisip UI

Damdani, Rakhmat (2011)-***Jama'ah Anshorut Tauhid Sebagai Organisasi Hub Terorisme Berlatar Belakang Keagamaan di Indonesia***, Tesis Bidang Kajian Ketahanan Nasional UI

Hakim, laode Aulia Rahman, (2009)-***Pemaknaan Khalayak Muslim dari enam organisasi Islam terhadap Berita Terorisme. Analisis resepsi Berita Prosesi Pemakaman Amrozi Cs tahun 2008 dan Berita Pengepungan rumah Teroris di Temanggung tahun 2009 di TVOne***- Tesis S2 UI

Hendropriyono, (2009) ***'Terorisme dalam Filsafat Analitika; Relevansinya dengan Ketahanan Nasional' di Sekolah Pascasarjana UGM***-Disertasi Bidang Filsafat

Luriltasari, Ahta Prayinda (2013) ***Pencitraan Abu Bakar Ba'asyir di Harian Republika (Studi Analisis Framing Pencitraan Abu Bakar Ba'asyir Terkait Keterlibatannya dengan Kegiatan Terorisme pada Pemberitaan Harian Republika Periode Agustus 2010 – Juni 2011)***. S1 thesis, UAJY

Mamoto, Benny Jozua (2008) ***"Penanganan Polri Terhadap Organ Teror Dalam Al- Jamaah Al-Islamiyah"***. Disertasi bidang Ilmu Kepolisian

Mardenis, (2009)- ***Perkembangan Konstelasi Politik Internasional dan Implikasinya terhadap Politik Hukum Nasional Indonesia dalam Pemberantasan Terorisme"***
Disertasi UNPAD

Milla, Mirra Noor (2009) ***Dinamika Psikologis Perilaku Terorisme: Identitas dan Pengambilan Keputusan Jihad di Luar Wilayah Konflik pada Terpidana Kasus Bom Bali di Indonesia"*** Disertasi Bidang Psikologi UGM

Sistarwanto, Rocky (2011) ***Potensi Ideologisasi Jihad yang mengarah pada aksi terorisme oleh kelompok-kelompok Islam radikal di Indonesia***-Tesis Bidang Sosiologi UI

Siagian, Tagor (2012) ***Strategi far enemy Al Qaeda dan jaringan melawan Amerika Serikat, NATO dan Sekutu dalam perang asimetrik di Afghanistan dan Irak, 2001-2011*** -Tesis Kajian Terorisme dalam Keamanan Internasional, Program Pasca Sarjana Fisip UI

Wawancara

Butarbutar, Benny Siga (2013) wawancara seputar pemberitaan terorisme di Koran Tempo bersama editor senior LKBN ANTARA, Benny Siga butarbutar

Gaban, Farid (2014) wawancara email seputar pemberitaan terorisme di Koran Tempo bersama Farid Gaban, mantan wartawan Tempo

Harymurti, Bambang (2014), wawancara seputar pemberitaan Terorisme di Koran Tempo bersama CEO Tempo Group, Bambang Harymurti

Hatumena, Nuh (2013) wawancara seputar pemberitaan terorisme bersama Pengurus Pusat PWI, Nuh Hatumena

Nugraha, Pepih (2013) wawancara seputar pemberitaan terorisme di Koran Tempo bersama wartawan senior Kompas, Bapak Pepih Nugraha

Rakhmadi, Yudono (2013), wawancara seputar pemberitaan terorisme, bersama Redaktur Koran Tempo
Ritonga, Efri (2013), wawancara seputar pemberitaan terorisme, bersama Redaktur Koran Tempo

Sardi, Marula (2013) wawancara seputar pemberitaan terorisme di Koran Tempo bersama wartawan Rakyat Merdeka, Marula Sardi

Taufiqrahman (2013), wawancara seputar pemberitaan terorisme di Koran Tempo bersama Redaktur senior Republika pak Taufiqrahman

Wiraatmaja, Alit (2013) wawancara seputar pemberitaan terorisme bersama senior wartawan di LPP RRI, bapak Alit Wiraatmaja

LAMPIRAN 1

Berita-Berita Yang Dianalisis

No	Edisi/hal/ Tanggal	Judul Berita	Lead
1	KORAN TEMPO Selasa, 10 Agustus 2010 Cover story	CERAMAH BA'ASYIR SEBELUM DITANGKAP : "DEMOKRASI ITU KURANG AJAR"	Jakarta- Detasemen Khusus 88 Antiteror Markas Besar Kepolisian menangkap Amir Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) Abu Bakar Ba'asyir di Banjar Patroman, Jawa Barat sekitar pukul 08.00 WIB kemarin. Dalam Kesempatan itu dicokok pula istri Ba'asyir, Aisyah binti Abdurrahman, dan sebelas orang lainnya .Ba'asyir ditangkap dalam perjalanan menuju Solo, Jawa Tengah
2	Koran Tempo, Selasa 10 Agustus 2010 Halaman A3	SEBELUM DITANGKAP, BA'ASYIR KECAM DEMOKRASI	Jumat malam 6 Agustus 2010. Jalan sempit menuju Masjid Ikhwanul Qorih , Babakan Priangan, Bandung, lebih sibuk dari biasanya. Dua mobil patrol polisi terparkir di jalan Sriwijaya , dekat mulut jalan menuju masjid. Belasan petugas berseragam terlihat hilir mudik, dari pintu masuk jalan hingga masjid di pemukiman padat itu
3	Koran	Ba'asyir	Kepala Badan Reserse

	Tempo/Edisi no.3267/tahun X/ Selasa 10 Agustus 2010/Halaman A2	Dituding Terlibat Terorisme di Aceh	Kriminal Markas Besar Kepolisian RI Komisaris Jenderal Ito Sumardi mengatakan, Abu Bakar Ba'asyir ditangkap karena diduga memiliki keterkaitan dengan sejumlah aksi terorisme di beberapa daerah, di antaranya Aceh
4	Koran Tempo/Edisi no.3267/tahun X/ Selasa 10 Agustus 2010/ Halaman A4	Kesaksian dari Tanah Rencong Jerat Ba'asyir	Penangkapan Abu Bakar Ba'asyir, kemarin pagi, merupakan hasil pengembangan penyidikan tim Detasemen 88 Anti Teror Kepolisian RI terhadap terduga pelaku terror yang tergabung dalam kelompok Aceh. Menurut Kepala Divisi Humas Mabes Polri Edwar Aritonang, setelah menangkap 102 tersangka teroris di Aceh pada 2 Juli lalu, Densus menangkap Arifin di Solo dan Tomji alias Warsito di Indramayu, Jawa Barat
5	Koran Tempo/Edisi no.3267/tahun X/ Selasa 10 Agustus 2010/Halaman A 4	LIMA SERANGKAI PENEBAR TEROR	Abu Bakar Ba'asyir dikaitkan dengan rencana teror setelah Detasemen Khusus 88 Antiteror menangkap lima tersangka di Bandung, Subang, dan Padalarang, Jawa Barat, Sabtu pekan lalu. Juru bicara Markas Besar Kepolisian RI,

			<p>Inspektur Jenderal Edward Aritonang, me- ngatakan polisi menemukan satu benang merah yang menghubungkan Ba'asyir dengan jaringan teroris di Tanah Air. Keterkaitan pengasuh Pondok Pesantren Ngruki, Jawa Tengah, ini dimulai dari proses pelatihan militer di Aceh hingga ditemukannya laboratorium kimia di Cibiru, Bandung, untuk mendukung rencana pengeboman selanjutnya</p>
6	<p>Koran Tempo/Edisi no.3267/tahun X/ Selasa 10 Agustus 2010/ Halaman A3</p>	<p>Sang Amir yang Sudah Lama Diincar</p>	<p>Abu Bakar Ba'asyir mendirikan Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) setelah meninggalkan Majelis Mujahidin Indonesia pada 2008. Di organisasi baru ini, pemimpin Pondok Pesantren Al-Mukmin, Ngruki, Sukoharjo, Jawa Tengah, tersebut didapat sebagai amir atau ketua.</p>
7	<p>Koran Tempo/Edisi no.3267/tahun X/ Selasa 10 Agustus 2010/Halaman A4</p>	<p>FPI Menilai Ba'asyir Korban Rekayasa</p>	<p>Abu Bakar Ba'asyir dalang teroris di Aceh? Itu kata polisi. Konon ada "teori" lain. Setidaknya, itulah yang diyakini oleh Ketua Front Pembela Islam (FPI) Muham- mad Rizieq Shihab. Dia tidak percaya</p>

			pemimpin Jamaah Anshorut Tauhid itu mendanai teroris di Aceh seperti dituduhkan oleh polisi
8	Koran Tempo/Edisi no.3267/tahun X/ 16 Agustus 2010/ Halaman A 2	Ba'asyir Dulmatin Dituduh Rancang Pelatihan Militer	Amir Jamaah Ansharut Tauhid (JAT) Abu Bakar Ba'asyir, tersangka kasus terorisme yang ditangkap Detasemen Khusus 88 Anti Teror pada Senin Pekan lalu, diduga pernah bertemu dengan Dulmatin. Pertemuan itu berlangsung pada Februari 2009 di sebuah rumah toko di Ngruki, Sukoharjo Jawa Tengah. Meski hanya bertemu selama seperempat jam. Ba'asyir dan Dulmatin memutuskan hal penting yakni menggelar pelatihan militer di wilayah Aceh
9	(Koran Tempo/Edisi no.3267/tahun X/ 16 Agustus 2010/ Halaman A 2)	<i>Ba'asyir Dulmatin Dituduh Rancang Pelatihan Militer</i>	Amir Jamaah Ansharut Tauhid (JAT) Abu Bakar Ba'asyir, tersangka terorisme yang ditangkap Departemen Khusus 88 Anti Teror pada Senin pekan lalu, diduga pernah bertemu dengan Dulmatin.
10	(Koran Tempo, 21/9/2010, Halaman A 2)	Ba'asyir Dituding Terkait jaringan Medan	Kepala Divisi Humas Markas Besar Kepolisian RI, Inspektur Jenderal Iskandar Hasan mengatakan Abu Bakar

			Ba'asyir diduga memiliki keterkaitan dengan jaringan teroris Medan yang satu persatu dibekuk polisi. "Biaya pelatihan di Sinabung juga diduga berasal dari Ba'asyir
11	(Koran Tempo, 21/9/2010)	Kelompok Medan Dipimpin Abu Tholut	Kelompok teroris yang beraksi di Medan Sumatera Utara, dan sekitarnya diidentifikasi merupakan jaringan yang dipimpin oleh Abu Tholut alias Mustofa. Pria ini diketahui memiliki banyak nama samaran lain, di antaranya Pranata Yudha alias Herman alias Imron dan kini masih buron Detasemen Khusus 88 Antiteror
12	(Koran Tempo, 21/9/2010)	Teroris Di Balik Perampokan Medan	Perampokan bersenjata di Bank CIMB Niaga Medan pada 18 agustus 2010 dilakukan jaringan teroris yang sedang diburu polisi. Koran Tempo juga menjelaskan bahwa hasil perampokan dipakai untuk membiayai rencana operasi terorisme termasuk untuk pelatihan militer serta pembelian senjata dan amunisinya, yang disebut oleh kelompok teroris sebagai dana (Fai)
13	(Koran Tempo, 21/9/2010)	Aksi Perampokan	Mantan Pemimpin Jamaah Islamiyah, Nasir Abbas

		Dianggap Halal	mengatakan perampokan oleh kelompok teroris dilakukan terhadap harta yang mereka anggap halal. "Yakni (harta) yang bukan milik Muslim," kata Nasir kepada Tempo semalam
--	--	-----------------------	---

LAMPIRAN 2

Analisis Mikro

RELASI

No	Judul Teks berita	Relasi yang ditampilkan atau digambarkan dalam teks berita
1	<p>Ceramah Ba'asyir Sebelum Ditangkap : "Demokrasi itu kurang ajar"</p> <p>Edisi Selasa, 10/8/2010 Cover Story</p>	<p>Koran Tempo tidak melakukan konfirmasi seputar tuduhan atas Ba'asyir yang diduga terlibat sejumlah aksi terorisme di tanah air.</p> <p>Koran Tempo lebih banyak mengedepankan sumber resmi seperti Kepala Bareskrim Mabes Polri, Ito Sumardi</p> <p>Upaya konfirmasi dan investigasi mengenai kebenaran dari klaim atau tuduhan polisi terhadap Ba'asyir dan kelompok Islam garis keras tidak dilakukan</p> <p>Wartawan/editor Koran Tempo, ahmad Fikri dan kawan-kawan, tidak memberi tempat yang seimbang untuk narasumber yang mendukung Ba'asyir. Walaupun ada hanya satu paragraf di paragraf dua, dan hanya lewat tiga kalimat pendek terpisah.</p> <p>Ada upaya melakukan ekskomunikasi, artinya Koran Tempo tidak melakukan upaya menyeimbangkan informasi dengan melakukan wawancara yang seimbang, padahal kewajiban melakukan hal itu</p>

		merupakan kewajiban hakiki pers
2	Sebelum Ditangkap Ba'asyir kecam Demokrasi Koran Tempo edisi Selasa 10 Agustus 2010 Halaman A3	<p>Relasi yang dilakukan wartawan terhadap narasumber, khususnya kelompok terduga terorisme tidak dilakukan. Informasi yang disampaikan hanyalah fakta sebelum terjadinya penangkapan atas Ba'asyir yakni saat ada ceramah di Mesjid Ikhwanul Qorib, Babakan Priangan Bandung.</p> <p>Seolah-olah pernyataan dan isi ceramah Ba'asyir ini adalah alasan logis mengapa akhirnya Amir JAT ini ditangkap. Padahal tidak ada penjelasan dan bukti-bukti yang ditampilkan oleh polisi untuk memperkuat klaim bahwa Ba'asyir memang layak ditangkap</p> <p>Isi ceramah Ba'asyir ini kemudian ditanggapi oleh narasumber Koran Tempo dari Jaringan Islam Liberal dan pihak lain yang melihat ideologi yang dipegang Ba'asyir adalah keliru karena menganggap Demokrasi sebagai musuh Islam</p>
3	Ba'asyir Dituding Terlibat Terorisme di Aceh Koran Tempo edisi Selasa 10 Agustus 2010 halaman A2	<p>Pihak Ba'asyir tidak diminta konfirmasinya soal kebenaran tuduhan polisi bahwa Ba'asyir tidak hanya terlibat dalam gerakan terorisme di Aceh, tetapi juga terlibat dalam sejumlah kegiatan terorisme</p> <p>Sumber kepolisian yang</p>

		<p>menyebut bahwa Baasyir terlibat dalam sejumlah aksi, dan diduga turut serta melakukan perencanaan, merestui dan mendanai pelatihan teroris di Aceh, tidak didukung bukti-bukti yang kuat atau lewat serangkaian investigasi jurnalistik lapangan yang bisa menguak kebenaran data yang diberikan polisi</p> <p>Koran Tempo tidak menempatkan pembelaan dari kelompok Ba'asyir dalam porsi yang seimbang, tetapi hanya percaya mentah-mentah pernyataan kepolisian</p>
4	<p>Kesaksian dari Tanah Rencong Jerat Ba'asyir Koran Tempo/Edisi no.3267/tahun X/ Selasa 10 Agustus 2010/ Halaman A4</p>	<p>Berita satu sisi, hanya mempercayai satu informasi yakni kepolisian tanpa melakukan investigasi apa betul bahwa kasus pelatihan teroris di Aceh itu memang melibatkan Ba'asyir.</p> <p>Koran Tempo menelan mentah-mentah informasi dan klam dari kepolisian tanpa mencoba memberi keseimbangan berita</p>
5	<p>Lima Serangkai Penebar Teror Koran Tempo, edisi Selasa 10/8/2010 halaman A4</p>	<p>Lead berita Koran Tempo yang menyinggung-nyinggung Ba'asyir tetapi tidak menyertakan adanya konfirmasi dari Ba'asyir.</p> <p>Koran Tempo langsung percaya</p>

		<p>saja terhadap isi pernyataan dan klaim polisi soal keterlibatan Ba'asyir dalam sejumlah aksi terorisme, dan tidak melakukan investigasi untuk mencari kebenaran yang ada</p> <p>Meski judulnya lima serangkai penebar teror, tetapi narasumbernya hanya seragam yaitu dari pihak kepolisian belaka, ke lima orang yang dituduh terlibat dalam kegiatan laboratorium kimia tidak diberi ruang untuk bicara mengkonfirmasi apakah mereka memang benar-benar melakukan hal tersebut</p> <p>Meski dalam sub judul ditulis sejumlah peran dan barang bukti, yang mengaitkan pelaku penebar teror, tetapi sumber yang digunakan koran Tempo hanyalah Edward Arintonang, juru bicara kepolisian</p> <p>Dalam Lead disebutkan bahwa Abu Bakar Ba'asyir dikaitkan dengan rencana teror setelah Densus 88 Antiteror menangkap lima tersangka di Bandung, Subang dan padalarang, tetapi koran Tempo hanya percaya saja pada pernyataan Edward</p>
--	--	---

		Aritonang, tanpa mencoba melakukan konfirmasi atau melakukan investigasi untuk menguak kebenaran klaim atau tuduhan polisi tersebut
6	Sang Amir yang Sudah Lama Diincar Koran Tempo/Edisi no.3267/tahun X/ Selasa 10 Agustus 2010/ Halaman A3	<p>Berita ini tidak secara jelas mengungkap kapan Ba'asyir mengatakan secara langsung bahwa dia mendirikan JAT, dan menjelaskan bahwa sebagai Amir, Ba'asyir dia memiliki kekuasaan mutlak.</p> <p>Ada unsur when dan where yang hilang pada Lead berita, sehingga tidak jelas apakah wartawan Koran Tempo melakukan wawancara langsung, mengingat Ba'asyir sudah ditangkap polisi</p> <p>Kendati banyak pihak yang dicoba ditonjolkan dalam berita untuk memberikan keyakinan bahwa Ba'asyir memang benar-benar terlibat dalam aksi terorisme, tetapi Ba'asyir seakan dikucilkan dan tidak direpresentasikan dalam berita. Koran Tempo seakan hanya percaya pada satu sumber belaka yaitu kepolisian</p>
7	FPI Menilai Ba'asyir Korban Rekayasa Koran Tempo/Edisi no.3267/tahun X/ Selasa 10 Agustus	Sumber Sofyan atau Sufyan yang disebut-sebut dalam berita tidak dikonfirmasi, apakah benar-benar dia memang pelaku terorisme dan hanya mencoba

	2010/Halaman A4	<p>mengkaitkan aksinya dengan Ba'asyir</p> <p>Basyir dianggap sebagai korban rekayasa, tetapi Koran Tempo tidak melakukan konfirmasi atau investigasi mengapa dia dijadikan korban, koran tempo hanya percaya pada klaim-klaim narasumber tanpa berupaya melakukan konfirmasi pada pihak-pihak yang terkait dan berhadapan</p>
8	<p>Polisi Yakin Mustawan Anggota JAT Koran Tempo, Sabtu 14/8/2010</p>	<p>Koran Tempo begitu percaya pada klain polisi bahwa Mustawan memang adalah anggota Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) dimana Ba'asyir sebagai imamnya</p> <p>Tak ada upaya melakukan konfirmasi dan investigasi untuk memverifikasi bahwa memang Mustawan adalah anggota JAT</p>
9	<p>Ba'asyir Dulmatin Dituduh Rancang Pelatihan Militer Koran Tempo/Edisi no.3267/tahun X/ 16 Agustus 2010/ Halaman A 2</p>	<p>Ba'asyir yang dituduh rancang pelatihan militer tidak diberi kesempatan untuk menyanggah atau melakukan konfirmasi</p> <p>Koran Tempo juga tidak secara kritis melakukan investigasi sendiri, dan hanya percaya pada keterangan kepolisian yang mengatakan bahwa Ba'asyir memang terlibat dalam perancangan pelatihan teroris di</p>

		Aceh
10	Ba'asyir Dituding Terkait jaringan Medan Koran Tempo, 21/9/2010 Halaman A 2	<p>Ba'asyir meski disebut sebut dan dituding terkait jaringan Medan, tidak diberi kesempatan untuk berbicara membela diri. Koran Tempo hanya percaya pada klaim polisi bahwa Ba'asyir terkait dengan jaringan teroris Medan yang dibekuk polisi</p> <p>Upaya konfirmasi dari sejumlah pelaku jaringan Medan yang akhirnya menyebut Ba'asyir juga tidak secara jelas dikatakan. Koran Tempo hanya bersandarkan klaim dari Kepala Divisi Humas Mabes Polri Edward Aritonang</p>
11	Kelompok Medan Dipimpin Abu Tholut Koran Tempo, 21/9/2010	<p>Sumber hanya Kapolri, koran Tempo tidak mencoba melakukan konfirmasi dari kelompok Abu Tholut</p> <p>Koran ini juga tidak melakukan investigasi langsung, apakah memang benar apa yang disampaikan oleh polisi terkait dengan kelompok teroris Medan yang melakukan aksi perampokan di CIMB Niaga</p> <p>Begitu juga ketika Kapolri sebagai narasumber utama menyebut bahwa kelompok teroris medan ini bagian dari jaringan teroris Al-Qaidah tanzim</p>

		Aceh, Koran Tempo tidak melakukan konfirmasi soal kebenaran klaim ini. Relasi koran tempo pada kelompok teroris di Medan seakan putus dan tidak ada
12	Teroris Di Balik Perampokan Medan Koran Tempo, 21/9/2010	<p>Koran Tempo hanya berdasarkan pada pernyataan Kapolri Bambang Hendarso Danuri yang menyebut bahwa aksi perampokan bersenjata di Bank CIMB Niaga Medan dilakukan oleh kelompok jaringan teroris</p> <p>Koran Tempo tidak melakukan konfirmasi atau investigasi khusus untuk melihat hal tersebut</p>
13	Aksi Perampokan Dianggap Halal Koran Tempo, 21/9/2010	<p>Pemilihan narasumber memang mantan anggota Jamaah Islamiyah yang kemudian membenarkan adanya metode 'Fai' untuk mencari dana bagi kegiatan terorisme, tetapi tetap saja klaim polisi bahwa ada jaringan terorisme dari aksi perampokan tidak didukung bukti</p> <p>Koran Tempo tidak mencoba menguak, apakah memang dilakukan oleh kelompok teroris atau apakah dilakukan oleh kelompok lain yang mencoba mendeskreditkan kelompok Islam garis keras sebagai teroris</p>

LAMPIRAN 3

Analisis Mikro

REPRESENTASI

No	Judul Teks berita	Representasi Yang ditampilkan dalam teks
1	<p>Ceramah Ba'asyir Sebelum Ditangkap :“ Demokrasi itu kurang ajar”</p> <p>Edisi Selasa, 10/8/2010 Cover Story</p>	<p>-Media merepresentasikan, Ba'asyir ditangkap karena <i>diduga terlihat sejumlah aksi terorisme</i> di beberapa daerah termasuk di Aceh</p> <p>-media juga merepresentasikan <i>adanya ideologi Ba'asyir yang jelas-jelas menentang demokrasi</i> yang disebutkan sebagai 'kurang ajar',</p> <p>pengamalan Islam yang membutuhkan pemahaman yang benar, sebab <i>hidup harus berasas tunggal yakni bersendikan pada hukum agama (Islam)</i>, dan medeskreditkan demokrasi yang bertentangan dengan hukum Allah.</p> <p>Ba'asyir mengomentari soal penangkapan dirinya sebagai <i>(1) ini rahmat Allah, (2) untuk mengurangi dosa dan (3) rekayasa Amerika</i> walau dalam teks tidak dijelaskan apa bentuk rekayasa Amerika tersebut</p>

2	<p>Sebelum Ditangkap Ba'asyir kecam Demokrasi Koran Tempo edisi Selasa 10 Agustus 2010 Halaman A3</p>	<p>Koran Tempo mencoba mengangkat '<i>alasan penting mengapa tokoh semacam Ba'asyir itu layak ditangkap dan ditahan</i>, karena pernyataan-pernyataannya yang anti demokrasi dan anti pemerintah</p> <p>-</p> <p>Sebelum penangkapan, <i>Baasyir berpidato mengecam pemerintah terkait dengan perlakuan terhadap dirinya</i> dengan mengatakan bahwa orang Islam yang mau menjalankan Islam dengan Benar akan dicap sebagai Islam Garis Keras atau Fundamentalis</p> <p>Ba'asyir mengatakan bahwa <i>Islam adalah ideologi yang paling benar, paling cocok</i> untuk mengatur kehidupan manusia dan dunia. Sedangkan <i>demokrasi itu kurang ajar karena berupaya menetapkan Allah di posisi yang lebih rendah</i> ketimbang manusia</p> <p><i>Ideologi yang dianut Ba'asyir dianggap aneh</i>, oleh narasumber lain seperti Tokoh JIL, Ulil Abshar, yang menyebut <i>pemikiran Ba'asyir kacau</i></p>
---	--	--

		<p>Ba'asyir dalam ceramahnya menegaskan bahwa <i>Ahmadiyah dan golongan lain seperti Jaringan Islam Liberal sebagai golongan murtad, yang dibentuk oleh orang kafir untuk mengobok-obok dan merusak Islam dari dalam.</i></p> <p>Serangan terhadap Islam ini menurut Ba'asyir <i>disebut Ghazwul fikri atau perang pemikiran yang lebih berat ketimbang perang mengangkat senjata.</i> Ahmadiyah harus diusir dan diperangi.</p> <p><i>Negara Indonesia dianggap Ba'asyir adalah negara kafir dan pemerintahan di Indonesia bukan pemerintahan Islam, karena membiarkan sesuatu yang merusak Islam dari dalam dan dianggap sebagai hak asasi</i></p>
3	<p>Ba'asyir Dituding Terlibat Terorisme di Aceh Koran Tempo edisi Selasa 10 Agustus 2010 halaman A2</p>	<p>Penjelasan pihak Kepolisian alasan mengapa Ba'asyir ditangkap, karena <i>adanya dugaan Ba'asyir memiliki keterkaitan dengan sejumlah aksi terorisme</i> di beberapa daerah , diantaranya Aceh</p>

		<p>Polisi <i>menduga ada keterkaitan antara Ba'asyir dengan Abdullah Sunata sebagai pemimpin gerakan pelatihan teroris di Aceh Besar</i>. Ba'asyir diduga turut dalam perencanaan awal sampai terbentuknya <i>Al Qaida Aminah</i> yang berfungsi sebagai basis militer di Aceh</p> <p>Ba'asyir diduga <i>megetahui semua rangkaian pelatihan teroris</i> di Aceh dan <i>mendapat laporan rutin pengelola di lapangan</i>, Abu Tholut</p> <p>Polisi menjelaskan bahwa <i>pihaknya masih mengumpulkan data dan bukti</i>, tetapi polisi tidak sembarangan mengambil dan mengamankan orang tanpa <i>bukti keterlibatan orang tersebut dalam kasus terorisme</i></p> <p>Sementara itu, dari pihak Ba'asyir direpresentasikan memrotes <i>adanya ketidakcermatan tuntutan dan UU atau pasal-pasal yang diterapkan untuk menjerat</i> Ba'asyir</p>
--	--	---

4	<p>Kesaksian dari Tanah Rencong Jerat Ba'asyir Koran Tempo/Edisi no.3267/tahun X/ Selasa 10 Agustus 2010/ Halaman A4</p>	<p>.Baasyir ditangkap adalah <i>hasil pengembangan penyidik yang telah menangkap 102 tersangka</i> teroris di Aceh</p> <p>Ada <i>satu benang merah</i> yang menghubungkan antara <i>aksi terorisme di Aceh dengan Baasyir yaitu proses pelatihan kemiliteran di Aceh</i> dan rencana <i>kegiatan meledakan sejumlah sasaran, hingga temuan laboratorium di Cibiru, Bandung</i> berkaitan dengan Abu Bakar Baasyir</p> <p>Peran dan keterlibatan Baasyir belum jelas, <i>tetapi penangkapan Baasyir tidak ada tendensi ataupun pengalihan dari isu</i> yang sekarang berkembang, termasuk masalah rekening gendut perwira kepolisian</p> <p>bukti kuat yang melibatkan Ba'asyir dalam <i>aksi terorisme agak lemah maka dari itu untuk memberi argument kuat soal penangkapan dirinya</i>, maka polisi mencari alasan yang bisa mengkaitkan Ba'asyir.</p>
---	--	--

5	<p>Lima Serangkai Penebar Teror Koran Tempo, edisi Selasa 10/8/2010 halaman A4</p>	<p>Baasyir <i>dikaitkan dengan rencana terror</i> setelah lima tersangka teroris ditangkap di Bandung. Ada benang merah yang <i>menghubungkan Ba'asyir dengan jaringan teroris di tanah air</i>. Dimulai dengan proses pelatihan militer di Aceh, hingga ditemukannya laboratorium untuk mendukung rencana pengeboman selanjutnya</p>
6	<p>Sang Amir yang Sudah Lama Diincar Koran Tempo/Edisi no.3267/tahun X/ Selasa 10 Agustus 2010/ Halaman A3</p>	<p>Sang Amir <i>sudah lama diincar</i> sejak 2008. Baasyir dirikan Jemaah Anshorut Tauhid (JAT) setelah meninggalkan Majelis Mujahidin Indonesia pada 2008. Tujuan pendirian JAT adalah <i>Daulah Islamiyah yakni menginginkan peraturan di Negara ini sesuai dengan syariat Islam</i>. Ideologi ini jelas <i>bertentangan dengan ideologi Pancasila</i> yang dipegang teguh Indonesia</p> <p>Sebagai Amir (pimpinan) , <i>Ba'asyir memiliki kekuatan mutlak, Jemaah harus taat kepada amir</i>, kecuali jika amir melakukan maksiat</p> <p>Nama <i>Baasyir mulai</i></p>

		<p>disebut, ketika Mei 2010, Densus 88 menangkap belasan anggota JAT di Pejaten, 7 diantaranya dijadikan tersangka kegiatan terorisme.</p> <p>Ba'asyir mulai dikaitkan setelah april 2010 polisi menangkap Ubeid atau Luthfi Haedaroh di Medan. Ubeid adalah instruktur utama pelatihan kemiliteran Alqaedah serambi mekah Aceh</p> <p>Dugaan keterlibatan Ba'asyir makin kuat setelah penggerebegan di Ci biru, Kota Bandung. Pelatihan militer di Aceh dan rencana kegiatan di Cibiru berkaitan dengan Abu Bakar Ba'asyir</p> <p>Mehendradata dari tim pengacara Ba'asyir mengatakan kliennya menolak penangkapan itu, karena tidak jelas kejadian terorisme mana dan peristiwa apa</p>
7	<p>FPI Menilai Ba'asyir Korban Rekayasa Koran Tempo/Edisi no.3267/tahun X/ Selasa 10 Agustus 2010/Halaman A4</p>	<p>Ba'asyir yang ditangkap polisi, adalah korban rekayasa isu terorisme dan dituding sebagai orang yang mendanai aksi terorisme di Aceh</p> <p>tim investigasi FPI menemukan fakta bahwa</p>

		<p><i>teoris Aceh itu dibiayai oleh Sufyan Sauri disertai anggota Brigade Mobil Polri</i> yang juga merekrut dan melatih militer di Aceh</p> <p><i>Sufyan telah dipecat dari kepolisian, namun pada februari 2009 Sufyan mengirim kelompok militan Aceh ke Jakarta.</i> Anehnya mereka berlatih menembak <i>di markas Brimob</i>, berlatih dengan senjata AK-47 dan 50 peluru tajam</p> <p>Sufyan diduga merupakan tokoh sentral dalam pelatihan kelompok militan di Indonesia. Adapun <i>Ba'asyir sekedar dijadikan tumbal.</i></p> <p>Polri <i>membantah temuan FPI</i>, Sufyan yang ditahan polisi bukan dari Brimob tetapi dari <i>Sabhara Polres Depok yang dipecat karena tidak pernah masuk . Sufyan masuk kelompok Oman Abdurrahman</i> tersangka bom Cimanggis dan dibawa untuk pelatihan ke Aceh</p>
8	<p>Polisi Yakin Mustawan Anggota JAT Koran Tempo, Sabtu 14/8/2010</p>	<p>Mabes Polri yakin <i>Mustawan Ahbab, WNI yang ditangkap di Kuala Lumpur</i> adalah anggota <i>Jamaah Anshorut Tauhid (JAT)</i></p>

		<p>Mustawan <i>ditangkap polisi Malaysia karena diduga bagian dari jaringan teroris</i> yang beroperasi di Malaysia dan Indonesia</p> <p>Dugaan polisi itu <i>dibantah oleh pemimpin JAT Jawa Timur. Polisi dianggapnya selalu mencoba mengkaitkan setiap kegiatan terorisme dengan Abu Bakar Ba'asyir</i></p>
9	<p>Ba'asyir Dulmatin Dituduh Rancang Pelatihan Militer Koran Tempo/Edisi no.3267/tahun X/ 16 Agustus 2010/ Halaman A 2</p>	<p>Amir Jamaah Ansharut Tauhid (JAT) Abu <i>Bakar Ba'asyir</i>, tersangka kasus terorisme yang ditangkap Detasemen Khusus 88 Anti Teror pada Senin Pekan lalu, <i>diduga pernah bertemu dengan Dulmatin</i></p> <p><i>Ubaid mengaku ikut hadir pada pertemuan antara Ba'asyir dan Dulmatin, buron tersangka teroris yang telah ditembak mati</i> oleh polisi di Pamulang Banten 9 Maret lalu</p> <p>Dari hasil pemeriksaan polisi, <i>Ubaid mengaku bahwa pada pertemuan itu Ba'asyir memberikan Rp 180 juta dan US \$ 5000</i> kepadanya pada November 2009. Menurut dokumen</p>

		<p>pemeriksaan itu , pelatihan militer di bukit Krueng Linteung, seperti yang dilaporkan ke Ba'asyir, dimulai pada 28 Januari 2010 tepat pukul 08:00 WIB.</p> <p>Dulmatin yang membukanya secara resmi</p> <p>polisi bersikukuh bahwa Ba'asyir dan Dulmatin memang benar-benar bertemu dan membicarakan rencana pelatihan militer, tetapi pihak Ba'asyir membantah dan berargumen bisa saja informasi dari Ubaid itu tidak murni tetapi karena ditekan oleh aparat keamanan</p>
10	<p>Ba'asyir Dituding Terkait jaringan Medan</p> <p>Koran Tempo, 21/9/2010 Halaman A 2</p>	<p>Polisi yakin Abu Bakar Ba'asyir diduga terkait dengan jaringan teroris Medan yang satu persatu dibekuk polisi</p> <p>Biaya pelatihan militer teroris jaringan Medan di Sinabung juga diduga berasal dari Ba'asyir</p> <p>Para anggota jaringan teroris Alqaidah Tanzim Aceh tidak hanya pernah berlatih di Jalin Jantho Aceh, tapi pernah juga berlatih di Sinabung dan Deli Serdang,</p>

		<p>Sumatera Utara</p> <p><i>Tuduhan terhadap Ba'asyir menurut pendukung Ba'asyir mengada-ada.</i> Karena untuk membiayai hidup saja Ba'asyir justru masih dibantu orang lain. <i>Kalaupun Ba'asyir menggalang dana, itu bukan untuk kegiatan terorisme tetapi untuk aksi kegiatan kemanusiaan di Palestina</i></p>
11	<p>Kelompok Medan Dipimpin Abu Tholut Koran Tempo, 21/9/2010</p>	<p>Kelompok teroris di Medan diidentifikasi <i>merupakan jaringan teroris yang dipimpin oleh Abu Tholut yang pernah menjadi Ketua Mantiqi III Jamaah Islamiyah.</i></p> <p>Kelompok teroris medan disebut <i>sebagai bagian dari jaringan teoris Al-Qaidah Tanzim Aceh</i></p> <p>Dalam pengungkapan teroris di Medan, polisi menyita sepucuk senjata api laras panjang, tiga pistol jenis FN dan ratusan peluru. Juga ditemukan peledak TNT seberat 1,5 kg, sangkur, parang, telepon selular, detonator, cakram digital serta berbagai rangkaian elektronik</p>
12	Teroris Di Balik Perampokan Medan	<p>Perampokan bersenjata di Bank CIMB Niaga Medan pada</p>

	Koran Tempo, 21/9/2010	<p>18 agustus 2010 dilakukan jaringan teroris yang sedang diburu polisi</p> <p>Hasil perampokan dipakai untuk <i>membiayai rencana operasi terorisme termasuk untuk pelatihan militer serta pembelian senjata dan amunisinya, yang disebut oleh kelompok teroris sebagai dana (Fai),</i> yaitu dana yang dikumpulkan dari hasil perampokan yang mereka halalkan</p> <p>Ada sekitar 33 anggota jaringan teroris di Medan, dan terkait dengan jaringan teroris yang melakukan latihan di Aceh.</p> <p>Jaringan ini telah merampok sejak April 2010 (Bank Sumut Medan dan menggondol Rp.600 juta), kemudian 3 juni 2010 merampok Bank BRI di Ampelas Medan dan mengambil Rp.60 juta, kemudian pada 12 juni 2010 merampok money changer di Belawan dan menguras Rp 13 juta, dan pada 18 Agustus 2010 merampok Bank CIMB Niaga Medan dan merampas Rp 300 juta</p>
13	Aksi Perampokan	<i>Hasil rampokan kelompok</i>

	<p>Dianggap Halal Koran Tempo, 21/9/2010</p>	<p><i>teroris dianggap halal, karena mereka merampok harta yang bukan milik orang Muslim</i></p> <p>Perampokan hanya salah satu cara untuk menggalang dana, dan <i>kelompok teroris meyakini bahwa uang rampokan sebagai 'fai' atau pampasan perang</i>, karena situasi di <i>Indonesia saat ini dianggap suasana perang</i></p> <p><i>Pemerintah Indonesia pun dianggap kafir</i> oleh para pelaku terorisme sehingga <i>mereka bebas melakukan apa saja termasuk merampok harta warga non muslim</i></p> <p><i>Metode Fa'i menyumbang dana paling besar bagi kelompok teroris</i>, sehingga sering dilakukan. Bahkan dana fa'i dari malaysia dan Filipina juga pernah masuk ke Indonesia</p> <p><i>Perampokan di Medan menurut polisi dilakukan kelompok teroris untuk membiayai kegiatan terorisme</i> seperti membeli senjata dan mengongkosi kegiatan organisasi</p>
--	---	--

LAMPIRAN 4

Analisis Unsur Identitas

Dalam analisis unsur identitas, yang dicari adalah konstruksi identitas penulis dengan pembaca tertentu (misalnya, dalam hal apa disorot - Apakah aspek status dan peran identitas, atau aspek-aspek individu dan kepribadian identitas)..Dalam kata lain, bagaimana identitas wartawan, khalayak, dan partisipasi berita, terkait dengan terorisme digambarkan dan direpresentasikan dalam berita. Bagaimana juga identitas para pelaku aksi terorisme itu digambarkan, apa saja atribut yang diterakan pada objek pemberitaan soal terorisme bernafaskan gerakan Islam garis keras.

Pada berita ketiga yang berjudul **Ba'asyir Dituding Terlibat Terorisme di Aceh** (Koran Tempo edisi Selasa 10 Agustus 2010 halaman A2) , Identitas Ba'asyir sebagai tokoh penting dalam jaringan teroris dijelaskan secara gampalng. Polisi menduga ada keterkaitan antara Ba'asyir dengan Abdullah Sunata sebagai pemimpin gerakan pelatihan teroris di Aceh Besar. Ba'asyir diduga turut dalam perencanaan awal sampai terbentuknya Al Qaida Aminah yang berfungsi sebagai basis militer di Aceh. Tetapi sayangnya tidak disertai bukti yang memadai. Tanpa adanya konfirmasi, wartawan Koran Tempo begitu saja percaya pada klaim polisi bahwa Ba'asyir diduga mengetahui semua rangkaian pelatihan teroris di Aceh dan mendapat laporan rutin pengelola di lapangan, Abu Tholut . Identitas Ba'asyir sebagai pimpinan jaringan teroris ini tidak disertai bukti kuat. Dugaan Polisi ini tidak begitu kuat, Polisi hanya bisa menjelaskan bahwa pihaknya masih mengumpulkan data dan bukti, tetapi polisi tidak sembarangan mengambil dan mengamankan orang tanpa bukti keterlibatan orang tersebut dalam kasus terorisme.

Sementara pada berita keempat yang berjudul **Kesaksian dari Tanah Rencong Jerat Ba'asyir** (Koran Tempo/Edisi no.3267/tahun X/ Selasa 10 Agustus 2010/ Halaman A4). Identitas teroris yang ditangkap, Arifin dan Tomji tidak digambarkan secara detil, tetapi aksi keduanya dijadikan alasan mengapa Ba'asyir ditangkap. Secara detil, diakui oleh polisi belum bisa dijelaskan apa peranan dan keterlibatan Ba'asyir, tetapi sosok ini langsung ditahan. Meski Ba'asyir disebut-sebut, tak ada upaya Koran Tempo untuk menyeimbangkan

berita dengan melakukan wawancara dengan Ba'asyir. Sejumlah narasumber yang digunakan hanyalah pihak kepolisian seperti Kepala Divisi Humas Mabes Polri Edward Aritonang, Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Ito Sumardi..Di bagian ending berita, hanya ada satu paragraf yang menampilkan Imam Masjid Agung Kota Banjar, Haji Mahfud Sidiq, tetapi narasumber ini tidak digali secara lebih rinci dan lengkap sebagaimana narasumber kepolisian, soal kesaksian dari Aceh yang akhirnya menjerat Ba'asyir .

Yang paling menyolok adalah pada berita yang berjudul **Lima Serangkai Penebar Teror** (Koran Tempo, edisi Selasa 10/8/2010 halaman A4). Meski nama Ba'asyir disebut-sebut, dan dikaitkan dengan rencana teror, tapi tak ada upaya konfirmasi dari Ba'asyir tentang benar tidaknya klaim polisi. Identitas Ba'asyir secara sepihak diekspos oleh koran Tempo yang menelan secara bulat, klaim dari juru bicara Mabes Polri, Edward Aritonang .Identitas narasumber yang bisa membuktikan keterlibatan Ba'asyir dibalik penemuan laboratorium tempat pembuatan bom teroris tidak dijelaskan. Narasumber satu-satunya untuk berita Lima Serangkai Penebar Bom hanyalah Juru Bicara Mabes Polri, Edward Aritonang, identitas narasumber ini jelas hanya sepihak menyuarakan kepentingan kepolisian, dan ketika menyatakan bahwa Ba'asyir terkait dengan rencana teror terkait dengan penemuan laboratorium kimia di Ci biru Bandung. Tak ada narasumber lain yang dikutip oleh Koran Tempo, untuk mengimbangi pemberitaan satu sisi ini. Koran Tempo seakan hanya percaya bahwa informasi kepolisian yang menyebut Ba'asyir terkait dengan rencana teror adalah satu-satunya kebenaran.

Begitu pula pada berita berjudul **Ba'asyir Dulmatin Dituduh Rancang Pelatihan Militer** (Koran Tempo/Edisi no.3267/tahun X/ 16 Agustus 2010/ Halaman A 2) Identitas Ba'asyir yang disebut sebagai 'amir' atau pemimpin Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) diduga pernah bertemu dengan Dulmatin . Tetapi pertemuan tersebut hanya berdasarkan pengakuan dari Ubaid al Lutfi Haidaroh aktivis JAT yang telah ditangkap oleh Densus 88 maret 2010.

Tidak jelas Identitas siapa narasumber yang bisa memastikan bahwa Amir Jamaah Anshorut Tauhid benar-benar bertemu dengan Dulmatin. Koran Tempo hanya mengaitkan dengan adanya dokumen pemeriksaan Ubaid, sedangkan Dulmatin sendiri adalah buronan teroris yang sudah ditembak mati oleh polisi di Pamulang Banten, 9 Maret 2010.

Koran Tempo tidak memberi kesempatan bagi Ba'asyir untuk melakukan konfirmasi mengenai identitas dan tuduhan yang diberikan polisi kepadanya. Koran Tempo hanya menyampaikan bantahan Ba'asyir dari kuasa hukum Ba'asyir di paragraf-paragraf akhir, sedang di judul dan Lead, koran ini lebih mengutamakan sumber resmi. Bantahan pendukung/pengacara Ba'asyir ditujukan pada 'identitas' Ubaid yang dianggap mereka mengaku dan mengatakan hal itu karena dibawah tekanan polisi, dan wartawan tidak langsung mendapat pengakuan tersebut dari Ubaid karena Ubaid ditutup aksesnya dan tidak mendapatkan pendampingan dari pengacara dari TPM (Tim pengacara Muslim).

Hal yang sama juga bisa dilihat pada berita berjudul **Ba'asyir Dituding Terkait jaringan Medan** (Koran Tempo, 21/9/2010 Halaman A 2), Sosok Ba'asyir yang dituduh memiliki keterkaitan dengan jaringan teroris medan nyaris tanpa bukti. Identitas Ba'asyir sebagai aktor dibalik jaringan teroris Medan ini hanya disampaikan secara sepihak oleh kepolisian, oleh Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Iskandar Hasan.

Penggambaran polisi bahwa Ba'asyir yang memiliki uang banyak sehingga mampu membiayai aktivitas gerakan teroris di Medan dan membiayai pelatihan teroris di Aceh, menurut juru bicara Pondok Pesantren Al Mukmin, terlalu mengada-ada, karena kehidupan sehari-hari Ba'asyir jauh dari cukup. Identitas para teroris di Aceh, yang diidentifikasi sebagai anggota jaringan teroris Al Qaidah Tanzim Aceh sendiri tidak dijelaskan, tetapi polisi meski tanpa bukti yang memadai langsung menuduh bahwa Abu Bakar Ba'asyir terkait dengan jaringan teroris Medan. Nara sumber utama dalam berita itu adalah pihak kepolisian dari Judul hingga enam paragraf berita, sedangkan bantahan dari pengikut Ba'asyir hanya diberikan tempat 2 paragraf.

Pada berita berjudul **Kelompok Medan Dipimpin Abu Tholut** (Koran Tempo, 21/9/2010) Kelompok teroris di Medan diidentifikasi merupakan jaringan teroris yang dipimpin oleh Abu Tholut yang pernah menjadi Ketua Mantiqi III Jamaah Islamiyah. sebagai bagian dari jaringan teroris Al-Qaidah Tanzim Aceh. Identifikasi kelompok teroris Medan ini hanya berasal dari Kepala Kepolisian RI dan Kadiv Humas Mabes Polri, sedangkan informasi alternatif lain seputar sosok atau identitas para pelaku dari 'jaringan teroris' Medan ini tidak ada. Koran Tempo dengan wartawan Mustafa Silalahi/Soetana Monang Hasibuan, tidak menyertakan sumber alternatif lain selain pihak

kepolisian untuk mencari kebenaran sesungguhnya yang terjadi dan percaya saja pada apa yang diklaim polisi.

Sementara itu pada berita berjudul **Teroris Di Balik Perampokan Medan** (Koran Tempo, 21/9/2010) Perampokan bersenjata di Bank CIMB Niaga Medan pada 18 agustus 2010 dilakukan jaringan teroris yang sedang diburu polisi. Perampok diidentifikasi oleh pihak kepolisian, ada sekitar 33 anggota jaringan teroris di Medan, dan terkait dengan jaringan teroris yang melakukan latihan di Aceh. Mereka merampok untuk membiayai kegiatan terorisme mereka, dengan merampasnya dari harta non Muslim. Tetapi kebenaran sejati apakah mereka memang benar melakukan itu untuk kepentingan terorisme, tidak ditampilkan. Koran Tempo, khususnya wartawan Mustafa Silalahi dan Sutana Moenang Hasibuan, hanya menampilkan satu-satunya narasumber yakni Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri. Mereka tidak melakukan cek ricek apakah berita atau klaim yang disampaikan oleh polisi memang benar-benar mengandung kebenaran.

Pada berita yang berjudul **Aksi Perampokan Dianggap Halal** (Koran Tempo, 21/9/2010) Identitas narasumber dalam berita ini adalah seorang mantan pemimpin Jamaah Islamiyah, Nasir Abbas yang mencoba menganalisis bahwa perampokan oleh kelompok teroris di Medan dilakukan terhadap harta yang halal, yakni hartanya warga non muslim. Tetapi tidak ada konfirmasi dari mereka yang tertangkap bahwa memang mereka merampok untuk membiayai kegiatan teroris mereka. Semua klaim bahwa aksi perampokan itu dilakukan oleh kelompok teroris untuk membiayai aksi terorisme ditulis koran Tempo berlandaskan pada pernyataan Kapolri semata, tapi identitas siapa para perampok itu, dan apakah memang benar mereka bertujuan untuk mengumpulkan dana 'fai' tidak disertakan dalam pemberitaan. Bahkan penulis berita, Amirullah, dan Ratnaning Asih dan editor Jobpie S, mengaitkan metode 'fai' ini sudah dilakukan kelompok teroris sejak peristiwa bom Natal (2000), Bom Bali (12 oktober 2002), Bom Bali II (1 oktober 2005) yang dibiayai dengan uang jarahan merampok toko emas, dan merampok toko ponsel, tetapi tidak ada bukti-bukti atau konfirmasi mengenai kebenaran klaim tersebut.

LAMPIRAN 5 TRANSKRIP WAWANCARA

NARASUMBER: BAMBANG HARYMURTI

TRANSKRIP WAWANCARA BAPAK BAMBANG HARYMURTI CEO TEMPO



Q: Bagaimana pendapat bapak tentang Terorisme di Indonesia khususnya terorisme yang berdasarkan agama tertentu?

BH: Kalau saya pikir sih, saya sebagai pribadi saya melihat apa yang disebut teroris dan kadang apa yang disebut pahlawan itu batasnya tipis tergantung kepada siapa korban dan siapa pelakunya. Saya lihat Moh Toha barangkali buat kita pahlawan buat orang Belanda dianggap teroris .

Jadi kalau kami biasanya mendefinisikan terorisme bukan berdasarkan agama atau ideologinya, atau apanya, tetapi itu khan sebetulnya adalah perilakunya kalau dia itu tidak..., korbannya tak ada sangkutpautnya dengan perjuangan si kelompok yang melakukan kekerasan itu, ya itu buat kita itu merupakan aksi terorisme.

Contohnya misalnya dalam kasus bom mariot, korbannya khan kebanyakan orang Islam, supir-supir taksi itu lho, kalau buat saya mereka bukan memperjuangkan Islam, jelas itu, apalagi sebagai orang Islam sendiri , terus terang saya menganggap teroris yang menggunakan umat Islam itu menurut saya itu mereka bukan Islam.

Q: Walaupun mereka melakukan itu dengan alasan ideologi aksinya untuk memperjuangkan Islam?

BH: Kalau saya pikir, saya sebagai orang Islam kita akan melihat apa yang ditulis Quran dan apa yang dilakukan Nabi. Nabi sendiri khan tidak pernah melakukan kegiatan terorisme, artinya selalu tindakannya kalau pun perang dilandasi untuk membela diri.

Jadi kalau buat saya, kalau khan kita sebagai umat Islam pasti mengikuti apa kata Al-Quran dan apa yang dilakukan Nabi, khan Nabi sendiri tidak pernah melakukan aksi terorisme.

Jadi terorisme dan Islam jelas bertentangan, siapapun itu kalau ada yang melakukan aksi terorisme apalagi yang mengatasnamakan Islam itu pasti tidak Islami yang bertentangan dengan Islam

Q: Apa kebijakan Umum Tempo (termasuk juga Koran Tempo) dalam memberitakan soal terorisme?

BH: Kalau saya sih melihat Koran Tempo menjalankan apa yang kita sebut jurnalisme saja . Jadi kebetulan aja di Indonesia itu mayoritas terorisnya Islam di India khan ada teroris sikhnya, teroris hindu ada. Tapi khan sebenarnya teroris itu nggak ada kaitannya dengan agamanya tapi itu Cuma pembenarannya, untuk hal yang bukan utamanya agamanya. Iya kita jurnalismenya.

Q: Kebijakan atau ideologi Tempo saat melakukan reportase aksi Islam garis keras dan terorisme khususnya pada kelompok Abu Bakar Ba'asyir?

BH: Media itu nggak ada yang netral dan nggak boleh netral sebetulnya menurut saya. saya kebetulan sudah melakukan reportase kelompok Ba'asyir dan Abdullah Sungkar sejak tahun 85 jadi saya yah cukup kenal dengan mereka itu, kalau saya sih gini. Kalo disebut ideologinya Tempo yah karena kita ingin jadi jurnalis profesional, dan ini yang sering salah orang menganggap bahwa jurnalisme itu harus netral, Tidak. Jurnalisme itu ideologinya adalah membela kepentingan publik. Nah tindakan yang disebut terorisme ini khan merugikan kepentingan publik jadi keberpihakan kita yah pada publik, dalam hal ini yah keselamatan publik. Jadi kalo ada orang terlepas dia pakai agama apapun, nro bom di pasar yah itu namanya teroris. Karena publik yang dirugikan, lain kalau misalnya dia mengebom markas tentara atau targetnya jelas.

Q: Apakah pemberitaan soal terorisme ada kaitannya dengan prinsip Islam Liberal yang sering diduga orang dianut Tempo?

BH: saya rasa nggak ada itu. Coba deh lihat bagaimana di masa Orde Baru, siapa yang membela Abdullah Sungkar, siapa media yang membela mereka pada saat mereka di jaman orde baru sangat digencet. Kita khan selama ini punya akses yang bagus dengan kelompok-kelompok teroris /Islam ini karena di era Orde Baru yang paling banyak membela khan kita. Sama seperti Sidney Jones, karena bahkan saya ingat pada pengadilan Abu Bakar dan Abdullah Sungkar itu yang jadi saksi ahli khan Amin Rais untuk saksi pemberat. Tapi kalau...orang itu lupa bagaimana penulisan Tempo tentang Tanjung Priok, ketika orang-orang nggak ada yang berani bela karena takut dibreidel, kita sih lakukan apa yang kita hadapilah. Dan ketika itu bisa ngomong dengan angkatan itu, siapa yang menolong saat mereka dipenjara supaya mereka tidak diperlakukan sangat kejam. Nah sekarang ini yang muncul adalah pahlawan kesiangan semua, yang seolah-olah membela kelomok ini. Berani nggak mereka membela teroris itu di jaman orde baru? Jadi kalo kami-kami sih yang telah terlibat ketawa, kalau kami yang senior-senior kalau ke kalangan mereka yang disebut sebagai teroris itu yah kami merasa aman-aman saya, karena para gegendol mereka sudah kita kenal justru saat mereka dulu nggak punya temen. Pada saat mereka nggak punya temen, Khan waktu itu kalo ketahuan kopkamtib...ngomong ajah susah .gila waktu ditahanan itu mereka nggak bisa berdiringgak bisa tidur aja mesti duduk aja. Dulu yang paling tersiksa itu khan tahanan

ekstrim kiri dan ekstrim kanan. Pada saat itu siapa media yang berani membela mereka, buka saja arsip yah anda khan peneliti. Jadi Sekarang kita nggak punya beban, kalau sekarang dikatakan wah kamu nggak bener nih ? Jadi prinsipnya jurnalisme itu ada dua sebenarnya. Pertama dia membela kepentingan publik, Kedua biasanya cenderung membela underdog, siapapun dizalimi saat itu. Sekarang misalnya siapa yang berani membela ahmadiyah? Media? Tapi dulu siapa yang berani bela Amir Biki, sekarang kebetulan kelompok Amir Biki berkuasa, yang dia tindas kita bela. Jadi sebenarnya gitu saja sederhana, coba lihat dalam posisinya terbalik. Kalau sekarang tempo sering dianggap anti dengan Islam, karena sekarang khan yang melakukan kezaliman itu FPI, segala macam. Tapi dulu jaman FPI di orde baru, Siapa yang berani membela mereka saat diperlakukan oleh anak buah Benny Murdani ? Jadi jurnalisme kita pertama membela kepentingan publik dan terutama orang-orang yang terzalimi.

Itu yang harus dibela. Ngak tahu apa-apa, lagi enak-enak makan di warung dibom sama teroris, apa salahnya dia wong dia bukan musuhnya teroris, mengapa mereka tidak pergi ke Israel, kalau mereka merasa musuh Islam adalah Israel mengapa mereka tidak pergi ke Israel saja, berjuang di sana. Ngapain ngebom-ngebom orang Islam sendiri, supir taksi lagi. Anak istrinya gimana kalau mati bapaknya?

Q: Dari hasil kajian teks ada temuan bahwa untuk laporan berita-berita teroris, narasumber yang dipilih adalah narasumber resmi seperti Densus 88 atau aparat kepolisian? Komentar Bapak?

Nggak ada kebijakan khusus, ini masalah akses saja. Memang sekarang ada perbedaan antara kelompok teroris jaman dulu dengan kelompok Alqaeda- Jemaah Islamiah. Kalau dulu itu mereka justru mengklaim, ini mereka lakukan sehingga media juga gampang melakukan ini. Sekarang khan susah, kita mau tanya siapa? Kalau kita mau melakukan azaz keberimbangan, kita harus nanya siapa? Bayangkan kalau pak Indi sebagai wartawan, mau pengen banget agar beritanya berimbang nih, ada pengeboman ..meledak terus mau nanya siapa nih? Polisi kasih keterangan yah kan, terus pelakunya bom bunuh diri sudah mati, terus mau nanya siapa karena nggak ada yang klaim yang melakukan siapa.

Artinya wartawan akhirnya mengambil narasumber yang available saja, khan kita nggak bisa ngarang-ngarang. Nanti kita bisa dianggap spekulatif gini gini. Jadi ini soal akses pada sumber yang bisa menceritakan tentang orang-orang ini. Misalnya kita cari soal Gayus, terus gayusnya nggak mau ngomong, keluarganya nggak mau ngomong, lawyernya nggak mau ngomong terus bagaimana wartawan?

Q: jadi kalau dikatakan bahwa terorisme dipandang musuh oleh wartawan sehingga perlu dilawan bagaimana komentar bapak?

Tergantung yah, tergantung wartawannya khan macem-macem. Ada wartawan yang kerjanya di kantor polisi karena dia kerjanya mencari sumbernya itu. Tapi kalau kita itu Tempo, kalau ada yang dapet dari kantor polisi kta juga ngambil informasi dari tempat lain. Tetapi problemnya dengan teroris ini, misalnya sengketalah antara pihak A dan pihak B, khan gampang si A ngomong si B ngomong. Sekarang bayangin soal teroris ini, misalnya ada yang ditangkap dan ditembak mati oleh Densus 88 reporter cari data yang bisa kasih keterangan khan polisi. Kita khan selalu berusaha cari saksi-saksi lain, saksi-saksi lain yang melihat misalnya ada masyarakat yang melihat dan mereka bilang nggak tahu tiba-tiba ada yang banyak dateng, atau mereka bilang 'orangnya tertutup, nggak pernah bergaul. Cilakanya begitu, kalau orang yang ditangkap ini begitu pas ditanya tetangga, pak RT orangnya bagaimana. Jawabannya orangnya tertutup, kalau pergi selalu pakai helm, nah ngak ada lagi seperti misalnya teroris jaman dulu seperti PLO kalau ada kejadian terus ada yang klaim siapa yang melakukan. Gam lah, paling gampang GAM, tiap kali TNI bilang begini tinggak telepon ke kantornya GAM, gimana versi GAM. Sekarang bagaimana? Kalau ada momen ini? Kita harus cari informasi kemana? Yah karena teroris sekarang mereka tidak memberi akses kepada media, padahal khan mereka bisa buka website, kalau takut ditangkap, khan kita tahu bahwa website ini mewakili apa. Dulu terhadap Al Jazera, mereka kirimkan video ke

Ini khan dapetnya dari penggerebegan , sekarang para teroris itu tidak memberi kesempatan buat kita untuk melakukan tugas kita?

Narasumber: Pepih Nugroho
Jabatan : Wartawan Kompas



1. Komentar mas Pepih tentang terorisme di Indonesia?

Terorisme di Indonesia dilakukan oleh kelompok radikal yang terorganisir. Saya tidak akan menyebut nama organisasinya, akan tetapi dari penyeragaman dan pelumpuhan yang dilakukan aparat kepolisian (Densus 88), teroris mengarah pada satu kelompok radikal keagamaan, yaitu Islam. Organisasi teroris, di manapun dia eksis, memiliki tujuan. Ada tujuan sampingan, ada tujuan utama. Ada

tujuan jangka pendek-menengah-panjang, sebagaimana sebuah organisasi. Menilik pada teroris di Indonesia, tujuan utama terorisme dengan melakukan pembunuhan dengan cara pengebomam (bom bunuh diri, misalnya), adalah mendirikan satu negara, atau satu kekhalifahan mencakup regional tertentu yang terbebas dari sekat negara. Bisa jadi, misalnya, bertujuan mendirikan kekhalifahan yang mencakup Asia Tenggara. Yang digoyang tentu saja pemerintahan yang sah, sedangkan simbol yang dianggap paling pas bagi pengacauan keamanan (bagi teroris) adalah dengan menjadikan aparat keamanan, dalam hal ini polisi (wa bil khusus Densus 88), sebagai musuh. Maka dalam beberapa peristiwa berdarah, polisi menjadi sasaran mereka (teroris). Belum pernah tersebut aparat pertahanan seperti tentara atau simbol-simbol pertahanan (Kodim, Korem, Koramil)

yang menjadi sasaran, yang terjadi adalah sasaran terhadap simbol kepolisian seperti Polsek, Polres, dst.

2. ada tidak pedoman di media anda saat meliput terorisme di Indonesia?

Pedoman untuk meliput apapun, termasuk berita terorisme, tentu saja Kode Etik Jurnalistik. Ada poin-poin di sana yang mengharuskan wartawan (media massa) melakukan cek dan cek ulang, tidak boleh menghakimi (cover both side), berimbang, adil, penayamanan identitas bagi tersangka, dan tidak boleh beropini, Itu panduan pada umumnya. Tetapi ada beberapa panduan khusus bagi media tertentu, katakanlah Kompas.com di mana sekarang saya sedang bertugas, bahwa sumber harus dari keterangan resmi, terutama dalam hal penyebutan terduga teroris. Tidak bisa terjadinya pengeboman yang mungkin dilakukan kelompok tertentu, dengan hanya mendapat keterangan warga atau pengamat, maka dugaan kelompok tertentu disebutkan secara jelas di media massa. Ketika terjadinya pembunuhan, penembakan, atau pengeboman yang melibatkan korban jiwa yang banyak, yang pertama-tama dilakukan wartawan dalam hal ini media adalah meliput/menulis peristiwa tersebut secara straight, lalu kemudian mengikuti perkembangannya detik ke detik.

3. apa sikap media anda terkait pemberitaan terorisme kelompok Islam garis keras?

Pemberitaan media massa Indonesia terhadap tersangka teroris garis keras mengerucut pada kelompok Islam garis keras. Ini harus dibuktikan baik di pengadilan maupun dari sisi intelijen. Sebab, kelompok lain yang bahkan mereka yang dikatakan "garis lunak" atau teror lain mengatasnamakan premanisme, keagamaan non-Muslim (kalau ada), akan menggunakan stigma ini untuk melakukan apapun yang mereka mau, meski sampai saat ini belum terbukti dilakukan. Islam garis keras dalam pemahaman saya, yaitu mereka yang tetap ingin mengubah haluan negara menjadi sebuah syariah yang mendunia, yang berlaku di manapun. Sedangkan Indonesia dianggap harus bisa menunjukkan dirinya (di sisi teroris) sebagai negara Islam terbesar, sehingga radikalisasi mereka dianggap harus dimulai di sini, di Indonesia, khususnya untuk kawasan Asia Tenggara.

4. Mengapa banyak media seperti Koran Tempo cenderung lebih mengutamakan sumber resmi dari Densus 88 dan sering mengabaikan sisi keluarga pelaku terorisme (yang mati ditembak) atau kelompok yang diduga terorisme seperti Ba'asyir dll?

Saya tidak tahu kebijakan koran lain, tetapi memang karena terorisme masuk kategori "berita sensitif", maka sumber resmi densus atau kepolisian, akan menjadi sumber paling kredibel dan aman. Bahwa kelak akan diliput dari sisi keluarga korban teroris, itu bisa saja dan masuk nilai berita menarik karena pembaca bisa mengetahui sisi lain dari keluarga teroris dan bahkan si teroris itu sendiri. Namun demikian, hal ini baru akan dilakukan ketika kepolisian sudah mengumumkan tersangka teroris (meninggal atau masih hidup). Kalau baru spekulasi, itu tidak akan dilakukan.

5. Menurut Mas, bagaimana sih terorisme di Indonesia itu? Apa yang menyebabkannya? dan bagaimana media seharusnya bersikap dalam menghadapi peristiwa terorisme?

Terorisme adalah cita-cita, bahkan ideologi. Karena ideologi, mereka menjalankan tugas atas dasar ideologi teror yang disepakati organisasi. Penyebab teror di Indonesia bukan semata-mata kekecewaan terhadap pemerintah, misalnya, lebih karena cita-cita (ideologi) mendidikan kekhalifahan itu, sehingga pada saat negara gagal (fail state) atau berhasil, mereka tetap melancarkan aksi teror mereka, sebelum cita-cita mereka tercapai dan menjalankan ideologi (syariah) di seluruh dunia. Media massa tentu saja harus memberitakannya, terutama memberi pemahaman kepada pembaca dalam mengidentifikasi (calon) pelaku yang biasanya berbau di lingkungan mereka, apa saja yang harus mereka lakukan (the news that we can use).

6. Apakah berita terorisme merupakan berita yang laku dijual oleh media? Alasannya apa sih?

Ya. Berita teroris laku dijual, karena di dalamnya ada KONFLIK, DRAMATISASI dan KETEGANGAN, yang memenuhi nilai-nilai berita yang akan diserap pembaca. Demikian.

Narasumber: TaufiqRahman
Jabatan : editor di Harian Republika



1. ada tidak pedoman di media Republika saat meliput terorisme di Indonesia?

--Secara spesifik tidak ada pedoman untuk liputan terorisme. Standar saja seperti liputan yang lain..cover both sides, mengedepankan azas praduga tak bersalah. Makanya kami biasa menggunakan sebutan terduga teroris. Karena cap teroris atau bukan menjadi

wewenang pengadilan

2. apa sikap media Republika terkait pemberitaan terorisme kelompok Islam garis keras?

--tidak ada perhatian secara spesifik sih. Kami justru menghantam kelompok-kelompok garis keras yang justru merusak citra Islam. Dengan FPI misalnya, kami tak segan mengungkap sisi negatifnya kalau memang negatif.

Kami seringkali bertanya-tanya juga sih..mengapa terorisme cenderung dikaitkan dengan islam? ada apa ini?

3.mengapa media khususnya Koran Tempo cenderung lebih mengutamakan sumber resmi dari Densus 88 dan sering mengabaikan sisi keluarga pelaku terorisme (yang mati ditembak) atau kelompok yang diduga terorisme seperti Ba'asyir dll?

--sumber-sumber resmi atau densus 88 untuk klarifikasi dari temuan temuan di lapangan. Karena dalam operasi terduga teroris seringkali bersifat tertutup. Karena itu polisi atau densus 88 menjadi sumber utama. Selain polisi tentu saja dilakukan kroscek di lapangan untuk memperkaya dan memperjelas pokok persoalan.

Tak semua terduga teroris dan keluarganya mau berbicara dengan kalangan pers

Baasyir termasuk salah satu orang--yang dicap sebagai teroris--, dan mau terbuka dengan kalangan pers.

4. Menurut Mas, bagaimana sih teorisme di Indonesia itu? Apa yang menyebabkannya? dan bagaimana media seharusnya bersikap dalam menghadapi peristiwa terorisme?

Aku melihat definisi terorisme kacau kalau di Indonesia, karena lebih banyak muatan politisnya. Aku juga meragukan terorisme yang sesungguhnya ada di Indonesia. Melihat kultur di Indonesia sangat susah menjadikan mereka teroris. Kalau imam samudra dan kawan kawan bisa menghancurkan bali, mereka punya potensi untuk kudeta dong.

Aksi teror seringkali sporadis. Pengungkapan aksi terduga teroris atau penangkapan mereka seringkali memiliki relasi dengan kondisi di Jakarta. Terorisme seringkali menjadi semacam pengalihan isu publik.

Blow up penangkapan teroris seperti dilakukan TV One menjadikan publik semakin tahu kalau isu teroris seperti main-main saja. Ia seperti sinetron dan menjadikan publik semakin tidak percaya dengan isu terorisme. Media sebaiknya wajar saja mensikapi soal ini serta lebih cerdas lagi dalam mengungkapkan fakta-fakta yang ada di lapangan.

5. Apakah berita terorisme merupakan berita yang laku dijual oleh media? Alasannya apa sih

situasional saja sih kayaknya..masyarakat seperti sudah mulai bosan dan paham bahwa terorisme tak lebih dari aksi kriminal biasa yang dikemas menjadi aksi teroris.

Terorisme masih kalah populer dengan isu korupsi, sepakbola, atau timnas PSSI yang lagi naik daun

Date 9 Desember 2013

Narasumber : IB Alit Wiratmadja

Wartawan Senior, LPP RRI



Apa komentar bapak sebagai seorang wartawan senior mengenai pemberitaan soal terorisme di Indonesia?

Sepanjang itu fakta kenapa tidak? Tetapi perlu diingat bahwa media harus mendukung upaya pemberantasan terorisme di Indonesia mengingat bahwa masih banyak sel-sel

terorisme di Indonesia misalnya di Poso, itu ibarat api dalam sekam. Sehingga 'yang anti' teror itu masih diperlukan

Mengapa media khususnya Koran Tempo cenderung mengandalkan sumber resmi seperti polisi dan Densus 88 ketimbang cover both side memberi kesempatan yang sama kepada para tersangka atau tertuduh teroris dan keluarganya?

Ya memang Densus 88 itu khas sifatnya operasional, kalau mau netral memang wawancara kepada Kabid Humas sebagai jurubicara

kepolisian atau kalau bisa langsung Kapolri. Tetapi memang persoalan terorisme itu kan banyak, ada yang masih dalam taraf penyidikan, ada yang penyelidikan sehingga mungkin ada yang tidak perlu diungkapkan ke media. Mungkin terkadang media hanya diberikan latar belakang, tidak semua persoalan terkait terorisme harus diungkapkan ke masyarakat lewat media, mungkin karena masih dalam fase penyelidikan.

Dalam peliputan terorisme memang kita tidak bisa hanya cover both sides, tetapi multi sides wartawan harus juga melihat dampak dari pemberitaan terorisme, dampaknya pada keluarga korban, dampaknya kepada psikologi keluarga korban, dampaknya pada ketakutan rakyat banyak. Juga harus dipertimbangkan keamanan negara, Negara harus menjamin keamanan rakyatnya dan terorisme sebagai musuh negara harus diberantas habis

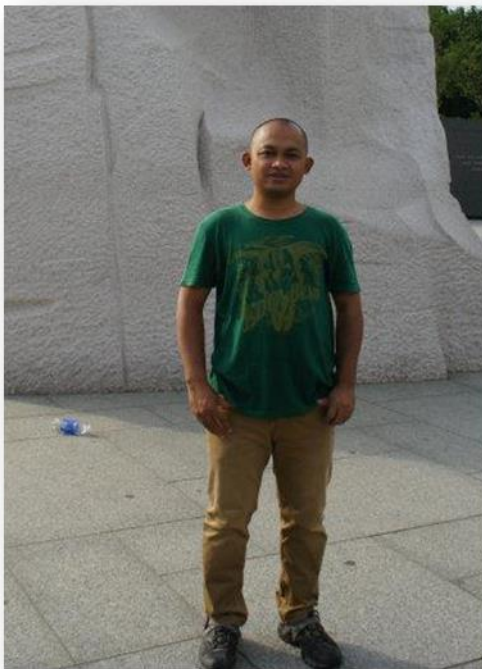
Apakah media menganggap teroris sebagai musuh bersama sehingga terkadang media mengabaikan nilai-nilai jurnanisme seperti keseimbangan narasumber ?

Perlu disadari bahwa kita tidak mau negara Indonesia ini disebut sebagai sarang teroris, sehingga wajar saja kalau media sendiri tidak mau dijadikan semacam 'corong' dari terorisme. Media lebih mengutamakan kepentingan rakyat banyak yang memang tidak menyukai terorisme. Sehingga wajar saja, media cenderung mengungkap peristiwa saja, menggunakan sumber-sumber resmi seperti Densus 88 dan Kepolisian dan menerapkan prinsip peace journalism yang mengedepankan solusi atas persoalan rakyat. Media dalam hal terorisme akan berada di belakang pemerintah untuk melawan bersama.

Date 9 Desember 2013
Narasumber : Marula Sardi
Wartawan Rakyat Merdeka

ada tidak pedoman di media anda saat meliput terorisme di Indonesia?

Ada. Dalam meliput terorisme redaksi ditugaskan untuk meliput peristiwa dibanding pernyataan. Biasanya diminta untuk menggambarkan situasi di lokasi kejadian. Opini tentang pelaku mengaitkan dengan Islam diminimalisir



apa sikap media anda terkait pemberitaan terorisme kelompok Islam garis keras?

Kami menghindari mengaitkan Islam dengan terorisme

mengapa media khususnya Koran Tempo cenderung lebih mengutamakan sumber resmi dari Densus 88 dan sering mengabaikan sisi keluarga pelaku terorisme (yang mati ditembak) atau kelompok yang diduga terorisme

seperti Ba'asyir dll?

Itu kebijakan redaksi tempo. Tapi kalau merujuk pada ideologi media, tempo lebih menjadi corong barat. Dia begitu keras dengan Islam dan terorisme. Namun soal feminisme misalnya sangat mendukung.

Menurut Mas, bagaimana sih terorisme di Indonesia itu? Apa yang menyebabkannya? dan bagaimana media seharusnya bersikap dalam menghadapi peristiwa terorisme?

Terorisme di Indonesia sudah kurang menarik lagi. Tiga tahun terakhir tidak ada berita besar soal teroris. Yang menarik justru sekarang muncul asumsi kalau densus menangkap teroris, isu politik apa yang dikaburkan. Pandangan itu juga ada pada wartawan.

Apakah berita terorisme merupakan berita yang laku dijual oleh media? Alasannya apa sih?

Terorisme bisa menarik melihat besaran kejadiannya. Kalau cuma densus menangkap dan membunuh teroris paling cuma menempati ruang kecil di halaman depan. Tapi kalau bom besar baru jadi isu Besar.

Tanggapan bapak soal pemberitaan terorisme di Indonesia?

terrorism itu "barang"baru bagi masyarakat indonesia yg secara historis



turun temurun hidup dlm kekerabatan sosial....sesuatu yang dipaksakan harus ada di indonesia oleh kepentingan-kepentingan global yg bersifat fundamentasm yang bergerak secara "tertutup" di lingkungan eksklusif , sementara orang-orang indonesia yang humble dengan kualitas pendidikan formal tapi fanatik dimanfaatkan dan terjerumus melakukan itu

mengikuti agenda kepentingan fundamentalism itu..

Dengan kata lain,terrorism tersebut ibarat hantu tanpa bentuk dan dicreate oleh elemen-elemen yang berkepentingan dan densus a.n pemerintah untuk sebuah tujuan yang jujur saja merupakan barang asing bagi awam indonesia termasuk pers, makanya sumbernya hanya sepihak dan pers sepertinya telah dikondisikan untuk hanya pegang sumber yang satu itu tanpa mengeksplor lebih dalam dengan cara pers sendiri. Saya pribadi pikir pers kita terjebak dlm agenda pemerintah, karena jarang ada pemberitaan berdasar investigatif

Date: 6 Desember 2013

Narasumber : Yudhono Yanuar Akhmadi

Redaktur Utama Internasional-Nusa Majalah-Koran dan Online Tempo



**Apa yang anda
mengerti soal
Terorisme di
Indonesia?**

Terorisme di Indonesia baru mencuat setelah menurunnya kontrol negara terhadap kehidupan bermasyarakat di akhir rezim Soeharto. Setelah itu, terorisme makin subur seiring dengan kebebasan berdemokrasi di era Reformasi.

Apa penyebab

terjadinya terorisme?

Akar dari terorisme adalah ketimpangan kesejahteraan dan pendidikan, sehingga orang yang tengah terpuruk dan kurang berpendidikan, gampang dipengaruhi kelompok tertentu untuk direkrut menjadi teroris.

bagaimana langkah polisi dan penegak hukum mengatasi terorisme?

Langkah polisi dan pemerintah untuk tindakan kuratif melawan terorisme cukup berhasil, tapi upaya pencegahannya masih kurang. Ini terlihat dari terus bertambahnya jaringan teroris meski para pentolan sekelas Noordin M Top, Ashari, kelompok lamongan dll tertangkap.

Bagaimana Koran Tempo memandang terorisme yang dilakukan sempalan Islam garis keras di Indonesia?

Koran tempo memandang terorisme sebagai musuh bersama yang harus diperangi. Koran tempo tidak mau terlalu gencar memberitakan 'keinginan' para teroris, karena koran Tempo tidak mau dijadikan alat atau corong buat terorisme dalam segala aksi mereka.

Bagaimana teknik pemberitaan terorisme di Koran Tempo?

Koran tempo tetap harus memegang prinsip praduga tak bersalah. Pemberitaan tentang terorisme dan teroris yang sudah terbukti tetap harus menyertakan keterangan dari pihak teroris. Ini semata-mata untuk memberikan peliputan yang utuh. Berita terorisme masih menarik utk jadi HL, namun harus besar magnitude nya. bila tokoh terorisnya termasuk gembong, kerusakan yg ditimbulkan cukup besar misalnya, maka berita terorisme bisa jadi HL. Enggak ada intervensi dari pemilik Tempo atau pihak lain seperti Goenawan Mohammad. Pemilik tempo mayoritas adalah karyawan melalui Yayasan karyawan. Sebagian lain dipegang perorangan dan publik.

Narasumber : Efri NP Ritonga <ucok_r@tempo.co.id>
Redaktur Desk Nasional Koran Tempo
Date : Sat, 7 Dec 2013 12:56:45 +0700
Subject : Transkrip Wawancara



- 1. Apa pedoman 'resmi' bagi wartawan Tempo saat meliput dan memberitakan soal terorisme?**
-Tidak ada pedoman khusus bagi peliputan terorisme. Standar saja yakni sesuai dengan kode etik jurnalistik, berimbang, berpihak pada kepentingan publik, tidak berprasangka, terus-menerus menggali kebenaran di balik cerita, dan menyajikan berita sesuai fakta.

2. Apakah berita terorisme merupakan berita penting dan layak diberitakan untuk meningkatkan oplah Koran Tempo? Ataukah ada kebijakan internal yang mengharuskan pemuatan berita tersebut?

*-Tidak ada kebijakan yang mengharuskan pemuatan berita terorisme atau berita apa pun juga. Setiap berita yang akan dimuat di Koran Tempo harus lolos seleksi layak berita. Kriterianya antara lain: **dampaknya** bagi kepentingan masyarakat, apakah melibatkan **tokoh** penting atau tidak, apakah memberi **inspirasi** atau tidak, seberapa **dahsyat** peristiwanya, dan ada unsur **kebaruan**.*

3. Mengapa Koran Tempo lebih sering mengutip sumber resmi (densus 88) dan kurang memberi tempat buat narasumber dari kelompok/orang atau keluarga tersangka teroris yang diberitakan?

-Tidak pernah ada penjataan berita di Koran Tempo. Kembali saja ke lima kriteria layak berita di atas. Informasi dari siapa yang masuk kategori layak berita? Apakah dari Kepolisian atau keluarga tersangka terorisme?

4. Pendapat Anda tentang terorisme Indonesia yang berdasarkan faham agama/aliran agama tertentu?

-Terorisme di Indonesia ada karena sebagian kecil masyarakat mendukung atau minimal toleran terhadap gerakan tersebut.

5..Apakah wartawan yakin dan selalu percaya pada pendapat Densus 88 soal terorisme? Kalau tidak percaya dan yakin apa yang dilakukan wartawan?

-Wartawan tidak boleh percaya mentah-mentah kepada semua narasumbernya, termasuk Kepolisian. Informasi lisan harus didukung dengan dokumen, reportase, dan diuji dengan pernyataan dari pihak-pihak lain.

Dalam konteks terorisme, Koran Tempo selalu mencari bukti pendukung, mewawancarai polisi, TNI, pakar, anggota keluarga tersangka, warga setempat, dan menerjunkan tim ke lapangan. Semua informasi yang diperoleh disaring, dianalisis, diperdebatkan sampai didapat rangkaian cerita yang bisa dipertanggungjawabkan.

Narasumber : Benny Siga Butarbutar
Jabatan : Kepala Redaktur Internasional Perum LKBN
ANTARA Mantan Pengurus PWI Jaya
Tanggal : 23 November 2013



Apakah pemberitaan soal terorisme di Koran Tempo terpengaruh gaya Goenawan Mohammad yang cenderung antipati terhadap gerakan Islam Garis Keras dan teorisme?

“ Hal itu wajar saja, karena Koran Tempo adalah bagian dari Group Tempo yang

dulu dibidani oleh Goenawan Mohamad. Sosok Goenawan ini pasti akan mempengaruhi semangat semua wartawan dan redaktur yang bekerja di Koran Tempo. Sikapnya yang kritis terhadap kelompok Islam fundamentalis itu erat kaitannya dengan kelompok Islam Liberal yang disokongnya, pasti sedikit banyak berpengaruh pada kebijakan redaksi mereka saat menggambarkan terorisme.”

Mengapa Koran Tempo menjadi tidak kritis terhadap pemerintah khususnya dalam pemberitaan terorisme?

"kebijakan Koran Tempo adalah kebijakan yang sama dengan kebijakan Tempo yang menganggap bahwa terorisme apalagi yang didukung oleh kelompok radikal atau kelompok Islam garis keras harus dianggap sebagai musuh bersama. Kekritisan Tempo dalam menulis berita-berita yang menyangkut kebijakan dan politik Orde Baru seakan hilang tak berbekas saat menulis dan menyiarkan berita-berita terorisme. Contoh yang paling terasa, saat pemberitaan tersangka terorisme yang ditembak mati oleh petugas Densus 88, Koran Tempo begitu saja percaya pada keterangan sumber kepolisian dan tidak melakukan investigasi sendiri.

Bagaimana sikap Tempo pada pemerintah Orde Baru? Sekarang bagaimana?

" Dulu Tempo dikenal kritis terhadap narasumber pemerintah , khususnya Orde Baru. Tempo tidak akan begitu saja menerima informasi dari mereka. Mereka akan melakukan cek ricek , bahkan kalau perlu wartawannya melakukan investigatif reporting. Tetapi dalam pemberitaan kasus-kasus terorisme, Koran Tempo cenderung percaya saja pada info dari Densus 88 atau Kepolisian. Kayaknya mereka tidak melakukan cek ricek apalagi melakukan investigatif reporting,"

LAMPIRAN 6

Pemberitaan Terorisme Koran Tempo Agustus 2010- Desember 2010

No/tgl	JUDUL	Narasumber	Inti persoalan yang coba diungkapkan
10/8/ 2010	Ceramah Ba'asyir Sebelum Ditangkap: "Demokrasi Itu Kurang Ajar"	Kepala Bareskrim Mabes Polri Komisaris Jenderal Ito Sumardi dan hasil reportase wartawan Koran Tempo sendiri (Koran Tempo sendiri melakukan kegiatan reportase dan mengutip narasumber penting dari kepolisian, tetapi tidak memberi ruang dan kesempatan Baasyir untuk berbicara membela diri atau sekedar perbandingan informasi)	-Koran Tempo mencoba mengkaitkan soal penangkapan Baasyir dengan ceramah Baasyir yang menilai bahwa demokrasi itu kurang ajar dan tidak sesuai dengan ajaran Islam. -Di sisi yang lain, pihak berwenang mencoba mengkaitkan penangkapan Baasyir dengan adanya dugaan keterlibatan sosok itu dalam

			sejumlah aksi terorisme di sejumlah daerah
10/8/10	Diburu Sepanjang Waktu	hasil reportase wartawan Koran Tempo	Baasyir diburu sepanjang waktu oleh aparat keamanan dan Densus 88 terkait dugaan sebagai otak penggerak terorisme
10/8/10	Ba'asyir Dituding Terlibat Terorisme di Aceh	<ul style="list-style-type: none"> -Kepala Bareskrim Mabes Polri Komjen Ito Sumardi -Kadiv Humas Polri Edward Aritonang -anggota tim pengacara Muslim Mahendrata -hasil reportase wartawan Koran Tempo sendiri 	<p>Baasyir dituding terlibat aksi terorisme di Aceh dengan berbagai fakta terkait dengan hal tersebut</p> <ul style="list-style-type: none"> -Baasyir ditangkap karena diduga memiliki hubungan dengan kelompok teroris di Aceh -Basyir dituduh merestui bahkan memberi dana pada kelompok

			<p>terorisme yang dipimpin oleh Abdullah Sunata</p> <p>-Baasyir juga dituduh terlibat berbagai aksi terorisme di sejumlah daerah tak hanya di Aceh</p> <p>-ikut merestui dan memberi dana untuk pelatihan teroris di Aceh</p> <p>-Polisi menduga Baasyir berperan besar dalam kegiatan aksi terorisme di Aceh, terbukti dengan melantik sejumlah pengurus, dan mendapatkan semua laporan soal kegiatan pelatihan senjata teroris di Aceh dari Abu Tholut pengelola lapangan dalam</p>
--	--	--	---

			kegiatan pelatihan tersebut
10/8/10	Ba'asyir Diincar sejak di Bulukumba	<ul style="list-style-type: none"> -Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Forum Umat Islam Bulukumba, Musyafir -wandy pengikut fanatic Baasyir -Pimpinan Muhammadiyah Bulukumba, H.Kamaludin -KH Muhammad Mahdi Hatma ketua MUI Bulukumba -hasil reportase wartawan Koran Tempo 	<p>Sepak terjang Baasyir yang telah diincar sejak ceramah di Bulukumba pada tahun 2009 ,</p> <ul style="list-style-type: none"> -Basyir mengaku bahwa dirinya dincar polisi sejak 2009 -FUI tidak percaya bahwa Baasyir memang terlibat dalam aksi terorisme -Dalam ceramahnya di Bulukumba, Baasyir tidak pernah menganjurkan untuk melakukan aksi pengeboman atau melakukan penyerangan kepada warga non muslim -FUI yakin bahwa Baasyir

			<p>tidak terlibat dan penangkapan Baasyir adalah pesanan dari amerika serikat karena tidak mungkin Baasyir mendanai kegiatan terorisme</p> <p>-Apa yang disampaikan Baasyir sesuai tuntunan Islam, tidak sesat atau ada amalan yang merugikan orang lain,</p> <p>-</p> <p>kedatanganny a saat berceramahdi Bulukumba juga dikawal polisi dan mengantongi izin</p> <p>-penangkapan Baasyir sebaiknya berlandaskan bukti yang kuat bukan hasil rekayasa,</p> <p>-Baasyir</p>
--	--	--	--

			merupakan tokoh agama dan pemimpin pesantren yang selalu menyuarakan kebaikan jadi sulit dipercaya kalau dia terlibat aksi terorisme
10/8/10	FPI Menilai Ba'asyir Korban Rekayasa	-Ketua FPI Muhammad Rizieg Shihab -Kadivhumas Polri Edward Aritonang	FPI menilai Baasyir adalah korban dari rekayasa, bukan pelaku terorisme sebagaimana dituduhkan dan disangkakan oleh aparat keamanan atau Densus 88 -Ba'asyir adalah korban rekayasa isu terorisme dan dituding sebagai orang yang mendanai aksi terorisme di Aceh -Ada temuan lain dari tim investigasi FPI

			<p>yang menemukan fakta bahwa teoris Aceh itu dibiayai oleh Sufyan Sauri disertir anggota Brigade Mobil Polri yang juga merekrut dan melatih militer di Aceh</p> <p>-Sofyan telah dipecat dari kepolisian, namun pada february 2009 Sufyan mengirim kelompok militan Aceh ke Jakarta. Anehnya mereka berlatih menembak di markas Brimob, berlatih dengan senjata AK-47 dan 50 peluru tajam dalam satu sesi</p> <p>-Sufyan diduga merupakan tokoh sentral dalam</p>
--	--	--	--

			<p>pelatihan kelompok militan di Indonesia. Ada pun Ba'asyir sekedar dijadikan tumbal.</p> <p>-Polri membantah temuan FPI, Sufyan yang ditahan polisi bukan dari Brimob tetapi dari Sabhara Polres Depok yang dipecat karena tidak pernah masuk</p> <p>-Sufyan masuk kelompok Oman Abdurrahman tersangka bom Cimanggis dan dibawa untuk pelatihan ke Aceh</p>
10/8/10	Kesaksian dari Tanah Rencong Jerat Ba'asyir	<p>-Kepala Divisi Humas Edward Aritonang</p> <p>-Kepala Badan Reserse Mabes Polri Ito Sumardi</p> <p>-Imam Masjid</p>	<p>Kesaksian para pelaku dan saksi dari aksi terorisme di tanah Aceh, justru memberatkan</p>

		<p>Agung Kota Banjar H Mahfud Sidiq (semua narasumber yang dipilih tak ada satupun yang membela atau berempati kepada Baasyir. Bahkan, Baasyir sendiri tidak diberi tempat atau space untuk berbicara. Semua informasi yang didapatkan wartawan hanya dari pihak aparat keamanan dan petinggi Mabes Polri</p>	<p>dan menjerat Ba'asyir sebagai pelaku terorisme Ada benang merah yang bisa dikaitkan antara Baasyir dengan aksi terorisme yang terjadi selama ini</p> <ul style="list-style-type: none"> -ini murni masalah hukum,tak ada kaitannya dengan pengalihan isu atau isu lain yang sedang menjadi perhatian public -narasumber yang dipilih semua menyudutkan Baasyir sebagai pihak yang terkait dengan aksi terorisme di sejumlah daerah -Imam Masjid Agung Kita Banjar H Mahfud Sidiq
--	--	---	--

			tidak mengira kalau Baasyir terlibat, karena sepengetahuan dia apa yang diceramahkan oleh ustad tersebut hanya tafsir Al Quran semata.
10/8/2010	Sebelum ditangkap, Ba'asyir Kecam Demokrasi	<ul style="list-style-type: none"> -Ba'asyir -Tokoh JIL, Uliil Abshar Abdalla -Anggota Komnas Ham, Yoseph Adhi Prasetyo 	<ul style="list-style-type: none"> -Sebelum akhirnya ditangkap, Baasyir sempat mengecam demokrasi yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam -Menurut Ba'asyir Ahmadiyah dan JIL adalah golongan murtad. Mereka dibentuk orang kafir untuk merusak dan mengobok-obok Islam dari dalam. -Menurut Ba'asyir kedua gerakan ini

			<p>merupakan serangan 'Ghazwul Fikri' (perang pemikiran) yang dianggapnya perang yang lebih berat daripada diperangi dengan senjata, karena itu dia mendesak agar Ahmadiyah dan JIL diusir dan diperangi</p> <p>-Tokoh jaringan Islam Liberal, Ulil Abshar Abdalla, mengatakan justru pemikiran Ba'asyir itulah yang kacau. "Tokoh-tokoh yang lebih pintar dari Ba'asyir juga tidak pernah mempermasalahkan demokrasi," kata Ulil</p>
10/8/	Sang Amir yang	-Ba'asyir	-Sejak lama

2010	sudah lama diincar	<p>-Jubir Kepolisian,Edwar d Aritonang</p> <p>-Mahendradata, tim pengacara muslim</p>	<p>Amir atau pemimpin besar kelompok Islam garis keras ini diincar</p> <p>- Polri semakin yakin soal dugaan keterlibatan Ba'asyir setelah menangkap Ubeid atau Luthfi Haesdaroh pada 12 April lalu di Medan</p> <p>-Ubeid mengaku pernah ada pertemuan dengan Ba'asyir membahas soal latihan di Aceh</p> <p>-Menurut Polisi, dugaan keterlibatan Ba'asyir dalam aksi terorisme makin mencuat setelah penggerebeg-an di Cibiru Bandung, akhir</p>
------	---------------------------	---	--

			<p>pekan lalu. Dari tempat ini, tim antiteror menangkap lima orang yang diduga teroris. "Pelatihan militer di Aceh dan rencana kegiatan di Cibiru berkaitan dengan Abu Bakar Ba'asyir.</p>
14/10/2010	<p>Polisi Yakim Mustawan Anggota JAT</p>	<p>-Wakil Jubir Mabes Polri, Kombes Ketut Untung Yoga -Muhammad Ahwan, pemimpin JAT -Kepala Bidang Penerangan Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Malaysia, Widyarka Ryananta</p>	<p>Polisi yakin Mustawan Ahabab WNI yang ditangkap di Kuala Lumpur adalah anggota Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) -Mustawan diduga bagian dari jaringan teroris yang beroperasi di Malaysia dan Indonesia -Pernyataan itu dibantah oleh Pemimpin JAT, karena</p>

			tidak ada anggota JAT bernama Mustawan - Menurut Ahwan, Polisi selalu mengait-ngaitkan jaringan teoris dengan Abu Bakar Ba'asyir. "Seolah-olah Ustad Abu yang komando, sangat tendensius...
14/8/2010	Pengacara Bantah Ba'Asyir Danai Latihan Militer	-Ahmad Michdan dari Tim Pembela Muslim -Wirawan Adnan pengacara Ba'asyir -Jubir Mabes Polri, Edward Aritonang	-Ada bantahan dari pengacara Ba'asyir soal Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) yang dibentuk Ba'asyir mendanai pelatihan militer di Aceh -Ahmad membantah berita Koran Tempo, 13 Agustus 2010 yang berjudul Ba'asyir akui Danai latihan Militer -Ahmad hanya

			menyebutkan saat diwawancarai Tempo, bahwa sejumlah organisasi Islam, termasuk JAT sudah lama terlibat dalam pelatihan ala militer di Aceh, namun dia tidak mengatakan bahwa JAT membiayai pelatihan tersebut
14/08	Terdakwa Teroris Dituntut 12 Tahun	- Feritas, Jaksa penuntut Umum -Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Muhammad Yusuf	-Tiga peserta pelatihan militer kelompok teroris di Jalin Jantho Aceh Besar, Aceh dituntut hukuman 12 tahun penjara -Terdakwa mengakui telah mengikuti pelatihan militer untuk tujuan ber jihad, memakai senjata api

			<p>illegal.</p> <p>-yang memberatkan, perbuatan mereka telah menimbulkan keresahan dan menciptakan ketakutan di masyarakat karena ikut dalam rangkaian kegiatan terorisme</p>
16/08/10	<p>Ba'asyir-Dulmatin Dituduh Rancang Latihan Militer</p>	<p>-Ubaid Al Luthfi Haidaroh Aktivis JAT yang ditangkap pada Maret 2010 setelah ikut pelatihan militer di Aceh</p> <p>-investigasi Tempo</p> <p>-Dokumen laporan kegiatan pelatihan militer di Aceh</p> <p>-Kuasa Hukum Ba'asyir , Achmad Michdan dari Tim Pengacara Muslim</p> <p>-Kepala Bidang Penerangan Umum Kombes</p>	<p>-Ba'asyir diduga pernah bertemu Dulmatin pada Februari 2009 di sebuah rumah di Ngruki Sukoharjo membicarakan soal pelatihan militer di wilayah Aceh</p> <p>-Ubaid mengaku ikut hadir pada pertemuan antara Ba'asyir dan Dulmatin, buron tersangka teroris yang telah ditembak</p>

		Marwoto Soeto	<p>mati oleh polisi di pamulang Banten 9 Maret lalu</p> <p>-Dari hasil pemeriksaan polisi, Ubaid mengaku bahwa pada pertemuan itu Ba'asyir memberikan Rp 180 juta dan US \$ 5000 kepadanya pada November 2009 di Surakarta</p> <p>-Setelah uang ada ditangan Ubaid, bersama Machfud tersangka lain, berangkat ke Jakarta, kemudian mengantar uang ke kontrakan Dulmatin di Ciputat</p> <p>-Pengakuan Ubaid, Dulmatin juga meminta dana lain dan terakhir dia</p>
--	--	---------------	--

			<p>mendapat kucuran dana sebesar 10 juta rupiah pada awal 2010</p> <p>-Dari hasil pemeriksaan, lokasi pelatihan militer ada di bukit Krueng Linteung, seperti yang dilaporkan ke Ba'asyir</p> <p>-Pengakuan Ubaid ini dibantah oleh Ba'asyir lewat pengacaranya, dan mengatakan bisa saja pengakuan itu di bawah tekanan sehingga tidak bisa dipercaya</p>
16/8/2010	<p>Robert W.Hefner: Penentang Demokrasi Seperti Ba'asyir Sangat Minoritas</p>	<p>-Robert W.Hefner (peneliti Indonesia)</p>	<p>- Ba'asyir lebih menarik sebagai figure politik</p> <p>-Pandangan Ba'asyir terhadap syariah dan politik</p>

			<p>sebetulnya cukup umum di kalangan Islam Konservatif seperti di Pakistan</p> <p>- Sekitar 20 sampai 30 di Pakistan sama seperti Ba'asyir berpendapat bahwa demokrasi bertentangan dengan Islam</p> <p>- padahal 70 - 80 persen penduduk muslim di dunia ini menganggap Islam bukan hanya tidak bertentangan dengan demokrasi, mereka juga menganggap Islam adalah system yang baik dan diharapkan bias diterapkan di Negara mereka</p> <p>- Baa'syir terkesan</p>
--	--	--	---

			<p>menolak gagasan demokrasi, itu juga penolakan terhadap institusi pemerintah dan institusi media</p> <p>-Gagasan menolak demokrasi (di kalangan Muslim seperti Ba'asyir) sudah ada sejak 1970-an, kemudian mulai lebih aktif pada 1999 setelah reformasi. Tapi gagasan itu tidak bisa diterima, banyak orang khawatir akan masa depan mainstream Islam</p> <p>-Orang Islam sudah mengerti mereka sudah mempraktekkan demokrasi selama sebelas tahun</p>
--	--	--	--

21/09/ 2010	Teroris Di balik Perampokan Medan	-Kapolri, Jenderal Bambang Hendarso Danuri	-Perampokan bersenjata yang menyerang Bank CIMB Niaga Medan pada 18 agustus 2010 dilakukan kelompok teroris yang selama ini diburu polisi -Kelompok perampok ini telah melakukan aksi serupa di sejumlah bank dan tempat penukaran uang Showroom kendaraan dan bank lain -hasil perampokan dipakai untuk membiayai rencana operasi terorisme,term asuk untuk pelatihan militer serta pembelian senjata -itu yang
----------------	--	--	---

			<p>disebut sebagai dana Fa'I .Dana dikumpulkan dari hasil perampokan yang mereka halalkan</p> <p>-Densus 88 mengindentifikasi ada 33 anggota jaringan ini. Mereka juga terkait dengan jaringan teroris yang melakukan latihan militer di Aceh</p> <p>-Sebanyak 18 anggota jaringan ditangkap. 3 diantaranya tewas, dan sekitar 15 yang lain diburu</p>
--	--	--	--

TENTANG PENULIS



**INDIWANI SETO WAHJU
WIBOWO**

ALAMAT : Perum Cimone
Permai Kodya Tangerang
Jalan Zeta Raya 112
Telp. 021 5513947
HP 082112297660 E-mail:

Indiwan_seto@yahoo.co.id

indiwanx@gmail.com

Dosen Ilkom UMN dan
CEO dan peneliti Rumah
Pintar Komunikasi, kelompok
penggiat komunikasi, peneliti
isi media, semiotika dan

framing dan provider pelatihan jurnalistik dan workshop metode
penelitian Komunikasi dan penulisan buku komunikasi

Website <http://www.rumahpintarkomunikasi.com>

PENDIDIKAN:

1992 lulus S1 Jurusan Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

2003 lulus S2 Komunikasi program Pasca Sarjana Fisip Universitas Indonesia Depok

Tesis: Pembunuhan Karakter Dalam Berita Pers
(Studi Kasus Perlakuan Sejumlah Penerbitan Pers Terhadap Karakter Abdurrahman Wahid saat menjadi presiden, sebuah analisis semiotika)

2008-2014 program Doktorat Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia

2009 Lulus Uji kualifikasi S3 sebagai syarat penulisan disertasi doktorat komunikasi

2014 lulus S3 Komunikasi Universitas Indonesia

RIWAYAT PEKERJAAN:

- 1990 Reporter Radio Unisi Yogyakarta
- 1990-1991 Koresponden Harian Sore Wawasan Semarang
- 1992 Calon Reporter LKBN ANTARA Jakarta Jl.Merdeka Selatan 17
- 1993 Wartawan Tetap LKBN ANTARA
- 1996-1999 Kordinator reportase desk nasional
- 2003-2004 Penanggung jawab Liputan Berita Seni Budaya dan Hiburan
- 2000-kini Dosen Lembaga Pendidikan Jurnalistik Antara (LPJA)
- 2001-2004 Dosen tidak tetap Fikom Universitas Mercubuana Jakarta
- 2001-2010 Dosen Jurnalistik, Humas dan Periklanan di Universitas Prof Dr Moestopo (B) Jakarta
- 2004-2010 Dosen tidak tetap The London School Of Public Relations Jakarta
- 2005-2009 Kepala Departemen Pendidikan Jurnalistik Perum LKBN ANTARA
- 2009-2012 Editor/Redaktur senior ANTARA NEWS AGENCY Jakarta for Special News
- 2010-kini Dosen tetap pada Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara Gading Serpong Tangerang Banten,
www.umn.ac.id
- 2011-kini Instruktur Nasional / Widyaiswara Diklat Pranata Humas Kementerian Komunikasi dan Informasi

INDEKS

Abu Bakar Ba'asyir

5, 45, 46, 47, 91, 120, 125, 127, 216

Ahmadiyah

109, 143, 148, 150, 167, 172, 182, 211, 215, 219

Al-Qaeda

1, 12, 198

Analisis Wacana

27, 28, 46, 47, 48, 56, 65, 74, 75, 76

Bambang Harymurti

198, 204, 231, 264 ,

Bom Bali

230, 231, 263

Database soal terorisme

33

Densus 88

3, 6, 9, 10, 11, 19, 27, 56, 75, 120, 128, 136, 141,
143, 144, 157, 158, 159, 160, 166, 169, 179, 180, 188, 191, 194,
197, 201, 202, 208, 209, 210, 212, 217, 218, 222

Ekonomi politik terorisme

34, 35

Elemen Jurnalisme

66, 73, 106

Fai

137, 140, 188, 217, 227, 237, 246, 258, 259, 263, 271

Ghazwul fikri

109, 249, 297

Ideologi Islam

210

Islam

2, 3, 5, 15, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 37, 38, 40, 43, 44, 45,
46, 48, 54, 82, 86, 87, 90, 91, 99, 101, 104, 105, 109, 110, 120, 121, 122, 134,
142, 143, 145, 146, 148, 149, 150, 153, 154, 164, 167, 169, 172, 173,
181, 182, 183, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 197, 198, 202, 215

Islam Liberal

109, 211, 215, 219

Islam garis keras

2, 3, 5, 21, 22, 26, 27, 28, 48, 54, 82, 86, 87, 99, 101, 105, 109,
146, 148, 164, 173, 183, 189, 191, 193, 198, 239, 247, 248, 260, 266

Inklusi

161,162,163,164,217,218

Jamaah Anshorut Tauhid

47,120,121,124,125,127,128,141,
146,154,164,218,233,244,255,262,298,299

Jurnalisme advokasi

165,166

Kafir

109, 138, 140, 143, 148, 167, 210, 211, 215, 217, 219, 249,259,295

Konstruktivisme

28,82,84

Nilai berita

50, 57,62,63,65,104,107,111,114,116,119,123,125,127,130,
133,136,139,176,190,202,204,215,271

Pancasila

105,120,121,146,166,167,210,211,212,215,216,220,221,252

Representasi

1,3,5,27,28,36,46,47,48,51,52,53,54,55,56,57,73,75,76,86,
103,104,105,106,107,108,109,111,113,115,119,120,121,122,123,126,1
27,130,131,133,136,139,140,149,162,166,167,215,216,217,218,220,22
1,243,247,250,260

Riset soal terorisme

33

Syariat Islam

210,252

Syirik

210,211

Terorisme

1,3,4,5,6,9,10,11,12,13,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,
35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,54,56,61,62,63,6
4,65,70,71,72,73,74,75,79,82,85,86,87,88,
90,91,100,101,104,105,110,111,112,113,114,118,119,120,
121,122,123,127, 130,133, 136, 137, 138, 139, 140, 143, 146, 147,
148,149, 150, 151,166,167,168,163,164,165,170,171,
173,174,175,176,177,179,180,181,182,183,184,
185,186,187,188,189,190,191, 192,193, 194, 195,202,204, 205,
206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,
219,220,221,222,223

Terorisme Aceh

162,216,220

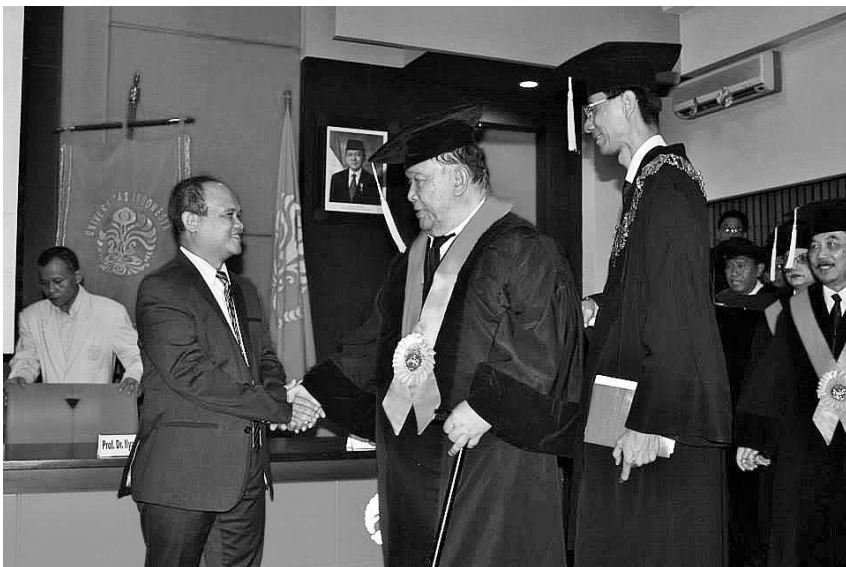
Theo Van Leeuwen

46, 47,55, 56, 57,74,75, 76,79.100

Verifikasi

219,244

HALAMAN NARSIS



Saat Promosi Doktor penulis di UI 12 Agustus 2014







kami Ucapkan:
Terima kasih atas
Dukungan bantuan
Doa & Restunya
serta kehadiran Anda semua
pada **Promosi Doktor Komunikasi**

Dr Indiwani Seto Wahjuwibowo & Dr Yoyoh Hereyah



TERORISME *dalam* PEMBERITAAN MEDIA

Analisis wacana Terorisme Indonesia



Lelaki kelahiran Tangerang 8 Maret 1966 ini sehari-hari bekerja sebagai Dosen Senior Bidang Komunikasi pada Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara. Doktor Komunikasi lulusan Universitas Indonesia ini, lama berkecimpung di dunia jurnalistik saat menjadi wartawan pada Perum LKBN Antara (1993-2012). Buku ini tercipta sebagian besar dari hasil penelitian disertasi yang menggunakan teknik Analisis Wacana saat melihat pemberitaan terorisme Indonesia pada Koran Tempo. Penulis bisa dihubungi via Whatsapp 082112297660 atau lewat E-mail: indiwanx@gmail.com

Dr Indiwan Seto Wahyu Wibowo

